

**KETAHANAN PANGAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA:
STUDI ANTAR PROVINSI**

***FOOD SECURITY AND HUMAN DEVELOPMENT
IN INDONESIA: STUDY INTER PROVINCE***

Oleh

**JAKARIA
120130120540**

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Ekonomi Jalur Ekonomi Terapan
pada Universitas Padjadjaran dengan wibawa Rektor Universitas Padjadjaran
Prof. Dr. Tri Hanggono Ahmad, Dr
Dipertahankan pada tanggal 30 Oktober 2018
di Universitas Padjadjaran**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2018**

**KETAHANAN PANGAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA:
STUDI ANTAR PROVINSI**

***FOOD SECURITY AND HUMAN DEVELOPMENT
IN INDONESIA: STUDY INTER PROVINCE***

Oleh

**JAKARIA
120130120540**

DISERTASI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi
Program Doktor Ilmu Ekonomi Jalur Ekonomi Terapan
Peminatan Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**

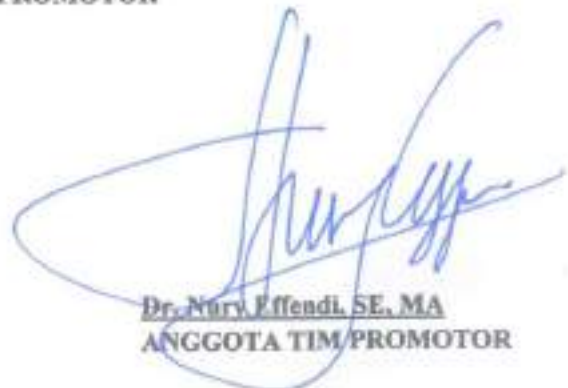
Bandung, September 2018



**Prof. Dr. Sutvastie, S. Remi, SE, MSi
KETUA TIM PROMOTOR**



**Dr. A. Kemal Hidayat, SE, MSc
ANGGOTA TIM PROMOTOR**



**Dr. Nury Effendi, SE, MA
ANGGOTA TIM PROMOTOR**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya

Nama : Jakaria
NPM : 120130120540
Judul Disertasi : Ketahanan Pangan Dan Pembangunan Manusia
Di Indonesia: Studi Antar Provinsi

Menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Padjadjaran maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Promotor dan masukan tim penelaah/penguji;
3. Dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,



Jakaria

DALIL-DALIL

1. Ketahanan Pangan antar provinsi di Indonesia masih rendah
2. Ketersediaan dan akses terhadap pangan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia
3. Pembangunan manusia merupakan salah satu target dari tujuan pembangunan
4. Peran pemerintah melalui kebijakan di bidang anggaran sangat dibutuhkan untuk pencapaian target pembangunan manusia
5. Manusia yang berkualitas direfleksikan dari kualitas hidup yang sehat, memiliki pengetahuan dan standar hidup yang layak
6. Setiap warganegara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan
7. Usaha, kerja keras dan kesiapan mental merupakan pedoman di dalam setiap penyelesaian masalah

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the condition on food security among provinces in Indonesia and to test the effect of food security and others independent variable such as dependency ratio, proportion of government expenditure in education, proportion of government expenditure in health, policy of change method of calculation Human Development Index (HDI and global crisis 2008 on Human Development Index (HDI)

The research method used is quantitative and correlational method. Quantitative method used to calculate food security while correlational method is done by panel regression which is a combination of cross section 33 provinces and 10 years time series data.

The results of this study indicate that food security among provinces in Indonesia is still low where the main cause is the low contribution of the dimension of availability and access. The contributions of dimensions of stability is relative low because even though have enough index numbers but have low weight in the calculation. The result of panel model regression shows the dimension of availability and access and proportion of government expenditure in health sector have a significant positive effect to HDI while policy change method of HDI and global crisis 2008 have negative effect to HDI. Dimension of stability, dependency ratio and the proportion of government expenditure in education sector have no effect to HDI

Keywords: Food security, availability, access, stability, HDI

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kondisi ketahanan pangan antar provinsi yang ada di Indonesia serta menguji pengaruh dari ketahanan pangan beserta variabel independen lainnya yaitu rasio ketergantungan, proporsi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, proporsi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, kebijakan perubahan metode perhitungan IPM serta krisis global tahun 2008 terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan korelasional. Metode kuantitatif digunakan untuk menghitung ketahanan pangan sedangkan metode korelasional dilakukan dengan menggunakan regresi panel yang merupakan gabungan dari data cross section 33 provinsi serta data time series 10 tahun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan antar provinsi yang ada di Indonesia masih rendah dimana penyebab utamanya adalah rendahnya kontribusi dari dimensi *availability* dan *access* sementara kontribusi dari dimensi *stability* relatif kecil karena sekalipun memiliki angka indeks yang cukup tetapi memiliki bobot yang rendah dalam perhitungan. Hasil regresi model panel menunjukkan dimensi *availability* dan *access* serta proporsi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap IPM, sementara rasio ketergantungan, kebijakan perubahan metode perhitungan IPM dan krisis global 2008 berpengaruh negatif terhadap IPM. Dimensi *stability*, rasio ketergantungan serta proporsi dari pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM.

Kata kunci : Ketahanan pangan, *availability*, *access*, *stability*, IPM

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini merupakan salah satu syarat yang harus penulis lakukan untuk memperoleh gelar Doktor dalam jalur Ekonomi Terapan, Program Doktor Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung.

Penulis sangat menyadari bahwa selesaikan disertasi ini berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini ijin penulis untuk menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang sangat berjalan dalam penyelesaian disertasi ini :

1. Ibu Prof. Dr. Sutyastie. S. Remi, SE, MSi selaku ketua tim Promotor yang telah memberikan begitu banyak jasanya kepada penulis melalui pencerahan, sumbangan pemikiran mengenai isi disertasi ini bahkan dukungan semangat dan motivasi serta sangat memahami kondisi penulis saat penyelesaian disertasi ini.
2. Bapak Dr. Nury Effendi SE sebagai Anggota Promotor I yang selalu memberikan solusi serta masukan-masukan yang sangat berharga terkait dengan permasalahan di dalam model disertasi penulis. Berkat bantuan dan arahan bapak akhirnya penulis bisa mendapatkan model yang *powerfull*
3. Bapak Dr. H. A. Kemal Hidayat, SE, MSc selalu Anggota Promotor 2 yang ditengah kesibukannya yang luar biasa selalu mengingatkan penulis untuk selalu semangat menyelesaikan disertasi ini. Beberapa kata yang bapak berikan ke penulis terkait masalah penyelesaian disertasi selalu menjadi PR dan penerungan yang luar biasa untuk penulis interpretasikan sehingga akhirnya disertasi ini selesai. Sekali lagi saya haturkan terima kasih yang luar biasa untuk Pak Kemal sehingga proses yang cukup berat dalam penulisan disertasi ini akhirnya penulis dapat selesaikan

4. Representasi Guru Besar Prof Dr. Arief Anshory Yusuf, SE, MSc yang telah memberikan masukan yang luar biasa berharga demi perbaikan isi dari disertasi ini.
5. Kepada Tim Opponen, yaitu Bapak Dr. Budiono S., M, Dr. Rudi Kurniawan, SE, MSi serta Dr. Adhitya Wardana, SE, MSi yang telah memberikan masukan yang sangat berharga pada saat Sidang Usulan Proposal (SUP) Disertasi sampai penyelesaian disertasi ini.
6. Staf Pengajar Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran serta seluruh civitas akademika yang telah memberikan dedikasinya dalam proses penyelenggaraan kegiatan perkuliahan.
7. Staf Administrasi program DET ibu Rina, mbak Tami serta staf penunjang lainnya yang sangat membantu penulis selama proses belajar mengajar dan dalam penyelesaian disertasi ini.
8. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Prof Dr Bambang Soedaryono, Ak, CA, MBA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh jenjang pendidikan tertinggi program doctoral di Universitas Padjadjaran
9. Kepada teman-teman program DET khususnya angkatan IX (Ibu Liana , Ibu Tri Pak Pia,, Pak Rinaldi, Pak Rizky, Pak Rudy, Pak Moses,) dan angkatan X (Pak Handry dan Ibu Renea) terima kasih atas semua kenangan yang indah selama menjalankan kuliah program doktor ini. Special kakak terbaik saya di DET Dr. Desmintary dan Dr Eka Desy terima kasih atas dorongan , masukan dan semangat luar biasa yang diberikan selama penyelesaian disertasi ini.
10. Para kolega di Univeristas Trisakti terutama prodi Ilmu Ekonomi (Dr. Syafri, MS, Dr Dini Hariyanti selaku kaprodi dan sekprodi, Dr. Anna S.D.Dasril yang sudah penulis anggap seperti orang tua sendiri, Terima kasih untuk kesempatan dan toleransi pekerjaan selama penulis menempuh pendidikan program doctoral

11. Terima kasih khusus untuk mbak Age, Mbak Yani, Mbak Nir, Mbak Sumiyarti, serta lorong presiden lantai 5 (Uni Ida, Dian, Ina , Hessy, Mbak Astrid, Bowo), Nurhayati, Mentari, Tini, Mbak Hartini makasih atas doa dan supportnya
12. Sahabat-sahabat di lingkungan FEB USAKTI yang selalu memberikan warna dalam kehidupan penulis (Lyda, Tata, Nora, Gatri, Reni, Iza, Bachtiar Usman, Aini, Nimai, Defi, Nioz, Niel, Mbak Neng, Yoto, Beta, Neta, Tinuk, Butet, Sisca dan yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu). Sahabat di MM Trisakti (Dr Elizabeth G. Ananto, Dr. Erny Tadjib, Dr Hemanto, Pak Oni Cad. PhD, Dr Andreas, Dr Yustin, Dr. Maria Nindita, Prof Mutiara SP. Dr Arwini)
13. Untuk sahabat SMP penulis (Yeyeh), sahabat SMA (Dery, Linda, Iedha, Nana, Piepit, Harto dan anggota Sanamaga), sahabat S1 UGM (Tien, Tyas, Ndari, Steve), sahabat S2 UI (Dewi Rahmi, Mbak Ida, Mbak Dini)
14. Keluarga besar Drs Ady Sunaryo, Mbak Oci, Mbak Ayu, Wok Ina, Kelik yang sudah menerima penulis sebagai bagian dari keluarga. Terima kasih atas segala bantuan dan dorongan sehingga penulis bisa sampai seperti ini. Special mbak Oci terima kasih sudah menjadi teman diskusi dalam banyak hal dan dalam segala hal sehingga penulis bisa menghadapi segala permasalahan secara rasional.

Terima kasih yang tidak terkira penulis ucapkan kepada Ibunda Mardiah yang dengan segala kekuatan dan kelembuhan telah menjadi orang tua tunggal terbaik sejak bapak pergi mendahului kita tahun 1972. Tidak ada kata2 yang penulis bisa sampaikan selain penulis sangat bangga memiliki ibu yang luar biasa dan istimewa. Buat kakak2 ku Sumanta, Mpok Eny dan Mpok Minah terima kasih atas semua bantuan dan dorongan serta motivasi yang diberikan penulis kecil bersama ibu mendidik dan mengasuh penulis.

Terakhir kepada lima anak tercinta dan selalu memberikan kekuatan pada penulis Andrea Rahma Putri Jakaria, Salma Khalifa Putri Jakaria, Fatwa Syaikuna Fadlilatussy Jakaria, Aldimas Aziz Ibrahim dan Dani Ramdani. Suatu kebahagiaan

memiliki anak-anak seperti kalian yang selalu memahami kondisi papahnya dan selalu memberikan kebanggaan kepada penulis.

Akhir kata hanya Allah SWT yang berkenan untuk membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu hingga disertasi ini dapat diselesaikan

Bandung, Oktober 2018

J A K A R I A

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
DALIL-DALIL	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
 BAB. I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	17
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	20
1.3.1. Maksud Penelitian	20
1.3.2. Tujuan Penelitian	20
1.4. Kegunaan Penelitian `.....	21
1.4.1. Kegunaan Akademis	21
1.4.2. Kegunaan Praktis	22
 BAB. II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
2.1. Kajian Pustaka	23
2.1.1. Ketahanan Pangan	23
2.1.1.1. Konsep dan Pengertian Ketahanan Pangan	25
2.1.1.2. Pengukuran Ketahanan Pangan	29
2.1.2. Pembangunan Manusia (<i>Human Development</i>).....	40

2.1.2.1. Konsep dan Pengertian Pembangunan Manusia (<i>Human Development</i>)	43
2.1.2.2. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	45
2.2. Hasil Studi Empiris Sebelumnya	50
2.2.1. Studi Empiris Pengukuran Ketahanan Pangan	50
2.2.2. Studi Empiris Hubungan Antara Ketahanan Pangan dengan Indeks Pembangunan Manusia	56
2.2.3. Studi Empiris Faktor-Faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia	61
2.3. Kerangka Pemikiran	68
2.4. Hipotesis Penelitian	71
 BAB. III. METODE PENELITIAN	
3.1. Rancangan Penelitian	73
3.2. Operasional Variabel Penelitian	74
3.2.1. Variabel Dependen	74
3.2.2. Variabel Independen	75
3.3. Jenis dan Sumber Data	84
3.4. Validasi Data : Masalah Statistik Dalam Data	84
3.5. Model Estimasi	86
3.5.1. Indeks Ketahanan Pangan (<i>Food Security Index</i>)	86
3.5.2. Model Ekonometrika	90
3.5.2.1. Metode Estimasi Model Regresi Panel	91
3.5.2.2. Pengujian Pemilihan Model Regresi Panel	94
3.5.2.3. Pengujian Hipotesis Teori	97
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Statistik Deskriptif	102
4.1.1. Statistik Deskriptif Variabel Indeks Pembangunan Manuris (IPM)	102

4.1.2. Statistik Deskriptif Variabel Ketahanan Pangan	
Provinsi di Indonesia	111
4.1.3. Statistik Deskriptif Variabel Rasio Ketergantungan	
Provinsi di Indonesia	113
4.1.4. Statistik Deskriptif Variabel Proporsi Pengeluaran	
Pemerintah di Bidang Pendidikan Antar Provinsi	
di Indoneesia	114
4.1.5. Statistik Deskriptif Variabel Proporsi Pengeluaran	
Pemerintah di Bidang Kesehatan Antar Provinsi	
di Indoneesia	116
4.2. Pemetaan Ketahanan Pangan Antar Provinsi	
di Indonesia	118
4.3. Estimasi Model Pembangunan Manusia	135
4.3.1. Pemilihan Model Panel	135
4.3.2. Pengujian Hipotesis Teori	136
4.4. Analisis Pembahasan	144
4.4.1. Analisis Pembahasan Ketahanan Pangan	144
4.4.2. Analisis Pembahasan Model Pembangunan	
Manusia	167
4.5. Implikasi	171
4.5.1. Implikasi Teoritis	171
4.5.2. Implikasi Praktik Bagi Pengambil Keputusan	172
 BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	175
5.2. Saran	178

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 Nilai dan Peringkat Index Ketahanan Pangan Indonesia dan Negara-Negara ASEAN Tahun 2012-2016	4
Tabel 1.2 Nilai dan Peringkat Index Ketahanan Pangan Negara-Negara Asia Tenggara Berdasarkan Kriteria FAO	7
Tabel 2.1 Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode baru UND....	48
Tabel 2.2 Studi Empiris Indikator Pengukuran Ketahanan Pangan (<i>Food Security</i>)	55
Tabel 2.3. Studi Empiris Hubungan antara Ketahanan Pangan dengan Pembangunan Manusia	60
Tabel 2.4 Studi Empiris Faktor-faktor Yang Mempengaruhi IPM	60
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel Penelitian	79
Tabel 3.2 Hubungan Variabel-Variabel Pengukuran Ketahanan Pangan.....	87
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif IPM Provinsi di Indonesia 2007-2013.....	103
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif IPM Provinsi di Indonesia 2014-2016....	107
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Indeks Ketahanan Pangan Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2016	112
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Rasio Ketergantungan Provinsi di Indonesia 2007-2016	113
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Proporsi Pengeluaran Bidang Pendidikan Antar Provinsi di Indonseia 2007-2016	115
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Proporsi Pengeluaran Bidang Pendidikan Antar Provinsi di Indonseia 2007-2016	117
Tabel 4.7 Indeks Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonsia Tahun 2007 – 2011	119
Tabel 4.8 Indeks Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonsia Tahun 2012 – 2016	128
Tabel 4.9 Pengujian Chow	135
Tabel 4.10 Pengujian Hausman	136
Tabel 4.11 Model Regresi Panel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)...	137
Tabel 4.12 Rata-rata Index Ketahanan Pangan dan Dimensi Pembentuk Antara Provinsi di Indonesia 2007-2016`	145

Tabel 4.13	PDB Perkapita Provinsi di Indonsia Tahun 2007-2016.....	147
Tabel 4.14	Proporsi Pengeluaran Konsumsi Makanan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2016	148
Tabel 4.15	Prevalensi Kekurangan Gizi Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2016.....	149
Tabel 4.16	Peringkat Indeks Ketahanan Pangan Antara Provinsi di Indonesia Periode 2007-2016	152
Tabel 4.17	Jenis Lahan Pertanian Untuk Sawah Provinsi Jambi Tahun 2016	160
Tabel 4.18	Indeks Ketahanan Pangan Dunia Berdasarkan <i>Global Food Security Indeks</i> tahun 2017.....	166

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1. Indeks Ketahanan Pangan Dunia Berdasarkan <i>Global Food Security Indeks</i> Tahun 2014	3
Gambar 1.2. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2012-2016 versi GFSI..	6
Gambar 1.3. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2010-2013 Versi FAO	9
Gambar 1.4. Pemetaan Ketahanan dan Kerawanan Pangan Indonesia Tahun 2015	11
Gambar 1.5. <i>Human Development Index (HDI)</i> Indonesia Tahun 2010-2015	12
Gambar 1.6. Pemetaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2015	13
Gambar 1.7. Hubungan Antara Ketahanan Pangan dan IPM Antar Provinsi Di Indonesia Tahun 2014	14
Gambar 2.1. Dimensi Ketahanan Pangan Berdasarkan <i>Global Food Security Index</i>	30
Gambar 2.2. Dimensi Ketahanan Pangan Berdasarkan FAO	33
Gambar 2.3. Dimensi <i>Global Hunger Index</i>	35
Gambar 2.4. Dimensi <i>Human Development</i>	42
Gambar 2.5. Perjalanan Metodologi Perhitungan IPM di UNDP.....	47
Gambar 2.6. Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode baru di Indonesia adopsi UNDP.....	50
Gambar 2.6. Kerangka Pemikiran	71
Gambar 3.1. Pengujian Pemilihan Model Regresi Panel.....	94
Gambar 4.1. Rata-rata IPM Provinsi di Indonesia tahun 2007-2013.....	104
Gambar 4.2. Rata-rata IPM Menurut Wilayah di Indonesia tahun 2007-2013	105
Gambar 4.3. Status IPM Provinsi di Indonesia Periode 2007-2013	106
Gambar 4.4. Rata-rata IPM Provinsi di Indonesia tahun 2014-2016.....	108
Gambar 4.5. Rata-rata IPM Menurut Wilayah di Indonesia tahun 2014-2016	109
Gambar 4.6. Status IPM Provinsi di Indonesia Periode 2014-2016	110
Gambar 4.7. Rata-rata Ketahanan Pangan Provinsi di Indonesia tahun 2007 – 2016.....	112

Gambar 4.8	Statistik Deskriptif Rata-rata Rasio Ketergantungan Provinsi di Indonesia 2007-2016.....	114
Gambar 4.9	Statistik Deskriptif Proporsi Pengeluaran Bidang Pendidikan Antar Provinsi di Indonesia 2007-2016.....	116
Gambar 4.10	Statistik Deskriptif Proporsi Pengeluaran Bidang Kesehatan Antar Provinsi di Indonesia 2007-2016	117
Gambar 4.11	Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia tahun 2007	120
Gambar 4.12	Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia tahun 2008	121
Gambar 4.13	Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia tahun 2009	122
Gambar 4.14	Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia tahun 2010	123
Gambar 4.15	Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia tahun 2011	124
Gambar 4.16	Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2011.....	125
Gambar 4.17	Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia tahun 2012	129
Gambar 4.18	Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia tahun 2013	130
Gambar 4.19	Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia tahun 2014	131
Gambar 4.20	Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia tahun 2015	132
Gambar 4.21	Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia tahun 2016.....	133
Gambar 4.22	Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2002-2016.....	134
Gambar 4.23	Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan Dimensi Access dan Indikator Pengukurannya.....	146
Gambar 4.24	Distribusi Frekuensi Proporsi Pengeluaran Mananan Menurut Provinsi 2007-2106	148
Gambar 4.25	Distribusi Frekuensi Proporsi Prevalensi Kekurangan Gizi Menurut Provinsi tahun 2007-2016.....	149
Gambar 4.26	Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan Dimensi <i>Availability</i> dan Indikator Pengukurannya.....	151

Gambar 4.27	Indeks Ketahanan Pangan Antar Wilayah di Indonesia Tahun 2007-2016	153
Gambar 4.28	Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2007-2016..	154
Gambar 4.29	Proporsi Penggunaan Lahan Provinsi Bali Tahun 2016	155
Gambar 4.30	Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Bali Dimensi Availability Indikator Rata-rata Pasokan Energi Makanan Tahun 2007-2016	156
Gambar 4.31	Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Bali Dimensi Availability Indikator Rata-rata Pasokan Protein Tahun 2007-2016	157
Gambar 4.32	Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Bali Dimensi Availability Indikator Tingkat Defisit Pangan Tahun 2007-2016.....	159
Gambar 4.33	Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2007-2016	161
Gambar 4.34	Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Indikator Dimensi <i>Stability</i> Tahun 2007-2016	162
Gambar 4.35	Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Indikator Dimensi <i>Access</i>	164
Gambar 4.36	Indeks Ketahanan Pangan Rata-rata Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2016	165



BAB I

PENDAHULUAN

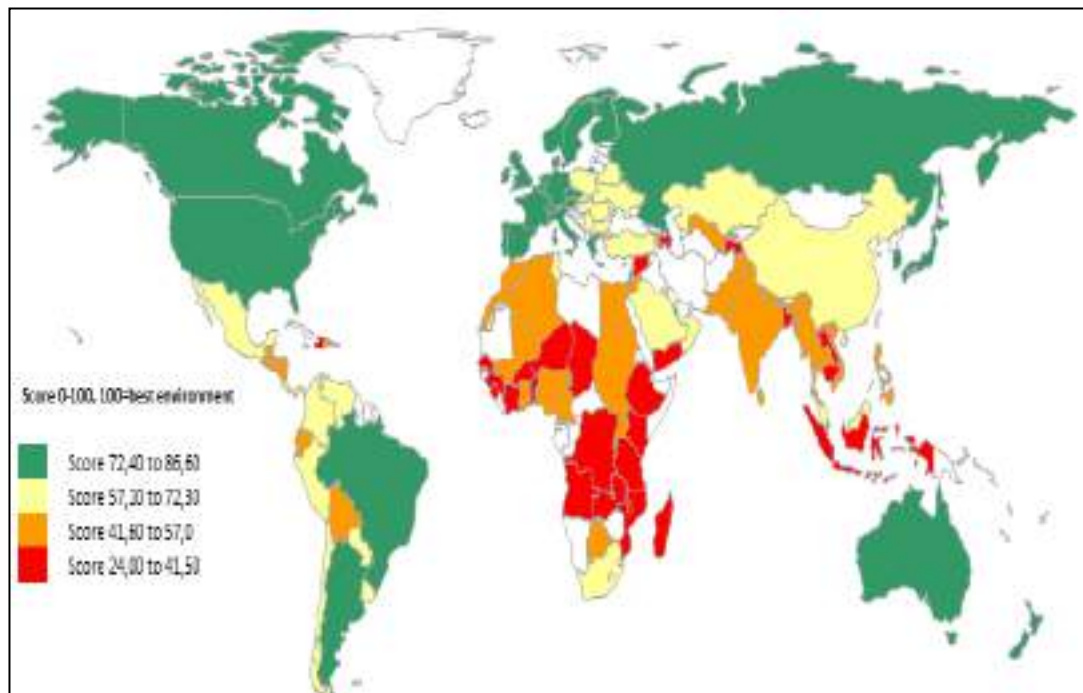
1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Ketahanan pangan menjadi isu pokok yang bersifat multidimensional karena di dalamnya mencakup aspek ekonomi, sosial, politik dan lingkungan. FAO (2017) menjelaskan bahwa dimensi ketahanan pangan terdiri dari 4 aspek yaitu (1) *Avalability* yaitu ketersediaan pangan, (2) *Access* yaitu akses memperoleh pangan yang baik dan bergizi, (3) *Stabiliity*, yaitu stabilitas untuk mendapatkan makanan yang baik sepanjang waktu, terbebas dari gejala-gejala seperti yang berkaitan dengan krisis ekonomi dan iklim dan (4) *Ulitization* yaitu pengetahuan mengenai masalah kesehatan dan sanitasi di dalam konsumsi pangan.

Di dalam UU No. 7 Tahun 1996 mengenai pangan dinyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang utama bagi manusia sehingga menjadi hak bagi setiap individu untuk memperoleh pangan yang cukup dan memadai. Secara definisi pangan diartikan sebagai sumber hayati, hewani dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang digunakan sebagai sumber makanan dan minuman bagi manusia. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan komponen utama yang penting yaitu pemenuhan pangan yang memadai. Hal ini yang mendasari suatu negara terlebih dahulu memprioritaskan pembangunan ketahanan pangannya dalam menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan sektor produksi yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah

pemenuhan pangan tidak hanya mencakup masalah kewajiban secara moral, sosial dan hukum serta masalah pemenuhan hak asasi manusia melainkan merupakan salah satu investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang. Selain itu pemenuhan kecukupan pangan merupakan persyarat utama untuk pemenuhan hak-hak dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan,

Economics Intelligence Unit (EIU) (2016) dalam laporannya menyatakan bahwa peta ketahanan pangan dunia jika dilihat berdasarkan indeks ketahanan pangan tahun 2016 menunjukkan bahwa negara-negara yang berada di Afrika merupakan negara yang paling banyak mengalami masalah pangan dimana mayoritas skor indeks ketahanan pangannya berada pada kuartil 1 yaitu pada kisaran angkat indeks antara 24% sampai dengan 41,50%. Negara-negara yang berada di benua Asia umumnya memiliki indeks ketahanan pangan pada tingkatan kuartil 2 dengan kisaran angka indeks antara 41,6% sampai dengan 57% serta pada tingkatan kuartil 3 dengan kisaran angka indeks antara 57,1% sampai dengan 72,3%. Untuk negara-negara maju seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, negara-negara di benua Eropa, Amerika Serikat, Kanada dan sebagian negara Amerika Selatan memiliki tingkat ketahanan pangan yang tinggi dengan kisaran angka indeks antara 72,4% sampai dengan 86,6%. Pemetaan indeks ketahanan pangan dunia berdasarkan perhitungan *Global Food Security Index (GFSI)* tahun 2014 berdasarkan laporan publikasi tahun 2016 dapat dilihat pada gambar 1.1.



Sumber : GFSI, 2016

Gambar 1.1.
Indeks Ketahanan Pangan Dunia Berdasarkan *Global Food Security Indeks* Tahun 2014

Masalah ketahanan pangan tidak hanya bertumpu pada ketersediaan lahan pangan yang ada dan produksi pangan yang dihasilkan tetapi juga berhubungan dengan aspek lain seperti akses, stabilitas dan pemanfaatan. Hal ini yang menyebabkan sekalipun Indonesia adalah negara agraris dengan luas lahan yang paling besar di kawasan Asia Tenggara, akan tetapi posisi Indonesia untuk ketahanan pangan termasuk yang paling rendah. Informasi dari tabel 1.1. menunjukkan peringkat indeks ketahanan pangan untuk wilayah Asia Tenggara selama periode 2012-2016 dimana Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan peringkat rendah dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam kecuali pada tahun 2016 dimana peringkat Indonesia hanya

lebih tinggi dari Philipina yaitu dengan skor indeks ketahanan pangan sebesar 50,6% dengan peringkat 72 untuk Indonesia sedangkan untuk Philipina

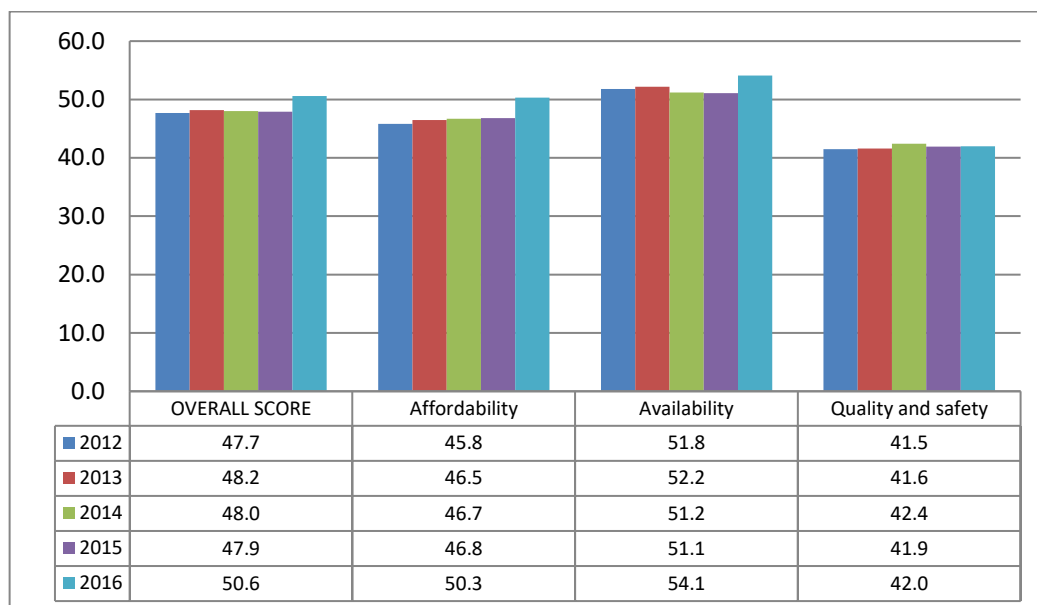
Tabel 1.1
Nilai dan Peringkat Index Ketahanan Pangan Indonesia dan
Negara-Negara ASEAN Tahun 2012-2016

Pengukuran	2012		2013		2014		2015		2016	
	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank
INDONESIA										
OVERALL SCORE	47,7	74	48,2	71,0	48,0	72	47,9	76	50,6	71
Affordability	45,8	72	46,5	71	46,7	71	46,8	72	50,3	70
Availability	51,8	67	52,2	65	51,2	71	51,1	71	54,1	66
Quality and safety	41,5	83	41,6	84	42,4	87	41,9	87	42,0	87
SINGAPURA										
OVERALL SCORE	82,5	4	80,8	9	83,4	2	83,0	2	83,9	3
Affordability	90,0	2	90,2	2	90,6	2	90,6	2	90,7	2
Availability	77,9	13	73,9	17	79,1	10	77,9	11	79,8	14
Quality and safety	76,2	25	76,6	24	77,2	24	78,2	24	78,3	24
MALAYSIA										
OVERALL SCORE	66,8	38	66,6	37	68,6	35	68,9	34	69,0	35
Affordability	64,3	41	64,4	41	68,1	38	68,5	41	68,4	41
Availability	68,8	27	67,7	27	68,7	26	68,4	26	68,8	28
Quality and safety	67,6	41	68,9	39	69,5	40	71,1	38	71,1	38
THAILAND										
OVERALL SCORE	58,7	52	59,4	52	59,5	50	59,0	51	59,5	51
Affordability	62,9	44	63,2	43	63,9	42	62,6	49	62,0	50
Availability	55,8	56	56,9	53	56,8	51	56,5	56	58,3	54
Quality and safety	56,0	58	57,0	57	55,7	59	56,8	57	56,8	58
PHILIPINA										
OVERALL SCORE	49,8	68	48,6	70	48,8	70	49,1	72	49,5	74
Affordability	44,1	74	43,5	74	43,6	76	43,6	76	43,5	76
Availability	54,3	62	52,1	66	52,5	64	53,1	67	53,4	68
Quality and safety	51,3	65	51,6	66	51,6	70	51,7	72	54,0	67
VIETNAM										
OVERALL SCORE	53,0	62	54,0	59	54,8	59	55,9	60	57,1	57
Affordability	50,1	66	54,6	58	54,8	61	54,8	62	56,0	62
Availability	57,4	51	55,6	56	56,1	55	58,2	52	60,0	51
Quality and safety	48,2	72	48,3	72	50,8	71	51,9	71	52,1	71

Sumber : GFSI, 2016

memiliki skor indeks ketahanan pangan sebesar 49,5% dengan peringkat 74. Singapura merupakan negara yang memiliki indeks ketahanan pangan tinggi di dunia dimana pada tahun 2016 memiliki skor indeks sebesar 83,9% dan berada pada peringkat 3 dunia, disusul Malaysia dengan indeks ketahanan pangan sebesar 69% dan berada di peringkat 35. Thailand memiliki indeks ketahanan pangan sebesar 59,5% dan berada di peringkat 51 serta Vietnam memiliki indeks ketahanan pangan sebesar 57,1% dan berada di peringkat 57.

Hasil studi empiris yang dilakukan *Global Security Food Index* (GSFI) menunjukkan selama periode 2012-2016, baik secara keseluruhan maupun jika dilihat berdasarkan dimensi dari ketahanan pangan, nilai skor untuk ketahanan pangan Indonesia masih relatif rendah. Secara keseluruhan indeks ketahanan pangan Indonesia selama periode 2012-2016 masih rendah yaitu memiliki indeks di bawah 50% kecuali pada tahun 2016 yang sudah mencapai angka 50,8%. Indeks dimensi ketersediaan (*availability*) memberikan kontribusi yang paling besar dimana selama periode 2012-2016 memiliki angka indeks selalu lebih besar dari 50%. Dimensi *quality dan safety* menjadi titik lemah dari rendahnya indeks ketahanan pangan Indonesia seperti ditunjukkan dengan nilai indeks ketahanan pangan yang nilainya berada pada kisaran angka 41% sampai 42% selama periode 2012-2016. Dimensi *affordability* juga memberikan kontribusi yang rendah terhadap pembentukan indeks ketahanan pangan Indonesia seperti ditunjukkan dengan nilai indeks ketahanan pangan untuk aspek ini yang nilainya selama periode 2012-2015 di bawah 50% sementara pada tahun 2016 sudah mencapai angka indeks 50%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.2.



Sumber : GFSI, 2016

Gambar 1.2.

Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2012-2016 versi GFSI

Pengukuran ketahanan pangan juga dilakukan oleh FAO dengan menggunakan *Food Security Indicators* yang membagi ketahanan pangan ke dalam 4 dimensi yaitu *Availability*, *Access*, *Stability* dan *Utilization*. Hasil pengolahan indeks ketahanan pangan untuk negara-negara Asia Tenggara ditunjukkan pada tabel 1.2. Untuk kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari 11 negara, dengan nilai indeks ketahanan pangan sebesar 43,3% menempatkan Indonesia pada peringkat 6. Peringkat 1 sampai 5 masing-masing ditempati oleh Brunei Darussalam (69,09%), disusul Malaysia (67,16%), Singapura (62,50%), Vietnam (56,65%) dan Thailand (55,86%). Peringkat Indonesia hanya lebih baik dari negara-negara Myanmar (42,92%), Laos (40,87%), Philipina (39,11%), Kamboja (35,55%) dan Timor Leste (29,91%) yang masing-masing menempati peringkat 7 sampai 11.

Tabel 1.2

**Nilai dan Peringkat Index Ketahanan Pangan Negara-Negara
Asia Tenggara Berdasarkan Kriteria FAO**

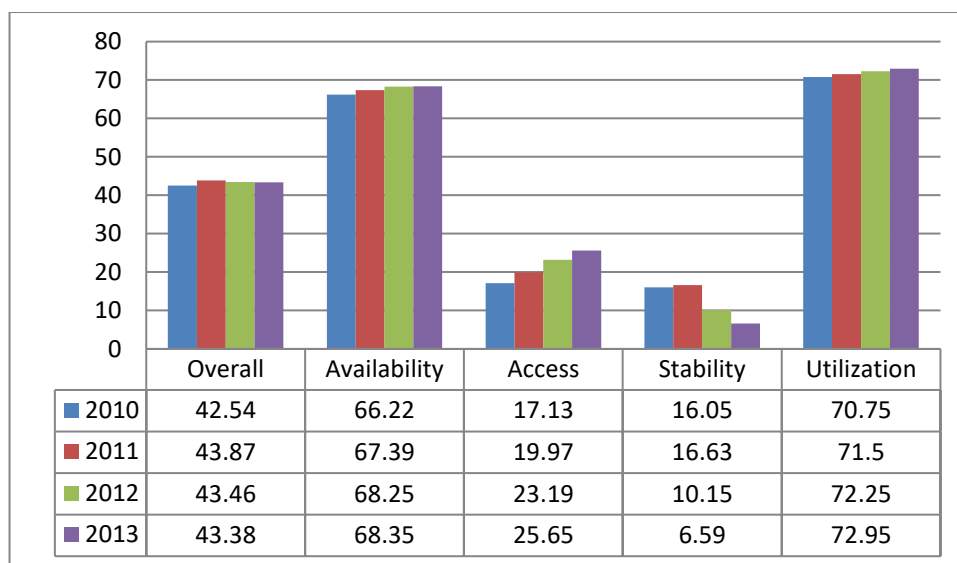
Food Security FAO	2010	2011	2012	2013	Rank
Brunei Darussalam					
Overall	68.67	69.35	69.77	69.09	1
Availability	75.62	75.28	75.59	75.92	3
Access	100.00	100.00	100.00	100.00	1
Stability	30.40	32.78	33.74	31.36	3
Utilization	na	na	na	na	na
Cambodia					
Overall	34.62	35.33	35.36	35.55	10
Availability	62.94	63.99	63.96	64.46	8
Access	11.98	11.97	11.57	11.35	10
Stability	14.65	14.39	12.90	11.33	7
Utilization	48.90	50.95	53.00	55.05	10
Indonesia					
Overall	42.54	43.87	43.46	43.38	6
Availability	66.22	67.39	68.25	68.35	6
Access	17.13	19.97	23.19	25.65	5
Stability	16.05	16.63	10.15	6.59	8
Utilization	70.75	71.50	72.25	72.95	7
Laos					
Overall	36.75	40.06	40.35	40.87	8
Availability	60.52	61.20	61.84	61.64	9
Access	10.90	11.54	11.84	11.93	9
Stability	12.47	21.89	19.67	19.38	5
Utilization	63.10	65.60	68.05	70.55	8
Malaysia					
Overall	66.78	67.68	67.43	67.16	2
Availability	90.76	91.37	90.73	89.99	1
Access	62.32	65.65	66.74	66.86	3
Stability	17.68	17.01	15.35	14.78	6
Utilization	96.35	96.70	96.90	97.00	2
Myanmar					
Overall	41.29	43.54	44.96	42.92	7
Availability	74.34	76.07	75.67	74.50	4
Access	12.27	13.72	14.20	14.32	8
Stability	1.19	5.77	10.12	2.91	9
Utilization	77.35	78.60	79.85	79.95	6
Philippines					

Overall	38.67	40.81	39.53	39.11	9
Availability	67.74	67.46	66.24	65.53	7
Access	18.32	17.88	16.57	15.58	7
Stability	-11.67	-2.89	-6.01	-6.49	11
Utilization	80.30	80.80	81.30	81.80	5
Singapore					
Overall	61.33	61.79	61.95	62.50	3
Availability	0.17	0.17	0.21	0.21	11
Access	96.50	97.00	97.58	99.78	2
Stability	48.66	50.00	50.00	50.00	1
Utilization	100.00	100.00	100.00	100.00	1
Thailand					
Overall	55.67	57.39	58.83	55.86	5
Availability	71.80	72.21	72.85	72.61	5
Access	26.19	27.24	27.49	27.43	4
Stability	29.86	35.06	39.83	28.09	4
Utilization	94.85	95.05	95.15	95.30	3
Timor-Leste					
Overall	30.67	32.11	32.51	29.91	11
Availability	57.73	57.62	57.94	57.49	10
Access	7.14	7.43	7.43	7.45	11
Stability	4.16	8.80	9.15	-1.04	10
Utilization	53.65	54.60	55.50	55.75	
Vietnam					
Overall	53.43	55.08	56.03	56.65	4
Availability	75.25	76.94	76.35	76.22	2
Access	15.52	16.48	16.49	16.42	6
Stability	42.46	44.91	47.83	49.06	2
Utilization	80.50	82.00	83.45	84.90	9

Sumber : Food Security Indicators FAO diolah

Salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya peringkat ketahanan pangan Indonesia adalah rendahnya nilai indeks ketahanan pangan dimensi *stability* dimana selama periode 2010-2013 nilainya selalu mengalami penurunan dan pada tahun 2013 hanya mencapai angka 6,59%. Dimensi *Access* juga memberikan kontribusi yang rendah sekalipun nilainya mengalami kenaikan selama periode 2010-2013 namun dengan angka yang masih relatif rendah yaitu sebesar 25,65%

pada tahun 2013. Dimensi *availability* dan *Utilization* memiliki kontribusi yang cukup tinggi yaitu di atas 50% dan nilainya selalu mengalami kenaikan selama periode 2010-2013. Untuk lebih jelasnya berikut gambar yang menjelaskan mengenai pembentukan indeks ketahanan pangan Indonesia versi FAO



Sumber : FAO, 2017

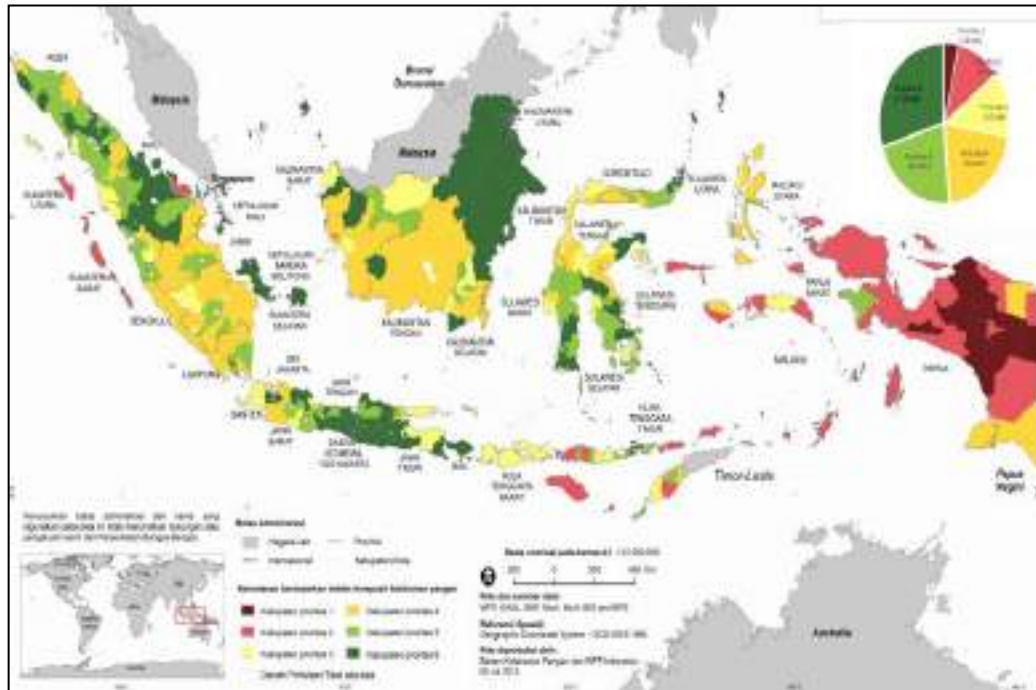
Gambar 1.3

Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2010-2013 Versi FAO

Posisi peringkat Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bicara masalah *availability* tetapi juga mencakup aspek lain yang tak kalah penting yaitu *access*, *stability* dan *utilization*. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang menyebar dari Sabang sampai Meurake ternyata Indonesia memiliki masalah dalam *access* dan *stability*. Masalah utama berkaitan dengan jarak antara satu daerah ke daerah lain sehingga pengiriman dari sumber pangan ke target pangan mengalami banyak kendala baik waktu, tenaga dan biaya. Demikian pula hanya dengan stabilitas dari pangan menjadi kendala utama dalam pembentukan ketahanan pangan Indonesia .

Dewan Ketahanan Pangan (2015) menyatakan bahwa Indonesia sudah berhasil mencapai tujuan pembangunan milenium yang pertama yaitu separuh dari jumlah penduduk yang hidup dalam kelaparan dan kemiskinan ekstrim telah berkurang. Program pangan dan gizi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 merupakan salah satu agenda utama di bawah pemerintah presiden Joko Widodo. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di bidang pangan, terlebih dahulu dibuat Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2015 (*Food Security and Vulnerability Atlas*) dilakukan identifikasi terhadap kabupaten-kabupaten yang paling rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi serta factor-faktor yang menjadi penyebabnya. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan di bidang pangan dan sumber daya yang dikeluarkan dapat memberikan hasil yang maksimal.

Dengan menggunakan indikator pengukuran ketahanan pangan sebanyak 11 indikator diperoleh peta ketahanan dan kerawanan pangan seperti ditunjukkan pada gambar 1.4. Dari gambar dapat dilihat bahwa kabupaten-kabupaten yang menjadi prioritas utama dalam kerawanan pangan di Indonesia menyebar di Indonesia Timur yaitu Maluku, Nusa Tenggara Timur Irian, Papua dan Papua Barat, kepulauan di pesisir Sumatera Utara serta kepulauan di pesisir Sumatera Selatan. Jika dilihat dari pemetaan kerawanan pangan nampak terlihat bahwa daerah- yang memiliki kerawanan pangan yang tinggi merupakan daerah yang mempunyai masalah dalam hal *access* dan *stability*



Sumber : Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dan World Food Programme

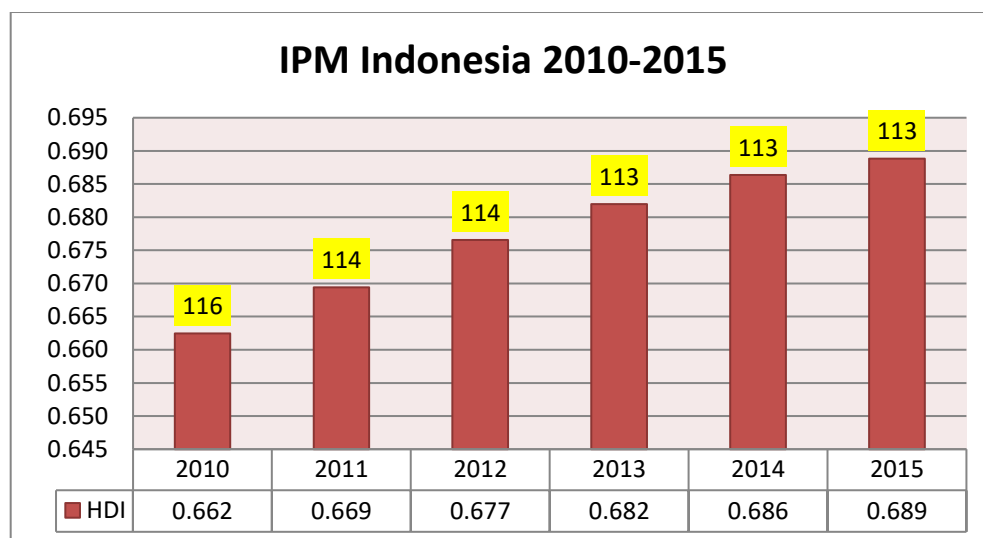
Gambar 1.4.

Pemetaan Ketahanan dan Kerawanan Pangan Indonesia Tahun 2015

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dari pembangunan adalah membangun dan menciptakan manusia yang berkualitas baik jasmani maupun rohani sehingga nantinya akan memberikan efek multiplier yang tinggi terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang ingin dicapai. Indikator keberhasilan pembangunan manusia diukur melalui IPM.

Hasil laporan UNDP (2016) menempatkan Indonesia Indonesia pada posisi negara dengan Indeks Pembangunan Manusia pada tingkatan menengah. Dari total 188 negara yang dimasukkan dalam perhitungan IPM, Indonesia menempati peringkat 113 pada tahun 2015 dengan nilai IPM sebesar 0,689. Jika dilihat dari tren IPM Indonesia selama periode 2010-2015 terjadi peningkatan IPM Indonesia dari tahun ke tahun. Demikian pula dilihat dari peringkat IPM, terjadi kenaikan selama

periode 2010-2015 dimana jika pada tahun 2010 posisi Indonesia ada di peringkat 116, mengalami kenaikan pada tahun 2011 dan 2012 yaitu naik menjadi peringkat 114 dan kembali terjadi peningkatan peringkat pada tahun 2013 sampai 2015 yaitu berada peringkat 113 seperti dapat dilihat pada gambar 1.5.



Sumber : UNDP, 2016

Gambar 1.5

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2010-2015

Peringkat Indonesia jika dibandingkan negara-negara ASEAN pada tahun 2015 jauh bawah Singapura yang menempati peringkat 5, Brunei Darussalam pada peringkat 30, Malaysia di peringkat 59 dan Thailand di peringkat 87. Peringkat Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam yang berada di peringkat 115, Philipina pada peringkat 116. Peringkat Indonesia lebih baik dibandingkan dnegan Laos yang berada di peringkat 138, Kamboja dengan peringkat 143 dan Myanmar yang menempati peringkat 145.

Pemetaan IPM Indonesia berdasarkan provinsi menunjukkan bahwa mayoritas seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkatan IPM pada level sedang

yaitu dengan kisaran nilai IPM terletak antara 60 sampai 70%. Sebanyak 9 provinsi sudah berhasil mencapai tingkatan IPM yang tinggi dimana provinsi yang dimaksud adalah provinsi Riau, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki IPM paling rendah dan berada pada tingkatan rendah. Informasi lebih jelasnya mengenai IPM provinsi di Indonesia berdasarkan tingkatan nilai IPM dapat dilihat pada gambar 1.6 mengenai Pemetaan IPM provinsi di Indonesia pada tahun 2015.

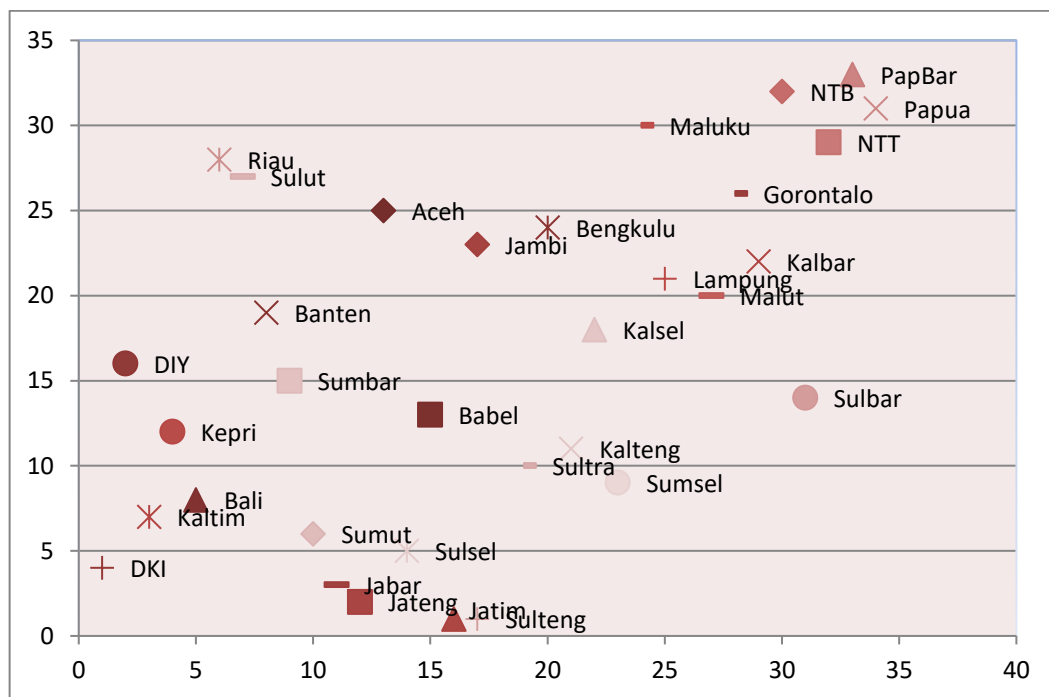


Sumber : IPM Indonesia 2015, BPS

Gambar 1.6.
Pemetaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia
Menurut Provinsi Tahun 2015

Jika dikaitkan antara ketahanan pangan dengan IPM terdapat hubungan yang positif dimana provinsi-provinsi dengan tingkat ketahanan pangan tinggi memiliki IPM yang tinggi pula dan sebaliknya provinsi dengan indeks ketahanan pangan yang rendah akan memiliki IPM yang rendah. Pemetaan antara rangking

ketahanan pangan dengan ranking IPM untuk antar provinsi di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.7. Provinsi dengan ranking indeks ketahanan yang tinggi



Sumber : Data BPS dan BI diolah,

Gambar 1.7

Hubungan Antara Ketahanan Pangan dan IPM Antar Provinsi Di Indonesia Tahun 2014

seperti DKI, Bali, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, DIY dan Sulawesi Utara juga memiliki nilai IPM yang tinggi pula. Sebaliknya provinsi dengan indeks ketahanan pangan yang rendah seperti provinsi NTB, NTT, Papua Barat dan Papua juga memiliki IPM yang rendah pula. Dengan berdasarkan diagram pencar antara variabel ketahanan pangan dan IPM nampak terlihat adanya hubungan yang positif diantara kedua variabel tersebut.

Beberapa studi empiris menguatkan adanya pengaruh dari ketahanan pangan terhadap IPM. Gani dan Prasad (2007) dalam studinya menghasilkan temuan bahwa dimensi ketahanan pangan ketersediaan pangan (*food Availability*) dan pasukan kalori dan protein berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia, sementara untuk dimensi akses terhadap pangan (*food accessibility*) juga menghasilkan temuan semakin tinggi harga pangan dan semakin rentan akan pangan menyebabkan indeks pembangunan manusia yang rendah pula. Verwimp (2012) dalam kajiannya menghasilkan temuan bahwa konflik hebat yang terjadi di negara-negara Afrika berpengaruh pada penurunan ketahanan pangan dan dalam jangka panjang berdampak negatif pada pembangunan manusia di negara-negara yang mengalami konflik hebat tersebut. Burchi dan Muro (2012) dalam hasil penelitiannya memperkuat adanya hubungan negatif yang kuat antara ketidaktahanan pangan di negara-negara Afrika dengan pembangunan manusia. Sow et al (2015) dalam kajiannya mengenai hubungan antara antara *food safety*, *food security* dengan pembangunan manusia di Afrika memperkuat adanya hubungan yang positif yang signifikan antara ketahanan pangan dengan pembangunan manusia.

Penduduk merupakan variabel yang menjadi modal dasar di dalam pembangunan dengan syarat jumlah penduduk yang besar diimbangi dengan kualitasnya sehingga mereka dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja. Penduduk dalam jumlah yang besar tanpa disertai dengan kualitas yang baik tentu saja akan menghambat jalannya pembangunan. Jumlah penduduk dengan komposisi dimana penduduk usia muda dan usia tidak produktif yang lebih besar dibandingkan dengan

penduduk usia produktif akan berdampak pada beban ketergantungan dari seorang penduduk usia produktif yang semakin tinggi dan hal ini diduga akan berdampak negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian Bhakti dan Istiqomah (2012) serta Prastowo (2011) menghasilkan temuan bahwa rasio ketergantungan yang tinggi terbukti secara signifikan mempengaruhi penurunan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil temuan Bucher (2017) juga menghasilkan temuan bahwa rasio ketergantungan berhubungan negatif dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Khan (2002) dalam tulisannya menyatakan terdapat beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah ketahanan pangan untuk pengembangan sumber daya manusia yaitu 1) bagaimana kita dapat menjadikan gizi dan ketahanan pangan sebagai elemen kunci dalam pengentasan kemiskinan; 2) mendidik wanita terbukti sangat efektif untuk mengurangi masalah malnutrisi dan hal ini menjadi masalah besar di banyak negara karena banyak wanita yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup sehingga berdampak pada penciptaan kualitas sumber daya manusia dimana wanita adalah faktor yang menjadi penentunya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan harus mendapat perhatian khusus selain di bidang ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan manusia yang berkualitas. Kebijakan pemerintah di dalam mengalokasikan anggarannya melalui pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan investasi sumber daya manusia akan mempengaruhi tercapainya pembangunan manusia yang berkualitas. Lenkong (2017), Shuaibu & Odalaya (2016), Astry dkk (2013) dan Melliana dan Zain (2013) dalam studi empirisnya menghasilkan temuan bahwa

alokasi APBD untuk pendidikan terbukti berpengaruh signifikan positif mempengaruhi Indeks. Sebaliknya hasil penelitian dari Bhakti & Istiqomah (2012) menghasilkan temuan bahwa alokasi APBD bidang pendidikan tidak terbukti berpengaruh positif terhadap IPM.

Salah satu komponen dari IPM adalah dimensi umur panjang dan sehat yang diproksi melalui indikator pengukuran angka harapan hidup. Kebijakan pemerintah melalui alokasi anggaran khususnya di bidang kesehatan diyakini berdampak positif dalam meningkatkan IPM. Sejumlah hasil penelitian membuktikan adanya pengaruh positif dari alokasi APBD bidang kesehatan terhadap IPM yaitu Hekadkk (2017), Kahang dkk (2016), Safitri (2016), Melliana dan Zain (2013), Bhakti dan Istiqomah (2012)

Dengan berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian antara ketahanan pangan beserta pengaruh kependudukan, kebijakan anggaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pembangunan manusia Indonesia untuk periode 2007-2016.

1.2. Rumusan Masalah

Fenomena yang ada menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi karena selain hanya berorientasi pada tingkat kegiatan ekonomi yang sifatnya jangka pendek, juga belum dapat memecahkan masalah-masalah utama yang menjadi fokus dari pembangunan ekonomi seperti masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan. Keadaan ini memberikan sinyal bahwa pembangunan harus berorientasi pada

konsep keberlanjutan (*sustainable*) yang sifatnya jangka panjang sehingga pembangunan manusia (*human development*) harus ditempatkan sebagai sasaran dari aktivitas yang dilakukan manusia di dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi makro.

Konsep UNDP (1990) menyatakan bahwa pembangunan manusia diartikan sebagai upaya yang memungkinkan orang untuk menuju kehidupan dengan kualitas yang lebih baik, sehat dan sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran akhir dari pembangunan ekonomi bukanlah pertumbuhan ekonomi sekalipun pertumbuhan ekonomi sangat erat hubungannya dengan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara keseluruhan akan meningkatkan pendapatan riil rumah tangga dan pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi baik konsumsi makanan maupun non makanan yang nantinya akan berdampak pada tercapainya pembangunan manusia yang berkualitas.

Fenomena lain juga menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan dimana hasil dari pemetaan antara pembangunan manusia dan ketahanan pangan antar propinsi menunjukkan adanya pola yang konsisten yaitu daerah dengan indeks ketahanan pangan yang rendah adalah daerah yang memiliki IPM yang rendah dan sebaliknya daerah dengan indeks ketahanan pangan yang tinggi memiliki IPM yang tinggi. Kondisi ini memberikan sinyal bahwa pembangunan manusia diawali dengan pembentukan karakter individu dari manusianya yang diawali dari terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*) yaitu masalah pangan yang di dalamnya tidak hanya mencakup ketersediaan dari barang tersebut tetapi juga mencakup akses untuk

mendapatkan barang, pemanfaatan barang tersebut serta stabilitas terutama masalah ketersediaan stok makanan dan fluktuasi harga. Jawaban empiris dari permasalahan diatas yang ingin diungkap melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi pemerintah dan pihak yang terkait di dalam merumuskan kebijakan yang tepat di dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan manusia yang berkualitas.

Selain masalah pangan, hasil studi empiri menunjukkan bahwa faktor-faktor demografi yaitu rasio ketergantungan serta keberpihakan pemerintah melalui kebijakan di dalam pengeluaran anggaran belanja yang diperuntukkan untuk mendorong optimalitas pembangunan sumber daya manusia terutama pengeluaran alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan juga diduga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia.

Untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian mengenai pembangunan manusia ini dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab atau yang mempengaruhi pembangunan manusia. Dengan mengacu pada uraian di atas maka permasalahan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi ketahanan pangan antar provinsi di Indonesia dilihat dari aspek Ketersediaan (*Availability*), Akses (*Access*), Stabilitas (*Stability*)?
2. Apakah Ketahanan pangan yang dilihat dari aspek Ketersediaan (*Availability*), Akses (*Access*) dan Stabilitas (*Stability*) mempengaruhi pembangunan manusia ?

3. Apakah aspek demografi yaitu tingkat rasio ketergantungan serta kebijakan anggaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan mempengaruhi pembangunan manusia?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis hubungan antara ketahanan pangan (*food security*) dengan pembangunan manusia (*human development*) antar provinsi di Indonesia. Agar dihasilkan model yang lebih baik dimasukkan pula sebagai variabel independen yaitu faktor demografi (tingkat rasio ketergantungan) dan kebijakan pemerintah melalui alokasi anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan dalam kaitannya dengan pembangunan manusia

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang diajukan di atas, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk :

1. Melakukan pemetaan ketahanan pangan (*food security*) antar provinsi yang ada di Indonesia dilihat dari aspek ketersediaan (*Availability*), Akses (*Access*), dan Stabilitas (*Stability*)
2. Menganalisis pengaruh dari ketahanan pangan yang terdiri dari aspek ketersediaan (*Availability*), akses (*Access*) dan stabilitas (*Stability*) terhadap pembangunan manusia antar propinsi di Indonesia.

3. Menganalisis pengaruh dari aspek demografi yaitu rasio ketergantungan serta aspek kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pembangunan manusia antar provinsi di Indonesia

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini untuk pengembangan akademis adalah

1. Sebagai referensi dan bahan informasi serta memberikan sumbangan konseptual bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi para akademisi yang ingin mengkaji lebih komprehensif mengenai masalah ketahanan pangan (*food security*) dan pembangunan manusia.
2. Sebagai bahan informasi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut khususnya dalam hal menggali lebih dalam mengenai model-model ketahanan pangan dalam kaitannya dengan pembangunan manusia yang nantinya dapat lebih bermanfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi
3. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi instansi dan pihak-pihak yang terkait dalam upaya untuk penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan masalah ketahanan pangan dan pembangunan manusia.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan sumber informasi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan ekonomi dalam kaitannya dengan masalah ketahanan pangan dan pembangunan manusia dengan cara

1. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam rangka mengevaluasi dan merumuskan kembali kebijakan khususnya dalam hal ketahanan pangan (*food security*) antar provinsi di Indonesia.
2. Dapat memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan untuk peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas setelah terlebih dahulu sudah teridentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab pembangunan manusia.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Pada bab ini akan diuraikan teori yang digunakan dalam penelitian serta hasil studi empiris yang relevan dalam mendukung pengembangan kerangka pemikiran yang nantinya akan digunakan sebagai dasar di dalam pengembangan hipotesis penelitian. Pada bagian akhir bab ini akan dijelaskan kerangka konseptual yang menjadi dasar di dalam pembentukan hipotesis penelitian yang diajukan.

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Ketahanan Pangan

Braun (1992) menyatakan bahwa pemakaian istilah ketahanan pangan merupakan masalah yang banyak diperdebatkan dan menjadi hal yang bersifat multi tafsir karena aspek dari ketahanan pangan yang sangat luas, tetapi satu yang pasti bahwa ketahanan pangan sangatlah penting bagi jutaan manusia yang ada di seluruh dunia. Braun juga menyatakan bahwa pengertian ketahanan pangan dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat luasnya aspek dari ketahanan pangan itu sendiri yang berkaitan dengan tujuan dan ketersediaan data yang ada.

Braun berpendapat bahwa pencapaian pasokan makanan yang cukup merupakan syarat perlu (*necessary condition*) untuk ketahanan pangan dan akan menghasilkan ketahanan pangan yang berkelanjutan (*sustainable*). Hal ini seiring

dengan berkembangnya kebutuhan akan pangan yang akan tetap menjadi tantangan ke depannya. Untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan dibutuhkan promosi terhadap pertumbuhan sektor pertanian khususnya produksi hasil pangan dan hal ini menjadi agenda kebijakan yang perlu mendapat perhatian yang serius. Banyak negara-negara sedang berkembang yang sudah berusaha untuk meningkatkan ketahanan pangan mereka tetapi mereka menghadapi pilihan-pilihan yang sulit berkaitan dengan kendala dalam masalah anggaran dan kelembagaan. Biasanya negara-negara sedang berkembang sangat bergantung pada seperangkat kebijakan yang sifatnya sangat lemah seperti kebijakan penjataan makanan, subsidi harga umum serta program atau skema pemberian makanan yang dampaknya jangka pendek.

Ballanger & Zeno (1990), membagi ketahanan pangan ke dalam tiga jenis yaitu (1) Ketahanan Pangan Global (*Global Food Security*) yang mensyaratkan bahwa jumlah makanan yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dunia (global), (2) Ketahanan Pangan Nasional (*National Food Security*) didefinisikan sebagai makanan yang tersedia untuk konsumsi di dalam negara paling tidak sama dengan kebutuhan biologis sepanjang tahun, (3) Ketahanan Pangan Individu (*Individual Food Security*) didefinisikan sebagai pendapatan dari masing-masing individu (orang) yang diinterpretasikan secara luas yaitu cukup untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Barraaclough, S, and P.Utting (1987) menyatakan sistem pangan yang ditawarkan ketahanan pangan (*Food Security*) memiliki 5 karakteristik sebagai

berikut : (1) Kemampuan untuk menghasilkan kecukupan pasokan makanan internal baik melalui produksi, penyimpanan yang memadai dan stok serta impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar bagi semua kelompok sosial serta memperluas permintaan yang efektif, (2) Memiliki otonomi untuk menentukan nasibnya sendiri secara maksimal, menurunkan kerentanan terhadap fluktuasi pasar internasional dan tekanan politik dari luar (otonomi tidak berarti otoriter, tetapi lebih bergantung pada keuntungan yang diperoleh dari spesialisasi), (3) Dapat diandalkan sehingga variasi musim dan siklus dalam akses terhadap makanan dapat diminimalkan, (4) Memiliki keberlanjutan jangka panjang seperti produksi andalan yang menjadi sektor basis dipertahankan dan ditingkatkan dan (5) Harus memastikan masalah keseimbangan, yang artinya paling tidak adanya akses yang dapat diandalkan untuk makanan bagi semua kelas sosial, kelompok dan strata.

2.1.1.1. Konsep dan Pengertian Ketahanan Pangan

Seperti penjelasan sebelumnya bahwa definisi ketahanan pangan dapat bermacam-macam karena aspek dari ketahanan pangan sendiri yang relatif sangat luas. Berikut beberapa definisi ketahanan pangan yang banyak dijadikan dasar untuk mengukur ketahanan pangan dari suatu perekonomian,

1. ***Internasional Confrence in Nutrition, (FAO/WHO, 1992)*** mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi dimana setiap rumah tangga atau individu dapat memperoleh pangan setiap waktu untuk keperluan hidup sehat. Berdasarkan definisi ini, pencapaian ketahanan pangan mencakup 3 dimensi yaitu

- a. Dibutuhkan kepastian mengenai makanan yang aman dan memenuhi kecukupan gizi baik pada tingkat nasional maupun pada tingkatan rumah tangga
 - b. Perlu adanya tingkat stabilitas pasokan makanan yang masuk akal dari satu tahun ke tahun lainnya dan sepanjang tahun.
 - c. Perlu untuk memastikan bahwa setiap rumah tangga memiliki kemampuan untuk mendapatkan baik secara fisik, sosial dan ekonomi terhadap makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ini berarti setiap rumah tangga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memproduksi atau memperoleh makanan yang dibutuhkan secara berkelanjutan.
2. **World Food Summit (1996)** memperluas definisi ketahanan pangan yang dikemukakan oleh FAO pada tahun 1992 dimana ketahanan pangan diartikan kondisi ketika setiap orang memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang tidak berkurang, aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan akan makanan serta preferensi mereka terhadap makanan untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Dalam hal ini, tindakan bersama di semua tingkat diperlukan. Setiap negara harus menerapkan strategi yang konsisten dengan sumber daya dan kapasitasnya untuk mencapai tujuan masing-masing dan, pada saat yang sama, bekerja sama secara regional dan internasional untuk mengorganisir solusi bersama terhadap masalah keamanan pangan global.
3. **Undang-Undang No : 7 tahun 1996 mengenai Pangan**
- Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan untuk setiap rumah tangga yang dapat dilihat dari ketersediaan yang

cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dari pengertian tersebut, tersirat bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus lebih dipahami sebagai pemenuhan kondisi kondisi :

- a. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, dengan pengertian ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan dan memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, vitamin dan mineral serta turunan, yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
 - b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi aman, diartikan bebas dari pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang lain dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman untuk kaidah agama.
 - c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan bahwa distribusi pangan harus mendukung tersedianya pangan pada setiap saat dan merata di seluruh tanah air.
 - d. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan bahwa pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.
4. **Oxfam 2001** mendefinisikan ketahanan Pangan sebagai kondisi dimana setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan memiliki kontrol terhadap kuantitas pangan yang cukup dan berkualitas untuk mencapai suatu aktivitas kehidupan yang sehat. Dari definisi ini terdapat dua elemen dari ketahanan pangan yaitu :
- a. Ketersediaan (*Avaibility*) baik kualitas maupun kuantitas dari pasokan makanan

- b. Keterjangkuan (*Access*) yaitu terpenuhinya hak atas pangan melalui pembelian, pertukaran maupun klaim

5. ***FIVIMS (Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping Systems) tahun 2005*** mendefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi (*dietary needs*) dan pilihan pangan (*food preferences*) demi kehidupan yang aktif dan sehat.

6. **Undang-Undang No : 12 tahun 2012 tentang Pangan sebagai revisi dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1996**

Ketahanan Pangan menurut Undang-Undang nomor : 12 tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ada 3 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan rumah tangga yaitu :

- a. Kecukupan ketesediaan pangan
- b. Tercukupinya kebutuhan konsumsi
- c. Distribusi pangan yang merata

Kesimpulan dari berbagai definisi di atas menunjukkan adalah aspek dari ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan (*availability*) baik dalam hal

kuantitas maupun kualitas tetapi juga mencakup akses (keterjangkauan), kualitas, keamanan, stabilitas dan pemanfaatan.

2.1.1.2. Pengukuran Ketahanan Pangan

Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa definisi ketahanan pangan berubah-ubah dan menyangkut aspek yang sangat luas, sehingga indikator, cara dan data yang digunakan oleh peneliti atau para pakar untuk mengukur ketahanan pangan juga sangat beragam. Oleh karena itu pengukuran untuk ketahanan pangan juga sangat beragam. Berikut beberapa pengukuran ketahanan pangan yang digunakan dalam mengukur indeks ketahanan pangan.

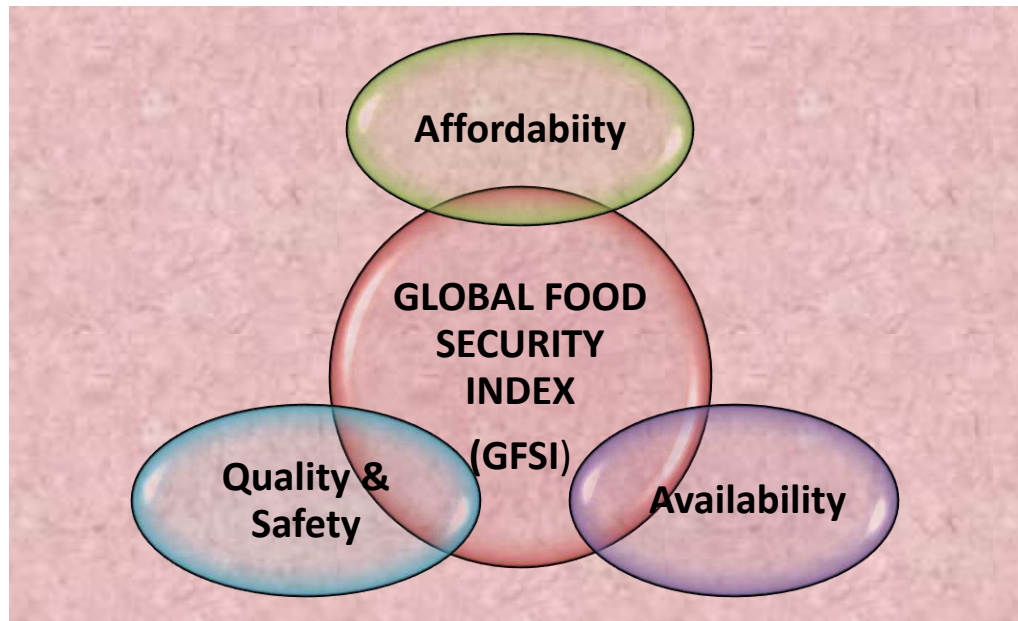
1. *Global Food Security Index (GFSI)*

Merupakan metode pengukuran ketahanan pangan yang dibangun oleh DuPont *The Economic Intelligence Unit (EIU)* yang mengukur ketahanan pangan 109 negara, termasuk Indonesia. Terdapat tiga kategori dalam pembentukan indeks ketahanan pangan seperti ditunjukkan gambar 2.1. yaitu :

a. *Affordability* (keterjangkauan) yang diukur melalui 6 indikator pengukuran yaitu

- Konsumsi makanan sebagai prosentase dari pengeluaran rumah tangga
- Proporsi dari penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan global
- Pendapatan nasional perkapita
- Tarif impor untuk komoditas pertanian
- Keberadaan program jaring pengaman makanan

- Akses pembiayaan kepada para petani



Gambar 2.1.
Dimensi Ketahanan Pangan Berdasarkan *Global Food Security Index*

b. *Availability* (ketersediaan)

Indikator pengukuran untuk dimensi dari *availability* sebanyak 11 indikator yaitu :

- Rata-rata pasokan makanan
- Ketergantungan yang kronis terhadap bantuan makanan
- Pengeluaran pemerintah untuk riset dan pengembangan di bidang pertanian
- Adanya fasilitas penyimpanan makanan yang memadai
- Ketersediaan infrastruktur jalan
- Ketersediaan infrastruktur pelabuhan

- Volatilitas produksi pertanian
- Resiko stabilitas politik
- Korupsi
- Kapasitas penyerapan tenaga kerja di perkotaan
- Kerugian makanan

c. *Quality and Safety (Kualitas dan Keamanan).*

Indikator pengukuran untuk dimensi dari *availability* sebanyak 11 indikator yaitu :

- Diversifikasi pangan
- Pedoman nasional mengenai masalah pangan
- Perencanaan dan strategi gizi nasional
- Pemantauan dan pengawasan mengenai gizi
- Terpenuhiya kebutuhan akan vitamin A
- Terpenuhiya kebutuhan akan zat besi yang berasal dari hewan
- Terpenuhiya kebutuhan akan zat besar yang berasal dari sayuran
- Kualitas protein
- Badan yang menjamin keamanan dan kesehatan pangan
- Prosentase penduduk yang mendapat akses air minum
- Keberadaan sektor formal dalam bidang pangan

2. *Food Security Indicators oleh FAO*

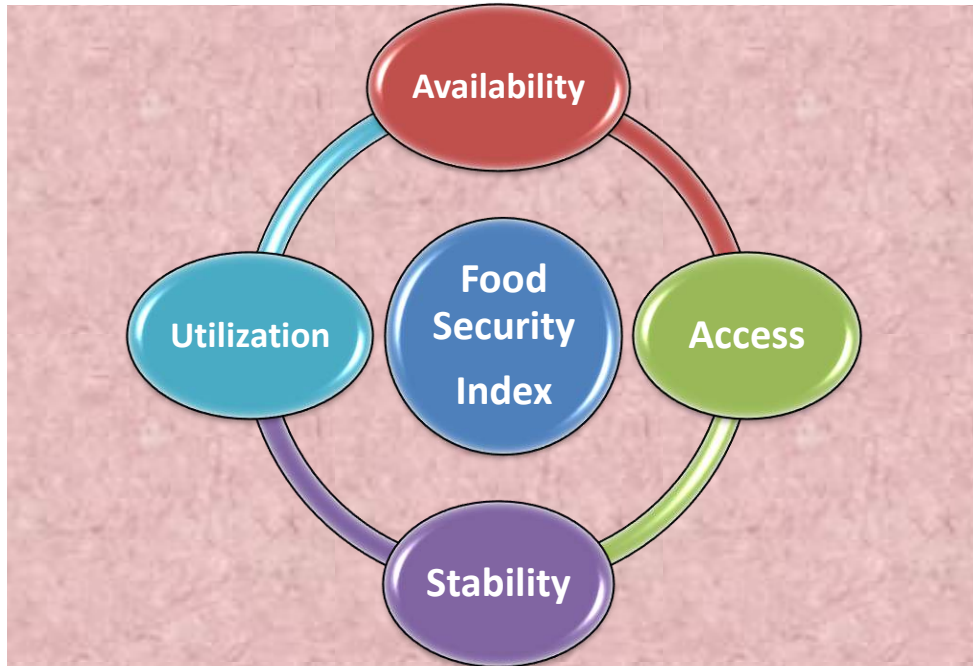
Merupakan pengukuran indeks ketahanan pangan dengan menggunakan 4 pilar (dimensi) pengukuran seperti ditunjukkan pada gambar 2.2.

a. **Availability**, yaitu keadaan mengenai terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Indikator pengukuran untuk dimensi availability terdiri dari 5 pengukuran yaitu

- Rata-rata kecukupan pasokan energi makanan (kalori/kapita)
- Rata-rata nilai produksi pangan (produksi/kapita)
- Prosentase pasokan energi yang berasal dari sereal, akar dan umbi
- Rata-rata pasokan protein (gr/cap.hari)
- Rata-rata pasokan protein yang berasal dari hewan (gr/cap/hari):

b. **Access**, yaitu memiliki akses atau keterjangkauan baik secara fisik, ekonomi dan sosial dimana indikator pengukuran untuk dimensi ini adalah :

- Pendapatan nasional per kapita
- Indeks harga makanan domestik
- Prevalensi kekurangan gizi
- Prosentase pengeluaran untuk makanan
- Tingkat defisit pangan



Gambar 2.2.
Dimensi Ketahanan Pangan Berdasarkan FAO

- c. **Stability**, yaitu masyarakat mempunyai kemampuan untuk mengakses dan menggunakan makanan dengan kondisi stabil dan berkelanjutan sepanjang waktu. Pengukuran untuk dimensi stability terdiri dari 5 indikator yaitu
- Ratio ketergantungan impor untuk sereal
 - Nilai impor makanan terhadap total ekspor barang dagangan
 - Gejolak pangan domestik yaitu standar deviasi inflasi komoditas pangan perbulan dalam tahun tertentu
 - Variabilitas dari produksi makanan perkapita
 - Variabilitas dari pasokan makanan perkapita
- d. **Utilization**, yaitu masyarakat memiliki pengetahuan dan kondisi sanitasi yang mendasar untuk memilih, mempersiapkan dan mendistribusikan

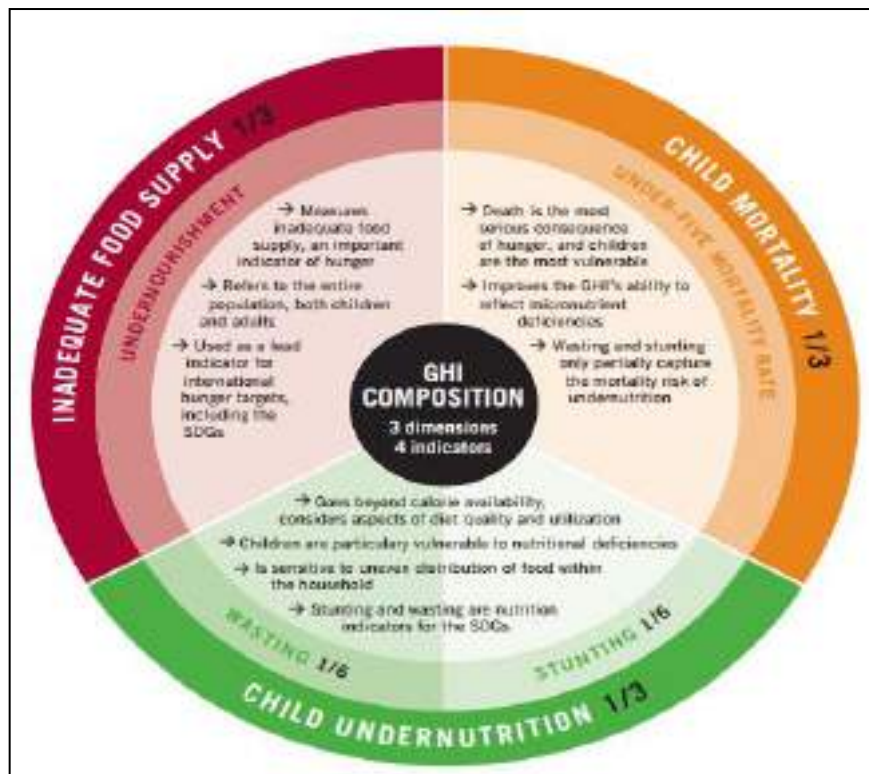
makanan melalui suatu cara yang akan menghasilkan nutrisi yang baik.

Dimensi ini menggunakan 10 indikator pengukuran yaitu

- Akses untuk mendapatkan sumber air bersih
- Akses untuk mendapatkan fasilitas sanitasi yang lebih baik
- Prosentase anak dibawah 5 tahun yang terkena dampak dari limbah
- Prosentase anak dibawah umur 5 tahun yang tumbuh tidak berkembang
- Prosentase anak dibawah 5 tahun yang berat badannya kurang
- Prosentase orang dewasa yang kekurangan berat badan (kurus)
- Prevelensi jumlah ibu hamil yang kekurangan daerah
- Prevelensi jumlah anak dibawah 5 tahun yang kekurangan darah
- Prosentase jumlah penduduk yang kekurangan vitamin A
- Prosentase anak usia sekolah (6-12 tahun) yang kekurangan asupan yodium

3. ***Global Hunger Index (GHI)*** disusun oleh *International Food Policy Research Institute* (2016) dan merupakan laporan mengenai kondisi kelaparan di seluruh dunia. GHI merupakan alat yang dirancang untuk mengukur dan merekam secara komprehensif jejak kelaparan per kawasan dan per negara di dunia khususnya untuk negara berpendapatan rendah dan sedang. GHI menekankan pada upaya kesuksesan dan kegagalan setiap negara negara dalam mengurangi kelaparan di negerinya dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor pendorong kelaparan dan ketidakamanan makanan dan nutrisi. Dengan meningkatkan kesadaran

dan pemahaman akan perbedaan yang terjadi di setiap kawasan dan di setiap negara, GHI diharapkan dapat mendorong upaya-upaya untuk mengurangi kemiskinan.. Global Hunger Index dibentuk berdasarkan tiga dimensi seperti ditunjukkan pada gambar 2.3.



Gambar 2.3.

Dimensi Global Hunger Index

- Undernourishment* (kekurangan gizi) yang dihitung sebagai proporsi atau persentase masyarakat yang kekurangan gizi terhadap total populasi.
- Child underweight* (jumlah anak dengan berat di bawah rata-rata) yang dihitung sebagai jumlah anak dibawah umur 5 tahun yang memiliki berat di bawah rata-rata

- c. *Child mortality* (jumlah anak yang meninggal) yang dihitung dengan proksi tingkat kematian anak dibawah umur lima tahun.

Global Hunger Index dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{GHI} = (\text{PUN} + \text{CUW} + \text{CM})/3$$

Dimana

GHI = Global Hunger Index

PUN = Proporsi masyarakat yang kekurangan gizi (%)

CUW = persentase jumlah anak-anak yang memiliki kekurangan berat badan (%)

CM = persentase jumlah anak yang meninggal sebelum umur lima tahun (%)

Semakin tinggi nilai indeks kelaparan mengindikasikan kelaparan di negara tersebut semakin tinggi dan sebaliknya makin rendah nilai indeks kelaparan menunjukkan kelaparan di negara tersebut semakin rendah.

4. **Rice Bowl Index (RBI)** disusun oleh Syngenta (2004) bekerja sama dengan *Frontier Strategy Group*. RBI mengukur laporan mengenai ketahanan pangan khusus untuk wilayah Asia Pasifik. Perbedaan RBI dengan indeks lain yang mengukur ketahanan pangan adalah RBI menilai seberapa baik kapasitas suatu negara dalam mencapai dan mempertahankan ketahanan pangan, bukan sekedar mengukur apakah ketahanan pangan suatu negara sudah terjadi atau tidak. Dengan demikian, *food security robustness*

memperhatikan dua aspek, yaitu ketahanan pangan (*food security*) dan stabilitas pangan (*stability or sustainability*). *Rice Bowl Index* dihitung berdasarkan empat indikator yakni:

1. *Farm Level Factor*

Farm Level Factors terdiri atas beberapa sub indikator: akses terhadap teknologi dan inovasi, edukasi petani, peran perempuan di pertanian, akses terhadap pasar, dan tingkat investasi

2. *Demand and Price*

Demand and Price terdiri atas beberapa sub-indikator: pertumbuhan masyarakat, pendapatan masyarakat, kekurangan cadangan makanan, permintaan bahan bakar, spekulasi, dan volatilitas

3. *Policy and Trade*

Policy and trade terdiri atas beberapa sub indikator: stabilitas politik, proteksi dan subsidi, kebijakan perdagangan internasional, infrastruktur, termasuk transportasi dan penyimpanan, dan kebijakan investasi dan inovasi

4. *Environmental Factors*

Environmental Factors terdiri atas beberapa sub-indikator: *water strees*, banjir, degradasi tanah, hilangnya *biodiversity*, dan perubahan iklim.

Food security robustness terjadi apabila terdapat keseimbangan antara empat unsur (rubrics) yang terdapat di dalam indeks, yaitu *Farm Level Factors; Demand and Price; Policy and Trade dan Environmental Factors*

Dari keempat pengukuran yang dijelaskan di atas, pengukuran ketahanan pangan yang diambil di dalam penelitian ini adalah ketahanan pangan yang dilakukan oleh FAO yaitu pengukuran ketahanan pangan yang didasarkan dimensi *availability*, *access*, *stability* dan *utilization*. Alasan penggunaan pengukuran ketahanan pangan FAO didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Konsep pengukuran ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh FAO relatif lebih dekat dengan kondisi ketahanan pangan yang terjadi di Indonesia yaitu mempertimbangkan aspek-aspek ketersediaan (*availability*), *access*, *stability* dan *utilization*. Hal ini dilihat dari bukti data empiris yang menunjukkan bahwa masalah *access* dan *stability* merupakan titik lemah dari ketahanan pangan di Indonesia. Hasil perhitungan indeks ketahanan pangan untuk wilayah Asia Tenggara menempatkan indeks dari dimensi *access* dan *stability* Indonesia dalam kelompok paling rendah jika dibandingkan dengan skor indeks di negara-negara kawasan Asia Tenggara yaitu berada pada kisaran 6% sampai 25%. Penggunaan indeks ketahanan pangan *Global Food Security Index* (GFSI) yang dikeluarkan oleh *The Economic Intelligence Unit* (IEU) tidak dipilih dengan pertimbangan dimensi pengukuran yang digunakan yaitu *affordability*, *availability* serta *quality* dan *safety* tidak secara optimal menggambarkan kondisi ketahanan pangan yang terjadi di Indonesia. Hasil data empiris menunjukkan ketiga dimensi dari ketahanan pangan di Indonesia yaitu *affordability*, *availability* serta *quality* dan *safety* menghasilkan skor indeks yang nilainya tidak terlalu berbeda signifikan (GFSI 2016) yaitu pada rentang nilai antara 40%

sampai 50%. Pengukuran ketahanan pangan *Global Hunger Index (GHI)* tidak dipilih sebagai pengukuran ketahanan pangan mengingat indikator ini hanya mengukur ketahanan hanya melihat dari kondisi kelaparan yang terjadi pada suatu perekonomian saja yaitu hanya mempertimbangkan indikator masyarakat yang kekurangan gizi, jumlah anak yang kekurangan berat badan serta jumlah anak yang meninggal sebelum usia 5 tahun. Pengukuran indeks ketahanan pangan *Rice Bowl Index (RBI)* tidak dipilih karena secara konseptual menerapkan indikator pengukuran untuk aspek *policy and trade* dalam konteks perekonomian provinsi di Indonesia tidak dapat diterapkan seperti stabilitas politik, proteksi dan subsidi, kebijakan perdagangan internasional yang memang bukan menjadi wewenang dari pemerintah daerah.

2. Masalah ketersediaan data juga menjadi pertimbangan di dalam pemilihan konsep ketahanan pangan FAO dibandingkan pengukuran yang lain terutama ketahanan pangan pangan GFSI ataupun RBI terutama dalam hubungannya mendisagregasikan konsep ketahanan pangan national menjadi ketahanan pangan provinsi. Konsep ketahanan pangan FAO dipilih karena seluruh indikator pengukuran yang digunakan memiliki skala rasio yang bersumber dari data sekunder yang sudah dipublikasi. Sementara pengukuran untuk ketahanan pangan GFSI dan RBI menggunakan beberapa indikator pengukuran yang sifatnya *assessment* sehingga ketersediaan data yang digunakan relatif akan menyulitkan untuk dilakukan perhitungan.

2.1.2. Pembangunan Manusia (*Human Development*)

Pendekatan teori pembangunan manusia dikembangkan Mahbub UI Haq yang didasarkan dari karya Amartya Sen dalam *Development of Freedom* yang membahas mengenai kemampuan/kapabilitas manusia (UNDP, 2015). *Human Development* atau pendekatan pembangunan manusia memberikan penjelasan proses pembangunan melalui peningkatan kualitas kehidupan manusia, bukan hanya sekedar meningkatkan perekonomian suatu negara. Pendekatan ini berfokus pada manusia, kesempatan dan pilihan yang dimilikinya. *Human Development* berasumsi bahwa memperbaiki atau meningkatkan kehidupan manusia akan lebih menjelaskan dampak dari kesejahteraan dan kemakmuran dibandingkan hanya meningkatkan kemampuan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi saja. Teori *Human Development* percaya bahwa pertumbuhan pendapatan hanyalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk membangun dan membentuk kehidupan manusia dan bukan sebagai tujuan dari pembangunan.

Teori *Human Development* juga menyebutkan bahwa pembangunan seharusnya berfokus pada pemberian kebebasan terhadap manusia untuk menjalani hidup yang mereka inginkan yang berarti harus disertai dengan pengembangan kemampuan masyarakat atau lebih spesifik manusia dan juga pemberian kesempatan untuk menggunakan kemampuan yang telah dikembangkan. Sebagai contoh, memberikan pendidikan kepada pengemis atau gelandangan (misal pelatihan ketrampilan menyablon) paling tidak akan meningkatkan dan membangun kemampuan/ketrampilan mereka dalam menyablon, tetapi hal tersebut tidak akan signifikan dampaknya apabila mereka tidak memiliki tempat dan atau

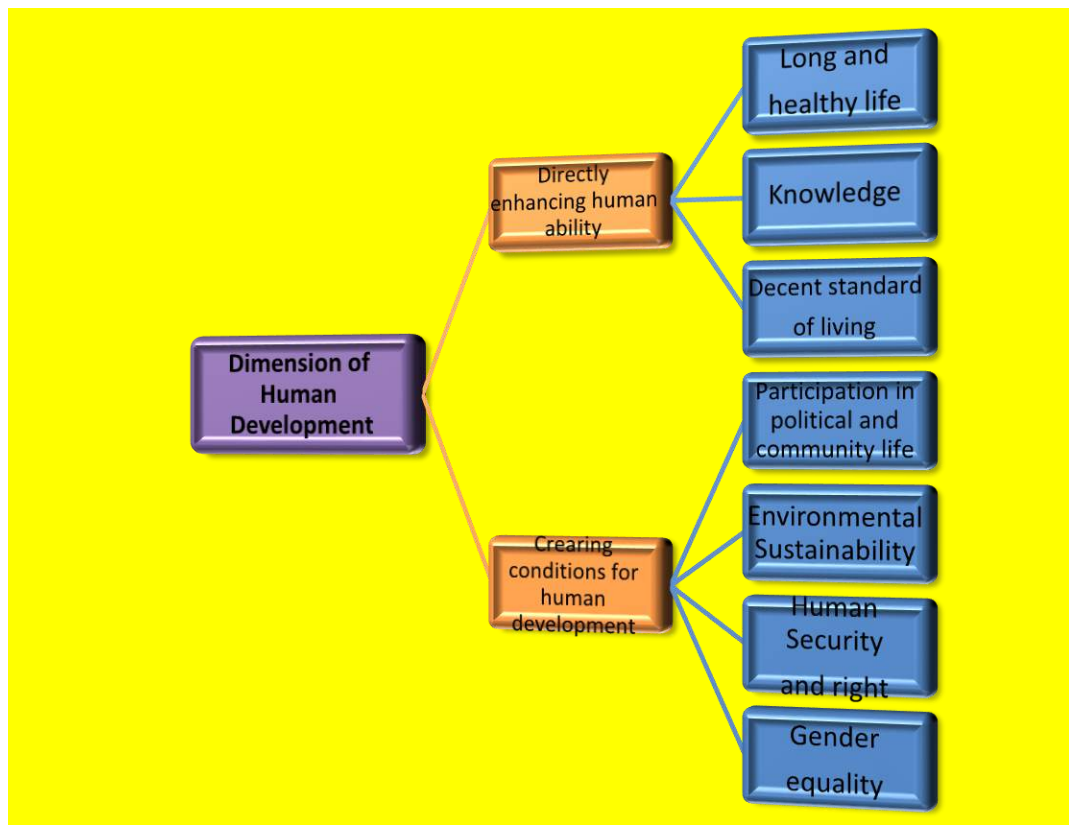
akses untuk memasuki dunia kerja, apalagi kalau pekerjaan yang pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan ketrampilan atau kemampuan yang mereka pelajari. Secara spesifik, ada tiga pondasi yang harus digunakan dalam pembangunan menurut teori *human development* yaitu

1. Pembangunan ditujukan untuk memberikan kehidupan yang panjang, sehat dan kreatif bagi manusia
2. Untuk memberikan pengetahuan yang luas
3. Memudahkan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan kehidupan yang layak

Setelah ketiga fondasi dasar tersebut tercapai dalam pembangunan di suatu *perekonomian*, menurut *Human Development* akan terbuka kesempatan untuk meraih kemajuan pada aspek kehidupan lainnya.

Teori *Human Development* juga menjelaskan bahwa pembangunan manusia berarti memberikan lebih banyak pilihan terhadap manusia/masyarakat yang ada terlepas apakah pilihan tersebut akan digunakan/diambil atau tidak oleh manusia/masyarakat misalnya pilihan akan pekerjaan, tempat tinggal atau yang lainnya. Kebahagiaan manusia dan pilihan yang seorang individu ambil merupakan urusan individu yang bersangkutan. Dalam hal ini pembangunan akan menciptakan lingkungan yang baik untuk individu ataupun kelompok kolektif, dapat membantu mereka mengembangkan potensi maksimalnya serta kesempatan yang ada untuk mereka menjalani hidup secara produksi dan kreatif sesuai dengan yang mereka inginkan.

Berikut ini merupakan bagan yang dibentuk oleh UNDP (2015) mengenai dimensi yang dicakup oleh *Human Development* dimana kedua dimensi tersebut adalah :



Sumber : UNDP, 2015

Gambar 2.4.
Dimensi *Human Development*

1. Secara langsung meningkatkan kemampuan manusia yang mencakup
 - a. Memiliki harapan hidup yang panjang dan sehat
 - b. Memiliki pengetahuan
 - c. Memiliki standar hidup yang layak
2. Menciptakan kondisi bagi pembangunan manusia yang mencakup

- a. Berperan serta dalam kehidupan politik dan masyarakat
- b. Pembangunan lingkungan yang berkelanjutan
- c. Menjaga keamanan dan hak-hak setiap manusia
- d. Kestaraan gender

Dengan berdasarkan konsep dimensi human development tersebut, maka teori *human development* mencoba membentuk pembangunan yang berorientasi pada manusia.

2.1.2.1. Konsep dan Pengertian Pembangunan Manusia (*Human Development*)

Pengertian mengenai pembangunan dan pembangunan manusia berbeda secara signifikan. Pembangunan memiliki fokus utama pada pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Disisi lain pembangunan sumber daya manusia cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. (BPS, IPM 2016)

UNDP (1990) menyatakan bahwa kekayaan bangsa yang sesungguhnya ada pada manusia sehingga tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap orang untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Dengan kata lain, ide dasar dari pembangunan manusia berfokus kepada manusia dan kesejahteraan. Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level

pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses. Pembangunan manusia tidak hanya sebatas hal tersebut. Pilihan tambahan, mulai dari politik, kebebasan ekonomi dan sosial sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati harga diri pribadi dan jaminan hak asasi manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut, pembangunan manusia memiliki dua sisi yaitu :

1. Pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan.
2. Penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, seperti untuk menikmati waktu luang, untuk tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik. Apabila skala pembangunan manusia tidak seimbang, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan.

Konsep pembangunan manusia juga dikemukakan oleh beberapa ahli. Amartya Sen (1989) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai perluasan kebebasan nyata yang dinikmati oleh manusia dimana kebebasan sendiri bergantung pada faktor ekonomi dan sosial seperti akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik. Mahbub ul Haq (1995) menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan untuk kebebasan berpolitik, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berpendidikan, bertahan hidup dan sehat, serta menikmati standar hidup layak. Neamtu Daniela & Ciobanu Oana (2015) menyatakan bahwa pembangunan manusia mencakup kehidupan

sosial manusia seperti kehidupan berpolitik yaitu kemampuan untuk berkomunikasi tanpa rasa malu atau secara bebas. Pembangunan manusia juga merupakan pembangunan dari manusia dan oleh manusia

2.1.2.2. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengukuran pembangunan manusia diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 melalui suatu pengukuran yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM sendiri terdiri dari tiga dimensi pembentuk yaitu

- a. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diproksi melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH)
- b. Dimensi pengetahuan yaitu diukur dengan menggunakan 2 indikator yaitu Angka Melek Huruf (AMH) kombinasi dengan Angka Partisipasi Angkatan Kerja
- c. Dimensi standar hidup layak yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Perkapita

Pada tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan kembali perhitungan IPM dengan tetap menggunakan tiga dimensi yaitu :

- a. Umur panjang dan hidup sehat dengan menggunakan indikator pe angka harapan hidup saat lahir,
- b. Pengetahuan dengan menggunakan dua indikator pengukuran yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah
- c. Standar hidup layak dengan menggunakan pengukuran Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita

Metode pernhitungan agregasi IPM juga mengalami penyempurnaan, dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Perbaikan terakhir di dalam perhitungan IPM terjadi pada tahun 2014 dimana IPM diukur dengan menggunakan tiga dimensi dari pengukuran yaitu

- a. Lamanya hidup (*longevity*) yang diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH)
- b. Pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan menggunakan 2 indikator yaitu
 - Rata-rata lama sekolah (RLS)
 - Harapan lama sekolah (HLS)
- c. Standar hidup layak (*standard of living*) yang diukur dengan menggunakan PNB perkapita riil dengan mengganti tahun dasar dari 2005 menjadi 2011

Perkembangan perjalanan perhitungan IPM yang digunakan oleh UNDP sebagai indikator pengukuran keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat pada gambar 2.5.

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks dari dimensi yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan. Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3} [Y_1 + Y_2 + Y_3] \dots\dots\dots (2.1)$$

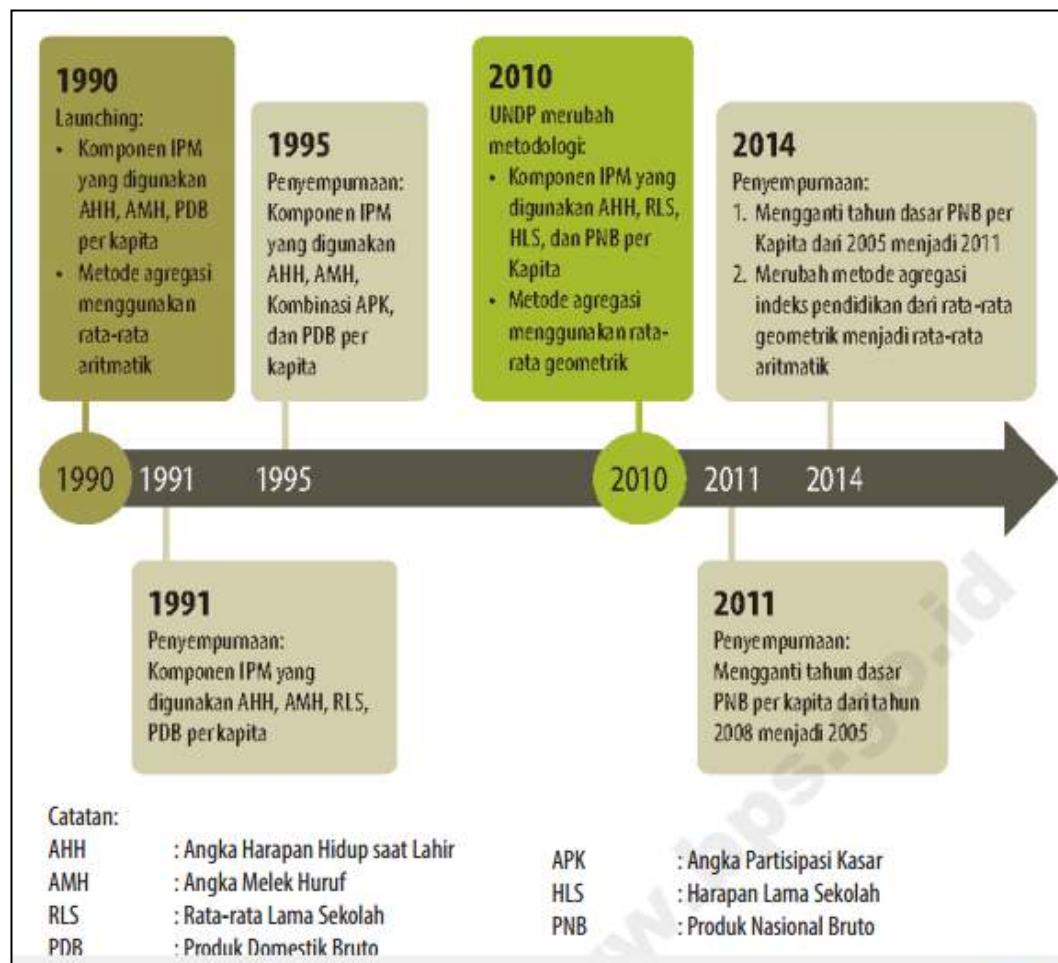
Dimana

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

Y_1 = Indeks Harapan Hidup

Y_2 = Indeks pengetahuan

Y_3 = Indeks standar layak hidup



Gambar 2.5

Perjalanan Metodologi Perhitungan IPM di UNDP

Nilai IPM memiliki berada pada kisaran antara 0 hingga 100. IPM yang mendekati 100 memberikan indikasi pembangunan manusia semakin baik dan sebaliknya nilai IPM mendekati nol menunjukkan pembangunan manusia semakin buruk. maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. $IPM < 50$ (rendah)
2. $50 \leq IPM < 66$ (menengah bawah)

3. $66 \leq \text{IPM} < 80$ (menengah atas)

4. $\text{IPM} \geq 80$ (tinggi)

Secara umum perbedaan indikator pengukuran IPM dengan metode lama dan metode baru berdasarkan konsep UNDP dapat dilihat pada tabel 2.1. Perubahan terjadi pada dimensi pengetahuan dimana pada metode lama dimana Angka Melek Huruf (AMH) dan Kombinasi Partisipasi Angkatan Kerja (APK) digantikan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk dimensi Standar Hidup Layak terjadi perubahan dari PDB perkapita pada metode lama digantikan dengan PNB perkapita pada metode baru dan perubahan terakhir terjadi pada metode perhitungan agregasi dari rata-rata aritmatik pada metode lama menjadi rata-rata geometrik pada metode baru.

Tabel 2.1

Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode baru UNDP

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per Kapita	PNB per Kapita
Agregasi	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik

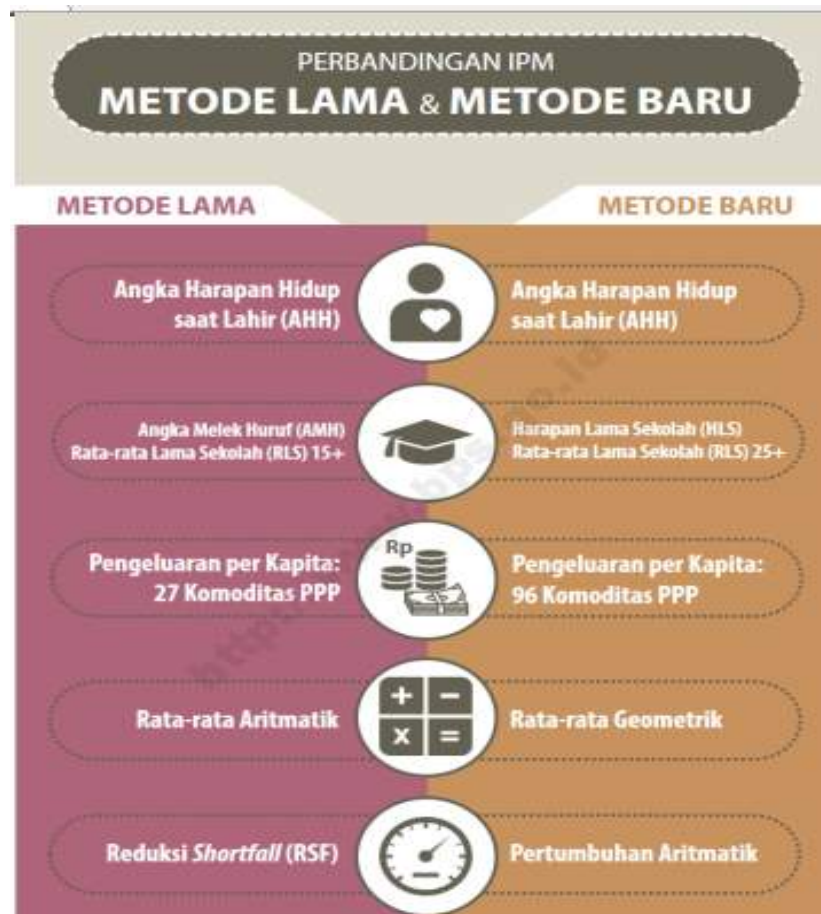
BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru

Perhitungan IPM oleh UNDP digunakan untuk melihat posisi Indonesia di tingkat global, sementara untuk memonitor pencapaian pembangunan manusia antar wilayah di Indonesia dilakukan perhitungan IPM oleh BPS. Perhitungan IPM

oleh BPK dilakukan pada tingkat regional, yaitu provinsi dan kabupaten/kota dan IPM nasional. Metode penghitungan IPM yang digunakan BPS mengacu pada metodologi yang digunakan UNDP dengan penyesuaian pada beberapa indikator sesuai ketersediaan data sampai tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, Perhitungan IPM untuk tingkat provinsi dan kabupaten di Indonesia merupakan capaian agregasi dari tiga dimensi :

1. Umur panjang dan sehat yang diproksi melalui indikator angka harapan hidup
2. Pengetahuan yang diproksi melalui 2 indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah
3. Standar hidup layak yang diproksi melalui indikator pengeluaran per kapita

Secara umum perbandingan perbedaan perhitungan IPM di Indonesia baik level nasional, provinsi dan kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar 2.6. Untuk dimensi panjang hidup dan sehat tidak mengalami perubahan pada metode lama dan baru yaitu tetap menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Dimensi pengetahuan (*knowledge*) mengalami perubahan indikator pengukuran dari kombinasi antara Angka Melek Huruf (AMH) dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada metode lama digantikan dengan kombinasi antara Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Dimensi standar hidup layak mengalami perubahan dari pengeluaran perkapita dengan menggunakan 27 komoditas pada metode lama menjadi pengeluaran perkapita dengan menggunakan 96 komoditas. Untuk metode perhitungan agregasi mengalami perubahan dari menggunakan rata-rata aritmatik pada metode lama digantikan dengan rata-rata geometrik pada metode baru.



Gambar 2.6
Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode baru
di Indonesia adopsi UNDP

2.2. Hasil Studi Empiris Sebelumnya

2.2.1. Studi Empiris Pengukuran Ketahanan Pangan

Isu mengenai ketahanan pangan menjadi masalah penting karena berdampak pada pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas yang nantinya diharapkan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Studi empiris mengenai pengukuran ketahanan pangan sudah

banyak dilakukan dan berikut adalah hasil studi empiris mengenai pengukuran dari ketahanan pangan yang digunakan.

1. ***The Economics Intelligence Unit (2016)*** melakukan penelitian mengenai pemetaan ketahanan pangan untuk 113 negara dengan mempertimbangkan isu utama mengenai keterjangkauan (*Affordability*), ketersediaan (*Availability*) dan kualitas serta keamanan (*Quality and Safety*) di dalam perhitungan indeks ketahanan pangan (*Global Food Security Index*). Hasil penelitian untuk pemetaan ketahanan pangan menunjukkan

- a. Negara yang menempati peringkat 10 tertinggi dengan perolehan skor indeks ketahanan pangan lebih dari 80 adalah peringkat pertama Amerika Serikat dengan (86,6), peringkat kedua Irlandia (84,3), peringkat ketiga Singapura (83,9), peringkat keempat Australia (82,6), peringkat kelima Belanda (82,6), peringkat keenam Perancis (82,5), Peringkat ketujuh Jerman (82,5), peringkat kedelapan Kanada (81,9), peringkat kesembilan Inggris (81,9) dan peringkat kesepuluh Swedia (82,3)
- b. Negara yang menempati peringkat 10 terendah masing-masing peringkat kesatu Burundi (24,0), peringkat kedua Sierra Leone (26,1), peringkat ketiga Chad (28,6), peringkat keempat Nigeria (29,0), peringkat kelima Mozambik (29,4), peringkat keenam Haiti (29,4), peringkat ketujuh Kongo (30,5), peringkat kedelapan Burkina Faso (31), peringkat kesembilan Malawi (31,4) dan peringkat kesepuluh Madagaskar (31,6)
- c. Negara-negara yang menempati peringkat 10 tertinggi dalam hal peningkatan indeks ketahanan pangan adalah peringkat pertama Indonesia

(+2,72), peringkat kedua Myanmar (+2,7), Peringkat ketiga Inggris (+2,6), peringkat keempat Ekuador (+2,4), Peringkat kelima Kolombia (2,2), peringkat keenam adalah Honduras (+2,2), peringkat ketujuh Denin (+2,2), disusul dengan peringkat kedelapan Irlandia (+2,0), disusul peringkat kesembilan Israel (+2,0) dan peringkat kesempuluh Argentina (+1,9)

- d. Posisi Indonesia dari total 113 negara menempati peringkat ke 71 pada tahun 2016. Peringkat ini jauh lebih rendah dari Singapura yang menempati peringkat ke 3, Malaysia yang menempati peringkat 35, Thailand yang menempati peringkat 51, Vietnam yang menempati peringkat 57 dan hanya lebih tinggi dari Philipina yang menempati peringkat 74.
2. Redy et all (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *Towards Sustainable Indicators of food and nutritional outcomes in India* bertujuan untuk mengukur kinerja dari ketahanan pangan dan nutrisi di India relatif dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya seperti Bangladesh, China, Afrika dan beberapa negara berkembang dari tahun 1991 sampai 2016. Penelitian ini menggunakan indikator pengukuran ketahanan pangan FAO yang terdiri dari dimensi ketersediaan (*Availability*), keterjangkauan (*Access*), stabilitas (*Stability*) dan pemanfaatan (*Utilization*). Total indikator yang digunakan untuk mengukur ketahanan pangan sebanyak 14 indikator yaitu a) Rata-rata pasokan energi makanan perkapita yang memadai, b) Rata-rata pasokan protein perkapita, c) Rata-rata pasokan protein yang berasal dari hewani, d) Rata-rata pasokan lemak perkapita, e) Kepadatan jalan, f) Indeks harga makanan domestik, g) Volatilitas harga makanan domestik, h) Sebaran dari produksi makanan

perkapita, i) Akses untuk sumber sir berih, j) Akses terhadap peningkatan sanitasi kesehatan, k) Prevelansi kurang gizi, l) Prosentasei pengeluaran untuk makanan masyarakat miskin, m) Tingkat defisit makanan dan n) Prevalensi wanita hamil yang kekuarangan darah.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan makanan (*food availability*) yang diukur dari jumlah kalori dan protein perkapita lebih rendah di India dibandingkan dengan Afrika dan Bangladesh. Untuk indikator keterjangkauan makanan (*food access*) seperti tingkat kepadatan jalan lebih baik, harga makanan tetap stabil dan konstan yang berdampak pada peningkatan akses makanan dan stabilitas. Untuk dimensi pemanfaatan (*utilization*) yaitu akses untuk air dan sanitasi rendah, wanita hamil yang kekurangan daerah dan tingkat kekurangan gizi relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang seperti Afrika dan Bangladesh. Defisit terhadap makanan lebih tinggi kecuali Afrika.

3. **Nurhemi dkk (2014)** melakukan penelitian dengan tujuan untuk memetakan ketahanan pangan dengan menghitung *Total Factor Productivity* (TFP) untuk tanaman pangan dan hortikultura di masing-masing provinsi dengan menggunakan metode *Thorqvist Theil Index* sebagai ukuran dari tingkat adopsi teknologi. Untuk memetakan tingkat ketahanan pangan untuk setiap provinsi dilakukan dengan menghitung indeks ketahanan pangan yang didasarkan pada pengukuran yang dilakukan oleh *Global Food Security Index (GFSI)* yang terdiri dari dimensi ketersediaan (*availability*), akses (*affordability*) serta kualitas dan keamanan (*quality dan safety*).

Rata-rata TFP tanaman pangan (padi, kedelai, cabai merah, bawang merah) di 33 provinsi di Indonesia periode 2012–2013 menghasilkan tingkat adopsi teknologi di sektor pertanian sebesar 1,05. Hasil ini menunjukkan masih kecilnya dampak penggunaan teknologi terhadap produktivitas tanaman pangan. Untuk indeks ketahanan pangan, diperoleh rata-rata indeks dari seluruh provinsi sebesar 37,26% dari nilai maksimal 100. Hal ini menunjukkan masih perlunya perbaikan dari tiga aspek ketahanan pangan (ketersediaan, akses, stabilitas dan keamanan). Provinsi dengan indeks ketahanan pangan tertinggi adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Untuk hasil per kawasan, Jawa merupakan kawasan dengan indeks ketahanan pangan tertinggi, sementara Indonesia bagian timur merupakan kawasan dengan indeks ketahanan pangan terendah.

Studi empiris secara lebih jelas mengenai ketahanan pangan dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2.

Studi Empiris Indikator Pengukuran Ketahanan Pangan (*Food Security*)

No.	Nama Tahun dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Model yang Digunakan	Tujuan Penelitian	Kesimpulan
1	<i>The Economics Intelligence Unit (2016), Global Food Security Index</i>	<i>Food Security Index</i> • <i>Affordability</i> • <i>Availability</i> • <i>Quality and Safety</i>	<i>Composite Index</i>	Melakukan pemetaan mengenai ketahanan pangan untuk 113 negara	• Negara yang masuk dalam kelompok 10 tertinggi adalah USA, Irlandia, Singapura, Australia, Belanda, Perancis, Jerman, Kanada, Inggris dan Swedia

No.	Nama Tahun dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Model yang Digunakan	Tujuan Penelitian	Kesimpulan
					Negara yang menempati 10 peringkat terendah adalah Madagaskar, Malawi, Burkina Faso, Kongo, Haiti, Mozambik, Nigerai, Char, Sierra Leone dan Burundi
2	Redy et all (2016), <i>Towards Sustainable Indicators of food and nutritional outcomes in India</i>	- Ketahanan pangan dengan menggunakan pengukuran FAO yang terdiri dari 4 dimensi yaitu <i>Availability</i> <i>Access</i> <i>Stability</i> <i>Utilization</i> - Total indikator pengukuran yang digunakan 14	<i>Composite Index</i>	Mengukur kinerja dari ketahanan pangan dan nutrisi di India relatif dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya seperti Bangladesh, China, Afrika dan beberapa negara berkembang dari tahun 1991 sampai 2016	<i>Availability</i> di India lebih rendah dibandingkan dengan Afrika dan Bangladesh <i>Food Access</i> di India lebih baik dibandingkan dengan Bangladesh tetapi lebih rendah dibandingkan Cina. - Untuk <i>Stability</i> kondisi di India lebih baik dibandingkan dengan Afrika tetapi lebih besar dibandingkan dengan Bangladesh dan negara berkembang lainnya - Untuk dimensi <i>Utilization</i>, kondisi di India lebih baik dibandingkan dengan Bangladesh dan Afrika tetapi lebih jelek dibandingkan dengan Cina

No.	Nama Tahun dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Model yang Digunakan	Tujuan Penelitian	Kesimpulan
					dan negara berkembang
3	<i>Nurhemi dkk (2014)</i> , Pemetaan Ketahanan Pangan Di Indonesia: Pendekatan Tfp Dan Indeks Ketahanan Pangan	• Indeks Ketahanan Pangan yang terdiri dari dimensi : - <i>Availability</i> dengan 10 indikator - <i>Affordability</i> dengan 10 indikator - <i>Quality & Safety</i> • <i>Total Factor Productivity</i>	<i>Composite Index</i>	Memetakan ketahanan pangan dengan menghitung TFP tanaman pangan dan hortikultura di masing-masing provinsi dengan menggunakan metode <i>Thorqvist Theil Index</i> sebagai ukuran dari tingkat adopsi teknologi serta memetakan tingkat ketahanan pangan tiap provinsi dengan menghitung indeks berdasar ketersediaan, akses, dan tingkat keamanan bahan pangan, yang mengacu pada perhitungan <i>Global Food Security Index</i>	• Masih kecilnya dampak penggunaan teknologi terhadap produktivitas tanaman pangan. • Untuk indeks ketahanan pangan, rata-rata indeks dari seluruh provinsi adalah 37,26% dari nilai maksimal 100. Hal ini menunjukkan masih perlunya perbaikan di tiga sisi ketahanan pangan (ketersediaan, akses, stabilitas dan keamanan

2.2.2. Studi Empiris Hubungan Antara Ketahanan Pangan Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Ketahanan pangan berkaitan dengan kondisi dimana setiap individu dapat memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap makanan dalam jumlah yang cukup, aman dan bergizi menuju kehidupan yang sehat yang selanjutnya akan berpengaruh pada pembangunan kualitas manusia yang diproksi melalui Indeks Pembangunan

Manusia (IPM). Hasil studi empiris yang menganalisis pengaruh dari ketahanan pangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

1. Sow et all (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *The Relationship Between Safety, Security and Human Development in Africa* dilakukan dengan tujuan menguji hubungan antara indeks ketahanan dan keamanan pangan dengan pembangunan manusia di Afrika. Dengan menggunakan data 53 negara-negara Afrika dan menggunakan alat analisis korelasi *Pearson* diperoleh hasil temuan adanya korelasi sebesar 0,451 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan terbukti ada hubungan positif signifikan antara *safety dan security index* dengan *human development*..
2. Verwimp (2013) dalam penelitiannya dengan judul *Food Security, Violent Conflict and Human Development : Causes and Consequences*. Paper ini berargumen bahwa dampak konflik kekerasan terhadap ketahanan pangan dapat dipahami dengan menganalisis bagaimana konflik mempengaruhi rata-rata rumah tangga pertanian. Hal ini terjadi melalui pengaruhnya terhadap sumber pendapatan rumah tangga pertanian yang dikombinasikan dengan pengaruhnya terhadap rantai makanan lokal dan sistem politik. Pembuat kebijakan harus fokus pada kerentanan terhadap kekurangan pangan selama konflik, mengenai konsekuensi konflik jangka panjang untuk pembangunan manusia dan mekanisme jaminan yang inovatif untuk mempertahankan tingkat asupan makanan yang memadai dan untuk mencegah konflik kekerasan.

3. UNDP (2012) dalam kajiannya yang diberi judul *African Human Development Report, Toward a Food Secure*) dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis seberapa kuatnya ketahanan pangan dapat mengakselerasi Pembangunan Manusia. Dengan menggunakan variabel *Human Development* dan *Food Security* dan disain penelitian kualitatif dihasilkan temuan bahwa seorang dalam kondisi makan dan nutrisi yang cukup sehingga mereka dapat memperoleh dengan aman makanan dengan jumlah yang cukup, bervariasi dan berkualitas untuk kelangsungan hidup mereka yang pada akhirnya akan meningkatkan sumber daya manusianya (*human development*)

4. Gani Azmat dan Biman Chand Prasad (2007) dalam penelitiannya yang berjudul *Food Security and Human Development* dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan bukti eviden adanya hubungan antara ketahanan pangan (*food security*) dengan pembangunan manusia (*human development*) yang dilakukan pada negara-negara dengan pendapatan rendah. Dengan menggunakan model regresi panel dengan variabel dependen adalah *Human Development Index* (HDI) sementara variabel independennya adalah ketersediaan pangan (*Food Availability*) yang diukur dengan indeks produksi makanan, harga makanan, nutrisi (energi), nutrisi (protein) dan kerentanan pangan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa model HDI dengan nutrisi menggunakan proksi energi diperoleh temuan bahwa ketersediaan makanan (*food availability*) terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap HDI. Harga makanan sekalipun berpengaruh negatif terhadap HDI tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Nutrisi yang diproksi melalui energi terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap

HDI sementara kerentanan pangan menunjukkan pengaruh yang negatif tetapi tidak signifikan.

Untuk model HDI dengan nutrisi yang menggunakan proksi protein menghasilkan temuan yang konsisten dengan model pertama yaitu ketersediaan pangan (*food availability*) terbukti berpengaruh positif terhadap HDI, harga makanan sekalipun berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Nutrisi yang diukur dengan menggunakan protein terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap HDI sementara untuk kerentanan pangan tidak terbukti adanya pengaruh negatif signifikan terhadap HDI.

Ringkasan hasil studi empiris yang menghubungkan antara ketahanan pangan dengan pembangunan manusia dijelaskan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Studi Empiris Hubungan antara Ketahanan Pangan dengan
Pembangunan Manusia

No.	Nama Tahun dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Model yang Digunakan	Tujuan Penelitian	Kesimpulan
1.	Sow et al (2015), <i>The Relationship Between Safety, Security and Human Development in Africa</i>	• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) • <i>Safety and Security Indeks</i>	<i>Pearson Correlation</i>	Menguji hubungan antara indeks ketahanan dan keamanan pangan dengan pembangunan manusia di Afrika	Dengan menggunakan korelasi <i>Pearson</i> diperoleh hasil ada hubungan positif signifikan antara <i>safety dan security index</i> dengan <i>human development</i>

No.	Nama Tahun dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Model yang Digunakan	Tujuan Penelitian	Kesimpulan
2	Verwimp (2013), <i>Food Security, Violent Conflict and Human Development : Causes and Consequences</i>	• Konflik kekerasan • Ketahanan pangan • Pembangunan Manusia	Penelitian kualitatif	Menganalisis pengaruh dari konflik kekerasan berpengaruh terhadap ketahanan pangan dan selanjutnya berdampak pada pembangunan manusia.	Konflik kekerasan yang terjadi berdampak pada sumber pendapatan rumah tangga dan rantai makanan sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan dan dalam jangka panjang berpengaruh terhadap pembangunan manusia
3	UNDP (2012) <i>African Human Development Report, Toward a Food Secure Future</i>	• <i>Human Development</i> • <i>Food security</i>	Penelitian kualitatif	Menganalisis bagaimana kuatnya ketahanan pangan dapat mengakselerasi Pembangunan Manusia	• Seorang dalam kondisi makan dan nutrisi yang cukup sehingga mereka dapat memperoleh dengan aman makanan dengan jumlah yang cukup, bervariasi dan berkualitas untuk kelangsungan hidup mereka yang pada akhirnya akan meningkatkan sumber daya manusianya (<i>human development</i>)

No.	Nama Tahun dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Model yang Digunakan	Tujuan Penelitian	Kesimpulan
4.	Azmat & Prasad (2007), <i>Food Security and Human Development</i>	• Indeks Pembangunan Manusia • Ketersediaan Pangan • Harga makanan • Nutrisi (protein) • Kerentanan pangan	Model Regresi panel	Menunjukkan adanya bukti eviden mengenai hubungan antara ketahanan pangan dengan pembangunan manusia.	• Untuk model HDI dengan nutrisi energi, ketersediaan pangan terbukti berpengaruh positif terhadap HDI, harga makanan sekaligus pengaruhnya negatif tapi tidak signifikan, Nutrisi (energi) berpengaruh positif signifikan terhadap HDI sedangkan kerentanan berpengaruh negatif tidak signifikan • Untuk model HDI dengan nutrisi (protein) terbukti bahwa ketersediaan pangan berpengaruh positif signifikan terhadap HDI

2.2.3. Studi Empiris Faktor-Faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Studi empiris yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan faktor penentu IPM sudah banyak dilakukan. Berikut adalah hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks IPM

1. Heka, Alison,J.L, Agnes Lopian, Imelda Lajuck (2017) melakukan penelitiannya yang berjudul pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan terhadap IPM di provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan model regresi berganda dihasilkan kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah sector kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM sementara pengeluaran pemerintah untuk sector pendidikan tidak terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap IPM.
2. Edeme, R.K, Chigozie Nelson Nkalu and Innocent A. Ifelunin (2017) melakukan studi empiris dengan judul *Distributional impact of publicexpenditure on human development in Nigeria*. Dengan menggunakan analisis regresi panel dihasilkan kesimpulan alokasi anggaran bidang pendidikan dan kesehatann memiliki pengaruh marginal positif (positif tidak signifikan) terhadap IPM
3. Lengkong, Susye M.K, Debby Ch. Rotinsulu, Een N. Walewangko (2017) melakukan kajian empiris dengan judul Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bitung. Dengan menggunakan model regresi jalur (*path analys*) diperoleh kesimpulan bahwa alokasi anggaran bidang pendidikan terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap IPM sementara alokasi anggaran bidang kesehatan tidak terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap IPM.
4. Kahang.Merang, Muhammad Saleh,Rachmad Budi Suharto (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Dan Kesehatan Terhadap Indkes Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur. Dengan menggunakan analisis regresi berganda diperoleh kesimpulan Pengeluaran pemerintah sector pendidikan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di provinsi Aceh sementara Pengeluaran pemerintah sector kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap IPM di provinsi Aceh

5. Shuaibu & Odalaya (2016), melakukan kajian yang berjudul *Determinant of Human Capital Development in Afriaca : A Panel Data Analysis*. Hasil dari pengolahan dengan menggunakan model Panel menunjukkan bahwa pengeluaran blik untuk bidang Dengan menggunakan metode analisis regresi panel diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan dan bidang kesehatan dalam jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap *Human Capital Index*
6. Intan Safitri (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh pengeluaran Pemerinath Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Terhadap Indeks PembangunanManusia di Provinsi Aceh. Dengan menggunakan analisis regresi panel diperoleh kesimpulan pengeluaran pemerintah sector kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap IPM di provinsi Aceh sementara Pengeluaran pemerintah sector pendidikan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di provinsi Aceh
7. Astry, Meylina dkk (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari pengeluaran pemerintah pada sektor

kesehatan dan pendidikan terhadap IPM. Dengan menggunakan alat analisis regresi berganda diperoleh kesimpulan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap IPM tetapi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap IPM

8. Melliana, Ayunanda dan Ismaini Zain (2013) melakukan kajian empiris dengan judul Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota provinsi Jawa Timur Dengan Menggunakan Regresi Panel diperoleh kesimpulan Factor pendidikan yang diproksi melaluirasio guru-siswa SMP/MTS berpengaruh positif signifikan terhadap IPM sementara Factor kesehatan yang diproksi melalui jumlah sarana kesehatan dan rumah tangga dengan akses air bersih berpengaruh signifikan terhadap IPM.
9. Bhakti, Nadia AYu dan Istiqomah (2012) melakukan penelitian dengan judul penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-201.. Dengan menggunakan regresi panel diperoleh kesimpulan rasio ketergantungan terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM,. Pengeluaan pemerintah untuk pendidikan tidak terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap IPM atau dengan kata lain tidak terbukti meningkatnya pengeluaran pemerintah sector pendidikan akan meningkatkan IPM dan sebaliknya. Untuk pengeluaran pemerintah sector kesehatan menghasilkan kesimpulan adanya pengaruh positif signifikan yang artinya meningkatnya pengeluaran pemerintah bidang kesehatan akan

meningkatkan IPM dan sebaliknya menurunnya pengeluaran pemerintah sektor kesehatan akan menurunkan IPM.

10. Pratowo Nur Isa (2011) melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh terhadap IPM dimana salah satu variabel yang digunakan sebagai variabel yang mempengaruhi IPM adalah rasio ketergantungan. Dengan model regresi panel diperoleh kesimpulan bahwa rasio ketergantungan terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Meningkatnya rasio ketergantungan akan menurunkan IPM dan sebaliknya menurunnya rasio ketergantungan akan menaikkan IPM

Hasil studi empiris yang menghubungkan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan variabel-variabel yang mempengaruhi terutama variabel independen yang dijadikan sebagai variabel dalam model penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Studi Empiris Faktor-faktor Yang Mempengaruhi IPM

No.	Nama Tahun dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian yang terkait	Model yang Digunakan	Tujuan Penelitian yang terkait	Kesimpulan yang terkait
1	Heka,,Alison,J.L, Agnes Lapian, Imelda Lajuck, 2017. Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan terhadap IPM di provinsi Sulawesi Utara	• IPM • Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan • Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan	Model regresi berganda	Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan terhadap IPM di provinsi Sulaawesi Utara	Pengeluaran pemerintah sector kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM Pengeluaran pemerintah sector pendidikan tidak berpengaruh sginifikan positif terhadap IPM
2	Edeme, R.K, Chigozie Nelson Nkalu and Innocent A. Ifelunin, 2017. <i>Distributional impact of publicexpenditure on human development in Nigeria</i>	• IPM • Expenditure on education • Expenditure on Healt	Analisis regresi panel	Menganalisis pengaruh alokasi anggaran bidang pendidikan dan kesehatan terhadap IPM	Alokasi anggaran bidang pendidikan memiliki pengaruh marginal positif (positif tidak signifikan) terhadap IPM Alokasi anggaran bidang kesehatan memiliki pengaruh marginal positif (positif tidak signifikan) terhadap IPM
3	Lengkong, Susye M.K, Debby Ch. Rotinsulu, Een N. Walewangko 2017. Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bitung	• IPM • Anggaran pendidikan • Anggaran kesehatan	Analisis regresi jalur (<i>path analys</i>)	Menganalisis pengaruh alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap IPM dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Bitung	Anggaran pendidikan terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap IPM sedangkan anggaran kesehatan tidak terabukti berpengaruh signifikan positif terhadap IPM

No.	Nama Tahun dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian yang terkait	Model yang Digunakan	Tujuan Penelitian yang terkait	Kesimpulan yang terkait
4	Kahang, Merang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto (2016) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indkes Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur	• IPM • Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan • Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	Analisis regresi berganda	Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM di kabupaten Kutai timur	Pengeluaran pemerintah sector pendidikan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di provinsi Aceh Pengeluaran pemerintah sector kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap IPM di provinsi Aceh
5	Shuaibu & Oladayo (2016), <i>Determinant of Human Capital Development in Afriaca : A Panel Data Analysis</i>	• <i>Human Development Index (HDI)</i> • Pengeluaran pemerintah untuk tingkat pendidikan (PPE) • Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (PEH)	Model regresi panel	Menganalisis faktor-faktor yang menentukan <i>Human Capital Development</i> di 33 negara Afrika selama periode 2000-2013.	Hasil dari pengolahan model Panel menunjukkan Pengeluaran Publik untuk bidang Pendidikan dan , Pengeluaran Publik untuk kesehatann, dalam jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap <i>Human Capital Index</i>
6	Intan Safitri (2016) Pengaruh pengeluaran Pemerinath Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Terhadap Indeks PembangunanMa nusia di Provinsi Aceh	• IPM • Pengeluaran pemerintah sector pendidikan • Pengeluaran pemerintah sector kesehatan	Model regresi panel	Menganalisis pengaruh dari pengeluaran sector pendidikan dan kesehatan terhadap IPM	Pengeluaran pemerintah sector kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap IPM di provinsi Aceh Pengeluaran pemerintah sector pendidikan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di provinsi Aceh

No.	Nama Tahun dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian yang terkait	Model yang Digunakan	Tujuan Penelitian yang terkait	Kesimpulan yang terkait
7	Astry, Meylina dkk (2013) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia	• IPM • Pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan • Pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan	Regresi berganda	Menguji pengaruh dari pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan terhadap IPM	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap IPM tetapi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak terbukti
8	Melliana, Ayunanda dan Ismaini Zain (2013) Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota provinsi Jawa Timur Dengan Menggunakan Regresi Panel	• Faktor pendidikan • Faktor kesehatan	Metode Regresi panel	Menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi IPM di Jawa Timur periode 2004-2011	Factor pendidikan yang diproksi melalui rasio guru-siswa SMP/MTS berpengaruh positif signifikan terhadap IPM Factor kesehatan yang diproksi melalui jumlah sarana kesehatan dan rumah tangga dengan akses air bersih berpengaruh signifikan terhadap IPM
10	Pratowo Nur Isa (2011), Analisis Factor-faktor Yang Berpengaruh terhadap IPM	• IPM • Rasio Ketergantungan	Model Regresi Panel	Menganalisis pengaruh dari rasio ketergantungan terhadap IPM	Rasio ketergantungan terbukti berpengaruh negative signifikan terhadap IPM

2.3. Kerangka Pemikiran

Ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan pangan (*availability*) yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi juga mencakup bagaimana masyarakat memiliki akses (*access*) untuk mendapatkan pangan, stabilitas

(*stability*) dari penyediaan pangan serta pemanfaatan dari pangan (*utilization*) yang mencakup akses untuk mendapatkan air bersih, sanitasi yang memenuhi standar dan indikator kesehatan lainnya. Hasil studi empiris membuktikan bahwa ketahanan pangan terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia (IPM).

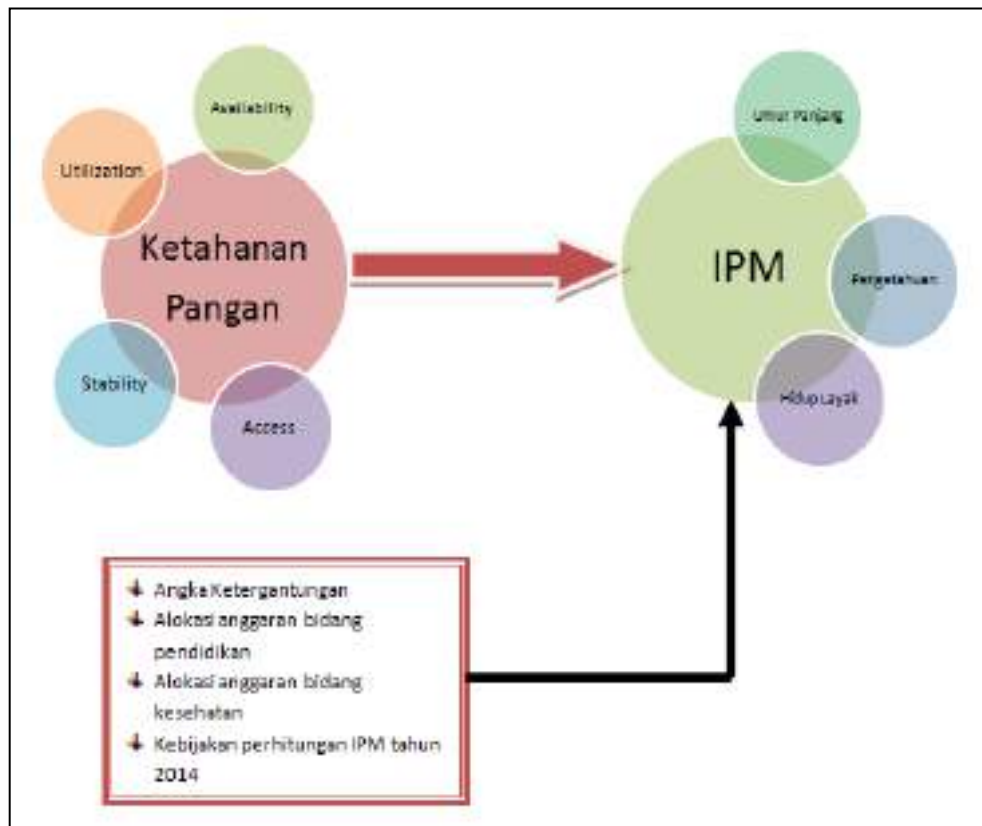
Selain Ketahanan Pangan (*Food Security*), hasil studi empiris lain dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh dari variabel variabel demografi dan variabel kebijakan anggaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka ketergantungan yang tinggi menghasilkan temuan akan menurunkan IPM sebagai akibat setiap individu yang berada pada usia produktif memiliki tanggungan yang lebih besar sehingga seluruh potensi ekonomi yang dihasilkan harus didistribusikan ke lebih banyak individu yang pada akhirnya akan menyebabkan rendahnya nilai IPM. Keberpihakan pemerintah daerah terhadap pembangunan IPM yang diproksi melalui kebijakan pemerintah melalui alokasi anggaran yang digunakan untuk bidang pendidikan dan kesehatan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia.

Perubahan metode perhitungan IPM yang digunakan Indonesia dengan mengadopsi metode yang dibuat oleh UNDP pada tahun 2014 terutama dari aspek dimensi pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup yang layak serta metode agregasi perhitungan IPM memberikan dampak yang signifikan terhadap IPM yang dihasilkan. Hasil perhitungan ditunjukkan dengan terjadinya variasi IPM yang lebih heterogen antara satu propinsi dengan provinsi yang lain dan secara keseluruhan

berdampak pada terjadinya penurunan nilai Ig PM secara merata di hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

Sebagai negara dengan ketergantungan yang relatif tinggi terhadap perekonomian dunia terutama negara-negara maju yang menjadi mitra dagang utama Indonesia dalam perdagangan dunia menyebabkan jalannya pembangunan ekonomi di Indonesia termasuk pembangunan IPM juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Krisis global financial yang terjadi pada tahun 2008 sedikit banyak menyebabkan standar hidup layak rata-rata pengeluaran perkapita Indonesia mengalami penurunan dari Rp 636,87 ribu pada tahun 2007 menjadi Rp 634,26 ribu pada tahun 2008.

Kristalisasi dari kajian pustaka dan studi empiris diatas diperoleh kerangka pemikiran yang menjadi dasar di dalam penulisan disertasi ini seperti ditunjukkan pada gambar 2.7



Gambar 2.7
Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Kristalisasi dari kajian literatur dan studi empiris yang digunakan menjadi dasar di dalam penyusunan kerangka pemikiran yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan untuk menyusun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun hipotesis dalam penelitiannya adalah :

H₁ : Ketahanan Pangan (*Food Security* yang terdiri dari dimensi *Availability*, *Access*, *Stability* dan *Utilization* berpengaruh positif terhadap Pembangunan Manusia (*Human Development*) antar provinsi di Indonesia

- H₂ : Rasio ketergantungan berpengaruh negatif terhadap Pembangunan Manusia (*Human Development*) antar provinsi di Indonesia
- H₃ : Pengeluaran Bidang Pendidikan berpengaruh positif terhadap Pembangunan Manusia (*Human Development*) antar provinsi di Indonesia
- H₄ : Pengeluaran Bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap Pembangunan Manusia (*Human Development*) antar provinsi di Indonesia
- H₅ : Kebijakan perhitungan IPM tahun 2014 berpengaruh negatif terhadap Pembangunan Manusia (*Human Development*) antar provinsi di Indonesia
- H₆ : Krisis global tahun 2008 berdampak negatif terhadap Pembangunan Manusia (*Human Development*) antar provinsi di Indonesia



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini merupakan penelitian kuantitatif dan korelasional. Penelitian kuantitatif digunakan untuk memberikan eksplanasi secara komprehensif terhadap ketahanan pangan antar provinsi di Indonesia yang dilakukan dengan perhitungan angka indeks ketahanan pangan yang terdiri dari 4 dimensi yaitu *availability*, *access*, *stability* dan *utilization*. Untuk menganalisis pengaruh dari ketahanan pangan yang terdiri dari 4 dimensi terhadap pembangunan manusia (IPM) juga dimasukkan variabel independen lain yaitu rasio ketergantungan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, kebijakan perubahan perhitungan IPM tahun 2014 serta krisis global tahun 2008 dengan menggunakan model regresi panel

Penelitian ini bertujuan untuk mendisain model ketahanan pangan antar provinsi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan pengukuran yang dilakukan oleh FAO karena dirasakan lebih tepat sebagai model ketahanan pangan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Hasil dari ketahanan pangan yang diperoleh dikaitkan dengan pembangunan manusia yang diproksi dengan menggunakan indeks IPM. Penggunaan variabel-variabel independen lain yang berdasarkan kajian empiris dan bukti eviden yaitu variabel rasio ketergantungan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang

kesehatan, kebijakan metode perhitungan IPM serta kondisi krisis global tahun 2008 dimasukkan untuk menghasilkan model pembangunan yang paling baik (*model fit*).

3.2. Operasional Variabel Penelitian

3.2.1. Variabel Dependen

Seperti telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa tujuan penelitian ini adalah ingin membuat model pembangunan manusia yang dipengaruhi oleh ketahanan pangan yang terdiri dari dimensi *availability*, *access* dan *stability* serta variabel independen lain yaitu rasio ketergantungan, pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan, kebijakan perubahan metode pengukuran IPM serta krisis global tahun 2008. Dari penjelasan ini dapat diidentifikasi bahwa variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengukuran untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan 2 pendekatan yaitu

1. Periode 2007-2013

Pada periode ini, IPM diukur dengan menggunakan 3 dimensi dan 4 indikator pengukuran yaitu :

- a. Dimensi umur panjang dan hidup sehat dimana indikator pengukuran yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup (AHH)

- b. Dimensi pengetahuan (*knowledge*) yang terdiri dari 2 indikator pengukuran yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
- c. Dimensi standar hidup layak dimana indikator pengukuran yang digunakan adalah pengeluaran perkapita untuk 27 komoditas

2. Periode 2014-2016

Pada periode ini, IPM diukur dengan menggunakan 3 dimensi dan 4 indikator pengukuran yaitu :

- a. Dimensi umur panjang dan hidup sehat dimana indikator pengukuran yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup (AHH)
- b. Dimensi pengetahuan (*knowledge*) yang terdiri dari 2 indikator pengukuran yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
- c. Dimensi standar hidup layak dimana indikator pengukuran yang digunakan adalah pengeluaran perkapita untuk 96 komoditas

3.2.2. Variabel Independen

Variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Ketahanan Pangan (*Food Security*)

Pengukuran variabel ketahanan pangan terdiri dari 4 dimensi tetapi dalam penelitian ini hanya digunakan 3 dimensi karena ada 1 dimensi yaitu *utilization* dengan pertimbangan hanya 2 dari 10 indikator yang tersedia dan bobot dari dimensi *utilization* yang kecil. Pengukuran indikator masing-masing dimensi adalah sebagai berikut :

- a. Dimensi **Availability** yang terdiri dari 5 indikator pengukuran yaitu :
 - 1) Rata-rata kecukupan pasokan energi makanan (kalori/kapita)
 - 2) Rata-rata nilai produksi pangan (produksi/kapita)
 - 3) Prosentase pasokan energi yang berasal dari sereal, akar dan umbi (kalori/kapita)
 - 4) Rata-rata pasokan protein (gr/cap.hari)
 - 5) Rata-rata pasokan protein yang berasal dari hewan (gr/cap/hari)

- b. Dimensi **Access** yang terdiri dari 5 indikator pengukuran yaitu :
 - 1) Produk Domestik Bruto perkapita yang mencerminkan daya beli
 - 2) Indeks Harga pangan (%)
 - 3) Prevalensi kekurangan gizi (%) yang diukur dengan rata-rata konsumsi kalori/kapita perprovinsi terhadap konsumsi kalori/kapita nasional
 - 4) Prosentasi pengeluaran untuk makanan masing-masing provinsi
 - 5) Tingkat defisit pangan yang diukur melalui perbedaan antara rata-rata energi yang dibutuhkan dengan konsumsi energi masing-masing provinsi

- c. Dimensi **Stability** yang terdiri dari 5 indikator pengukuran yaitu :
 - 1) Rasio ketergantungan impor sereal
 - 2) Nilai impor makanan terhadap total ekspor barang dagangan
 - 3) Gajolak pangan domestik yaitu standar deviasi inflasi komoditas pangan selama periode penelitian di setiap provinsi

- 4) Variabilitas produksi pangan perkapita yang diukur dari standar deviasi produksi makanan perkapita selama periode penelitian di setiap provinsi
- 5) Volatilitas pasokan makanan perkapita yang diukur dari standar deviasi konsumsi makanan perkalori/kapita/hari di setiap provinsi

Ketersediaan data di tingkat provinsi menyebabkan hanya 3 indikator yang digunakan untuk pengukuran dimensi stability yaitu indikator 3, 4 dan 5 semntara indikator 1 dan 2 dihilangkan.

Kesimpulannya dari total 25 indikator pengukuran ketahanan pangan versi FAO, dimensi utilization harus dihilangkan karena rendahnya bobot dan minimnya ketersediaan data darimana dari 10 indikator pengukuran hanya 2 indikator yang diperoleh. Untuk dimensi stability, dari 5 indikator hanya 3 indikator yang datanya secara lengkap dapat diperoleh sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur ketahanan pangan sebanyak 13 indikator pengukuran .

2. Rasio Ketergantungan

yaitu variabel yang mengukur perbandingan antara penduduk usia 0-14 tahun ditambah dengan penduduk usia 65 tahun ketas dengan penduduk usia 15-64 tahun

3. Proporsi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan

yaitu proporsi pengeluaran total pemerintah dari APBD setiap provinsi yang digunakan untuk bidang pendidikan

4. Proporsi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan

yaitu proporsi pengeluaran total pemerintah dari APBD setiap provinsi yang digunakan untuk bidang kesehatan

5. Dami kebijakan perubahan metode perhitungan IPM

yaitu periode sebelum dan sesudah terjadi perubahan metode perhitungan IPM di Indonesia dimana

0 = periode 2007-2013 untuk metode perhitungan lama

1 = periode 2014-2016 untuk metode perhitungan baru

6. Dami krisis finansial tahun 2008

yaitu variabel dami yang menjadi proksi krisis global 2008 dimana

0 = periode selain tahun 2008

1 = periode tahun 2008

Untuk lebih jelasnya, operasionalisasi dari seluruh variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran (Formulasi)	Fungsi variabel	Skala Pengukuran
Indeks Pembangunan Manusia	Perubahan positif pada manusia seutuhnya dengan fokus pada masyarakat dan kesejahteraannya dan pembangunan manusia adalah tujuan akhir dari segala macam pembangunan	Untuk periode 2007-2013 menggunakan formulasi rata-rata aritmatika $IPM = \frac{1}{3}(Y_1 + Y_2 + Y_3)$ Untuk periode 2014-2017 menggunakan formulasi rata-rata geometrika $IPM = \sqrt[3]{Y_1 * Y_2 * Y_3}$ Dimana Y_1 = Indeks harapan Hidup Y_2 = Indeks Pengetahuan Y_3 = Indeks status Hidup layak <i>Sumber : BPS</i>	Variabel dependen	Rasio
Indeks Ketahanan Pangan (Food Security Index)	Terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.	Menggunakan dimensi ketersediaan (<i>Availability</i>), Keterjangkauan (<i>Access</i>) Stabilitas (<i>stability</i>) dan Pemanfaatan (<i>Utilization</i>) <i>Sumber : BPS, Kementrian Pertanian</i>	Variabel Independen	Rasio

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran (Formulasi)	Fungsi variabel	Skala Pengukuran
Dimensi Availability	Jumlah makanan yang ada dalam suatu negara atau wilayah baik yang berasal dari domestik, impor, cadangan makanan ataupun bantuan makanan	1. Rata-rata kecukupan pasokan energi makanan (kalori/kapita) 2. Rata-rata nilai produksi pangan (produksi/kapita) 3. Prosentase pasokan energi yang berasal dari sereal, akar dan umbi (kalori/kapita) 4. Rata-rata pasokan protein (gr/cap.hari) 5. Rata-rata pasokan protein yang berasal dari hewan (gr/cap/hari)	Variabel Independen	Rasio
Dimensi keterjangkauan (Acces)	Memiliki akses atau keterjangkauan baik secara fisik, ekonomi dan sosial	1. Produk Domestik Bruto perkapita yang mencerminkan daya beli 2. Indeks Harga pangan (%) 3. Prevalensi kekurangan gizi (%) yang diukur dengan rata-rata konsumsi kalori/kapita perprovinsi terhadap konsumsi kalori/kapita nasional 4. Prosentasi pengeluaran untuk makanan masing-masing provinsi (%) 5. Tingkat defisit pangan yaituperbedaan antara rata-rata energi yang dibutuhkan dengan konsumsi energi masing-masing provinsi	Variabel Independen	Rasio

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran (Formulasi)	Fungsi variabel	Skala Pengukuran
Dimensi : Stability	Masyarakat mempunyai kemampuan untuk mengakses dan menggunakan makanan dengan kondisi stabil dan berkelanjutan sepanjang waktu	1. Gajolak pangan domestik yaitu standar deviasi inflasi komoditas pangan selama periode penelitian 2. Variabilitas produksi pangan perkapita yang diukur dari standar deviasi produksi makanan perkapita selama periode penelitian di setiap provinsi 3. Volatilitas pasokan makanan perkapita yang diukur dari standar deviasi konsumsi makanan perkalori/kapita/hari	Variabel Independen	Rasio
Rasio Ketergantungan (Dependency ratio)	Suatu bilangan yang mengukur perbandingan antara penduduk usia 0-14 tahun ditambah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan penduduk usia 15-64 tahun	$DR = \frac{P_{(0-14)} + P_{65+}}{P_{(15-64)}} \times 100$ Dimana DR = Rasio Ketergantungan $P_{(0-14)}$ = Jumlah penduduk usia mudah yaitu usia 0 sampai 14 tahun P_{65+} = Jumlah penduduk usia tua yaitu usia 65 tahun keatas $P_{(15-64)}$ = Jumlah penduduk usia produktif yaitu usia 15 sampai 64 tahun Sumber : BPS	Variabel Independen	Rasio

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran (Formulasi)	Fungsi variabel	Skala Pengukuran
Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan	Rasio besarnya pengeluaran pemerintah riil untuk sektor pendidikan terhadap total pengeluaran APBD masing-masing provinsi	$s_EDUC = \frac{\text{Exp Pendidikan}}{\text{Pengeluaran Total}} \times 100$ Dimana s_EDUC Adalah proporsi pengeluaran bidang pendidikan terhadap total pengeluaran APBD <i>Sumber : Kemenkeu</i>	Variabel Independen	Rasio
Pengeluaran Pemerintah untuk Kesehatan	Rasio besarnya pengeluaran pemerintah riil untuk sektor kesehatan dengan besarnya PDRB Riil	$s_HEALT = \frac{\text{Exp Kesehatan}}{\text{Pengeluaran Total}} \times 100$ Dimana s_HEAL = Proporsi pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan terhadap total APBD provinsi <i>Sumber : Kemenkeu</i>	Variabel Independen	Rasio

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran (Formulasi)	Fungsi variabel	Skala Pengukuran
Dami kebijakan Perhitungan IPM	yaitu periode waktu dimana terjadi penggunaan metode lama dan metode baru dalam perhitungan IPM	0 = untuk perhitungan dengan metode lama yaitu periode 2007-2013 1 = untuk perhitungan dengan metode baru yaitu periode 2014-2016	Variabel Independen	Nominal
Dami krisis global 2008	yaitu periode waktu dimana terjadi krisis global pada tahun 2008	0 = untuk periode selain tahun 2008 1 = untuk periode tahun 2008	Variabel Independen	Nominal

3.3. Jenis dan Sumber Data

Seluruh data yang digunakan sebagai materi untuk pengolahan model yang penelitian ini merupakan data-data sekunder yang disusun dalam bentuk data panel (*pooled data*). Data sekunder ini diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library researcy*) yang berasal dari berbagai instansi yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), United National Development Project (UNDP), Bank Indonesia, Kementrian Pertanian.

Sebagian besar data penelitian ini diperoleh dari laporan-laporan Badan Pusat Statistik untuk sejumlah periodeik diantaranya Statistik Indonesia, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi-Provinsi di Indonesia, Proyeksi Penduduk Indonesia Per Provinsi, Statistik Kesejahteraan Rakyat dan Statistik Sosial Ekonomi .

Periode waktu penelitian ini difokuskan pada periode 10 tahun yaitu 2007-2016. Adapun unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada tingkat provinsi di Indonesia yaitu sebanyak 33 provinsi. Satu provinsi yaitu Kalimantan Utara tidak dimasukkan dalam penelitian karena pemekaran provinsi ini relatif baru sehingga ketersediaan datanya baru dimulai pada tahun 2013

3.4. Validiasi Data : Masalah Statistik Dalam Data

Penelitian ini dilakukan dilakukan dengan dua tahapan. Pada tahap pertama akan terlebih dahulu dilakukan perhitungan indeks ketahanan pangan (*food*

security) untuk 33 provinsi di Indonesia selama periode 2007 - 2016 dengan terlebih dahulu menggunakan *Comparative Performance Index (CPI)* dari ketahanan pangan (*food security*) yang terdiri dari pilar ketersediaan (*Availability*), Keterjangkauan (*Access*), Stabilitas (*Stability*) dan Pemanfaatan (*Utilization*).

Pada tahap kedua akan dilakukan pengujian dan analisis dari pengaruh ketahanan pangan (*food security*) dengan empat dimensi pengukurannya serta variabel lainnya yaitu rasio ketergantungan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dampak kebijakan metode perhitungan IPM serta dampak krisis global tahun 2008 terhadap pembangunan manusia dengan menggunakan model regresi panel selama periode 2007-2016. Untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian ini dibutuhkan data-data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.. Data *cross section* yang digunakan adalah data provinsi di Indonesia yaitu sebanyak 33 provinsi dan data *time series* yang digunakan adalah data tahunan dari tahun 2007-2016. Baltaghi (2008) menyatakan bahwa untuk model data panel memiliki beberapa keunggulan yaitu :

1. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu
2. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks.
3. Data panel mendasarkan diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.

4. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, dan kolinieritas (multikolinearitas) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien
5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
6. Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Dengan keunggulan tersebut maka implikasi pada tidak harus dilakukannya pengujian asumsi klasik dalam model data panel (Verbeek, 2004; Gujarati, 2006; Widarjono (2007).

3.5. Model Estimasi

3.5.1. Indeks Ketahanan Pangan (*Food Security Index*)

Perhitungan Indeks ketahanan pangan (*food security index*) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut (Nurheni & Guruh, 2014)

1. Identifikasikan variabel-variabel yang akan digunakan dalam perhitungan indeks ketahanan pangan dan tentukan apakah hubungannya dengan ketahanan pangan bersifat positif atau negatif. Dari indikator pengukuran yang dibuat oleh FAO hanya sebanyak 13 indikator yang digunakan dalam penelitian ini seperti ditunjukkan tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Hubungan Variabel-Variabel Pengukuran Ketahanan Pangan

No	Variabel	Dimensi	Arah Hubungan
1	Rata-rata kecukupan pasokan energi makanan (kalori/kapita)	Availability	Positif
2	Rata-rata nilai produksi pangan (produksi/kapita)	Availability	Positif
3	Prosentase pasokan energi yang berasal dari sereal, akar dan umbi (kalori/kapita)	Availability	Positif
4	Rata-rata pasokan protein (gr/cap.hari)	Availability	Positif
5	Rata-rata pasokan protein yang berasal dari hewan (gr/cap/hari)	Availability	Positif
6	Produk Domestik Bruto perkapita yang mencerminkan daya beli	Access	Positif
7	Indeks Harga pangan (%)	Access	Negatif
8	Prevalensi kekurangan gizi (%) yang diukur dengan rata-rata konsumsi kalori/kapita perprovinsi terhadap konsumsi kalori/kapita nasional	Access	Positif
9	Prosentasi pengeluaran untuk makanan masing-masing provinsi	Access	Negatif
10	Tingkat defisit pangan yang diukur melalui perbedaan antara rata-rata energi yang dibutuhkan dengan konsumsi energi masing-masing provinsi	Access	Negatif
11	Gajolak pangan domestik yaitu standar deviasi inflasi komoditas pangan perbulan dalam tahun tertentu	Stability	Negatif
12	Variabilitas produksi pangan perkapita yang diukur dari standar deviasi produksi makanan perkapita selama periode penelitian di setiap Nprovinsi	Stability	Negatif

No	Variabel	Dimensi	Arah Hubungan
13	Volatilitas pasokan makanan perkapita yang diukur dari standar deviasi konsumsi makanan perkalori/kapita/hari	Stability	Negatif

2. Dengan menggunakan metode *distance to scale*, setiap variabel dirubah dalam bentuk indeks dengan memberikan nilai 100 pada provinsi yang memiliki nilai terbaik untuk setiap indikator dimana

- a. Untuk indikator yang memiliki hubungan positif terhadap ketahanan pangan, maka provinsi dengan nilai tertinggi akan memperoleh nilai indeks 100 sementara untuk provinsi lainnya dengan nilai lebih rendah akan memiliki nilai indeks dibawah 100. Adapun formulasi untuk merubah nilai indeks untuk setiap variabel yang hubungannya positif dengan ketahanan pangan untuk setiap provinsi dinyatakan dengan formulasi

$$\text{Indeks } X_{ij} = \frac{(X_{ij} - \min(X))}{(\max(X) - \min(X))} \times 100 \dots\dots\dots(3.1)$$

Dimana

Indeks X_{ij} = nilai indeks variabel tertentu pada provinsi ke-i tahun ke-j

X_{ij} = nilai dari variabel tertentu pada provinsi ke-i tahun ke-j

$\min(X)$ = nilai maksimum untuk variabel tertentu pada provinsi tertentu pada tahun ke-j

- b. Untuk indikator yang memiliki hubungan negatif terhadap ketahanan pangan, maka provinsi dengan nilai terendah akan memperoleh nilai indeks

100 sementara untuk provinsi lainnya dengan nilai lebih tinggi akan memiliki nilai indeks dibawah 100. Adapun formulasi untuk merubah nilai indeks untuk setiap variabel yang hubungannya negatif dengan ketahanan pangan untuk setiap provinsi dinyatakan dengan formulasi

$$\text{Indeks } X_{ij} = \frac{(X_{ij} - \max(X))}{(\min(X) - \max(X))} \times 100 \dots\dots\dots (3.2)$$

Dimana

Indeks X_{ij} = nilai indeks variabel tertentu pada provinsi ke-i tahun ke-j

X_{ij} = nilai dari variabel tertentu pada provinsi ke-i tahun ke-j

$X_{\min j}$ = nilai minimum untuk variabel tertentu pada provinsi tertentu pada tahun ke-j

3. Menghitung indeks ketahanan pangan untuk setiap dimensi yaitu *avalibility*, *access*, *stability* dan *unitilization* dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Indeks } D_{ij} = \frac{\text{Index } X_{ij}}{n} \dots\dots\dots (3.3)$$

Dimana

D_{ij} = Indeks ketahanan pangan dimensi ke-i tahun ke-j

Indeks X_{ij} = Indeks ketahanan pangan indikator ke-i tahun ke-j

N = Jumlah indikator ketahanan pangan untuk dimensi ketahanan tertentu

4. Menghitung indeks ketahanan pangan secara agregat yang merupakan pengabungan (composite) dari dimensi *avaibility*, *access*, *stability* dan *utilization*. Hasil dari diskusi melalui *FGD* (*Focus Group Discusiion*) dibuat

skenario pembobotan untuk perhitungan indeks *ketahanan pangan* sebagai berikut :

- a. Dimensi *Availability* memiliki bobot 40%
- b. Dimensi *Access* memiliki bobot 35%
- c. Dimensi *Stability* memiliki bobot 25%

Berdasarkan pembobotan diatas maka formulasi untuk menghitung Food Security dinyatakan sebagai berikut :

$$FSI_{ij} = 0,4AVAIL_{ij} + 0,35ACCESS_{ij} + 0,25STABIL_{ij} \dots\dots\dots(3.4)$$

Dimana

FSI_{ij} : Food Security Index (Indeks Ketahanan Pangan) Provinsi ke-
i tahun ke-j

$AVAIL_{ij}$: Indeks keahanan pangan (*food secirity index*) dimensi
availability

$ACCESS_{ij}$: Indeks keahanan pangan (*food secirity index*) dimensi
access provinsi ke-i tahun ke-j

$STABIL_{ij}$: Indeks keahanan pangan (*food secirity index*) dimensi
stability provinsi ke-i tahun ke-j

3.5.2. Model Ekonometrika

Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan regresi panel untuk pembangunan manusia yang dinyatakan dengan persamaan berikut :

$$IPM_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 AVAIL_{it} + \beta_2 ACCESS_{it} + \beta_3 STABIL_{it} + \beta_4 DR_{it} + \beta_5 s_EDUC_{it}$$

$$+ \beta_6 s_HEALT + \beta_7 D_HDI_{ij} + \beta_8 D_2008 + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3.5)$$

Dimana :

IPM_{it}	=	Indeks Pembangunan manusia provinsi ke-i periode ke-t
$AVAIL_{it}$	=	Indeks Ketahanan Pangan dimensi <i>avaibility</i> provinsi ke-i periode ke-t
$ACCESS_{it}$	=	Indeks Ketahanan Pangan dimensi <i>access</i> provinsi ke-i periode ke-t
$STABIL_{it}$	=	Indeks Ketahanan Pangan dimensi <i>stability</i> provinsi ke-i periode ke-t
DR_{it}	=	Angka Ketegantngan provinsi ke-i tahun ke-t
s_EDUC_{it}	=	Proporsi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terhadap total pengeluaran APBD provinsi ke-i tahun ke-t
s_HEALT_{it}	=	Proporsi Pengelauran pemerintah untuk kesehatan terhadap total pengeluaran APBD provinsi ke-i tahun ke-t
D_HDI	=	Dami perubahan perhitungan IPM dari metode lama ke metode baru
D_2008	=	Dami krisis global finansial tahun 2008

3.5.2.1. Metode Estimasi Model Regresi Panel

Di dalam melakukan estimasi persamaan regresi dengan menggunakan regresi panel, terdapat tiga kemungkinan model yang akan digunakan yaitu (Gujarati & Porter, 2009)

1. *Common Effect Model (CEM)*

Model regresi panel dengan CEM merupakan pendekatan yang paling sederhana dengan mengabaikan dimensi cross section dan time series. Model CEM mengasumsikan bahwa intersep masing-masing variabel adalah sama, begitu pula dengan slope koefisien untuk semua unit time series dan cross section. Estimasi model CEM bisa dilakukan dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square*. Pada model CEM, besarnya konstanta (α) sama disetiap individu maupun setiap periode. CEM dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut :

$$y = \alpha + \beta'X_i + \varepsilon \dots\dots\dots (3.6)$$

dimana

y	=	Variabel dependen
β'	=	$(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_k)$ adalah vektor konstanta berukuran $1 \times K$ dengan k adalah banyaknya variabel independen
X_i	=	$(x_{1t}, x_{2t}, x_{3t}, \dots, x_{it})$ menunjukkan vektor observasi pada variabel independen berukuran $1 \times k$
α	=	intersep
ε_{it}	=	komponen error
i	=	Variabel 1,2,3,....., N

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Pendekatan FEM menetapkan adanya kelompok yang spesifik atau berbeda dalam *constant term* dalam model regresinya. Formulasi yang biasa dipakai dalam model mengasumsikan bahwa perbedaan antar unit dapat dilihat dalam

perbedaan *constant term*. *Fixed effect model* mengasumsikan bahwa tidak ada *time specific effects* dan hanya memfokuskan pada *individual specific effects*. FEM dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut :

$$y_{it} = \alpha_i + \beta'X_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(3.7)$$

Indeks i pada intersep (α_i) menunjukkan bahwa intersept dari masing-masing individu berbeda, namun intersep untuk unit time series tetap (konstan)

3. *Random Effect Model (REM)*.

Pendekatan REM melibatkan korelasi antar *error terms* karena berubahnya waktu maupun unit observasi. Model regresi dengan REM dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut

$$y_{it} = \alpha_{it} + \beta'X_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (3.8)$$

Dengan asumsi α_i adalah variabel random dengan rata-rata α_0 maka intersep untuk tiap unit dinyatakan dengan

$$\alpha_i = \alpha_0 + \varepsilon_{i+}, \text{ dimana } i=1,2,3,\dots, N$$

maka REM dapat dinyatakan dengan

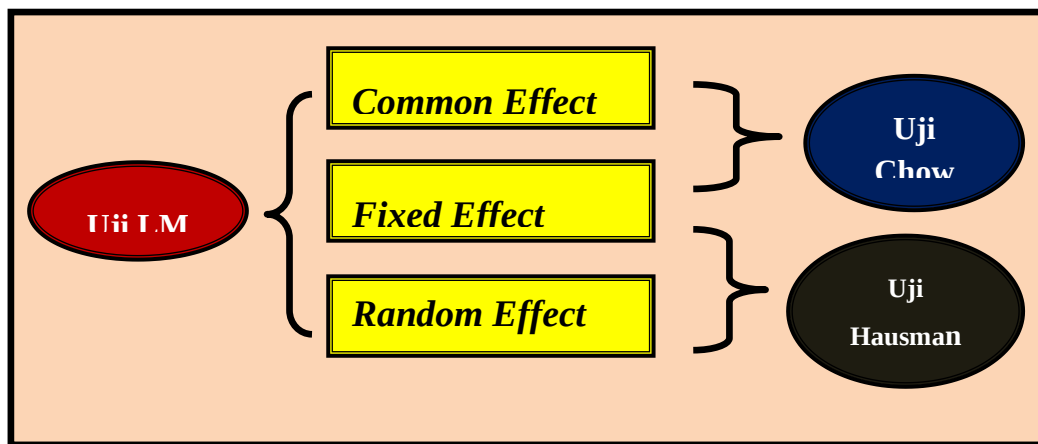
$$y_{it} = \alpha_0 + \beta'X_{it} + \varepsilon_i + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(3.9)$$

$$y_{it} = \alpha_0 + \beta'X_{it} + w_{it} \dots\dots\dots (3.10)$$

suku error gabungan w_{ij} terdiri dari komponen *error cross section* (ε_i) dan komponen *error time series* (ε_{it})

3.5.2.2. Pengujian Pemilihan Model Regresi Panel

Untuk menentukan model panel apa akan digunakan yaitu apakah *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)* atau *Random Effect Model (REM)* harus terlebih dahulu dilakukan pengujian untuk memilih model mana yang cocok. Adapun tahapan pemilihan model dapat dilihat dari bagan gambar 3.1.



Gambar 3.1

Pengujian Pemilihan Model Regresi Panel

1. Pengujian Chow

Pengujian Chow digunakan untuk memilih apakah model yang cocok adalah *Common Effect Model (CEM)* atau *Fixed Effect Model (FEM)*. Adapun tahapan pengujian Chow dilakukan sebagai berikut :

- a. Menentukan hipotesis null (H_0) dan hipotesis alternatif yang ditentukan dengan pernyataan berikut :

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_n = 0$$

artinya tidak ada perbedaan dari α_i atau dengan kata lain model yang cocok adalah CEM

H_1 : Minimal ada satu α_i yang berbeda yang artinya model yang cocok adalah FEM

- b. Menentukan daerah kritis dengan menggunakan tingkat kesalahan (α) sebesar 5% dan menggunakan distribusi F akan diperoleh nilai F tabel
- c. Menentukan nilai F statistik dengan formulasi

$$F_{\text{stat}} = \frac{(\text{RRSS} - \text{URSS}) / (N - 1)}{\text{URSS} / (NT - N - K)} \dots\dots\dots (3.11)$$

Dimana

RRSS = *Restricted Residual Sum Square* model CEM

URSS = *Unrestricted Residual Sum Square* model FEM

N = Jumlah unit *cross section*

T = Jumlah unit *time series*

K = Jumlah parameter yang diestimasi

- d. Pengambilan Keputusan

Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak atau model yang cocok adalah FEM

Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima atau model yang cocok adalah CEM

Atau

Jika p-value dari $F_{\text{statistik}} < 0,05$ maka H_0 ditolak atau model yang cocok adalah FEM

Jika p-value dari $F_{\text{statistik}} > 0,05$ maka H_0 ditolak atau model yang cocok adalah CEM

2. Pengujian Hausman

Pengujian Hausman dilakukan untuk memilih apakah model yang cocok adalah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Adapun tahapan pengujian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

- a. Menentukan hipotesis null (H_0) dan hipotesis alternatif yang ditentukan dengan pernyataan berikut :

H_0 : $\text{Corr}(X_{it}, \varepsilon_{it}) = 0$ yang artinya model yang cocok adalah
REM

H_1 : $\text{Corr}(X_{it}, \varepsilon_{it}) \neq 0$ yang artinya model yang cocok adalah
FEM

- b. Menentukan daerah kritis dengan menggunakan tingkat kesalahan (α) sebesar 5% dan menggunakan distribusi chisquare (χ^2)
- c. Menentukan statistik dengan menggunakan formulasasi

$$W = \left(\hat{\beta}_{\text{FEM}} - \hat{\beta}_{\text{REM}} \right)' \left(\text{var}(\hat{\beta}_{\text{FEM}}) - \text{var}(\hat{\beta}_{\text{REM}}) \right)^{-1} \left(\hat{\beta}_{\text{FEM}} - \hat{\beta}_{\text{REM}} \right) \quad \text{..(3.12)}$$

- d. Pengambilan Keputusan

Jika $w > \chi^2_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak atau model yang cocok adalah FEB

Jika $w < \chi^2_{\text{tabel}}$ maka H_0 diteirma atau model yang cocok adalah FEM

3. Pengujian LM

Pengujian LM digunakan untuk memilih apakah model yang cocok adalah *Common Effect Model* (CEM) atau *Random Effect Model* (FEM). Tahapan pengujian LM dilakukan sebagai berikut :

- a. Menentukan hipotesis null (H_0) dan hipotesis alternatif yang ditentukan dengan pernyataan berikut :

H_0 : $\sigma_i^2 = 0$ yang artinya model yang cocok adalah CEM

H_1 : $\sigma_i^2 \neq 0$ yang artinya model yang cocok adalah REM

- b. Menentukan daerah kritis dengan menggunakan tingkat kesalahan (α) sebesar 5% dan menggunakan distribusi chisquare (χ^2)
- c. Menentukan statistik dengan menggunakan formasilasi

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^N [T\bar{e}_i]^2}{\sum_{i=1}^T \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right] \dots\dots\dots (3.13)$$

- d. Pengambilan Keputusan

Jika $LM > \chi^2_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak atau model yang cocok adalah FEM

Jika $LM < \chi^2_{\text{tabel}}$ maka H_0 diteirma atau model yang cocok adalah REM

3.5.2.3. Pengujian Hipotesis Teori

Evaluasi model berdasarkan kriteria pengujian hipotesis teori dilakukan dengan beberapa pengujianberikut:

1. Koefisien Determinasi (R^2),

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya variasi dari variabel dependen mampu dijelaskan oleh variasi dari variabeal independennya,

sementara variasi yang tidak dapat dijelaskan merupakan variasi dari variabel independen lain yang mempengaruhi variabel dependen tetapi tidak dimasukkan dalam model. Gujarati (2010) menyatakan bahwa nilai *R square* terletak diantara 0 dan 1 dimana :

- Jika nilai R^2 mendekati angka 1, maka model regresi dapat menjelaskan dengan baik oleh variabel independennya
- Jika nilai R^2 mendekati angka 0 maka model regresi tersebut tidak dapat dijelaskan oleh variabel independennya

2. Uji Statistik F

Uji F ini digunakan untuk menguji apakah paling sedikit terdapat satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Adapun langkah-langkah pengujiannya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Menentukan hipotesis null dan hipotesis alternatif (H_0 dan H_1)

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_n = 0$$

yang artinya seluruh variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependennya

$$H_1 : \text{Minimal ada satu } \beta_k \neq 0, k = 1, 2, \dots, K$$

Yang artinya paling tidak terdapat satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya

- b. Menentukan nilai kritis atau nilai tabel dengan menggunakan alpha 5% diperoleh F tabel yaitu

$$F_{\alpha, df (k-1), (n-k)}$$

Dimana

α = Tingkat kesalahan yaitu 5%

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah seluruh observasi

df = Derajat kebebasan

- c. Menentukan nilai F statistik dengan menggunakan formulasi :

$$F_{\text{stat}} = \frac{\text{Mean Square Regression}}{\text{Mean Square Total}} \dots\dots\dots (3.14)$$

- d. Pengambilan Keputusan

Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak

Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima

Atau

Jika p-value dari $F_{\text{statistik}} < 0,05$ maka H_0 ditolak

Jika p-value dari $F_{\text{statistik}} > 0,05$ maka H_0 diterima

3. Uji statistik T

Uji statistik T digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya (pengujian individu). Adapun tahapan pengujian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menentukan hipotesis null dan hipotesis alternatif (H_0 dan H_1)

$$H_0 : \beta_i = 0$$

yang artinya variabel independen ke-i tidak mempengaruhi variabel dependen

$$H_1 : \beta_i \neq 0$$

yang artinya variabel independen ke-i mempengaruhi variabel dependen

- b. Menentukan nilai kritis atau nilai tabel dengan menggunakan alpha 5% diperoleh t tabel yaitu

$$t_{\alpha, df (n-k)}$$

Dimana

α = Tingkat kesalahan yaitu 5%

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah seluruh observasi

df = Derajat kebebasan

- c. Menentukan nilai t statistik dengan menggunakan formulasi :

$$t_{\text{stat}} = \frac{\beta_i}{SE[\beta_i]} \dots\dots\dots(3.15)$$

- d. Pengambilan Keputusan

Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak

Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima

Atau

Jika p-value dari $t_{\text{statistik}} < 0,05$ maka H_0 ditolak

- e. Jika p-value dari $t_{\text{statistik}} > 0,05$ maka H_0 diterima



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Sebelum dilakukan analisis estimasi dari model penelitian terlebih dahulu dilakukan pengamatan terhadap statistik deskriptif dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain digunakan untuk menggambarkan nilai sentral (*central tendency*) dari masing-masing variabel penelitian, melalui statistik deskriptif ini juga dilakukan *screening* terhadap data dari masing-masing variabel apakah terbebas dari masalah data-data yang ekstrim (*outlier*)

Objek penelitian ini menggunakan 33 provinsi yang ada di Indonesia dimana 1 provinsi harus dihilangkan yaitu

Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari provinsi Kalimantan Timur dan resmi disahkan menjadi provinsi berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2012. Dihilangkan provinsi Kalimantan Utara karena banyaknya data-data yang tidak tersedia sebagai akibat periode penelitian menggunakan rentang waktu antara tahun 2007-2016.

4.1.1. Statistik Deskriptif Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) mengalami perubahan perhitungan. Pada periode sebelum 2014, perhitungan IPM

menggunakan 4 indikator pengukuran yaitu Angka Harap Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Rata-rata pengeluaran perkapita untuk 27 komoditas. Hasil pengolahan statistik deskriptif untuk variabel IPM provinsi di Indonesia selama periode 2007-2013 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Statistik Deskriptif IPM Provinsi di Indonesia 2007-2013

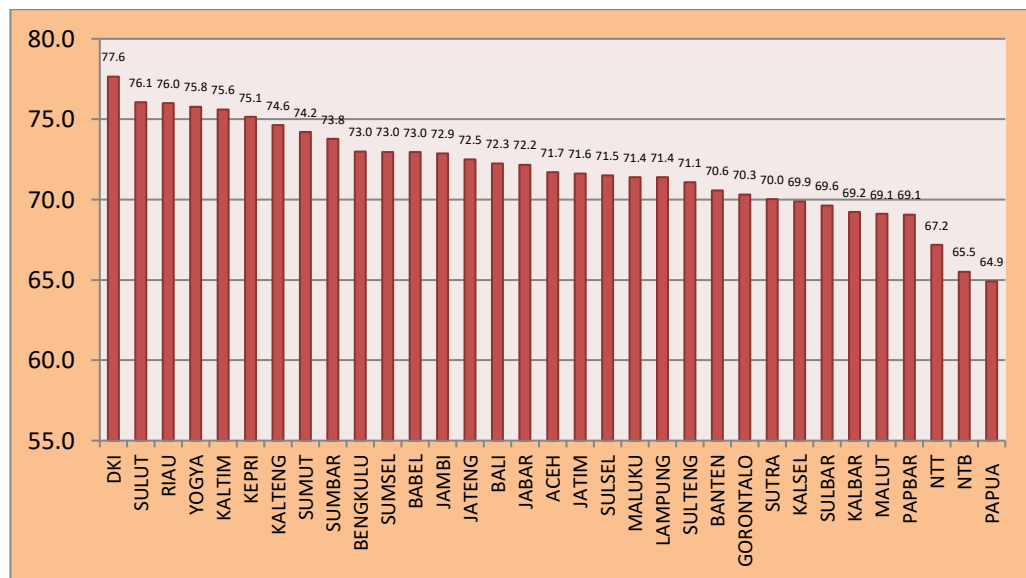
Tahun	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
2007	33	70,312	3,070	63,410	76,590
2008	33	70,879	3,050	64,000	77,030
2009	33	71,396	3,015	64,530	77,360
2010	33	71,857	2,975	64,940	77,600
2011	33	72,371	2,947	65,360	77,970
2012	33	72,873	2,893	65,860	78,330
2013	33	73,369	2,839	66,250	78,590

Sumber : data diolah

Informasi dari tabel menunjukkan selama periode 2007-2013 terjadi peningkatan rata-rata IPM seluruh provinsi di Indonesia yaitu dari rata-rata sebesar 70,312% pada tahun 2007 menjadi 73,369% pada tahun 2013. Nilai standar deviasi yang mengalami penurunan dari tahun 2007 sampai 2013 menunjukkan bahwa variasi nilai IPM antara satu provinsi dengan provinsi lainnya nilainya semakin homogen (variasinya semakin mengecil).

Jika dilihat dari nilai IPM menurut provinsi selama periode 2007-2013, lima provinsi dengan IPM tertinggi masing-masing adalah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kalimantan Timur. Sebaliknya lima provinsi dengan IPM terendah masing-masing adalah Papua, Nusa Tenggara Barat,

Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Maluku Utara. Gambar 4.1. berikut menunjukkan rata-rata nilai IPM untuk provinsi di Indonesia selama periode 2007-2013.

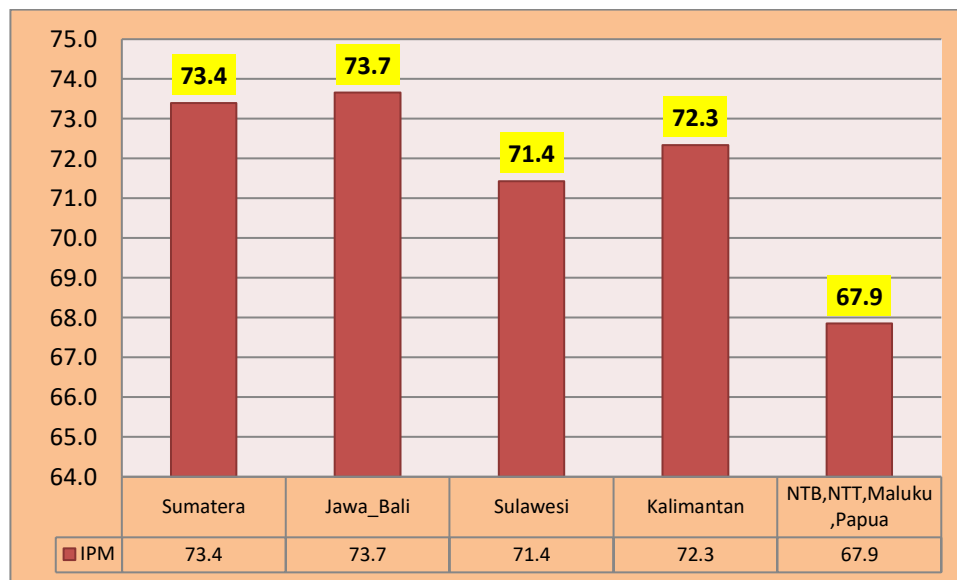


Gambar 4.1

Rata-rata IPM Provinsi di Indonesia tahun 2007-2013

Pembangunan manusia jika dilihat menurut wilayah menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan di Indonesia dimana wilayah Barat (Sumatera, Jawa+Bali) memiliki nilai rata-rata IPM yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah Indonesia tengah (Sulawesi+Kalimantan) dan wilayah Indonesia Timur (Maluku, Papua dan Nusa Tenggara). Selama periode 2007-2013, yang menempati peringkat pertama dalam hal pencapaian IPM adalah Pulau Jawa dengan nilai rata-rata IPM sebesar 73,7%, disusul pulau Sumatera dengan nilai rata-rata IPM sebesar 73,4%. Pulau Kalimantan menempati peringkat ketiga dengan nilai rata-rata IPM sebesar 72,3%, disusul pulau Sulawesi dengan nilai rata-rata IPM sebesar 71,4% dan wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua memiliki nilai rata-rata IPM yang

paling rendah yaitu sebesar 67,9%. Tabel 4.2.menunjukkan rata-rata IPM tahun 2007-2013 menurut pulau.



Gambar 4.2

Rata-rata IPM Menurut Wilayah di Indonesia tahun 2007-2013

Pembangunan manusia antar provinsi di Indonesia jika dilihat dari status nilai IPM berdasarkan ketentuan UNDP dapat dilihat pada gambar 4.3. Informasi gambar menunjukkan hampir seluruh nilai IPM provinsi di Indonesia berada pada kondisi menengah keatas yaitu memiliki indeks IPM pada kisaran angka antara 66% sampai dengan kurang dari 80%. Terdapat 2 provinsi yang memiliki status IPM menengah bawah yaitu memiliki nilai IPM pada kisaran angka 50% sampai dengan kurang dari 66%. Kedua provinsi yang dimaksud adalah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan provinsi Papua dengan nilai IPM masing-masing 65,5% dan 64,9%.

PETA IPM PROVINSI DI INDONESIA 2007-2013



Sumber : da ta diolah

Gambar 4.3

Status IPM Provinsi di Indonesia Periode 2007-2013

Perubahan metode perhitungan IPM mulai terjadi pada tahun 2014 yaitu dilakukan terhadap 2 variabel pengukuran IPM. Variabel pertama adalah Angka Melek Huruf (AMH) yang dirasakan sudah tidak relevan dikarenakan variasi nilai antara satu provinsi dengan provinsi lainnya sudah tidak terlalu signifikan dengan angka hampir mencapai 100% untuk setiap provinsi. Indikator AMH digantikan dengan variabel baru yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai salah satu proksi dari *knowledge*. Indikator kedua yang mengalami perubahan adalah rata-rata pengeluaran perkapita dimana sebelum tahun 2014 adalah pengeluaran untuk 27 komoditas menjadi rata-rata pengeluaran perkapita untuk 96 komoditas. Hasil pengolahan statistik deskriptif untuk rata-rata nilai IPM provinsi di Indonesia selama periode 2014-2016 ditunjukkan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Statistik Deskriptif IPM Provinsi di Indonesia 2014 - 2016

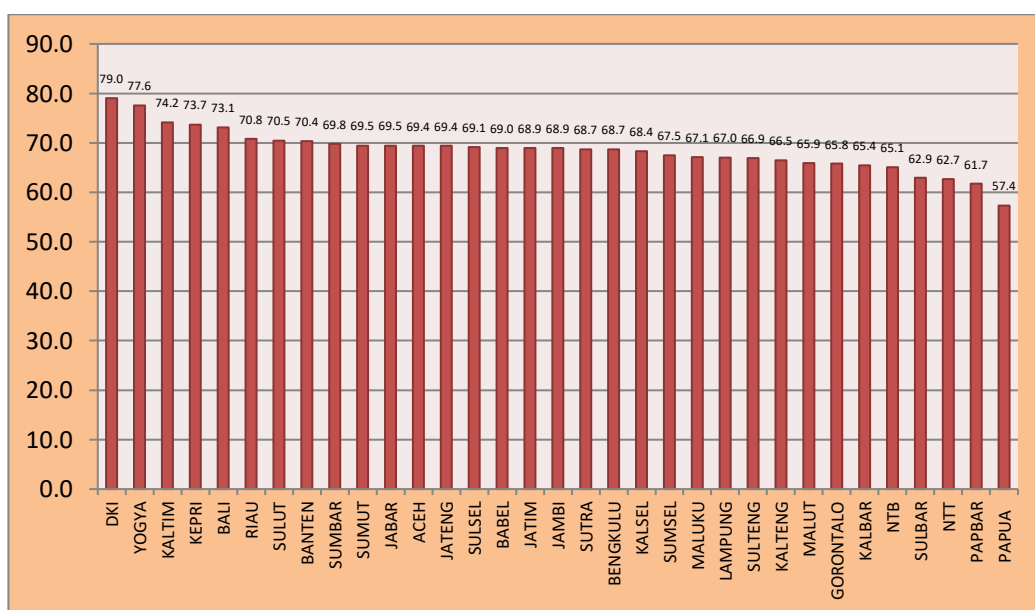
Tahun	Std.				
	N	Mean	Deviation	Minimum	Maximum
2014	33	67,961	4,227	56,750	78,390
2015	33	68,570	4,229	57,250	78,990
2016	33	68,952	4,338	58,050	79,600

Sumber : data diolah

Perubahan metode perhitungan IPM yang baru berdampak signifikan pada nilai IPM yang dihasilkan. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata IPM provinsi di Indonesia yang mengalami penurunan pada periode 2014-2016 dibandingkan dengan nilai rata-rata IPM pada periode 2007-2013. Nilai standar deviasi yang lebih besar pada periode 2014-2016 dibandingkan periode 2007-2013 menunjukkan bahwa adanya perubahan pengukuran variabel dari Angka Melek Huruf (AMH)

menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS) serta pengeluaran perkapita dari 27 komoditas menjadi 96 komoditas semakin memperlihatkan kesenjangan (*gap*) antara satu provinsi dengan provinsi yang lain.

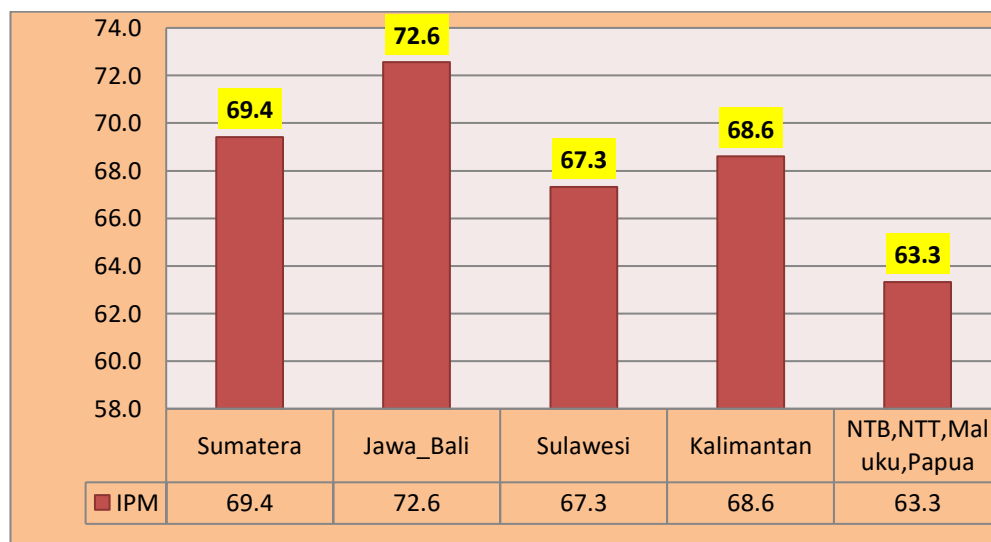
Lima besar provinsi dengan IPM tertinggi selama periode 2014-2016 masing-masing DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Bali. Disisi lain provinsi-provinsi yang menempati peringkat IPM lima terendah masing-masing Papua, Papua Barat, NTT, Sulawesi Barat dan NTB. Jika dibandingkan dengan peringkat IPM pada periode 2007-2013 secara keseluruhan tidak terdapat perubahan yang signifikan untuk peringkat IPM dimana provinsi-provinsi yang berada di wilayah Barat Indonesia mendominasi peringkat tertinggi IPM provinsi di Indonesia dan sebaliknya provinsi-provinsi yang berada di wilayah Indonesia Timur banyak menempati peringkat terendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.4.



Gambar 4.4

Rata-rata IPM Provinsi di Indonesia tahun 2014 sampai 2016

Jika dilihat menurut wilayah, pulau Jawa memiliki nilai rata-rata IPM yang paling tinggi pada periode 2014-2016 yaitu sebesar 72,6% disusul wilayah Sumatera dengan nilai rata-rata IPM sebesar 69,4%. Pulau Kalimantan menempati peringkat ketiga dengan nilai rata-rata IPM sebesar 68,6% disusul dengan wilayah Sulawesi dengan rata-rata IPM sebesar 67,3% dan yang paling rendah adalah wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan nilai rata-rata IPM sebesar 63,3%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.5.



Sumber : data diolah

Gambar 4.5

Rata-rata IPM Menurut Wilayah di Indonesia tahun 2014-2016

Perubahan metode perhitungan IPM memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap status IPM setiap provinsi menurut tingkatannya. Jika pada metode sebelumnya hanya ada 2 provinsi yang memiliki status IPM pada kondisi menengah bawah (indeks 50% sampai < 66%), dengan adanya metode baru perhitungan IPM beberapa provinsi mengalami penurunan status IPM dari menengah atas menjadi menengah bawah. Provinsi yang dimaksud adalah NTT,

PETA IPM PROVINSI DI INDONESIA 2014-2016



Sumber : data diolah

Gambar 4.6

Status IPM Provinsi di Indonesia Periode 2014-2016

Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat mengikuti status NTT dan Papua yang memang sebelumnya sudah berada pada status IPM menengah bawah. Untuk lebih jelasnya, status IPM provinsi di Indonesia setelah adanya perubahan perhitungan IPM dapat dilihat pada gambar 4.6.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa metode perhitungan IPM yang baru dengan memasukkan indikator-indikator yang lebih baik berdampak pada penurunan nilai IPM pada seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Hasil dari IPM yang diperoleh baik sebelum dan sesudah periode perubahan metode perhitungan menunjukkan terjadinya ketimpangan pembangunan manusia di Indonesia dimana wilayah barat pembangunannya relative lebih cepat dibandingkan dengan wilayah tengah dan timur.

4.1.2. Statistik Deskriptif Variabel Ketahanan Pangan Provinsi di Indonesia

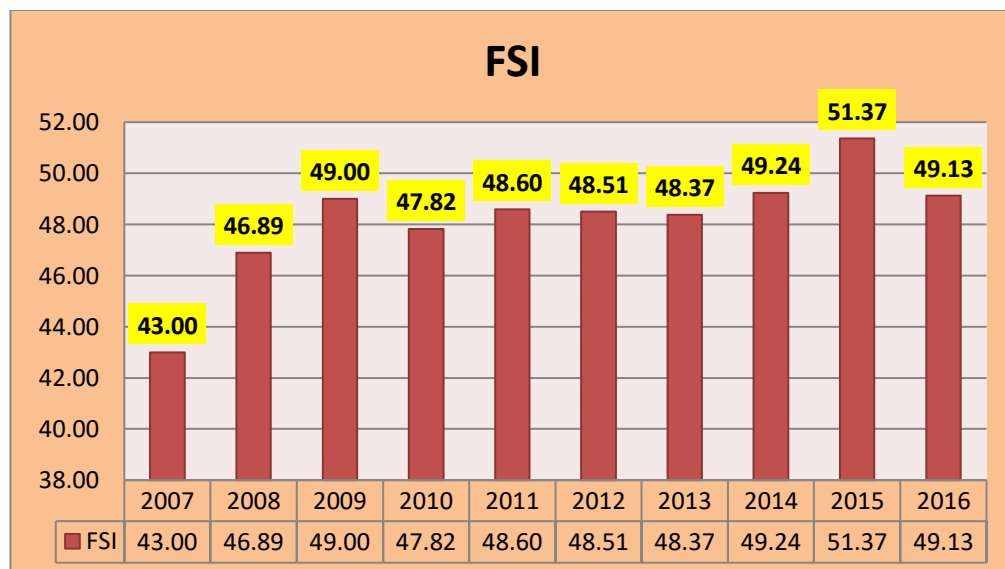
Hasil pengolahan statistik deskriptif untuk variabel ketahanan P]pangan Provinsi di Indonesia dilakukan dengan menggunakan tiga dimensi dengan masing-masing pembobotan untuk dimensi *availability* bobot 40%, dimensi *access* dengan bobot 35%, dan dimensi *stability* dengan bobot 25% ditunjukkan dengan tabel 4.3.

Perkembangan rata-rata indeks ketahanan pangan (*food security*) untuk 33 provinsi di Indonesia secara keseluruhan mengalami trend yang meningkat walaupun jika dilihat perubahannya dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi naik turun. Gambar 4.7 menjelaskan perkembangan indeks ketahanan antar provinsi di Indonesia selama periode 2007-2016.

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif Indeks Ketahanan Pangan
Provinsi di Indonesia Tahun 2007– 2016

Tahun	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
2007	33	43.003	8.819	27.950	72.080
2008	33	46.892	8.419	29.430	68.370
2009	33	49.001	8.078	28.800	61.850
2010	33	47.817	9.531	23.510	65.190
2011	33	48.595	8.856	26.320	67.070
2012	33	48.510	8.833	27.770	68.360
2013	33	48.373	8.255	29.890	63.790
2014	33	49.236	9.210	30.580	67.660
2015	33	51.371	9.144	26.130	67.100
2016	33	49.129	8.352	28.710	67.120

Sumber : data diolah



Sumber : data diolah

Gambar 4.7
Rata-rata Ketahanan Pangan Provinsi di Indonesia tahun 2007 – 2016

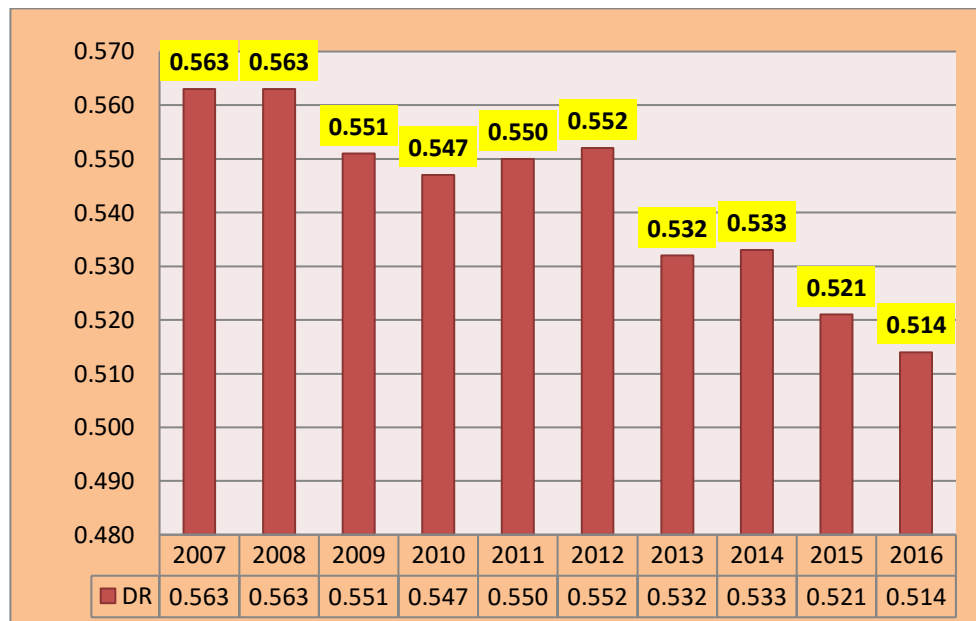
4.1.3. Statistik Deskriptif Variabel Rasio Ketergantungan Provinsi di Indonesia

Statistik deskriptif untuk variabel rasio ketergantungan untuk 33 provinsi di Indonesia ditunjukkan dengan tabel 4.4 dan gambar 4.8. Informasi dari tabel menunjukkan bahwa selama periode 2007-2016 secara keseluruhan terjadi perbaikan kinerja dari rasio ketergantungan seperti ditunjukkan dengan nilai rata-rata dari rasio ketergantungan yang memiliki tren menurun selama periode 2007-2016. Menurunnya nilai rasio ketergantungan ini menunjukkan bahwa rata-rata beban yang ditanggung seorang penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Standar deviasi yang juga relatif memiliki tren yang menurun menunjukkan bahwa kesenjangan rasio ketergantungan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya di Indonesia relatif semakin kecil antara satu provinsi dengan provinsi yang lain.

Tabel 4.4
Statistik Deskriptif Rasio Ketergantungan
Provinsi di Indonesia 2007-2016

Tahun	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
2007	33	0,563	0,076	0,383	0,748
2008	33	0,563	0,075	0,400	0,765
2009	33	0,551	0,070	0,399	0,743
2010	33	0,547	0,067	0,376	0,732
2011	33	0,550	0,072	0,380	0,759
2012	33	0,552	0,073	0,375	0,745
2013	33	0,532	0,064	0,393	0,726
2014	33	0,533	0,065	0,394	0,731
2015	33	0,521	0,062	0,395	0,709
2016	33	0,514	0,058	0,395	0,695

Sumber : data diolah



Sumber : data diolah

Gambar 4.8

**Statistik Deskriptif Rata-rata Rasio Ketergantungan
Provinsi di Indonesia 2007-2016**

4.1.4. Statistik Deskriptif Variabel Proporsi Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan Antar Provinsi di Indonesia

Statistik deskriptif variabel proporsi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan untuk 33 provinsi di Indonesia ditunjukkan dengan tabel 4.5 dan gambar 4.9 Informasi dari tabel menunjukkan bahwa selama periode 2007-2016 nilai rata-rata proporsi pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan untuk 33 provinsi di Indonesia memiliki pola parabola maksimum. Untuk periode 2007-2011 rata-rata proporsi pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan mengalami tren yang meningkat dengan kisaran nilai antara 21,171% sampai dengan 29,091%. Nilai standar deviasi yang berada pada kisaran angka 5,704% sampai dengan 7,081% menunjukkan adanya gap yang cukup besar antara proporsi pengeluaran

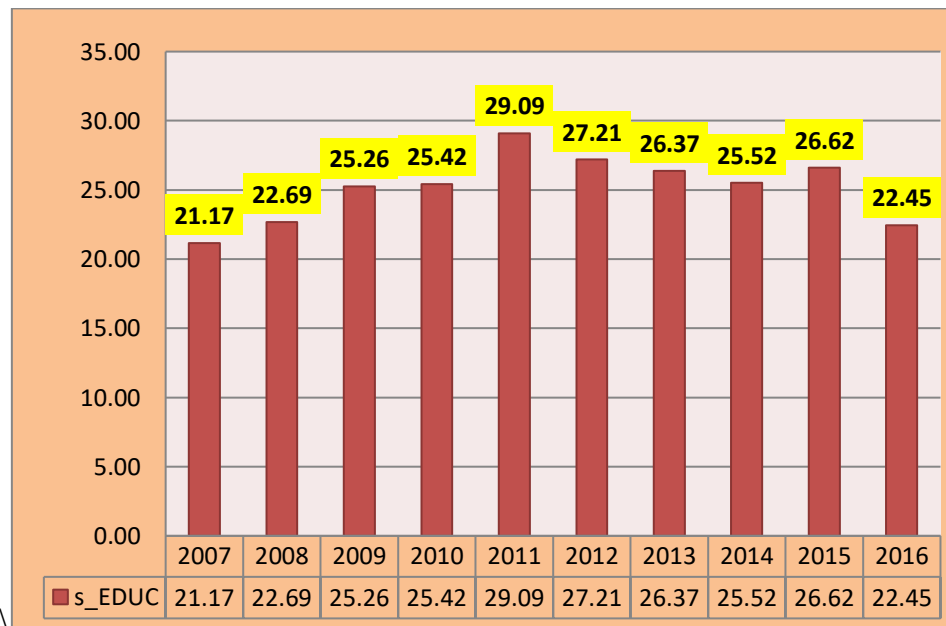
pemerintah di bidang pendidikan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain cukup heterogen.

Periode 2012-2016 ditandai dengan terjadinya tren yang menurun untuk proporsi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan untuk rata-rata provinsi yang ada di Indonesia. Pada tahun 2012, rata-rata proporsi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan untuk seluruh provinsi di Indonesia sebesar 27,21% dan nilainya pada tahun 2016 hanya sebesar 22,466%. Nilai standar deviasi yang berada pada kisaran angka antara 5,412% sampai 7,08% menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antara proporsi pengeluaran bidang pendidikan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain.

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif Proporsi Pengeluaran Bidang Pendidikan
Antar Provinsi di Indonesia 2007-2016

Tahun	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
2007	33	21,171	6,695	10,33	37,35
2008	33	22,689	5,704	11,72	33,78
2009	33	25,263	6,726	12,14	38,33
2010	33	25,420	5,967	12,96	37,04
2011	33	29,091	7,081	14,17	44,07
2012	33	27,210	6,616	12,41	39,93
2013	33	26,372	5,976	12,34	37,39
2014	33	25,516	5,966	11,52	35,73
2015	33	26,619	7,080	10,58	42,84
2016	33	22,446	5,412	11,22	33,72

Sumber : data diolah



Gambar 4.9
Statistik Deskriptif Proporsi Pengeluaran Bidang Pendidikan
Antar Provinsi di Indonesia 2007-2016

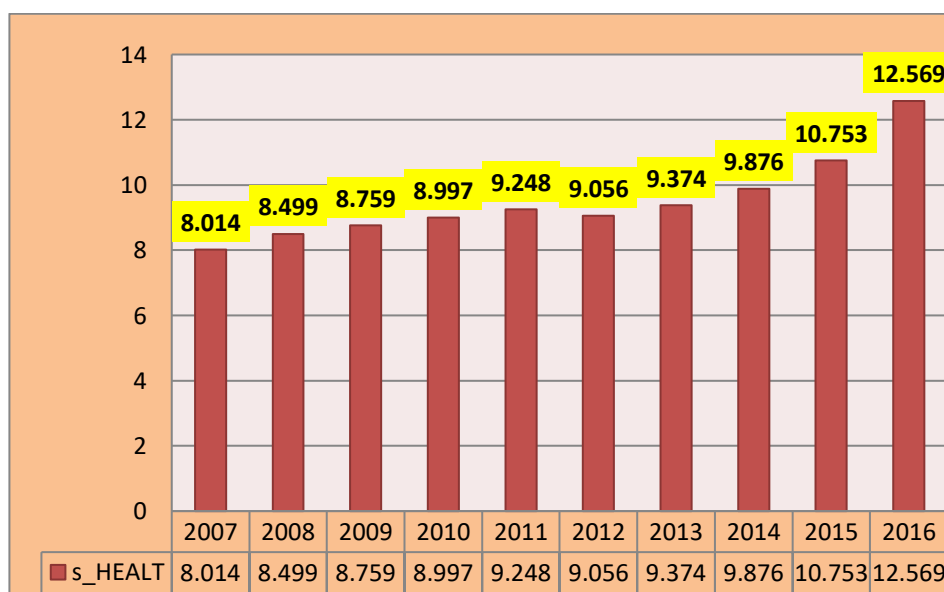
4.1.5. Statistik Deskriptif Variabel Proporsi Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan Antar Provinsi di Indonesia

Proporsi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan untuk 33 provinsi di Indonesia memiliki tren yang semakin meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2007-2016. Kondisi ini dapat dilihat dari nilai rata-rata dari proporsi pengeluaran pemerintah bidang kesehtandimana pada tahun 2007 nilainya sebesar 8,014% dan meningkat menjadi 12,569% pada tahun 2016. Nilai standar deviasi dengan tren yang semakin membesar menunjukkan bahwa variasi proporsi pengeluaran bidang kesehatan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain semakin besar. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan nilai rata-rata proporsi pengeluaran bidang pendidikan untuk 33 provinsi di Indonesia dapat dilihat pada tabel 4.6 dan gambar 4.10

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif Proporsi Pengeluaran Bidang Kesehatan
Antar Provinsi di Indonesia 2007-2016

Tahun	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
2007	33	8,014	1,501	4,50	10,95
2008	33	8,499	1,317	5,29	11,40
2009	33	8,759	1,397	5,77	11,04
2010	33	8,997	1,362	6,23	11,61
2011	33	9,248	1,371	6,40	13,27
2012	33	9,056	1,361	6,73	12,06
2013	33	9,374	1,529	6,57	12,69
2014	33	9,876	1,777	6,96	14,49
2015	33	10,753	1,943	7,13	15,26
2016	33	12,569	2,773	8,96	23,43

Sumber : data diolah



Sumber : data diolah

Gambar 4.10
Statistik Deskriptif Proporsi Pengeluaran Bidang Kesehatan
Antar Provinsi di Indonesia 2007-2016

4.2. Pemetaan Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia

Hasil dari pengolahan data untuk pembuatan angka indeks ketahanan pangan antar provinsi di Indonesia yang terdiri dari 3 dimensi yaitu *Availability*, *Access* dan *Stability* untuk periode 2007-2011 dapat dilihat pada tabel 4.7 dan tabel 4.8 untuk periode 2012-2016. Hasil pengolahan untuk indeks ketahanan pangan periode 2007-2011 menunjukkan secara keseluruhan indeks ketahanan pangan dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia berada pada tingkatan kuartil 1 (sangat rendah) dan kuartal 2 (rendah)

Jika dilihat dari perkembangan indeks ketahanan pangan selama periode 2007-2011 menunjukkan adanya perbaikan indeks ketahanan pangan antar provinsi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari status dari indeks ketahanan pangan setiap provinsi yang mengalami perubahan yaitu kuartil 1 (indeks ketahanan pangan sangat rendah dengan skor indeks ketahanan pangan antara 24% - 41,5%) menjadi berada pada kuartil 2 (indeks ketahanan pangan rendah yaitu dengan skor indeks ketahanan pangan antara 41,6% - 57%.)

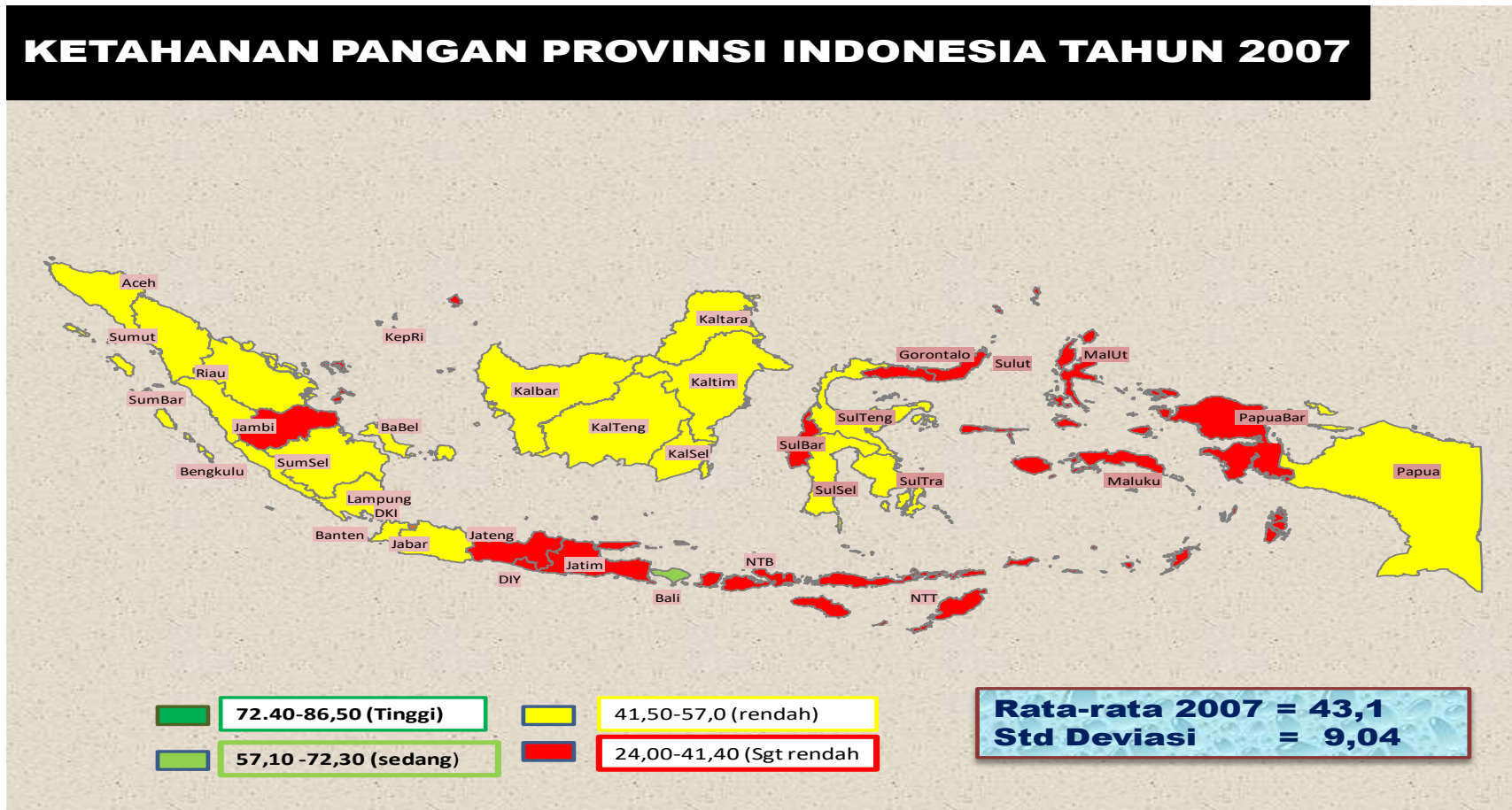
Faktor yang menjadi penyebab utama rendahnya indeks ketahanan pangan antar provinsi di Indonesia adalah dimensi dari *access* disusul dimensi *availability*. Untuk dimensi *stability*, nilai indeks yang dimiliki setiap provinsi yang ada di Indonesia sebagian besar berada pada kuartil III (tingkatan ketahanan pangan sedang dengan skor indeks ketahanan pangan berada pada rentang nilai antara 57,1% - 72,3%).

Pemetaan ketahanan pangan antar provinsi di Indonesia periode 2007-2016 baik secara provinsi maupun rata-rata dapat dilihat pada gambar 4.11 sampai 4.16

Tabel 4.7
Indeks Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2007 – 2011

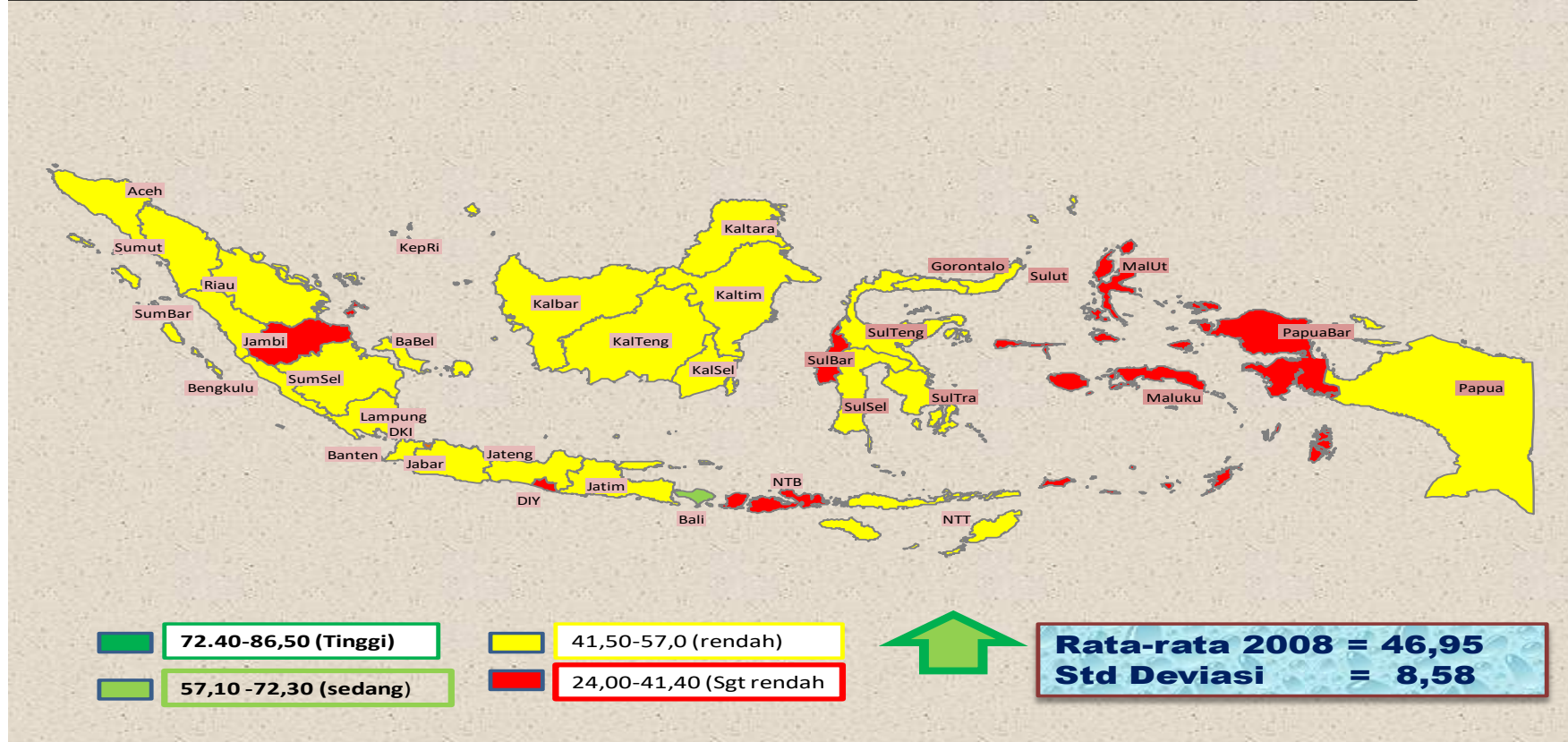
No	Provinsi	TAHUN 2007				TAHUN 2008				TAHUN 2009				TAHUN 2010				TAHUN 2011				Rata-rata Tahun2007-2011			
		AVAIL	ACCESS	STABIL	FS	AVAIL	ACCESS	STABIL	FS	AVAIL	ACCESS	STABIL	FS	AVAIL	ACCESS	STABIL	FS	AVAIL	ACCESS	STABIL	FS	AVAIL	ACCESS	STABIL	FS
1	ACEH	57.95	27.73	67.81	49.84	48.67	38.87	67.81	50.02	53.80	38.24	67.81	51.85	57.60	45.72	67.81	55.99	54.78	27.28	67.81	48.41	54.56	35.57	67.81	51.22
2	SUMUT	47.02	29.21	64.46	45.15	51.44	39.26	64.46	50.43	48.71	40.56	64.46	49.79	51.87	44.29	64.46	52.37	58.49	36.92	64.46	52.43	51.51	38.05	64.46	50.03
3	SUMBAR	46.49	21.22	62.98	41.77	52.03	40.42	62.98	50.70	58.09	50.04	62.98	56.49	59.48	49.19	62.98	56.75	66.14	39.02	62.98	55.86	56.45	39.98	62.98	52.32
4	RIAU	48.89	40.76	63.16	49.61	46.96	57.01	63.16	54.53	49.26	48.39	63.16		37.46	43.86	63.16	46.12	57.15	45.76	63.16	54.67	47.94	47.16	63.16	51.47
5	JAMBI	38.84	28.62	11.37	28.39	44.04	33.41	11.37	32.15	42.77	41.73	11.37	34.55	37.80	32.31	11.37	29.27	50.31	33.73	11.37	34.77	42.75	33.96	11.37	31.83
6	SUMSEL	50.13	29.28	69.71	47.73	53.65	36.99	69.71	51.83	54.70	45.25	69.71	55.14	56.81	41.54	69.71	54.69	62.51	34.31	69.71	54.44	55.56	37.47	69.71	52.77
7	BENGKULU	43.78	31.20	65.77	44.87	43.56	36.40	65.77	46.61	47.68	42.09	65.77	50.25	48.51	38.70	65.77	49.39	52.81	33.96	65.77	49.45	47.27	36.47	65.77	48.11
8	LAMPUNG	46.13	43.60	68.15	50.75	54.44	39.72	68.15	52.72	49.36	39.87	68.15	50.74	50.55	42.29	68.15	52.06	56.40	34.05	68.15	51.52	51.38	39.91	68.15	51.56
9	KEP. BABEL	47.50	39.00	50.78	45.35	46.00	36.32	50.78	43.81	36.17	37.84	50.78	40.41	46.89	40.65	50.78	45.68	37.62	16.24	50.78	33.43	42.84	34.01	50.78	41.73
10	KEPRI	30.35	41.08	59.54	41.40	50.90	59.21	59.54	55.97	63.35	54.15	59.54	59.18	51.78	55.40	59.54	54.99	46.17	36.80	59.54	46.23	48.51	49.33	59.54	51.55
11	DKI	33.21		67.63	47.06	30.99	59.59	67.63	50.16	49.35	59.31	67.63	57.41	34.97	55.16	67.63	50.20	44.78	53.34	67.63	53.49	38.66	55.12	67.63	51.66
12	JABAR	40.83	31.03	78.14	46.73	44.99	48.45	78.14	54.49	48.15	46.50	78.14	55.07	41.28	38.31	78.14	49.46	52.50	41.93	78.14	55.21	45.55	41.24	78.14	52.19
13	JATENG	25.73	24.78	80.37	39.06	30.73	38.81	80.37	45.97	33.09	36.52	80.37	46.11	21.20	24.30	80.37	37.08	34.40	30.49	80.37	44.52	29.03	30.98	80.37	42.55
14	DIY	23.01	26.12	66.51	34.97	12.65	26.15	66.51	30.84	30.89	36.43	66.51	41.73	24.70	31.99	66.51	37.71	28.87	24.78	66.51	37.25	24.22	29.09	66.51	36.50
15	JATIM	30.00	26.44	71.40	39.11	33.55	35.46	71.40	43.68	37.51	36.87	71.40	45.76	27.74	25.22	71.40	37.77	38.88	25.03	71.40	42.16	33.54	29.80	71.40	41.70
16	BANTEN	45.56	39.91	58.70	46.87	44.31	41.54	58.70	46.94	50.52	51.87	58.70	53.04	43.71	49.85	58.70	49.61	51.51	45.94	58.70	51.36	47.12	45.82	58.70	49.56
17	BAI	76.85	72.07	64.03	71.97	73.87	66.57	64.03	68.86	54.87	68.00	64.03	61.76	67.41	64.46	64.03	65.53	71.60	59.26	64.03	65.39	68.92	66.07	64.03	66.70
18	NTB	34.71	22.85	60.40	36.98	40.48	27.86	60.40	41.04	45.45	38.74	60.40	46.84	54.95	46.11	60.40	53.22	64.41	39.99	60.40	54.86	48.00	35.11	60.40	46.59
19	NTT	31.17	10.67	49.92	28.69	46.56	38.02	49.92	44.41	50.29	30.94	49.92	43.42	49.60	19.01	49.92	38.97	54.09	41.65	49.92	48.70	46.34	28.06	49.92	40.84
20	KALBAR	49.96	27.04	81.85	49.91	48.60	32.53	81.85	51.29	50.48	30.85	81.85	51.45	45.37	28.69	81.85	48.65	58.29	32.21	81.85	55.05	50.54	30.27	81.85	51.27
21	KALTENG	54.21	29.55	56.54	46.16	66.94	37.46	56.54	54.02	69.77	46.86	56.54	58.44	72.45	39.46	56.54	56.93	74.35	41.09	56.54	58.25	67.54	38.88	56.54	54.76
22	KALSEL	55.65	34.18	79.87	54.19	51.25	43.23	79.87	55.60	60.68	49.19	79.87	61.46	65.14	47.71	79.87	62.72	75.14	51.63	79.87	68.09	61.57	45.19	79.87	60.41
23	KALTIM	44.03	49.11	66.03	51.31	34.71	41.03	66.03	44.75	39.39	41.55	66.03	46.81	41.90	46.16	66.03	49.43	44.35	39.63	66.03	48.12	40.88	43.50	66.03	48.08
24	SULUT	44.11	28.46	54.80	41.30	51.41	29.22	54.80	44.49	53.55	37.55	54.80	48.27	54.91	47.39	54.80	52.25	58.85	38.84	54.80	50.83	52.57	36.29	54.80	47.43
25	SULTENG	36.14	31.10	70.28	42.91	47.56	37.51	70.28	49.72	45.82	37.84	70.28	49.14	35.62	32.49	70.28	43.19	55.22	40.96	70.28	53.99	44.07	35.98	70.28	47.79
26	SULSEL	55.80	30.95	48.68	45.32	63.12	43.36	48.68	52.59	62.42	48.12	48.68	53.98	70.12	51.73	48.68	58.32	77.54	47.57	48.68	59.83	65.80	44.35	48.68	54.01
27	SULTRA	50.05	20.91	69.47	44.71	50.65	34.77	69.47	49.80	47.76	28.62	69.47	46.49	45.26	41.72	69.47	50.08	49.81	30.75	69.47	48.05	48.71	31.35	69.47	47.82
28	GORONTALO	36.12	22.68	64.82	38.59	48.59	37.45	64.82	48.75	38.37	22.16	64.82	39.31	42.31	33.03	64.82	44.69	44.28	29.68	64.82	44.31	41.94	29.00	64.82	43.13
29	SULBAR	38.81	24.87	43.32	35.06	39.40	19.87	43.32	33.54	42.67	30.08	43.32	38.43	70.07	61.55	43.32	60.40	55.44	26.01	43.32	42.11	49.28	32.48	43.32	41.91
30	MALUKU	21.84	18.06	48.94	27.29	35.05	21.14	48.94	33.66	44.57	41.63	48.94	44.63	20.27	6.67	48.94	22.68	45.66	44.33	48.94	46.02	33.48	26.37	48.94	34.86
31	MALUT	17.88	24.67	55.61	29.69	30.85	20.48	55.61	33.41	18.91	22.32	55.61	29.28	17.01	24.22	55.61	29.19	19.31	13.60	55.61	26.38	20.79	21.06	55.61	29.59
32	PAPBAR	24.18	19.24	53.33	29.74	26.99	18.42	53.33	30.57	37.95	17.40	53.33	34.60	32.36	33.79	53.33	38.10	35.45	25.54	53.33	36.45	31.38	22.88	53.33	33.89
33	PAPUA	50.93	32.85	71.32	49.70	50.67	39.47	71.32	51.91	65.23	58.26	71.32	64.31	45.98	47.82	71.32	52.96	33.33	30.50	71.32	41.84	49.23	41.78	71.32	52.14
RATA-RATA		41.75	31.13	61.99	43.10	45.32	38.06	61.99	46.95	47.93	41.08	61.99	49.05	46.15	40.33	61.99	48.07	51.86	36.15	61.99	48.89	46.60	37.35	61.99	47.21
STANDAR DEVIASI		12.48	11.29	13.22	9.04	11.85	11.17	13.22	8.58	10.63	10.95	13.22	8.37	14.69	12.30	13.22	9.87	13.54	10.05	13.22	8.99	11.32	9.21	13.22	8.00

Sumber : data diolah



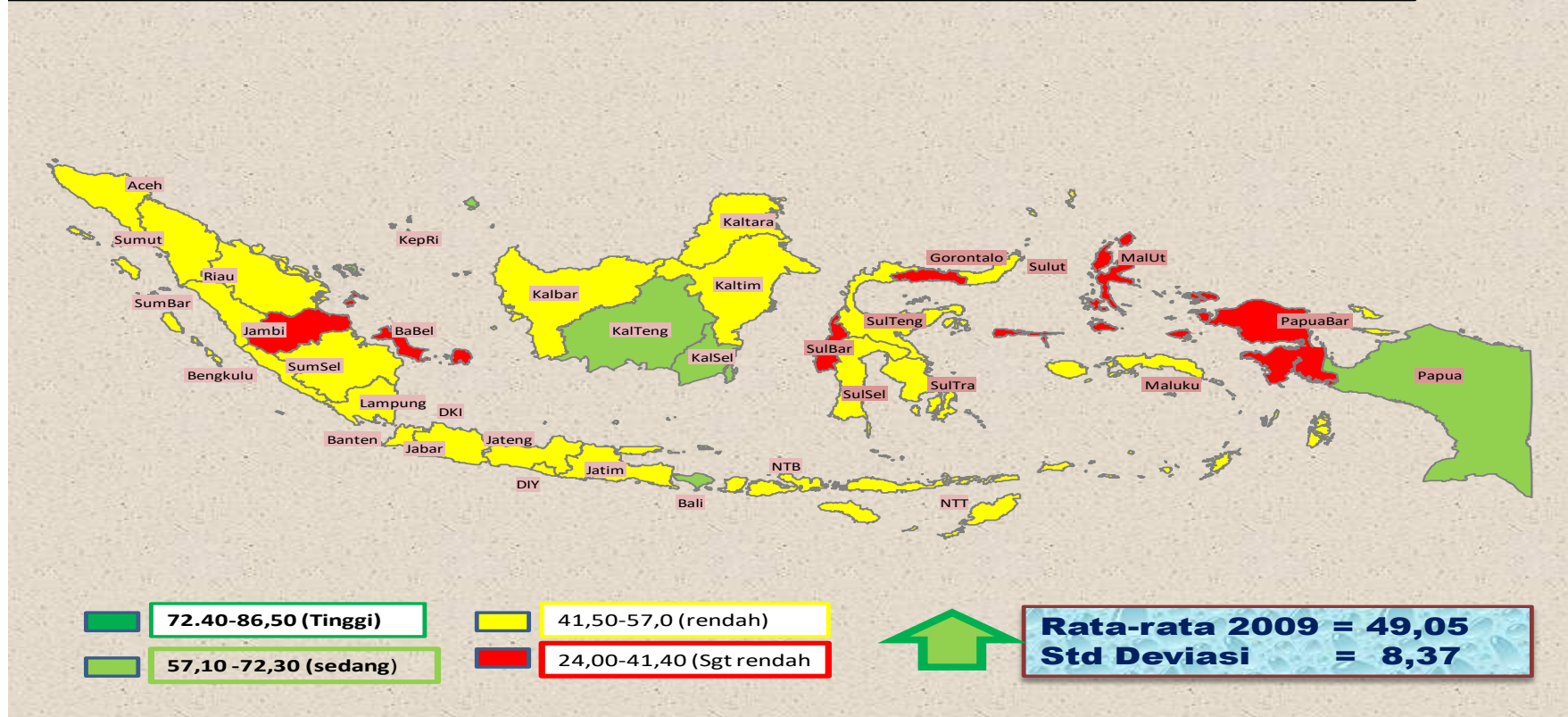
Gambar 4.11
Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2007

KETAHANAN PANGAN PROVINSI INDONESIA TAHUN 2008



Gambar 4.12
 Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2008

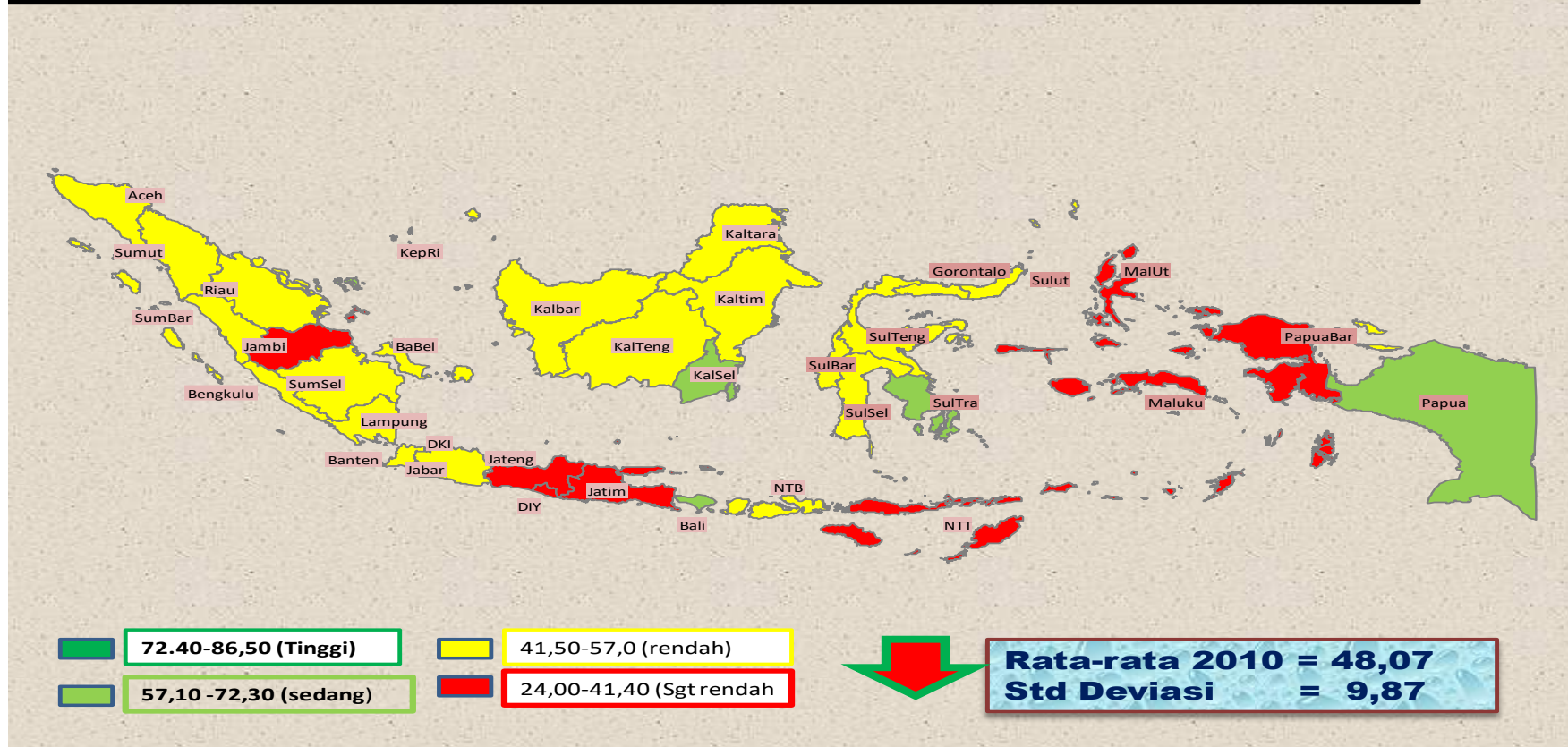
KETAHANAN PANGAN PROVINSI INDONESIA TAHUN 2009



Gambar 4.13

Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2009

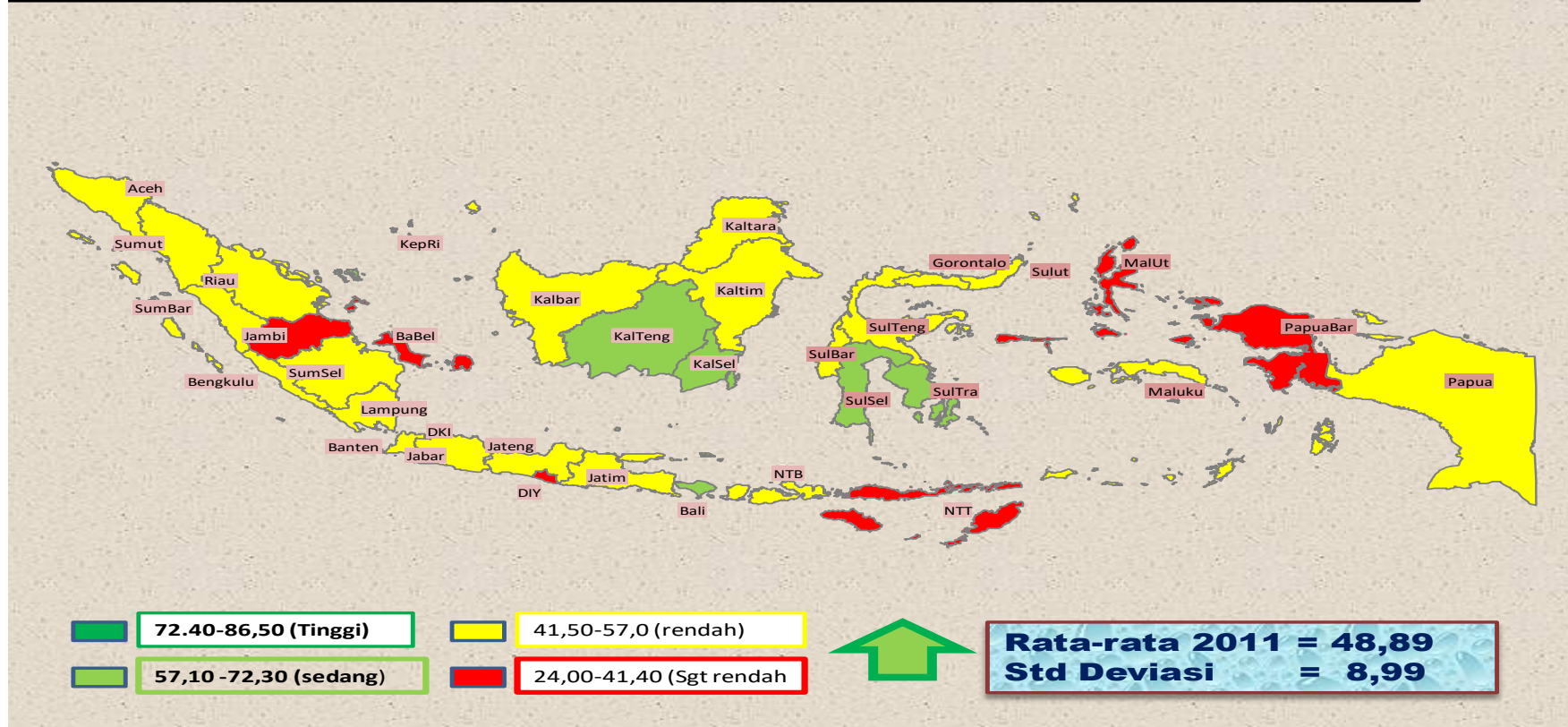
KETAHANAN PANGAN PROVINSI INDONESIA TAHUN 2010



Gambar 4.14

Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2010

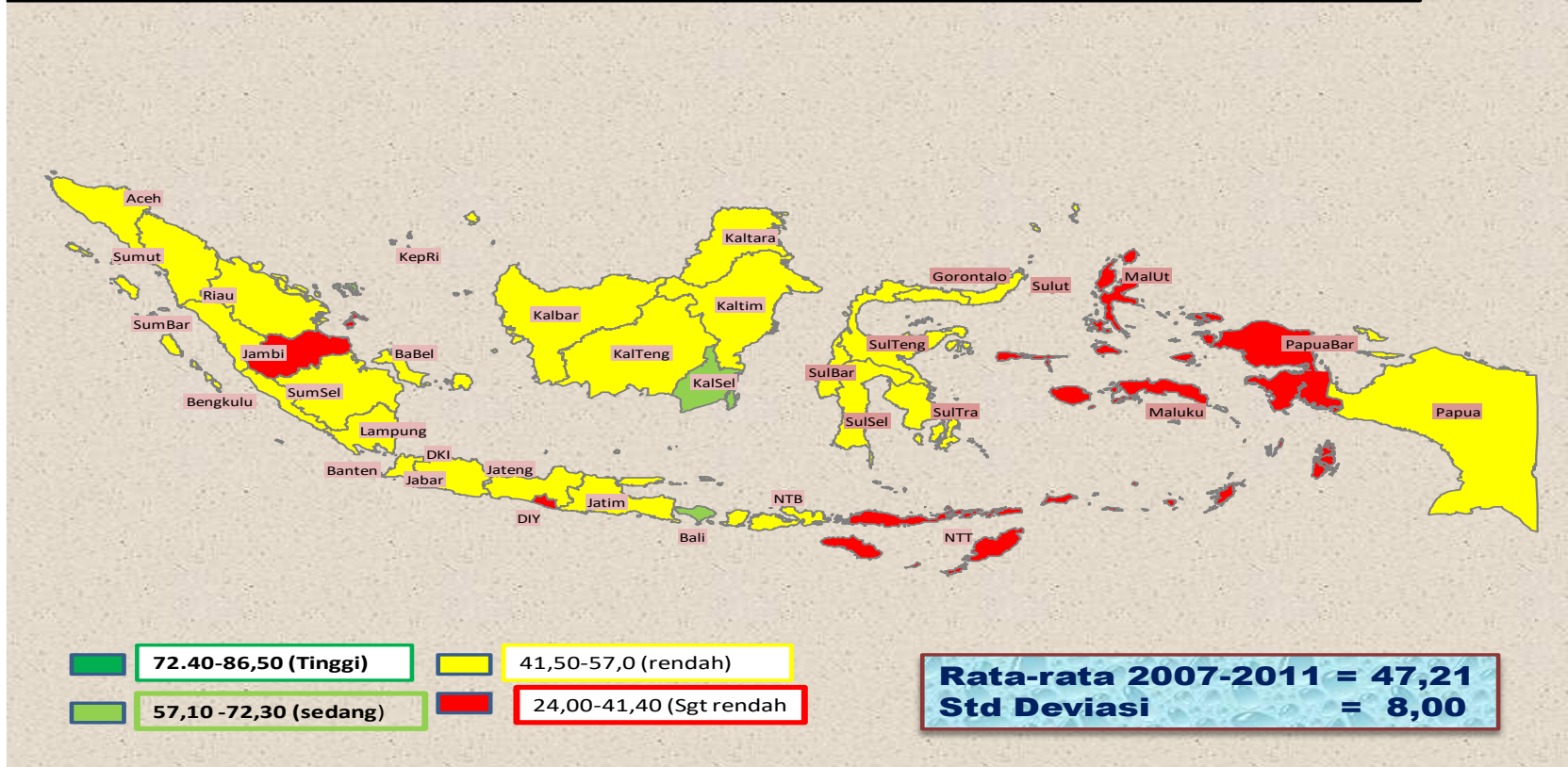
KETAHANAN PANGAN PROVINSI INDONESIA TAHUN 2011



Gambar 4.15

Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2011

KETAHANAN PANGAN PROVINSI INDONESIA TAHUN 2007-2011



Gambar 4.16

Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2011

Berdasarkan pemetaan ketahanan pangan antar provinsi di Indonesia, selama periode 2007-2012, mayoritas status ketahanan pangan antara provinsi di Indonesia berada pada tingkatan rendah. Terdapat 2 provinsi yang memiliki status ketahanan pangan yang cukup baik yaitu

1. Provinsi Bali
2. Provinsi Kalimantan Selatan

Disisi lain sejumlah provinsi yang selama periode 2007-2011 memiliki indeks ketahanan pangan sangat rendah adalah :

1. Provinsi Jambi
2. Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Provinsi Maluku Utara
4. Provinsi Papua Barat

Periode 2012-2016 ditunjukkan dengan adanya peningkatan indeks ketahanan pangan antar provinsi di Indonesia dibandingkan dengan periode 2007-2011 dimana status indeks ketahanan pangan baik secara keseluruhan maupun berdasarkan dimensinya sudah tidak terlalu dominan lagi berada pada kuartal 1 (indeks sangat rendah). Pada periode 2012-2016 terdapat 2 provinsi yang secara konsisten memiliki status indeks ketahanan pangan berada pada tingkatan sedang dan kondisi ini sama seperti pada periode 2007-2011. Kedua provinsi yang dimaksud adalah:

1. Provinsi Bali
2. Provinsi Kalimantan Selatan

Untuk provinsi dengan indeks kinerja sangat rendah justru mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode 2007-2011. Jika pada periode 2007-2011 provinsi-provinsi dengan kinerja sangat rendah hanya terdapat 4 provinsi sementara pada periode 2012-2016 bertambah 2 provinsi lain yang pencapaian indeks ketahanan pangannya sangat rendah. Provinsi-provinsi dengan indeks ketahanan pangan sangat rendah adalah :

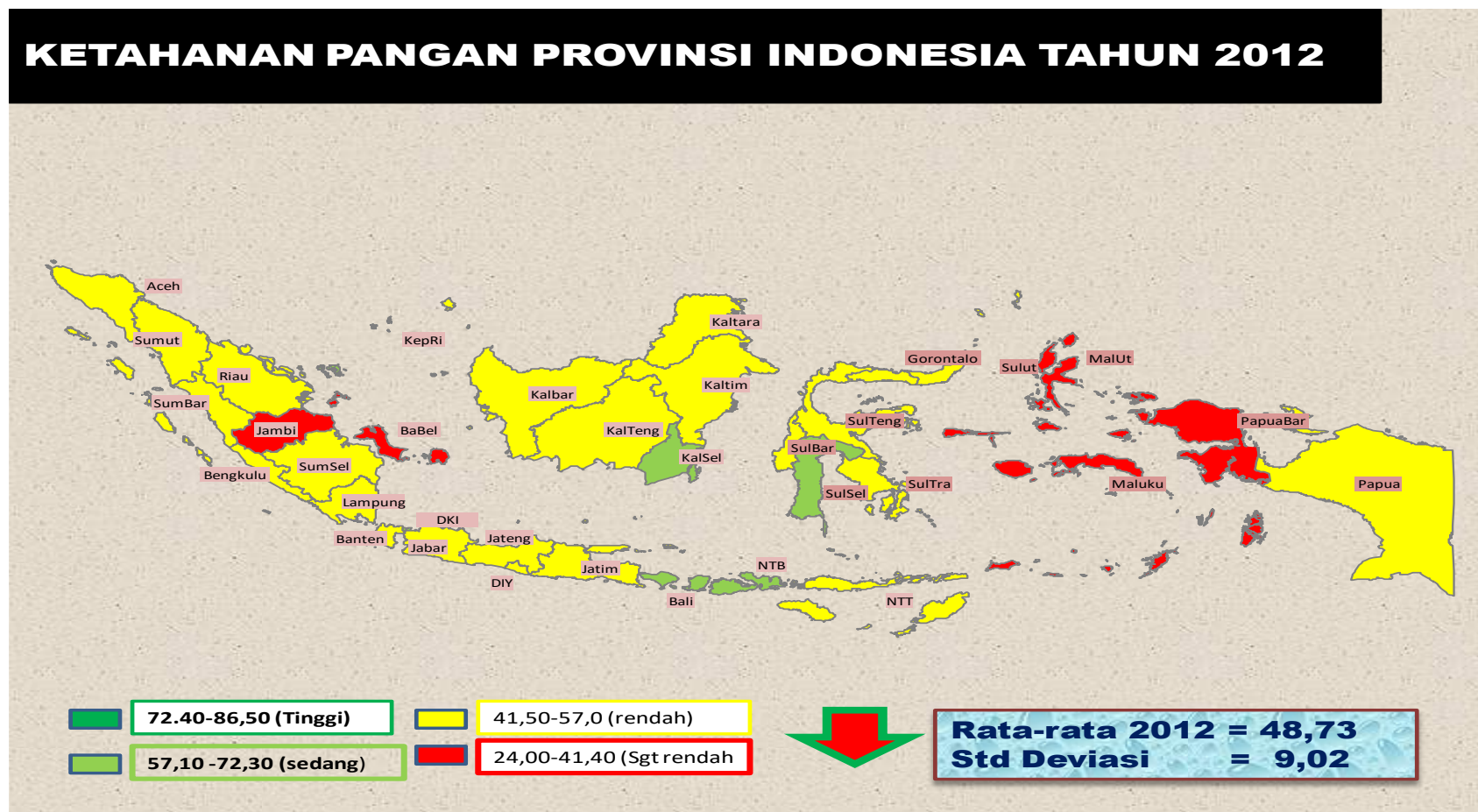
1. Provinsi Jambi
2. Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Provinsi Maluku Utara
4. Provinsi Maluku
5. Provinsi Papua Barat
6. Provinsi Papua

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan memang terjadi peningkatan ketahanan pangan di Indonesia tetapi jika dilihat secara individual yaitu ketahanan pangan menurut provinsi justru terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara satu provinsi dengan provinsi yang lain dalam kaitannya dengan masalah ketahanan pangan antar provinsi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan sejumlah provinsi yang mengalami peningkatan kinerja indeks ketahanan pangannya menjadi lebih baik sehingga berdampak pada kenaikan status ketahanan pangannya dari sangat rendah menjadi rendah. Sementara di sisi lain, terdapat beberapa provinsi yang indeks ketahanan pangannya mengalami penurunan status dari rendah menjadi sangat rendah. Gambar 4.17 sampai 4.22 menjelaskan mengenai pemetaan ketahanan pangan antar provinsi di Indonesia.

Tabel 4.8
Indeks Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2012 - 2016

No	Provinsi	TAHUN 2012				TAHUN 2013				TAHUN 2014				TAHUN 2015				TAHUN 2015				Rata-rata Tahun2012-2016			
		AVAIL	ACCESS	STABIL	FS	AVAIL	ACCESS	STABIL	FS	AVAIL	ACCESS	STABIL	FS	AVAIL	ACCESS	STABIL	FS	AVAIL	ACCESS	STABIL	FS	AVAIL	ACCESS	STABIL	FS
1	ACEH	49.38	39.48	67.81	50.52	46.98	41.36	67.81	50.22	43.73	28.66	67.81	44.48	56.15	40.80	67.81	53.69	43.59	38.88	67.81	47.99	47.97	37.84	67.81	49.38
2	SUMUT	50.96	42.97	64.46	51.54	47.82	39.02	64.46	48.90	55.66	43.31	64.46	53.54	52.78	45.64	64.46	53.20	44.19	33.70	64.46	45.58	50.28	40.93	64.46	50.55
3	SUMBAR	62.52	57.49	62.98	60.87	51.71	40.12	62.98	50.47	55.80	34.05	62.98	49.98	58.82	53.79	62.98	58.10	50.66	48.42	62.98	52.96	55.90	46.77	62.98	54.48
4	RIAU	38.76	49.12	63.16	48.49	41.15	54.06	63.16	51.17	45.22	48.59	63.16	50.88	48.41	58.03	63.16	55.46	41.96	49.44	63.16	49.88	43.10	51.85	63.16	51.18
5	JAMBI	43.46	47.62	11.37	36.89	34.82	33.71	11.37	28.57	34.07	35.22	11.37	28.80	40.19	53.45	11.37	37.63	54.72	38.70	11.37	38.28	41.45	41.74	11.37	34.03
6	SUMSEL	56.90	49.03	69.71	57.35	54.77	41.95	69.71	54.02	59.81	52.33	69.71	59.67	62.13	51.74	69.71	60.39	50.06	42.33	69.71	52.27	56.73	47.48	69.71	56.74
7	BENGKULU	47.59	39.37	65.77	49.26	47.42	39.86	65.77	49.36	48.48	35.64	65.77	48.30	55.17	46.87	65.77	54.91	47.94	53.25	65.77	54.26	49.32	43.00	65.77	51.22
8	LAMPUNG	52.26	39.04	68.15	51.61	47.68	34.53	68.15	48.19	41.50	32.47	68.15	45.00	46.83	33.34	68.15	47.44	37.23	37.33	68.15	45.00	45.10	35.34	68.15	47.45
9	KEP. BABEL	36.54	35.24	50.78	39.64	41.27	35.31	50.78	41.56	41.48	46.14	50.78	45.44	54.40	53.17	50.78	53.06	48.69	45.59	50.78	48.13	44.48	43.09	50.78	45.57
10	KEPRI	39.44	42.20	59.54	45.43	55.33	57.89	59.54	57.28	47.23	51.76	59.54	51.89	56.71	66.69	59.54	60.91	53.49	67.55	59.54	59.92	50.44	57.22	59.54	55.09
11	DKI	50.37	63.04	67.63	59.12	35.11	59.26	67.63	51.69	51.36	69.15	67.63	61.65	42.97	71.95	67.63	59.28	44.16	69.32	67.63	58.83	44.79	66.54	67.63	58.12
12	JABAR	39.86	29.61	78.14	45.84	42.76	40.61	78.14	50.85	45.71	45.64	78.14	53.80	52.26	49.35	78.14	57.71	50.87	52.32	78.14	58.20	46.29	43.51	78.14	53.28
13	JATENG	35.49	29.03	80.37	44.45	36.03	38.51	80.37	47.98	36.89	40.53	80.37	49.03	39.23	40.47	80.37	49.95	31.60	38.55	80.37	46.23	35.85	37.42	80.37	47.53
14	DIY	38.20	39.71	66.51	45.81	50.76	46.59	66.51	53.24	54.97	59.87	66.51	59.57	48.62	51.52	66.51	54.11	44.84	55.62	66.51	54.03	47.48	50.66	66.51	53.35
15	JATIM	39.48	33.37	71.40	45.32	37.01	34.74	71.40	44.82	45.35	47.65	71.40	52.67	47.69	48.97	71.40	54.07	39.98	49.52	71.40	51.18	41.90	42.85	71.40	49.61
16	BANTEN	46.72	42.60	58.70	48.28	49.04	41.74	58.70	48.90	44.40	47.29	58.70	48.99	51.81	54.98	58.70	54.64	52.54	56.11	58.70	55.33	48.90	48.54	58.70	51.23
17	BAU	70.32	69.54	64.03	68.48	62.74	65.11	64.03	63.89	66.25	72.13	64.03	67.75	62.90	67.74	64.03	64.88	68.45	68.46	64.03	67.35	66.13	68.60	64.03	66.47
18	NTB	69.94	51.31	60.40	61.04	64.02	42.35	60.40	55.53	60.57	48.23	60.40	56.21	59.69	46.05	60.40	55.10	49.84	45.84	60.40	51.08	60.81	46.76	60.40	55.79
19	NTT	49.00	38.23	49.92	45.46	44.08	36.16	49.92	42.77	39.62	31.70	49.92	39.42	39.99	21.60	49.92	36.04	39.41	26.90	49.92	37.66	42.42	30.92	49.92	40.27
20	KALBAR	47.02	26.08	81.85	48.40	48.87	42.19	81.85	54.78	50.12	35.50	81.85	52.94	56.24	30.40	81.85	53.60	43.51	37.20	81.85	50.89	49.15	34.28	81.85	52.12
21	KALTENG	56.23	37.77	56.54	49.85	54.56	46.08	56.54	52.09	56.31	46.46	56.54	52.92	64.44	49.74	56.54	57.32	51.95	57.05	56.54	54.89	56.70	47.42	56.54	53.41
22	KALSEL	63.05	50.46	79.87	62.85	59.99	52.22	79.87	62.24	63.75	50.75	79.87	63.23	71.13	56.36	79.87	68.15	56.38	58.01	79.87	62.82	62.86	53.56	79.87	63.86
23	KALTIM	34.92	46.83	66.03	46.87	32.84	52.11	66.03	47.88	29.33	45.82	66.03	44.27	39.05	58.01	66.03	52.43	35.92	53.87	66.03	49.73	34.41	51.33	66.03	48.24
24	SULUT	56.23	48.39	54.80	53.13	53.09	45.16	54.80	50.74	59.61	50.18	54.80	55.11	60.89	39.68	54.80	51.95	50.46	44.83	54.80	49.58	56.06	45.65	54.80	52.10
25	SULTENG	43.97	41.40	70.28	49.65	47.46	53.87	70.28	55.41	44.78	39.45	70.28	49.29	48.69	47.29	70.28	53.60	46.86	34.50	70.28	48.39	46.35	43.30	70.28	51.27
26	SULSEL	71.45	50.26	48.68	58.34	63.71	54.48	48.68	56.72	63.65	49.53	48.68	54.97	64.95	35.59	48.68	50.61	58.96	43.36	48.68	50.93	64.55	46.64	48.68	54.31
27	SULTRA	51.06	44.52	69.47	53.37	47.51	47.54	69.47	53.01	50.71	52.81	69.47	56.14	52.91	44.75	69.47	54.20	54.62	46.07	69.47	55.34	51.36	47.14	69.47	54.41
28	GORONTALO	45.36	38.45	64.82	47.81	41.87	43.95	64.82	48.34	52.02	50.77	64.82	54.78	61.90	53.77	64.82	59.79	48.78	36.81	64.82	48.60	49.99	44.75	64.82	51.86
29	SULBAR	53.46	46.04	43.32	48.33	56.66	50.92	43.32	51.32	56.04	50.79	43.32	51.02	52.48	35.00	43.32	44.07	55.35	45.46	43.32	48.88	54.80	45.64	43.32	48.72
30	MALUKU	33.71	19.99	48.94	32.72	30.07	31.17	48.94	35.17	22.85	28.42	48.94	31.32	30.75	17.52	48.94	30.67	27.19	38.72	48.94	36.66	28.91	27.16	48.94	33.31
31	MALUT	17.55	20.20	55.61	27.99	22.54	27.76	55.61	32.64	19.53	25.47	55.61	30.63	17.22	14.67	55.61	25.92	16.25	24.17	55.61	28.86	18.62	22.45	55.61	29.21
32	PAPBAR	22.85	20.01	53.33	29.47	25.57	20.77	53.33	30.83	25.92	37.78	53.33	36.92	34.77	43.95	53.33	42.62	30.14	35.63	53.33	37.86	27.85	31.63	53.33	35.54
33	PAPUA	31.25	39.00	71.32	43.98	24.18	21.64	71.32	35.08	30.79	15.73	71.32	35.65	28.33	23.90	71.32	37.53	19.66	19.22	71.32	32.42	26.84	23.90	71.32	36.93
RATA-RATA		46.83	41.44	61.99	48.73	45.44	42.81	61.99	48.66	46.77	43.93	61.99	49.58	50.32	45.66	61.99	51.61	45.16	45.24	61.99	49.39	46.90	43.81	61.99	49.59
STANDAR DEVIASI		12.69	11.31	13.22	9.02	11.13	10.23	13.22	8.39	12.07	11.81	13.22	9.34	11.82	13.68	13.22	9.40	11.08	11.94	13.22	8.43	11.02	10.26	13.22	8.32

Sumber : data diolah



Gambar 4.17

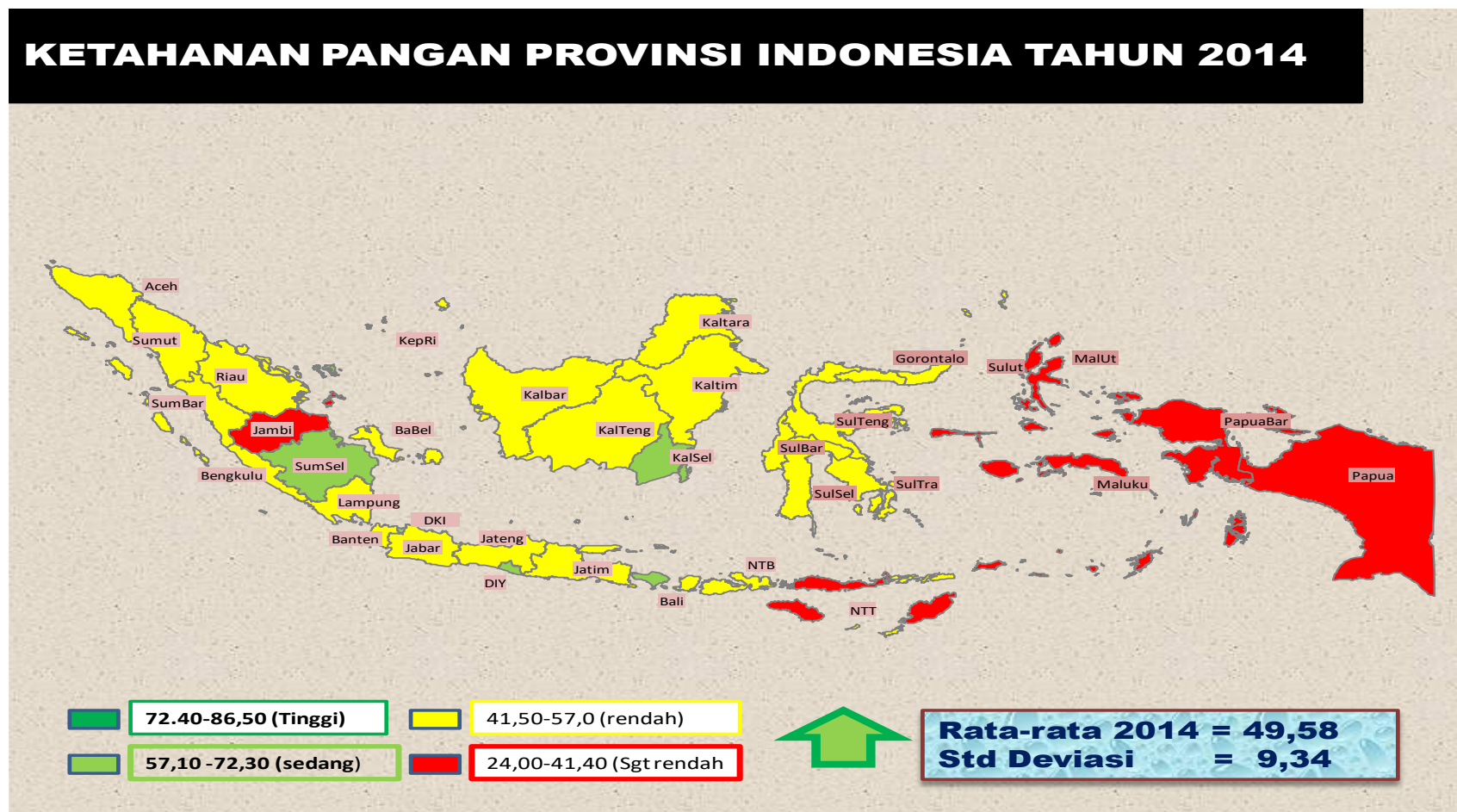
Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2012



Gambar 4.18

Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2013

KETAHANAN PANGAN PROVINSI INDONESIA TAHUN 2014



Gambar 4.19

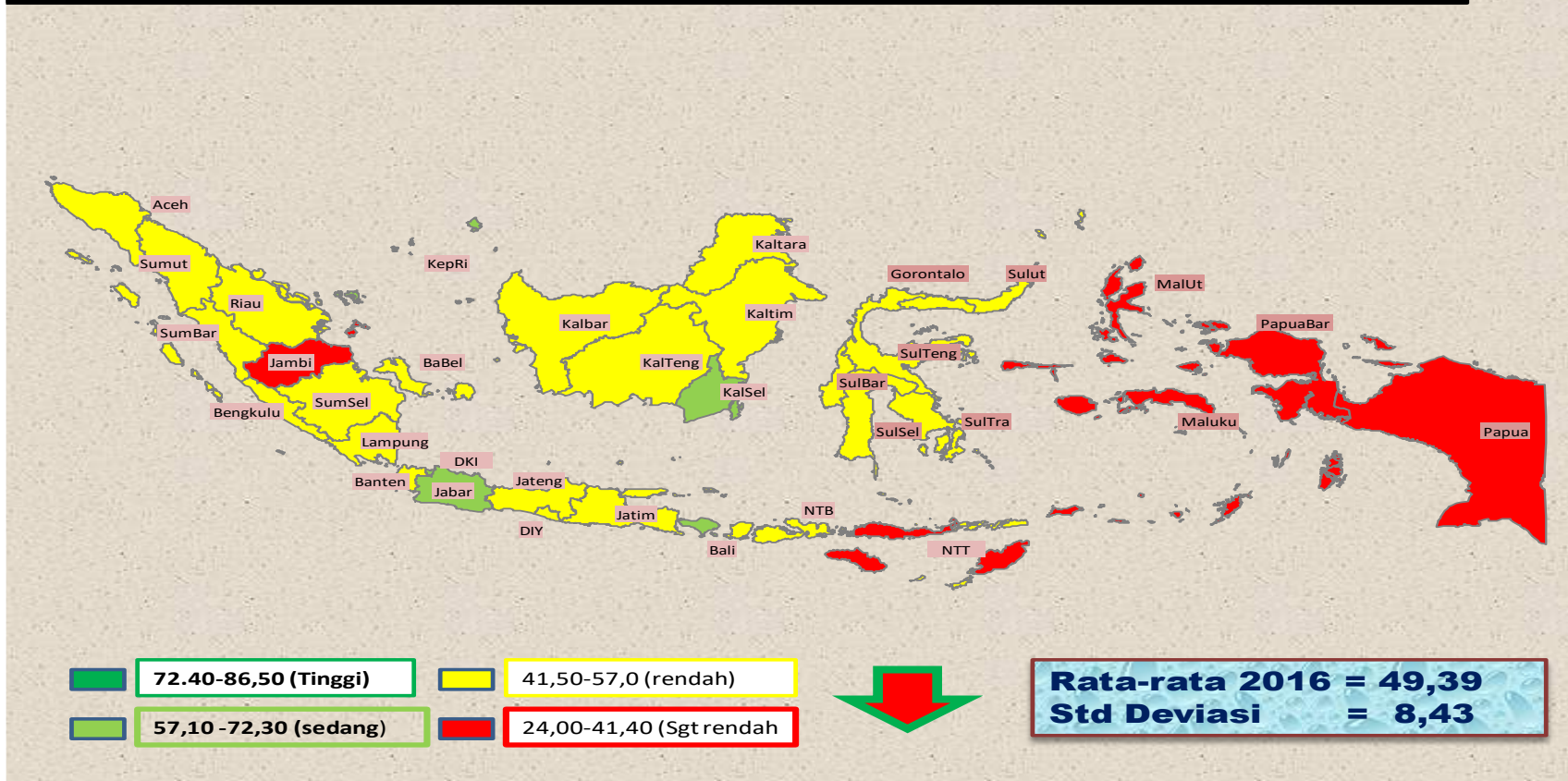
Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2014



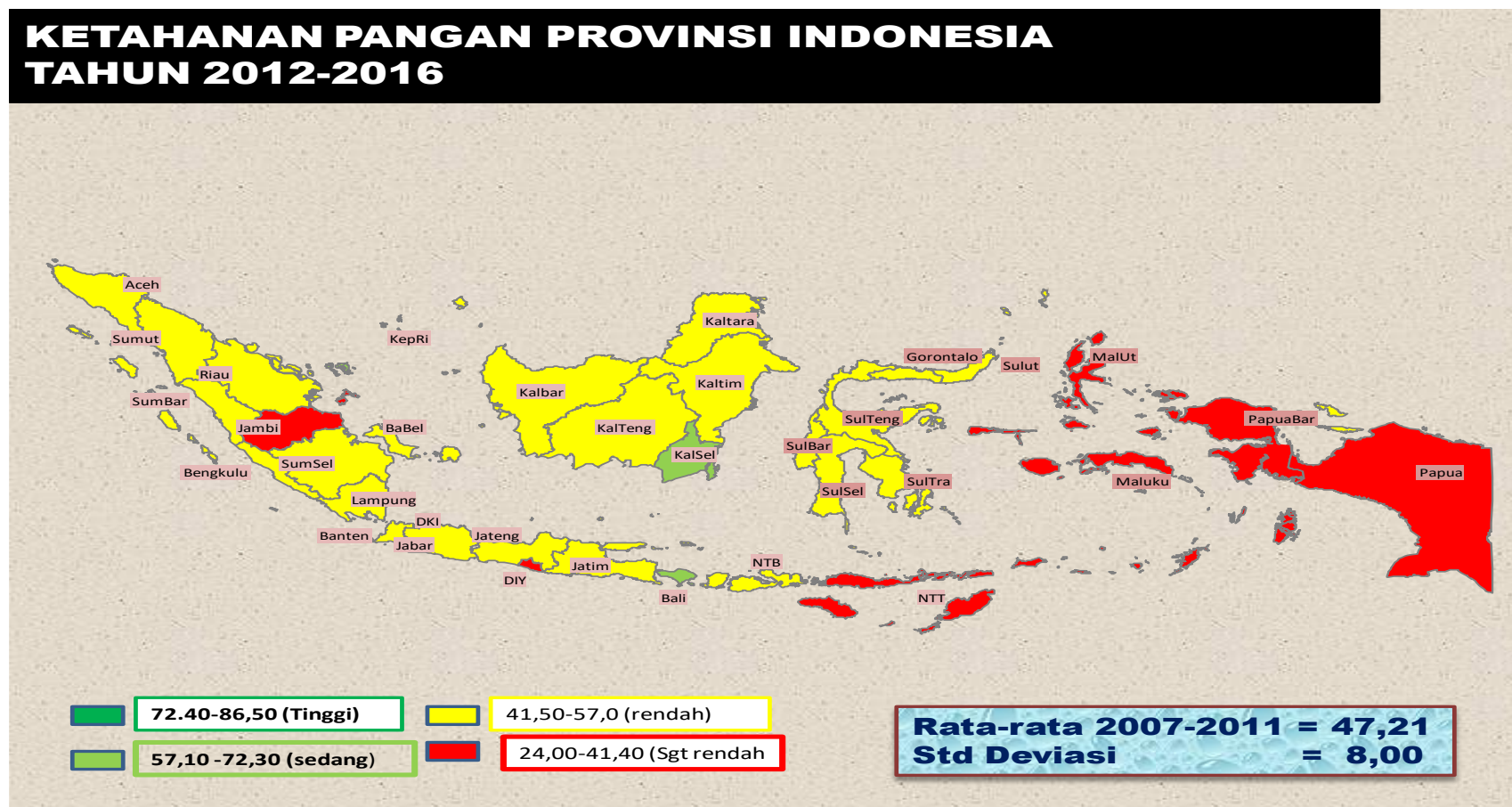
Gambar 4.20

Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2015

KETAHANAN PANGAN PROVINSI INDONESIA TAHUN 2016



Gambar 4.21
 Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2016



Gambar 4.22

Peta Ketahanan Pangan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2016

4.3. Estimasi Model Pembangunan Manusia

Pada tahap ini dilakukan estimasi model regresi untuk IPM dengan menggunakan model regresi panel karena memiliki struktur data gabungan antara data *cross section* (33 provinsi) dengan data *time series* (periode 2007-2016). Tahapan pengujian hipotesis untuk model regresi panel terdiri dari pemilihan model panel serta pengujian hipotesis dari model panel yang terpilih.

4.3.1. Pemilihan Model Panel

1. Pengujian Chow

Pengujian Chow dilakukan untuk memilih apakah model yang tepat adalah *Common Effect Model (CEM)* atau *Fixed Effect Model (FEM)*. Hasil pengolahan untuk pengujian Chow ditunjukkan dengan tabel 4.9. Dengan hipotesis null model yang tepat adalah *Common Effect Model (CEM)* sementara hipotesis alternatifnya model yang tepat adalah *Fixed Effect Model (FEM)* diperoleh nilai p-value dari *cross section chisquare* sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Tabel 4.9
Pengujian Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	38.069871	(32,289)	0.0000
Cross-section Chi-square	545.029983	32	0.0000

Sumber : data diolah

2. Pengujian Hausman

Pengujian Hausman dilakukan setelah pada pengujian Chow yang terpilih adalah FEM. Pengujian Hausman dilakukan untuk memilih apakah model yang tepat adalah FEM atau *Random Effect Model* (REM) dengan hipotesis null model yang tepat adalah REM sementara hipotesis alternatifnya adalah FEM. Hasil pengolahan pengujian Hausman dapat dilihat pada tabel 4.10 dimana nilai p-value dari cross section random sebesar $0,0009 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak (H_a diterima) sehingga model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM)

Tabel 4.10
Pengujian Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	26.481152	8	0.0009

Sumber : data diolah

Dari pemilihan model yang dilakukan maka model yang terpilih untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

4.3.2. Pengujian Hipotesis Teori

Hasil pengolahan untuk pengujian hipotesis teori yang diajukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11
Model Regersi Panel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Keputusan
AVAIL	0.123	3.208809	0.0007	Ho ditolak
ACCESS	0.026	2.557847	0.0055	Ho ditolak
STABIL	0.008	0.477074	0.3168	Ho diterima
DR	0.531	0.057051	0.4742	Ho diterima
S_EDUC	-0.007	-0.175056	0.4306	Ho diterima
S_HEALTH	0.393	8.028526	0.0000	Ho ditolak
D_HDI	-4.497	-10.61563	0.0000	Ho ditolak
D_2008	-0.956	-2.026118	0.0328	Ho ditolak
Adjust R ²	0.892			
F test	60,074			
p-value	0.000			

Sumber : data diolah

1. Model Fit Summary (*Adjusted R²*)

Hasil pengolahan untuk *model fit* ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R²* sebesar 0,892 yang artinya variasi atau perilaku dari variabel independen yaitu ketahanan pangan dengan 3 dimensinya yaitu *availability*, *access* dan *stability* mampu menjelaskan variasi atau perilaku dari variabel dependen yaitu IPM sebesar 89,2% sedangkan sisanya yaitu 10,8% adalah variasi dari variabel independen lain yang mempengaruhi IPM tetapi tidak dimasukkan dalam model. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa model IPM yang dihasilkan memiliki tingkat *goodness of fit* yang baik.

2. Uji Simultan (Uji F)

Hasil pengujian simultan untuk model IPM ditunjukkan dengan nilai F statistik sebesar 60,074 dengan p-value sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan paling tidak terdapat satu variabel independen (dimensi ketahanan pangan *availability*, *access*, *stability*, rasio ketergantungan, proporsi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, proporsi pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, kebijakan perubahan metode perhitungan IPM serta krisis global 2008) yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya yaitu IPM.

3. Uji Parsial (Uji-t)

Pengujian parsial digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu dalam hal ini dimensi ketahanan pangan *availability*, *access*, *stability*, rasio ketergantungan, proporsi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, proporsi pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, kebijakan perubahan metode perhitungan IPM serta krisis global 2008

Hipotesis 1#

Hipotesis 1 dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh positif dari ketahanan pangan (*Food Security*) yang terdiri dari dimensi *Availability*, *Access* dan *Stability* terhadap Pembangunan Manusia (*Human Development*) antar provinsi di Indonesia.

Hipotesis 1.1. bertujuan untuk menguji pengaruh positif dimensi *Availability* dari ketahanan pangan terhadap IPM. Dari hasil pengolahan diperoleh nilai koefisien estimasi sebesar 0,1234 yang artinya meningkatnya rata-rata nilai indeks ketahanan pangan dimensi *Availability* sebesar 1% mendekati provinsi yang menjadi acuan (*benchmarking*) akan meningkatkan IPM sebesar 0,1234% dan sebaliknya menurunnya rata-rata nilai indeks ketahanan pangan dimensi *Availability* sebesar 1% menjauhi provinsi yang menjadi acuan (*benchmarking*) akan meningkatkan IPM sebesar 0,1234%. Dengan nilai t statistik sebesar 3,208 diperoleh p-value sebesar $0,0007 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak (H_a diterima) dan dapat disimpulkan bahwa pengaruh positif dari ketahanan pangan dimensi *Availability* terhadap IPM terbukti signifikan. Hasil temuan ini mendukung studi empiris yang dilakukan oleh Sow et al (2015), Verwimp (2013), UNDP (2012) serta Azmat & Prasad (2007)

Hipotesis 1.2. dilakukan untuk menguji pengaruh positif dimensi *access* dari ketahanan pangan terhadap IPM. Dari hasil pengolahan diperoleh nilai koefisien estimasi sebesar 0,026 yang artinya meningkatnya indeks ketahanan pangan dimensi *access* sebesar rata-rata sebesar 1% mendekati provinsi yang dijadikan acuan (*benchmarking*) akan meningkatkan IPM sebesar 0,026% dan sebaliknya menurunnya rata-rata indeks ketahanan pangan dimensi *access* sebesar 1% menjauhi provinsi yang dijadikan *benchmarking* akan menurunkan IPM sebesar 0,026%. Hasil pengujian statistik ditunjukkan dengan nilai t statistik sebesar 2,557 dengan p-value sebesar $0,0055 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak (H_a diterima) dan dapat disimpulkan bahwa pengaruh positif dari ketahanan pangan dimensi

Accessterhadap IPM terbukti signifikan. Hasil temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sow et al (2015), Verwimp (2013), UNDP (2012) serta Azmat & Prasad (2007)

Hipotesis 1.3 dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh positif dimensi *Stability* dari ketahanan pangan terhadap IPM. Hasil pengolahan ditunjukkan dengan koefisien estimasi sebesar 0,008 yang artinya meningkatnya nilai rata-rata indeks ketahanan pangan dimensi *Stability* sebesar 1% dari provinsi yang dijadikan acuan akan meningkatkan IPM sebesar 0,008% dan sebaliknya menurunnya rata-rata indeks ketahanan pangan dimensi *Stability* sebesar 1% menjauhi dari provinsi yang dijadikan acuan akan menurunkan IPM sebesar 0,008%. Dari hasil pengolahan untuk pengujian statistik diperoleh nilai t statistik sebesar 0,477 dengan p-value sebesar $0,316 > 0,05$ sehingga H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa pengaruh positif dari ketahanan pangan dimensi *Stability* terhadap IPM tidak signifikan. Hasil temuan ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sow et al (2015), Verwimp (2013), UNDP (2012) serta Azmat & Prasad (2007)

Hipotesis 2#

Hipotesis 2 dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh negatif dari rasio ketergantungan terhadap IPM antar provinsi di Indonesia. Hasil pengolahan ditunjukkan dengan nilai koefisien estimasi sebesar 0,531 yang artinya meningkatnya rasio ketergantungan sebesar 1% akan menaikkan IPM sebesar

0,531% dan sebaliknya menurunnya rasio ketergantungan sebesar 1% akan menurunkan IPM sebesar 0,531%. Dari hasil pengujian statistik diperoleh nilai t statistik sebesar 0,057 dengan p -value sebesar $0,4742 > 0,05$ yang artinya H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh negatif dari rasio ketergantungan terhadap IPM tidak terbukti.. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan studi empiris yang dilakukan oleh Bhakti dan Istiqomah (2012) dan Pratowo (2011)

Hipotesis 3#

Hipotesis 3 bertujuan untuk menguji pengaruh positif dari proporsi pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan terhadap IPM antar provinsi di Indonesia. Dari hasil pengolahan diperoleh nilai koefisien estimasi sebesar $-0,007$ yang artinya meningkatnya proporsi pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan sebesar 1% akan menurunkan IPM sebesar 0,007% dan sebaliknya menurunnya proporsi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan sebesar 1% akan menaikkan IPM sebesar 0,007%. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis teori yang menyatakan bahwa proporsi pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM tidak terbukti. Hasil temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Heka dkk (2017), Edeme et al (2017), Kahang (2016), Safitri (2016) sert Bhakti dan Istiqomah (2012)\ tetapi bertolak belakang dengan studi empiris yang dilakukan oleh Lengkong dkk (2017), Shuaibu & Odalaya (2016), Astry dkk (2013), Melliana dan Zain

(2013) dimana pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM

Hipotesis 4#

Hipotesis 4 dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh positif dari proporsi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap IPM antar provinsi di Indonesia. Hasil pengolahan diperoleh nilai koefisien estimasi sebesar 0,393 yang artinya meningkatnya proporsi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan sebesar 1% akan meningkatkan IPM sebesar 0,393% dan sebaliknya menurunnya proporsi pengeluaran untuk kesehatan sebesar 1% akan menurunkan IPM sebesar 0,393%. Hasil pengujian statistik menghasilkan nilai t statistik sebesar 8,028 dengan p -value sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak (H_a diterima) dan dapat disimpulkan bahwa pengaruh positif dari proporsi pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan terhadap IPM terbukti signifikan. Hasil temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hekadkk (2017), Kahang (2016), Shuaibu & Odalaya (2016), Safitri (2016), Melliana dan Zain (2013) serta Bhakti dan Istiqomah (2012)

Hipotesis 5#

Hipotesis 5 bertujuan untuk menguji pengaruh negatif dari perubahan kebijakan pengukuran IPM terhadap IPM antar provinsi di Indonesia. Hasil pengolahan diperoleh nilai koefisien estimasi sebesar -4.497 yang artinya terdapat perbedaan rata-rata pengaruh dari kebijakan sebelum dan sesudah adanya metode perhitungan IPM dimana setelah adanya perubahan perhitungan IPM nilai rata-

rata IPMnya lebih rendah sebesar 4,6104 dibandingkan sebelum adanya kebijakan perubahan metode perhitungan. Dengan nilai t statistik sebesar -10,615 diperoleh nilai p-value sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak (H_a diterima) sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah adanya kebijakan perhitungan metode baru IPM memiliki nilai rata-rata IPM yang lebih rendah 4,6104% dibandingkan dengan perhitungan metode lama.

Hipotesis 6#

Hipotesis 6 dilakukan dengan tujuan menguji pengaruh negatif dari krisis global tahun 2008 terhadap IPM antar provinsi di Indonesia. Dari hasil pengolahan diperoleh nilai koefisien estimasi sebesar -0,956 yang artinya terdapat perbedaan rata-rata pengaruh dari krisis global tahun 2008 dengan periode selain tahun 2008 dimana pada kondisi krisis global tahun 2008 memiliki nilai rata-rata IPM lebih rendah 0,956% dibandingkan dengan periode selain tahun 2008. Hasil pengujian statistik menghasilkan nilai t statistik sebesar -2,026 dengan nilai p-value sebesar $0,0328 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak (H_a diterima) sehingga dapat disimpulkan bahwa krisis global tahun 2008 menyebabkan terjadinya penurunan rata-rata IPM sebesar adanya kebijakan perhitungan metode baru IPM memiliki nilai rata-rata IPM yang lebih rendah 4,6104 dibandingkan dengan perhitungan metode lama.

4.4. Analisis Pembahasan

4.4.1. Analisis Pembahasan Ketahanan Pangan

Hasil perhitungan indeks ketahanan pangan untuk 33 provinsi di Indonesia selama periode 2007-2016 memiliki rata-rata indeks yang rendah yaitu nilai indeks ketahanan pangannya dibawah 50% kecuali pada tahun 2015 yang nilainya sudah mencapai 51,37%. Adapun faktor penyebab rendahnya indeks ketahanan pangan antar provinsi di Indonesia yaitu adanya kesenjangan (*gap*) baik antara dimensi dari pembentuk ketahanan pangan maupun antara wilayah khususnya wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur.

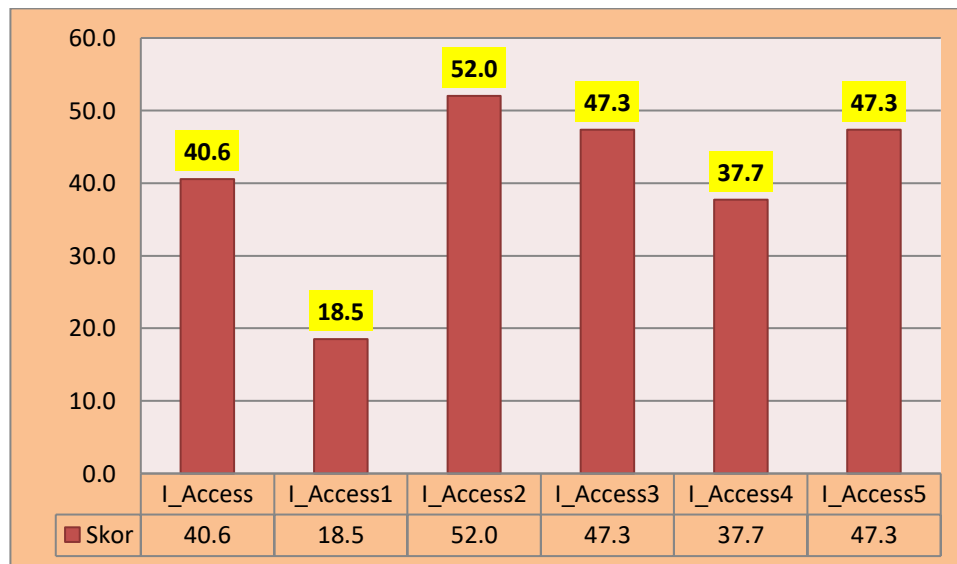
Dilihat dari dimensi pembentuk indeks ketahanan pangan, rendahnya nilai indeks ketahanan pangan merupakan kontribusi dari dimensi *access* yang memiliki nilai rata-rata selama periode 2007-2016 sebesar 40,58% diikuti dengan dimensi *availability* dengan rata-rata indeks selama periode 2007-2016 sebesar 46,75%. Selain rendahnya nilai rata-rata kedua dimensi dalam pembentukan indeks ketahanan pangan, bobot kedua dimensi tersebut nilainya relatif paling besar dibandingkan dimensi *stability* yaitu masing-masing 45% dan 30%. Dimensi pembentuk indeks ketahanan pangan lainnya yaitu *stability* walaupun memiliki rata-rata nilai indeksnya lebih dari 50% selama periode 2007-2016 yaitu 61,99% tetapi memiliki bobot perhitungan yang relatif rendah yaitu 25% sehingga secara keseluruhan tidak berdampak signifikan di dalam meningkatkan skor indeks ketahanan pangan antar provinsi di Indonesia seperti ditunjukkan tabel 4.12

Dimensi *access* sebagai faktor yang menjadi penyebab utama rendahnya indeks ketahanan pangan antar provinsi di Indonesia terdiri dari 5 indikator pengukuran dan berdasarkan hasil pengolahan diperoleh rata-rata indeks dari kelima indikator pengukuran dimensi *access* pada gambar 4.23. Informasi dari

Tabel 4.12
Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan dan Dimensi Pembentuk
Antara Provinsi di Indonesia 2007-2016

No	Provinsi	AVAILABILITY	ACCESS	STABILITY	FOOD SECURITY
1	ACEH	51.264	36.701	67.808	50.303
2	SUMUT	50.893	39.488	64.459	50.293
3	SUMBAR	56.174	43.376	62.981	53.396
4	RIAU	45.523	49.502	63.159	51.324
5	JAMBI	42.102	37.849	11.371	32.931
6	SUMSEL	56.146	42.475	69.715	54.753
7	BENGKULU	48.293	39.733	65.768	49.666
8	LAMPUNG	48.238	37.626	68.152	49.502
9	KEP. BABEL	43.656	38.550	50.777	43.649
10	KEPRI	49.475	53.272	59.538	53.320
11	DKI	41.728	60.831	67.630	54.889
12	JABAR	45.923	42.375	78.140	52.735
13	JATENG	32.439	34.199	80.368	45.037
14	DIY	35.851	39.877	66.513	44.926
15	JATIM	37.720	36.326	71.401	45.653
16	BANTEN	48.012	47.182	58.702	50.394
17	BALI	67.526	67.335	64.033	66.586
18	NTB	54.406	40.934	60.405	51.191
19	NTT	44.381	29.489	49.922	40.554
20	KALBAR	49.847	32.271	81.846	51.695
21	KALTENG	62.120	43.151	56.545	54.087
22	KALSEL	62.216	49.374	79.873	62.135
23	KALTIM	37.645	47.412	66.029	48.159
24	SULUT	54.311	40.970	54.803	49.765
25	SULTENG	45.213	39.641	70.281	49.530
26	SULSEL	65.173	45.494	48.677	54.161
27	SULTRA	50.034	39.245	69.471	51.117
28	GORONTALO	45.961	36.876	64.823	47.497
29	SULBAR	52.037	39.060	43.325	45.317
30	MALUKU	31.197	26.765	48.940	34.082
31	MALUT	19.704	21.757	55.613	29.400
32	PAPBAR	29.616	27.254	53.326	34.717
33	PAPUA	38.035	32.838	71.319	44.537
RATA-RATA		46.753	40.583	61.991	48.403
STANDAR DEVIASI		10.513	9.134	13.222	7.746

Sumber : data diolah



Sumber : data diolah lampiran 2

Gambar 4.23

**Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan Dimensi Access
dan Indikator Pengukurannya**

gambar menunjukkan bahwa Indikator utama yang menjadi penyebab rendahnya indeks dimensi *access* adalah :

- a. Indikator 1 yaitu Produk Domestik Bruto perkapita dengan nilai indeks sebesar 18,5%. Angka ini menunjukkan masih besarnya kesenjangan yang terjadi antara PDB/kapita satu provinsi dengan provinsi lain yang dijadikan sebagai acuan (standar) tertentu, Dari hasil pengolahan statistik deskriptif diperoleh nilai rata-rata untuk PDRB perkapita untuk provinsi di Indonesia selama periode 2007-2016 sebesar Rp 33.912,63 juta. Nilai standar deviasi sebesar Rp 28.959,86 juta menunjukkan bahwa variasi PDB Perkapita antara satu provinsi dengan provinsi lain bersifat heterogen. Hal ini dapat dilihat dari nilai maksimum PDRB perkapita adalah provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar Rp 136.313,10 juta/tahun sedangkan nilai minimum PDR perkapita adalah provinsi Nusa

Tenggara Timur dengan yaitu sebesar Rp 9.913,8 juta/tahun. Untuk informasi lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.13.

Tabel 4.13.
PDB Perkapita Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2016

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDB_Cap	33	9913,80	136313,10	33912,6303	28958,86960
Valid N (listwise)	33				

Sumber : data diolah

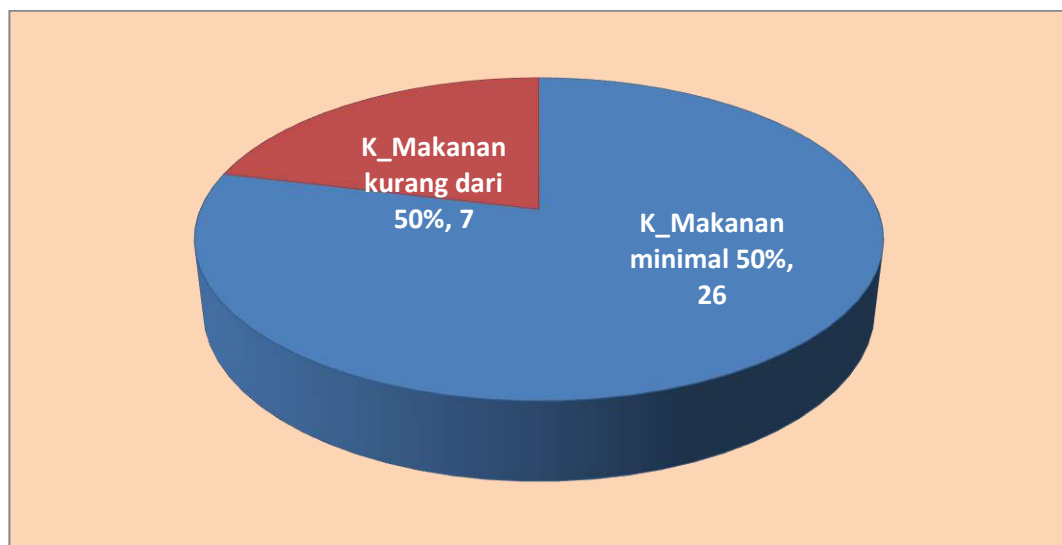
- b. Indikator 4 yaitu rata-rata prosentase pengeluaran rumah tangga untuk makanan dengan nilai indeks sebesar 37,7%. Rendahnya indeks untuk indikator ini menunjukkan bahwa mayoritas konsumsi yang dilakukan oleh penduduk dari masing-masing provinsi masih didominasi oleh konsumsi untuk makanan. Hasil pengolahan data statistik untuk pengeluaran konsumsi makanan berdasarkan provinsi menghasilkan nilai rata-rata pengeluaran konsumsi makanan untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia selama periode 2007-2016 sebesar 52,018%. Nilai standar deviasi sebesar 4,77% menunjukkan variasi pengeluaran konsumsi makanan antar provinsi di Indonesia berada pada kiraran angka 48% sampai dengan 57%. Prosentase terendah untuk pengeluaran konsumsi makanan adalah provinsi DKI Jakarta dengan nilai 36,70% sedangkan prosentase tertinggi adalah provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan nilai sebesar 59,70%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.14. Jika dilihat dari proporsi provinsi yang pengeluaran konsumsi makanannya lebih dari 50%, sebanyak 26 propinsi (78,8%) memiliki pengeluaran konsumsi makanan lebih dari 50% dan

sisanya yaitu 7 provinsi (21,2%) memiliki pengeluaran konsumsi makanan kurang dari 50%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.24.

Tabel 4.14
Proporsi Pengeluaran Konsumsi Makanan
Antar Provinsi di Indonesia (%) Tahun 2007-2016

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Konsumsi Makanan	33	36,70	59,70	52,01	4,777
Valid N (listwise)	33				

Sumber : data diolah



Sumber : data diolah

Gambar 4.24
Distribusi Frekuensi Proporsi Pengeluaran Makanan
Menurut Provinsi Tahun 2007-2016

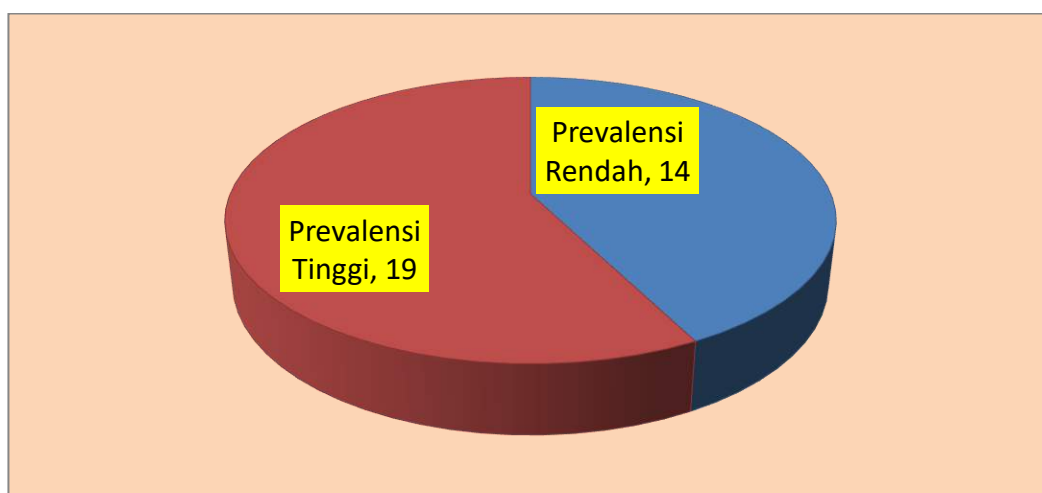
- c. Indikator 3 (prevaluensi kekurangan gizi) dengan indeks sebesar 47,3% yang dapat diartikan bahwa secara keseluruhan, provinsi-provinsi di Indonesia memiliki konsumsi kalori/kapita yang hamper sama dibandingkan dengan konsumsi kalori/kapita nasionalnya. Dari hasil pengolahan statistik deskriptif diperoleh nilai rata-rata prevalensi kekurangan gizi sebesar 1,002 dengan standar

deviasi sebesar 0,04 yang artinya bahwa variasi dari nilai prevalensi kekurangan gizi dari provinsi di Indonesia berada pada kisaran angka antara 0,096 sampai dengan 1,044. Nilai minimum dari prevanlesi sebesar 0,909 dimiliki oleh provinsi Bangka Belitung dan nilai maksimum dari prevalensi sebesarr 1,1292 dimiliki oleh provinsi Bali dengan nilai sebesar 1,292. Prevalensi dikaitkan dengan jumlah provinsi menunjukkan sebanyak 14 provensi memiliki prevenasi kekurangan gizi dan sisanya 19 provinsi memiliki prevalensi kelebihan gizi. Lebih jelasnya lihat tabel 4.15 dan gambar 4.25

Tabel 4.15
Prevanensi Kekurangan Gizi
Antar Provinsi di Indonesia (%) Tahun 2007-2016

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Prevalensi	33	.9091	1.1292	1.002121	.0444202
Valid N (listwise)	33				

Sumber : data diolah



Sumber : data diolah

Gambar 4.25
Distribusi Frekuensi Proporsi Prevalensi Kekurangan Gizi
Menurut Provinsi Tahun 2007-2016

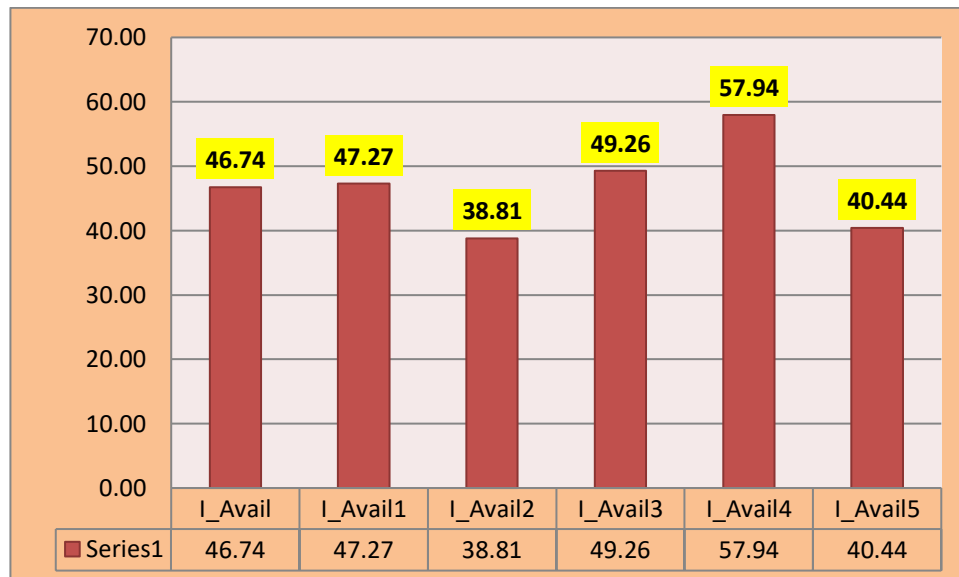
- d. Indikator 5 (tingkat defisit pangan) yang memiliki nilai indeks sebesar 47,3% yang artinya masih cukup banyak provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki kondisi dimana konsumsi energi perkapita dari setiap provinsi di Indonesia masih dibawah konsumsi energy yang disyaratkan sebagai kebutuhan energi minimal.

Satu indikator pengukuran dari dimensi *access* yaitu Indek Harga Pangan (indeks harga konsumen bahan makanan) menghasilkan indeks yang cukup baik yaitu dengan nilai sebesar 52,0%.

Dimensi *availability* sebagai penyebab kedua rendahnya rata-rata indeks ketahanan pangan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia terdiri dari 5 indikator pengukuran dan nilai indeks dari masing-masing indikator pengukuran dimensi *availability* dapat dilihat pada gambar 4.26. Dari gambar dapat dilihat bahwa indikator utama yang menjadi penyebab rendahnya dimensi dari *availability* adalah :

- a. Indikator kedua dari dimensi *availability* yaitu rata-rata nilai produksi pangan (produksi/kapita) dengan nilai indeks sebesar 38,81%
- b. Indikator kelima dari dimensi *availability* yaitu Prosentase pasokan energi yang berasal dari hewan (gr/cap/hari) dengan nilai indeks sebesar 40,44%
- c. Indikator pertama dari dimensi *availability* yaitu Rata-rata kecukupan pasokan energi makanan (kalori/kapita) dengan nilai indeks sebesar 47,27%
- d. Indikator ketiga dari dimensi *availability* yaitu prosentase pasokan energi yang berasal dari sereal, akar dan umbi (kalori/kapita) dengan nilai indeks sebesar 49,26%.

Satu indikator pengukuran dari dimensi *availability* yaitu indikator keempat yaitu Rata-rata pasokan protein (gr/cap/hari) memiliki nilai indeks yang cukup baik yaitu sebesar 57,94%.



Sumber : data diolah

Gambar 4.26
Rata-rata Indeks Ketahanan Pangan Dimensi *Availability*
dan Indikator Pengukurannya

Faktor kedua yang menjadi penyebab rendahnya nilai rata-rata indeks ketahanan pangan dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia adalah terjadinya kesenjangan (*gap*) yang cukup signifikan antara wilayah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur.. Jika dilihat dari peringkat indeks ketahanan pangan menurut provinsi selama periode 2007-2016, provinsi yang menempati peringkat pertama dalam indeks ketahanan pangan adalah provinsi Bali dengan nilai indeks sebesar 66,449%, diikuti dengan provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai indeks sebesar 61,134%. Peringkat ketiga ditempati oleh

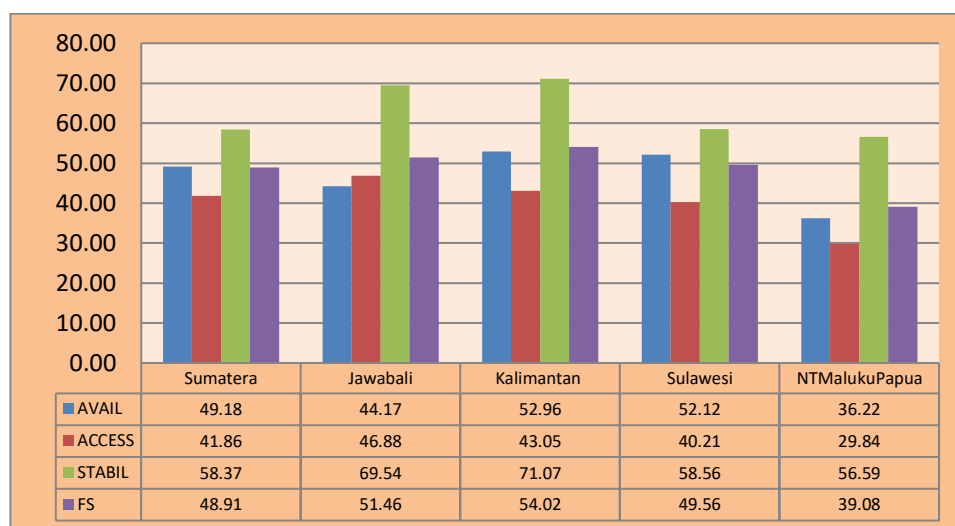
provinsi Sulawesi Selatan dengan angka indeks sebesar 55,090%, diikuti oleh Sumatera Selatan dengan nilai indeks sebesar 54,452 dan DKI Jakarta di peringkat kelima dengan nilai indeks sebesar 54,301%. Untuk lebih jelas mengenai peringkat ketahanan pangan dari 33 provinsi di Indonesia dapat dilihat pada tabel 4.16.

Tabel 4.16
Peringkat Indeks Ketahanan Pangan
Antara Provinsi di Indonesia Periode 2007-2016

No	Provinsi	AVAILABILITY	ACCESS	STABILITY	FOOD SECURITY
1	BALI	67.526	67.335	64.033	66.586
2	KALSEL	62.216	49.374	79.873	62.135
3	DKI	41.728	60.831	67.630	54.889
4	SUMSEL	56.146	42.475	69.715	54.753
5	SULSEL	65.173	45.494	48.677	54.161
6	KALTENG	62.120	43.151	56.545	54.087
7	SUMBAR	56.174	43.376	62.981	53.396
8	KEPRI	49.475	53.272	59.538	53.320
9	JABAR	45.923	42.375	78.140	52.735
10	KALBAR	49.847	32.271	81.846	51.695
11	RIAU	45.523	49.502	63.159	51.324
12	NTB	54.406	40.934	60.405	51.191
13	SULTRA	50.034	39.245	69.471	51.117
14	BANTEN	48.012	47.182	58.702	50.394
15	ACEH	51.264	36.701	67.808	50.303
16	SUMUT	50.893	39.488	64.459	50.293
17	SULUT	54.311	40.970	54.803	49.765
18	BENGKULU	48.293	39.733	65.768	49.666
19	SULTENG	45.213	39.641	70.281	49.530
20	LAMPUNG	48.238	37.626	68.152	49.502
21	KALTIM	37.645	47.412	66.029	48.159
22	GORONTALO	45.961	36.876	64.823	47.497
23	JATIM	37.720	36.326	71.401	45.653
24	SULBAR	52.037	39.060	43.325	45.317
25	JATENG	32.439	34.199	80.368	45.037
26	DIY	35.851	39.877	66.513	44.926
27	PAPUA	38.035	32.838	71.319	44.537
28	KEP. BABEL	43.656	38.550	50.777	43.649
29	NTT	44.381	29.489	49.922	40.554
30	PAPBAR	29.616	27.254	53.326	34.717
31	MALUKU	31.197	26.765	48.940	34.082
32	JAMBI	42.102	37.849	11.371	32.931
33	MALUT	19.704	21.757	55.613	29.400
RATA-RATA		46.753	40.583	61.991	48.403
STANDAR DEVIASI		10.513	9.134	13.222	7.746

Sumber : data diolah

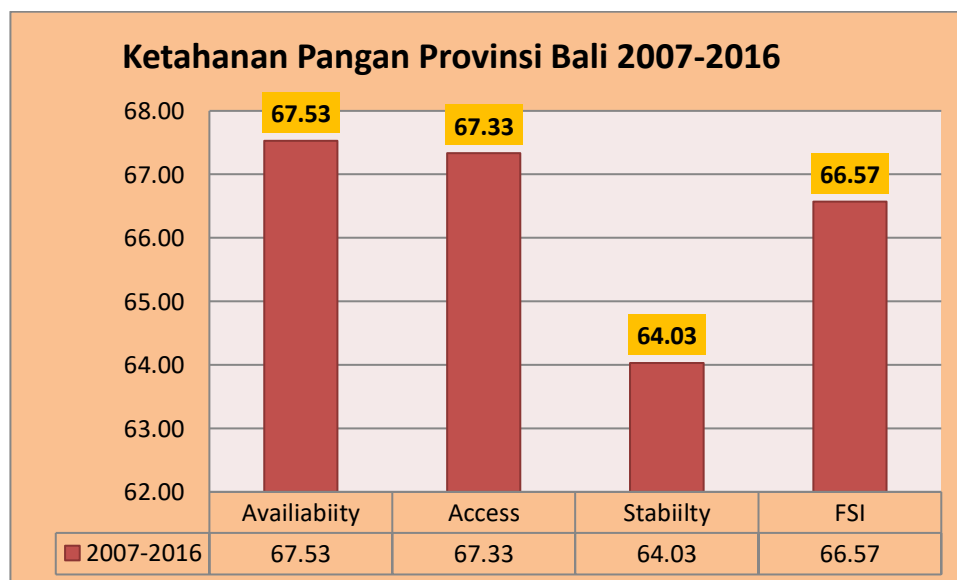
Ketimpangan mengenai indeks ketahanan pangan antar wilayah terutama wilayah timur dapat dilihat pada gambar 4.27. Informasi dari gambar menunjukkan wilayah timur Indonesia yaitu Nusa Tenggara, Maluku dan Papua memiliki skor indeks ketahanan pangan yang paling rendah dibandingkan 4 wilayah lainnya yaitu Sumatera, Jawa+Bali, Kalimantan dan Sulawesi. Secara keseluruhan wilayah timur yaitu Nusa Tenggara, Maluku dan Papua memiliki indeks ketahanan pangans sangat rendah yaitu sebesar 38,68% dan penyebab rendahnya indeks ketahanan pangan di wilayah timur disebabkan karena rendahnya nilai indeks dimensi *access* dan *availability* dengan nilai indeks masing-masing sebesar 29,84% dan 36,22%. Untuk keempat wilayah lainnya yang Sumatera, Jawa + Bali, Kalimantan dan Sulawesi secara keseluruhan tidak memiliki perbedaan indeks ketahanan pangan yang terlalu signifikan.



Sumber : data diolah

Gambar 4.27
Indeks Ketahanan Pangan Antar Wilayah di Indonesia
Tahun 2007-2016

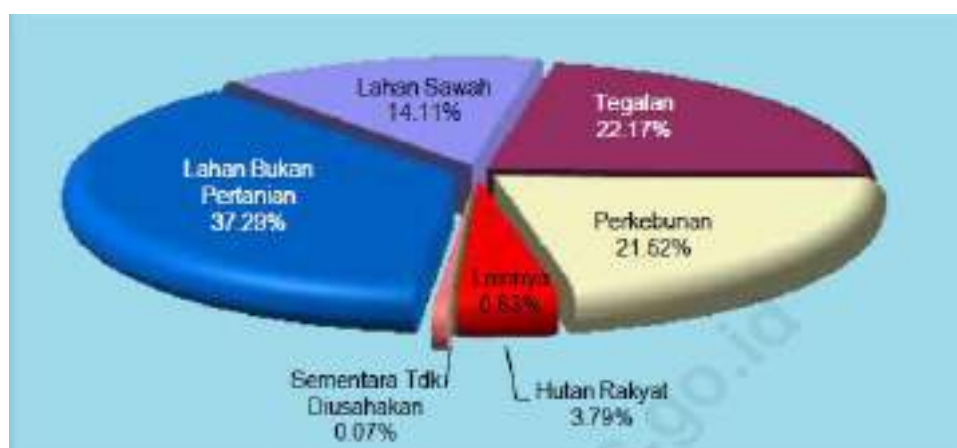
Bali merupakan provinsi yang memiliki indeks ketahanan pangan paling tinggi dan menempati peringkat 1 untuk periode 2007-2016 dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jika dilihat dari indeks ketahanan pangan, baik secara keluruhan maupun jika dilihat berdasarkan dimensi ketahanan pangan, provinsi Bali selalu berada pada kelompok 3 yaitu pada tingkatan indeks ketahanan pangan yang sedang dengan kisaran angka antara 57,10% sampai dengan 72,30% seperti ditunjukkan pada gambar 4.28. Indeks ketahanan dimensi *Availability* dan *Access* memberikan kontribusi yang paling besar terhadap pembentukan ketahanan pangan provinsi Bali seperti ditunjukkan dengan rata-rata indeks *Availability* selama periode 2007-2016 sebesar 67,53% dan untuk dimensi *Access* sebesar 67,33%. Dimensi *stability* memberikan kontribusi paling rendah terhadap indeks ketahanan pangan provinsi Bali yaitu sebesar 64,03%.



Sumber : data diolah

Gambar 4.28
Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Bali
Tahun 2007-2016

Indeks *Availiability* adalah dimensi yang menopang provinsi Bali menempati peringkat pertama untuk indeks ketahanan pangan di Indonesia. Salah satu faktor yang menjadi penyebab adalah fondasi yang kuat dari sektor pertanian di provinsi Bali. Pada tahun 2016 dari total sebesar 353.491 ha penggunaannya terdiri dari 14,11% untuk lahan sawah, 22,17% untuk lahan tegalan, 21,52% untuk lahan perkebunan, 37,29% untuk lahan bukan pertanian, 3,79% untuk hutan rakyat, sebanyak 0,63% untuk lainnya dan 0,07% sisanya tidak diusahakan seperti ditunjukkan pada gambar 4.29. Penggunaan lahan yang erat kaitannya dengan ketahanan pangan adalah lahan untuk sawah dimana dari total 79.536 ha lahan sawah (14,11% dari total daratan provinsi Bali) sebanyak 78.526 ha (99,27%) adalah sawah irigasi sisanya 0,73% adalah sawah tadah hujan (Bali Dalam Angka, 2017).



Sumber : data diolah

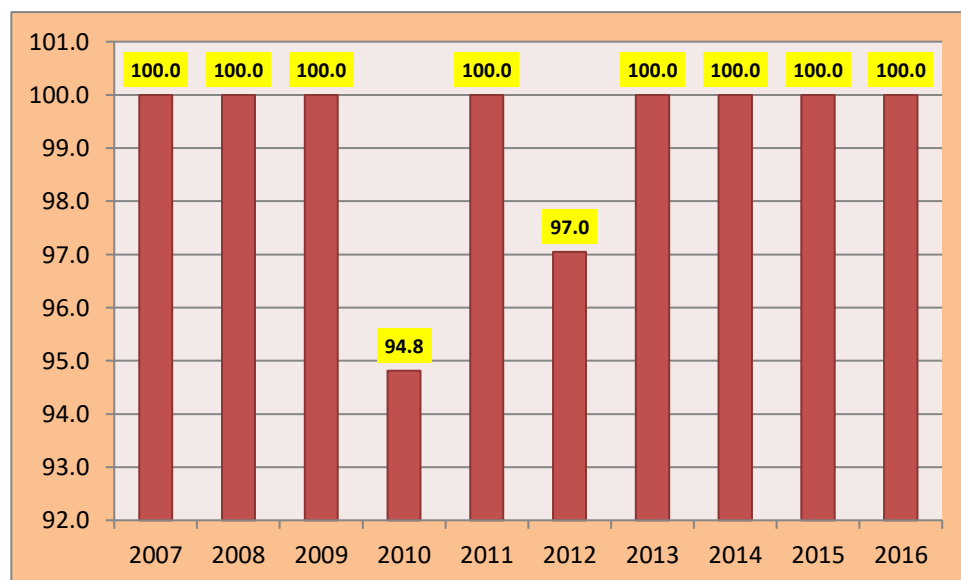
Gambar 4.29
Proposi Penggunaan Lahan Provinsi Bali 2016

Dampak dari status lahan sawah provinsi Bali yang hampir seluruhnya merupakan sawah irigasi adalah tingginya indeks ketahanan pangan untuk dimensi

availability provinsi Bali. Dari 5 indikator pengukuran dari dimensi Availability, untuk 2 indikator Bali mendominasi dan menjadi acuan bagi provinsi lain. Kedua indikator yang dimaksud adalah :

1. Rata-rata kecukupan pasokan energi makanan (kalori/kapita)

Selama periode 2007-2016, untuk indikator rata-rata kecukupan pasokan energy makanan, Bali secara keseluruhan selalu menempati peringkat 1 dan menjadi acuan bagi provinsi lain seperti ditunjukkan dengan nilai indeks indikator ini yang nilainya mayoritas 100 seperti ditunjukkan gambar 4.30 dimana selama 10 tahun periode penelitian Bali hamper selalu menempati peringkat pertama untuk indikator pasokan energi makanan kecuali pada tahun 2010 dan 2012 walaupun tetap pada angka indeks yang tinggi.

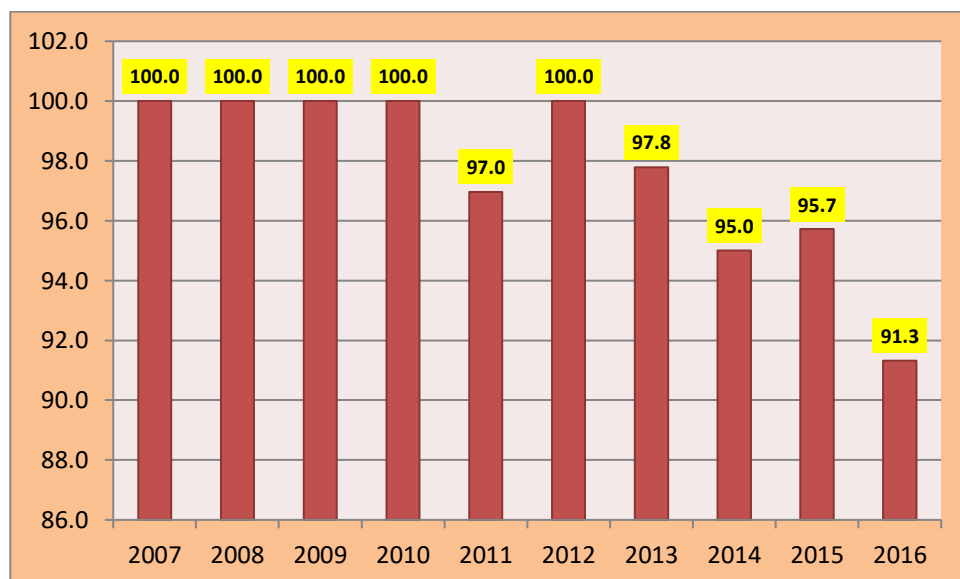


Sumber : data diolah

Gambar 4.30
Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Bali
Dimensi Availability Indikator Rata-rata Pasokan Energi Makanan
Tahun 2007-2016

2. Rata-rata pasokan protein

Indikator pasokan protein/kapita merupakan salah satu factor yang menyebabkan indeks *availability* provinsi Bali paling dominan dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia sehingga menjadi daerah acuan bagi provinsi yang lain. Hal ini dapat dilihat dari nilai indeks dari indikator rata-rata pasokan protein Bali selama periode 2007-2016 nilainya rata-rata diatas 90% seperti ditunjukkan dengan gambar 4.31.



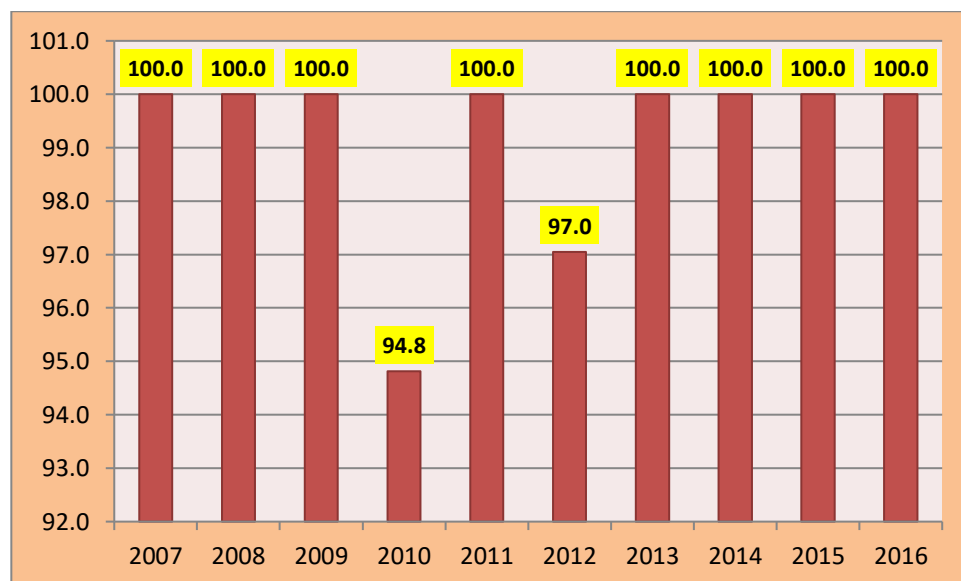
Sumber : data diolah

Gambar 4.31
Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Bali
Dimensi Availability Indikator Rata-rata Pasokan Protein
Tahun 2007-2016

Indeks ketahanan pangan dimensi *Access* untuk provinsi Bali juga memberikan kontribusi yang signifikan di dalam pencapaian provinsi Bali menempati peringkat pertama indeks ketahanan pangan di Indonesia. Dari 5 indikator pengukuran dimensi *access*, Bali mendominasi terhadap 2 indikator pengukuran yaitu :

1. Prevalensi kekurangan gizi

Hasil dari pengolahan data menunjukkan indikator untuk prevalensi kekurangan gizi provinsi Bali paling baik dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari dominannya nilai indeks prevalensi kekurangan gizi selama periode 2007-2016 provinsi Bali yang nilainya hampir selalu paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya kecuali untuk tahun 2010 dan 2012 yang nilainya walaupun tidak 100 tetapi masih tinggi yaitu memiliki indeks diatas 90.



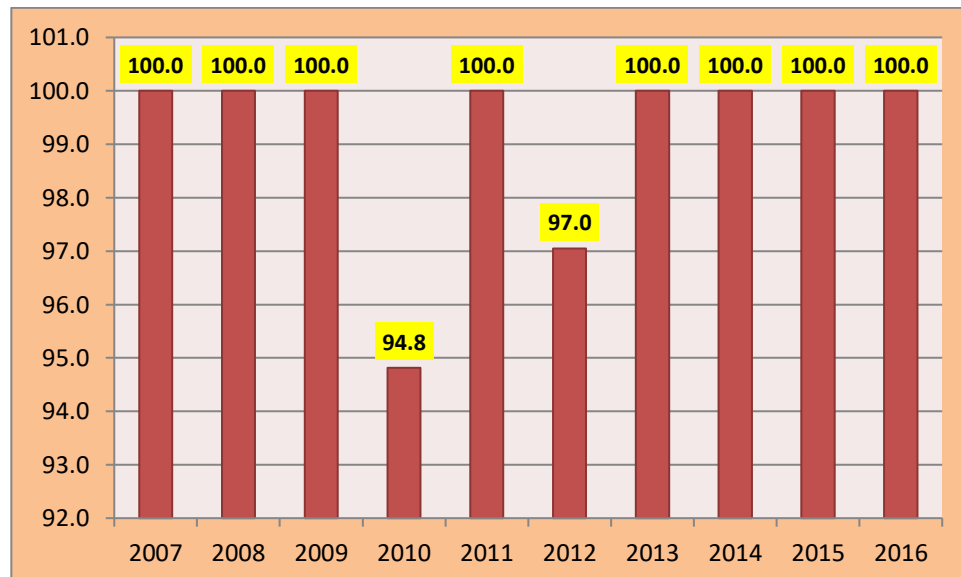
Sumber : data diolah

Gambar 4.31
Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Bali
Dimensi Availability Indikator Rata-rata Pasokan Protein
Tahun 2007-2016

2. Tingkat Defisit Pangan

Indikator tingkat defisit pangan untuk provinsi Bali selama periode 2007-2016 nilainya secara keseluruhan paling dominan dibandingkan dengan provinsi lain. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai indeks tingkat defisit pangan yang

mencapai angka 100% selama 8 tahun dan hanya pada tahun 2010 dan 2012 indeks tingkat deficit pangan provinsi Bali sekalipun tidak mencapai angka 100% tetapi nilainya masih tinggi yaitu diatas 90% seperti ditunjukkan pada tabel 4.32.



Sumber : data diolah

Gambar 4.32
Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Bali
Dimensi Availability Indikator Tingkat Defisit Pangan
Tahun 2007-2016

Berkebalikan dengan provinsi Bali, Jambi adalah salah satu provinsi yang secara konsisten selama periode 2007-2016 memiliki indeks ketahanan pangan pada tingkatan yang rendah yaitu berada pada kisaran angka antara 24% – 41,40%. Faktor yang menjadi penyebab utama dari rendahnya indeks ketahanan pangan provinsi Jambi adalah sifat dari lahan pertanian yaitu lahan sawah yang mayoritas merupakan sawah non irigasi seperti ditunjukkan pada tabel 4.17. Dari total lahan pertanian sawah sebesar 133.868 ha, yang merupakan sawah irigasi hanya sebesar

27,06% dan sisanya yaitu 72,94% merupakan sawah non irigasi yang sangat tergantung pada kondisi alam. Jika dilihat dari sebaran sawah irigasi menurut kabupaten/kota yang ada di provinsi Jambi, terdapat ketimpangan yang cukup signifikan antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota yang lain. Dari total 27,94% yang merupakan sawah irigasi, sebanyak 21,8% merupakan sawah irigasi yang berada di kabupaten Kerinci (11,36%), Kabupaten Merangin (5,52%) dan kabupaten Bungo (4,93%).

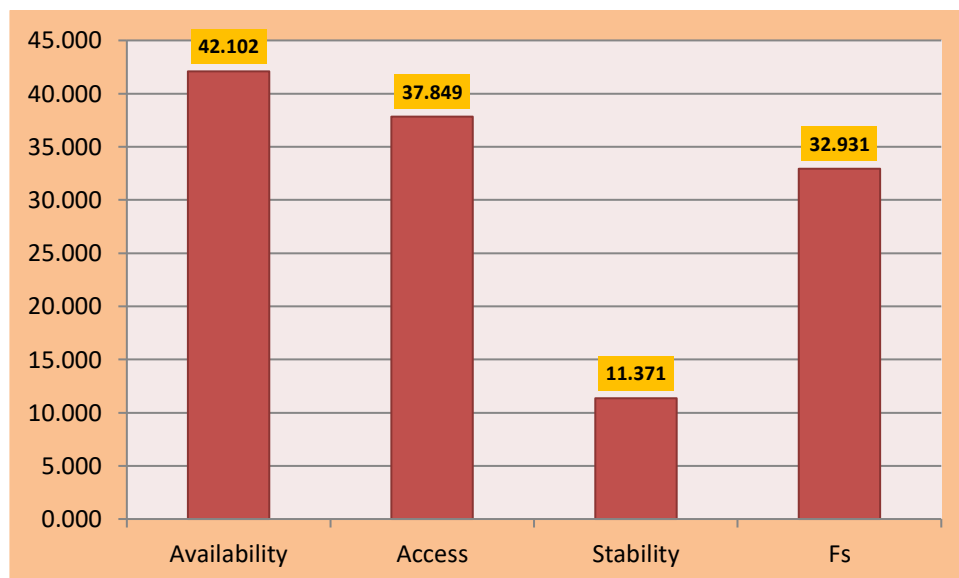
Tabel 4.17
Jenis Lahan Pertanian Untuk Sawah
Provinsi Jambi tahun 2016

Kabupaten/kota	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kerinci	15.205	3.720	18.915
2. Merangin	7.388	4.923	12.311
3. Sarolangun	1.909	4.806	6.715
4. Batang Hari	352	17.002	17.354
5. Muaro Jambi	840	22.354	23.194
6. Tanjab Timur	0	22.637	22.637
7. Tanjab Barata	1.021	9.298	10.310
8. Tebo	1.230	9.155	10.385
9. Bungo	6.604	566	7.170
10. Kota Jambi	0	1.349	1.349
11. Kota Sunga Penuh	1.671	1.848	3.519
Jambi	36.220	97.648	133.868

Sumber : Jambi Dalam Angka, 2016

Dampak yang terjadi akibat sumber daya untuk menghasilkan produk pangan utama yaitu beras adalah rendahnya indeks ketahanan pangan provinsi Jambi selama periode 2007-2016 yaitu rata-rata mencapai nilai sebesar 32,931% (lihat tabel 4.16). Rendahnya rata-rata indeks ketahanan pangan provinsi Jambi

adalah akibat rendahnya kontribusi dari 3 dimensi pembentuk indeks ketahanan pangan, dimensi *stability* memiliki nilai indeks rata-rata paling rendah yaitu 11,371%, diikuti indeks *Access* dengan nilai sebesar 37,849% dan indeks *Availiabiilty* dengan nilai sebesar 42,102% seperti ditunjukkan pada gambar 4.33.

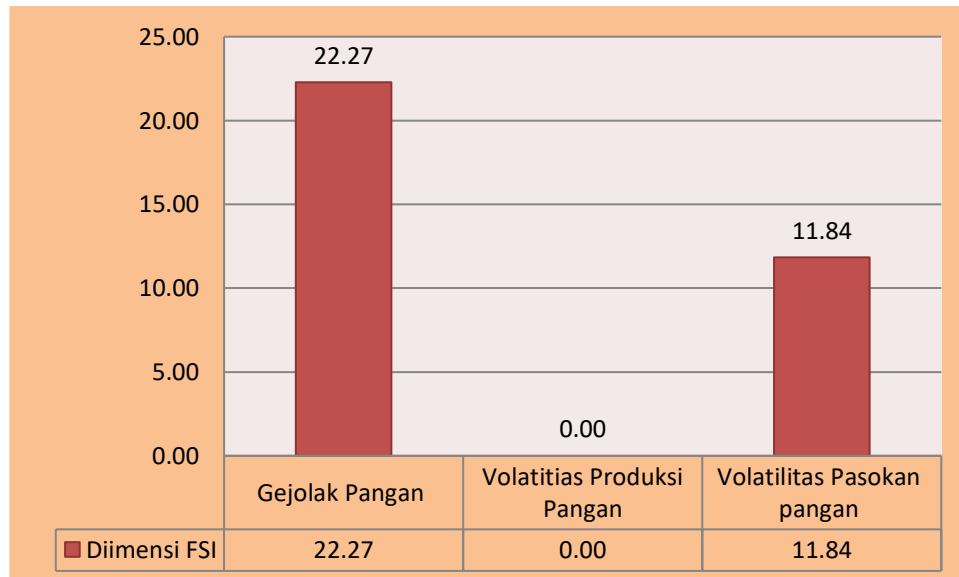


Sumber : data diolah

Gambar 4.33
Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
Tahun 2007-2016

Rendahnya dimensi *stability* menunjukkan bahwa fluktuasi dari kondisi pangan di provinsi Jambi yang terdiri dari 3 indikator yaitu gejolak pangan domestik, volatilitas produksi pangan dan volatilitas pasokan pangan memiliki indeks yang sangat rendah dan menempati peringkat lebih jelek jika dibandingkan dengan mayoritas provinsi-provinsi yang lain. Hasil pengolahan untuk ketiga indikator pengukuran dari dimensi *stability* ditunjukkan dengan gambar 4.34 dan dari hasil temuan dapat disimpulkan :

1. Indikator volatilitas produksi pangan provinsi jambi selama periode 2007-2016 memiliki indeks sebesar 0,00 yang menunjukkan bahwa Jambi merupakan provinsi yang memiliki volatilitas produksi pangan paling rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia atau dengan kata lain memiliki produksi pangan yang paling tidak stabil dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia
2. Indikator volatilitas dari pasokan pangan juga memiliki nilai indeks yang sangat rendah seperti ditunjukkan dengan nilainya sebesar 11,84% selama periode 2007-2016. Hal ini menunjukkan bahwa pasokan pangan di provinsi Jambi termasuk salah satu yang paling tidak stabil dibandingkan kondisi di provinsi lainnya yang ada di Indonesia.



Sumber : data diolah

Gambar 4.34
Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
Indikator Dimensi Stability
Tahun 2007-2016

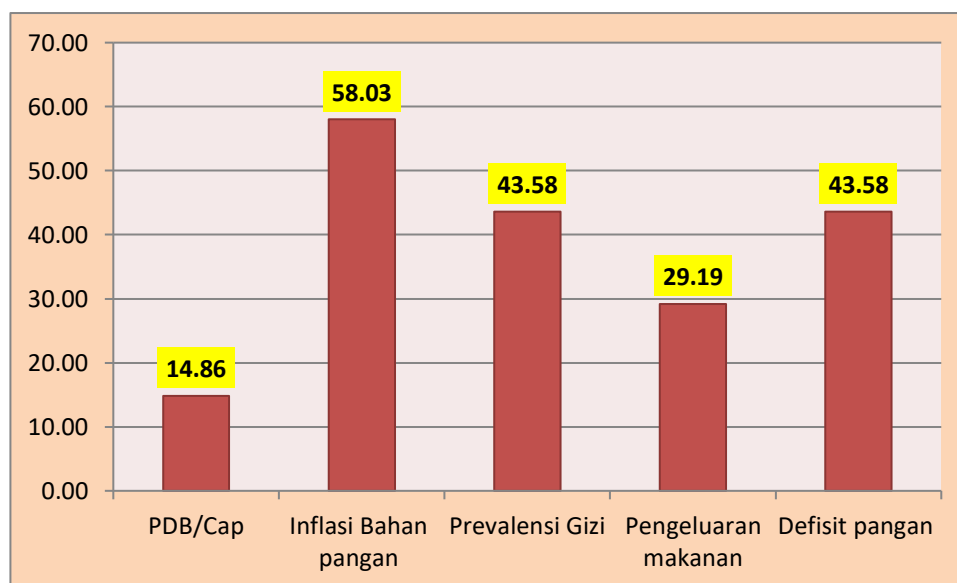
3. Indikator gajolak pangan yang diukur melalui standar deviasi inflasi pangan menghasilkan nilai indeks yang rendah untuk provinsi Jambi yaitu sebesar 22,72 selama periode 2007-2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan terutama untuk sumber karbohidrat di Provinsi Jambi sangat rendah dan salah satu penyebabnya adalah sistem tanam yang lebih mengandalkan pada kondisi alam (mengandalkan pada curah hujan)

Dimensi *Access* memberikan kontribusi yang juga rendah terhadap pembentukan indeks ketahanan pangan provinsi Jambi seperti ditunjukkan dengan nilai rata-rata dari indeks dimensi access selama periode 2007-2016 sebesar 37,849%. Dilihat dari pembentukan komponen dimensi *Access* yang terdiri dari 5 indikator pengukuran ditunjukkan pada gambar 4.35. Hasil dari gambar menunjukkan :

1. PDB perkapita sebagai proksi kemampuan setiap individu untuk memperoleh barang menghasilkan indeks yang rendah yaitu rata-rata selama periode 14,86% yang menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Jambi menempati posisi sangat rendah dibandingkan dengan kebanyakan provinsi lainnya di Indonesia.
2. Pengeluaran konsumsi makanan untuk provinsi Jambi menghasilkan angka indeks yang rendah seperti ditunjukkan dengan nilai sebesar 29,19% yang menunjukkan bahwa provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang memiliki proporsi pengeluaran konsumsi paling tinggi dari total pendapatan jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

3. Indikator prevalensi kekurangan gizi dan defisit pangan menghasilkan indeks yang rendah bagi provinsi Jambi seperti ditunjukkan dengan nilai indeks sebesar 43,85% selama periode 2007-2016.

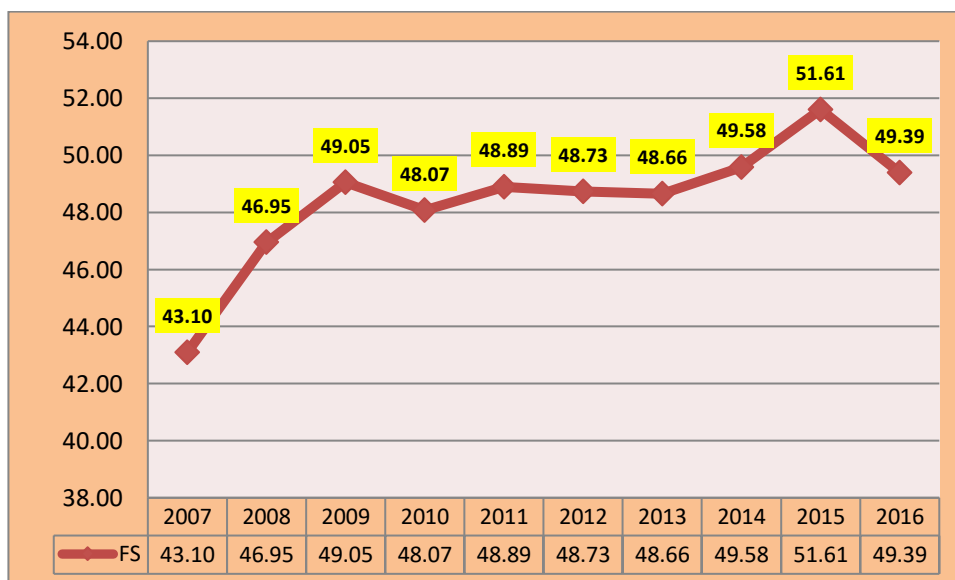
Untuk indikator inflasi bahan pangan menghasilkan indeks yang cukup tinggi seperti ditunjukkan dengan nilai-rata indeks inflasi bahan pangan sebesar 58,03% selama periode 2007-2016.



Gambar 4.35
Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
Indikator Dimensi Access
Tahun 2007-2016

Dari hasil pemetaan ketahanan pangan seperti telah dijelaskan diatas, secara keseluruhan indeks ketahanan pangan antar provinsi diIndonesia memiliki tren yang meningkat selama periode 2007-2016 seperti ditunjukkan pada gambar 4.36. Hal ini didukung oleh hasil pemetaan menurut provinsi dimana baik secara total maupun menurut dimensi dari ketahanan pangan terjadi perubahan indeks ketahanan pangan melalui perubahan status dari tingkatan sangat rendah menjadi

tingkatan rendah seperti ditunjukkan pada penjelasan bagian sebelumnya (tabel 4.7 dan tabel 4.8).



Gambar 4.36
Indeks Ketahanan Pangan Rata-rata Provinsi di Indonesia
Tahun 2007-2016

Jika dibandingkan dengan posisi ketahanan pangan Indonesia terhadap dunia, hasil perhitungan GFSI tahun 2017 menempatkan Indonesia memiliki indeks ketahanan pangan sebesar 51,3% dan berada pada peringkat 69 seperti ditunjukkan pada tabel 4.18. . Jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara, peringkat Indonesia masih dibawah Singapura (4) , Malaysia (41) , Thailand (55), Vietman (64) dan memiliki peringkat yang lebih baik dibandingkan dengan Philipina (79). Peringkat Indonesia pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun 2016 yang berada pada peringkat ke 71. Dibandingkan dengan negara-negara Asia Selatan, peringkat Indonesia masih

Tabel 4.18
Indeks Ketahanan Pangan Dunia Berdasarkan *Global Food Security Indeks* tahun 2017

OVERALL			OVERALL			OVERALL			OVERALL		
Rank	Negara	skor	Rank	Negara	skor	Rank	Negara	skor	Rank	Negara	skor
1	Ireland	85.6	31	Greece	71.9	61	Ecuador	55.2	91	Mali	39.4
2	United States	84.6	32	Saudi Arabia	71.0	62	Dominican Republic	54.8	92	Nigeria	38.4
3	United Kingdom	84.2	33	United Arab Emirates	70.9	63	Ukraine	54.1	93	Togo	37.2
4	Singapore	84.0	34	Slovakia	70.0	64	Vietnam	54.0	94	Tajikistan	35.9
5	Australia	83.3	35	Uruguay	69.7	65	El Salvador	53.1	95	Tanzania	35.4
6	Netherlands	82.8	36	Costa Rica	69.3	66	Sri Lanka	53.0	96	Sudan	34.8
7	Germany	82.5	37	Bahrain	68.6	67	Morocco	52.8	97	Guinea	34.0
8	France	82.3	38	Brazil	67.7	68	Algeria	51.5	98	Mozambique	33.7
9	Canada	82.2	38	Romania	67.7	69	Bolivia	51.3	99	Ethiopia	33.3
10	Sweden	81.7	40	Argentina	67.3	69	Indonesia	51.3	99	Syria	33.3
11	Austria	81.6	41	Malaysia	66.2	71	Venezuela	50.2	101	Angola	33.2
11	Switzerland	81.6	41	Russia	66.2	72	Nicaragua	50.0	102	Burkina Faso	33.1
13	Norway	81.4	43	Mexico	65.8	73	Guatemala	49.6	102	Laos	33.1
14	Finland	81.0	44	South Africa	64.0	74	India	48.9	104	Zambia	32.4
14	New Zealand	81.0	45	China	63.7	75	Honduras	48.6	105	Malawi	31.3
16	Denmark	80.3	46	Belarus	63.0	76	Ghana	47.9	106	Niger	29.5
17	Belgium	79.8	47	Bulgaria	62.9	77	Pakistan	47.8	107	Haiti	29.1
18	Japan	79.5	48	Panama	62.5	78	Uzbekistan	47.5	108	Yemen	28.8
19	Israel	79.2	49	Turkey	61.1	79	Philippines	47.3	109	Sierra Leone	28.7
20	Portugal	79.0	50	Serbia	60.6	80	Myanmar	44.8	110	Chad	28.3
21	Spain	78.1	51	Colombia	60.1	81	Nepal	44.5	111	Madagascar	27.2
22	Italy	75.9	52	Botswana	59.4	82	Senegal	44.2	112	Congo (Dem. Rep.)	25.5
23	Czech Republic	75.8	53	Peru	59.2	83	Cambodia	43.3	113	Burundi	25.1
24	Chile	74.7	54	Tunisia	58.8	83	Uganda	43.3			
24	South Korea	74.7	55	Jordan	58.3	85	Cote d'Ivoire	42.5			
26	Kuwait	74.6	55	Thailand	58.3	86	Kenya	42.2			
27	Poland	74.1	57	Azerbaijan	57.8	87	Cameroon	41.6			
28	Oman	73.9	58	Egypt	56.6	88	Rwanda	39.8			
29	Qatar	73.3	59	Paraguay	56.5	89	Bangladesh	39.7			
30	Hungary	72.2	60	Kazakhstan	56.0	90	Benin	39.6			

Sumber : Global Food Security Index 2017

lebih baik dibandingkan dengan India (74) akan tetapi masih dibawah Sri Lanka (66). Jika dibandingkan dengan negara-negara Afrika, nilai dan peringkat Indonesia relatif jauh lebih tinggi kecuali untuk beberapa negara afrika seperti Afrika Selatan (44) dan Botswana (55).

4.4.2. Analisis Pembahasan Model Pembangunan Manusia (IPM)

Pengujian hipotesis pertama yaitu pengaruh dari ketahanan pangan yang terdiri dari 3 dimensi yaitu *availability*, *access* dan *stability* terhadap IPM menghasilkan temuan hanya dua dimensi yaitu *availability* dan *access* yang terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap IPM sementara dimensi lainnya yaitu *stability* tidak terbukti berpengaruh signifikan positif. Sementara dari hasil perhitungan indeks ketahanan pangan seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa dimensi *availability* dan *access* merupakan masalah utama yang dihadapi hampir seluruh provinsi di Indonesia berkaitan dengan rendahnya indeks ketahanan pangan yang dimiliki oleh masing-masing provinsi. Bobot yang tinggi dari dimensi *availability* dan *access* di dalam membentuk ketahanan pangan dibandingkan dengan dimensi *stability* turut memberikan andil rendahnya ketahanan pangan yang dimiliki oleh masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu strategi yang harus dilakukan ke depan di dalam pencapaian tujuan pembangunan manusia harus searah dengan peningkatan ketahanan pangan dengan titik berat pada peningkatan kinerja dimensi *availability* dan dimensi *access*. Selain itu ketimpangan di dalam pencapaian kinerja terutama antara wilayah Indonesia barat dan tengah dengan

wilayah Indonesia timur menjadi perhatian utama di dalam membangun ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan.

Dari pengujian hipotesis kedua diperoleh suatu temuan bahwa rasio ketergantungan tidak terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap pembangunan manusia yang diproksi melalui IPM. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang berkualitas berhubungan erat dengan kondisi seberapa besar penduduk usia produksi (15 – 64 tahun) harus menanggung penduduk usia muda (< 15 tahun) dan penduduk usia lanjut (64+) . Rasio ketergantungan yang tinggi jika dilihat dari struktur demografi masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh penduduk usia muda dibandingkan penduduk usia 64+. Secara implisit hasil temuan ini mengindikasikan jumlah anggota keluarga yang dihasilkan masih belum memiliki kualitas yang baik sehingga menyebabkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari rasio ketergantungan terhadap pembangunan manusia antar propinsi di Indonesia. Banyaknya jumlah penduduk pada kelompok usia produktif dibandingkan kelompok usia non-produktif dapat memberikan manfaat bagi pembangunan nasional terutama pada sektor ekonomi. Akan tetapi untuk memanfaatkan kondisi tersebut, kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan secara maksimal antara lain melalui pendidikan, pelayanan kesehatan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Penyediaan lapangan pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi penduduk usia produktif karena penduduk usia produktif dituntut untuk bekerja sehingga pengangguran dapat diatasi. Penurunan rasio ketergantungan dapat

dilakukandengan menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga dapat meminimalisir terjadinya ledakan penduduk usia tidak produktif.

Hasil pengujian hipotesis untuk menguji pengaruh proporsi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap IPM menghasilkan temuan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Hal ini bisa terjadi karena struktur alokasi APBD pendidikan belum sepenuhnya menggambarkan pembangunan kualitas manusia menjadi arah dan kebijakan pembangunan. Hal ini secara langsung berkaitan dengan alokasi dana APBD untuk pendidikan tidak merata antar provinsi di Indonesia. Keterjangkauan masyarakat untuk menikmati pendidikan juga masih terbatas terutama untuk provinsi-provinsi yang berada di kawasan Indonesia timur. Dari statistik deskriptif APBD provinsi pada bagian sebelumnya mengunjukkan adanya fluktuasi naik turun yang mengindikasikan bahwa bidang pendidikan belum secara optimal

Penelitian ini menemukan bahwa proporsi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM. Hasil penelitian ini sesuai. Pasal 34 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Bentuk tanggung jawab negara terhadap pelayanan kesehatan harus diwujudkan dengan kebijakan anggaran yang memadai. Layanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Karena itu, pemerintah wajib membuka akses pelayanan kesehatan seluas mungkin dan memberi layanan berkualitas kepada setiap warga negara. Dalam konteks layanan kesehatan bagi warga miskin, pemerintah telah meluncurkan

berbagai program. Tujuan utama APBD untuk kesehatan adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Dengan adanya alokasikhusus untuk kesehatan yang berasal dari APBD diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan manusia karena kesehatan berkaitan dengan produktivitas

Penelitian ini juga menghasilkan temuan bahwa kebijakan perubahan metode perhitungan IPM berdampak signifikan terhadap pencapaian IPM yang dihasilkan dimana dengan metode baru, IPM yang dihasilkan setiap provinsi menjadi lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelum terjadinya perubahan metode perhitungan. Penggunaan metode baru ini pada dasarnya memberikan sinyal mengenai pengukuran IPM yang lebih konkrit dan riil seperti halnya pergantian dari indikator Angka Melek Huruf (AMH) dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) memang dirasa lebih tepat dibandingkan dengan AMH yang nilainya hampir seragam antaa provinsi yang satu dengan provinsi yang lain. Perubahan pengukuran hidup layak dengan menggunakan pengeluaran rata-rata perkapital dari 27 komoditas menjadi 96 komoditas dirasakan lebih tepat di dalam menggambarkan indikator IPM dan tentu saja hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi setiap provinsi untuk meningkatkan kembali pencapaian IPM nya dengan adanya penggunaan metode perhitungan yang baru.

Hasil temuan dimana krisis global terbukti berdampak signifikan terhadap pencapaian IPM di Indonesia khususnya antar provinsi yang ada di Indonesia mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap perubahan

yang terjadi secara eksternal terutama negara-negara maju yang menjadi mitra dagang utama Indonesia. Tentu saja hal ini menjadi sinyal bagi Indonesia untuk selalu meningkatkan kinerja dan daya saing dalam perdagangan dunia sehingga ke depannya tidak terlalu tergantung dan terpengaruh dengan adanya *shock* yang terjadi di luar dan pada akhirnya akan mengganggu jalannya pembangunan termasuk pembangunan manusianya.

4.5 Implikasi

4.5.1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada masalah ketahanan pangan dalam kaitannya dengan pembangunan manusia dengan objek penelitian adalah provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Pengukuran ketahanan pangan dilakukan dengan menggunakan ketahanan pangan konsep FAO dimana ketahanan pangan sendiri dibagi dalam kelompok 4 dimensi yaitu *availability*, *access*, *stability* dan *utilization*. Keterbatasan data terutama dalam dimensi *utilization* dimana dari 10 indikator yang digunakan hanya 2 indikator yang diperoleh sementara bobot dimensi yang rendah dari dimensi *utilization* menyebabkan dimensi *utilization* akhirnya dihilangkan dalam pengukuran ketahanan pangan pada penelitian ini,

Konsep pengukuran ketahanan pangan versi FAO dengan objek penelitian adalah provinsi di Indonesia merupakan penelitian yang menjadi keterbaharuan dari disertasi ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain di Indonesia yang khusus membahas mengenai ketahanan pangan di Indonesia. Penggunaan bobot

yang digunakan untuk dimensi pengukuran dari ketahanan pangan mengacu kepada bobot yang sudah dilakukan oleh penelitian Bank Indonesia yang dilakukan oleh Nurheni dengan menggunakan konsep ketahanan pangan versi Global Food Security Index (GFSI) yang memang memiliki irisan dimensi dengan konsep pengukuran yang dilakukan versi FAO. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai ketahanan pangan versi FAO harus lebih hati-hati untuk menentukan bobot dari dimensi ketahanan pangan yang digunakan misalnya melalui *Focus Group Discussion (FGD)* atau mendisain pengukuran indeks ketahanan pangan dengan menggunakan *Principal Component Analysis (PCA)* dengan alat analisis factor (factor analysis)

4.5.2. Implikasi Praktik Bagi Pengambil Kebijakan

Penelitian ini telah membuktikan bahwa ketahanan pangan terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap pembangunan manusia terutama untuk dimensi *availability* dan *access* sementara dimensi *stability* pengaruhnya marginal (positif tapi tidak signifikan). Dimensi *access* dalam penelitian ini terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap ketahanan pangan tetapi dalam pembentukan ketahanan pangan memiliki indeks ketahanan pangan yang palaign rendah dengan nilai skor indeks sebagian besar rendah yaitu memiliki indeks di bawah 50% untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak pemerintah untuk meningkatkan kinerja dari indeks dimensi *access*. Berdasarkan hasil temuan, indikator-indikator pengukuran dari dimensi *access* yang harus dipertimbangkan adalah :

- a. Peningkatan daya beli masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan pendapatan baik pemerataan antar provinsi maupun di dalam provinsi yang ternyata mengalami kesenjangan yang cukup signifikan.
- b. Peningkatan kualitas hidup dari masyarakat karena hasil temuan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi untuk makanan hamper mendominasi dibandingkan pengeluaran untuk non makanan yang artinya masalah utama di Indonesia masih bertumpu pada kebutuhan primer yang belum bisa teratasi dengan baik.

Dimensi kedua dari ketahanan pangan yaitu *availibity* dari hasil temuan juga menunjukkan kinerja yang rendah sehingga menyebabkan ketahanan pangan di Indonesia masih rendah. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja dari dimensi *availability* adalah

- a. Meningkatkan produksi pangan perkapita baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terutama pada produksi pangan karena dari hasil temuan menghasilkan indeks kinerja yang rendah yaitu 38,81%.
- b. Meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat terutama pasokan energy yang berasal dari hewani. Hal ini disebabkan karena dari hasil temuan diperoleh skor kinerja yang masih sangat rendah yaitu menghasilkan indeks sebesar 40,44%

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa rasio ketergantungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia. Hal ini secara implicit dapat terjadi karena penduduk usia produktif masih memiliki kinerja yang rendah (kualitas SDM) yang rendah. Oleh karena itu para pengambil kebijakan harus

memahami bahwa pembangunan dengan menenankan pada manusia harus mendapatkan perhatian khusus melalui alokasi anggaran pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui program-program baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk meningkatkan softskill dan hardskill dari manusianya.

Alokasi anggaran pemerintah untuk bidang pendidikan tidak terbukti berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Jika dilihat dari rata-rata pos pengeluaran APBD setiap provinsi untuk bidang pendidikan sudah melebihi target pemerintah yaitu minimal 20%. Hal yang perlu diperhatikan oleh para pengambil kebijakan melakukan evaluasi terhadap pos-pos anggaran di bidang pendidikan apakah program yang sudah dilakukan sudah efektif dan efisien dalam usaha meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Alokasi anggaran bidang kesehatan dari hasil temuan terbukti berpengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia. Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa program-program bidang kesehatan yang selama ini dilakukan sudah berjalan dengan baik sehingga alokasi anggaran yang dikeluarkan sudah tepat sasaran. Penciptaan program kartu sehat, BPJS dalam prakteknya sangat membantu masyarakat menghasilkan manusia-manusia yang sehat .



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Disertasi ini berusaha untuk memberikan perspektif yang baru mengenai masalah ketahanan pangan (*food security*) dengan melakukan perhitungan indikator ketahanan pangan untuk setiap provinsi yang ada di Indonesia dan mencoba mengkaitkan masalah ketahanan pangan dengan kondisi pembangunan manusia dalam hal ini diproksi melalui Indikator Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa variabel independen dimasukkan dalam model IPM untuk mendapatkan model yang paling baik dimana variabel yang dimaksud adalah rasio ketergantungan, proporsi pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan serta kebijakan perubahan metode pengukuran IPM dan kondisi krisis global tahun 2008.

Beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil temuan penelitian ini adalah :

1. Berkaitan dengan pemetaan ketahanan pangan (*food security*) antar provinsi di Indonesia, berikut beberapa simpulan yang diperoleh dari hasil temuan penelitian
 - a. Indeks Ketahanan Pangan rata-rata yang dihasilkan oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia baru mencapai tingkatan yang relatif rendah seperti ditunjukkan dengan nilai rata-rata indeks pangan selama periode 2007-2016 dibawah angka 50% kecuali pada tahun 2015 yang sudah mencapai angka 51,37%

- b. Dimensi ketahanan pangan *avalilability* dan *access* menghasilkan indeks paling rendah di dalam pembentukan indeks ketahanan pangan antar provinsi di Indonesia., sementara dimensi *stability* memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan indeks ketahanan pangan
 - c. Provinsi Bali dan Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang menempati rangking tertinggi dalam hal ketahanan pangan (*food security*), sementara Jambi, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat adalah provinsi-provinsi yang menempati peringkat terendah untuk ketahanan pangan antar provinsi di Indonesia selama periode 2007-2016.
 - d. Dilihat berdasarkan wilayah, indeks ketahanan pangan pada wilayah Indonesia bagian timur yaitu NTB, NTT, Maluku dan Papua nilainya lebih rendah dibandingkan dengan indeks ketahanan pangan di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.
2. Dalam kaitannya dengan pengaruh dari dimensi ketahanan pangan terhadap pembangunan manusia (*Human Development*) diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :
- a. Dimensi *availability* terbukti berpengaruh positif terhadap pembangunan Manusia antar provinsi di Indonesia
 - b. Dimensi *access* terbukti berpengaruh positif terhadap pembangunan Manusia antar provinsi di Indonesia.
 - c. Dimensi *stability* tidak terbukti berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia antar provinsi di Indonesia.

3. Hasil pengujian hipotesis pengaruh dari faktor demografi, kebijakan pemerintah terhadap pengeluaran anggaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan serta pengaruh dari kebijakan perubahan perhitungan IPM serta krisis global terhadap pembangunan manusia diperoleh kesimpulan
 - a. Rasio ketergantungan tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap pembangunan manusia antar provinsi di Indonesia.
 - b. Kebijakan pemerintah melalui proporsi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tidak terbukti berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia antar provinsi di Indonesia
 - c. Kebijakan pemerintah melalui proporsi pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terbukti berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia antar provinsi di Indonesia
 - d. Kebijakan penggunaan metode perhitungan IPM dengan menggantikan indikator Angka Melek Huruf (AMH) dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta mengganti indikator hidup layak dari pengeluaran konsumsi untuk 27 komoditas dengan pengeluaran konsumsi 96 komoditas serta metode perhitungan dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik terbukti berpengaruh negative terhadap pembangunan manusia antar provinsi di Indonesia.
 - e. Krisis global tahun 2008 terbukti memberikan pengaruh negatif yaitu berupa penurunan indeks IPM pada provinsi-provinsi yang ada di Indonesia.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan-temuan empiris dalam disertasi ini, dihasilkan beberapa saran yang dapat diberikan dalam kaitannya dengan kondisi ketahanan pangan serta pembangunan manusia..

1. Akademisi

Terdapat beberapa kelemahan yang dihasilkan dari disertasi ini yaitu

- a. Perhitungan indeks ketahanan pangan dilakukan dengan menggunakan indeks yang dinormalisasi relative terhadap provinsi lain yang dijadikan secara acuan (*bencmarking*) sehingga ukuran tinggi rendahnya nilai indeks akan maksimum sebesar nilai indeks dari provninsi yang dijadikan acuan tersebut. Saran untuk penelitian selanjutnya terkait dengan perhitungan indeks ketahanan pangan yang pengukurannya terdiri dari beberapa indikator pengukuran adalah menghitung indeks ketahanan pangan dengan menggunakan faktor analisis yaitu *Principal Component Analysis(PCA)* sehingga angka indeks yang dihasilkan memiliki nilai yang tidak dibatasi pada angka maksimum tertentu. Angka indeks yang semakin besar menunjukkan bahwa ketahanan pangan suatu daerah semakin kuat dan sebaliknya
- b. Kelamahan lain dari studi ini salah satunya adalah masalah *endogenity* dari *food security* terhadap pembangunan manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada dasarnya kebijakan perubahan perhitungan IPM yang baru yaitu mulai tahun 2014 dengan menggunakan 4 indikator pengukuran yaitu rata-rata lama hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah serta pengeluaran rata-rata pengeluaran perkapita untuk

96 komoditas sudah mengeliminir adanya *endogenitas* dengan pengukuran ketahanan pangan terutama untuk dua indikator pengukuran pada dimensi *access* yaitu pendapatan perkapita (PDB/Kapital) serta indikator prosentase pengeluaran konsumsi untuk makanan. Pengeluaran. Saran untuk penelitian selanjutnya dalam kaitannya dengan adalah masalah *endogeneity* adalah dengan mensubsitusikan indikator pengukuran ketahanan pangan yang mengandung unsur *endogeneity* dengan indikator pengukuran dimensi *access* versi dari *Global Food Security Index (GFSI)* untuk menggantikan indikator pengukuran yang dilakukan oleh FAO.

2. Pemerintah Daerah

- a. Hasil temuan disertasi ini menunjukkan bahwa kelemahan dari ketahanan pangan pada setiap provinsi di Indonesia terletak pada dimensi *availability* dan *access* sehingga dalam rangka peningkatan ketahanan pangan perlu dilakukan beberapa kebijakan yang mendorong peningkatan indeks dari dimensi *availability* dan *access* melalui beberapa strategi kebijakan antara lain :
 - Peningkatan fungsi dan kualitas lahan pertanian bahan pangan sehingga produktivitas lahan menjadi optimal dan supply akan kebutuhan pangan dapat tersedia sepanjang waktu. Hal ini terutama berkaitan dengan sistem pengairan untuk komoditas pangan terutama beras yang memang menjadi makanan pokok mayoritas masyarakat di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari temuan penelitian dimana daerah-daerah yang memiliki

ketahanan pangan yang kuat ditopang oleh sistem pengairan berupa pengairan irigasi sementara daerah-daerah dengan ketahanan pangan yang rendah memiliki sistem pertanian yang sifatnya tadah hujan (menggantungkan pada alam)

- Menciptakan lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup dengan layak. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensitasnya kolaborasi perusahaan-perusahaan berskala besar dengan pemerintah daerah melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dimiliki perusahaan secara lebih optimal dengan mensubstitusikan program-program yang selama ini lebih banyak bersifat *pilantropy (charity)* dengan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan manusia-manusia yang kedepannya mandiri secara ekonomi serta dapat memenuhi kebutuhan fisik minimumnya secara optimal dan layak.

- b. Dalam kaitannya dengan pembangunan manusia antar provinsi dihasilkan temuan masih belum optimalnya kebijakan pengeluaran alokasi dana bidang pendidikan di dalam menstimulus pembangunan manusia. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi secara lebih komprehensif dalam hubungannya daengan kebijakan pemerintah daerah terutama dalam hal alokasi anggaran di bidang pendidikan yang menempatkan siswa sebagai target bidik misi seperti pemberian program beasiswa kepada masyarakat tidak mampu tetapi

memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan produktivitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sebagai target dari pencapaian pembangunan manusia yang berkualitas harus mendapat porsi yang sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan.

- c. Untuk menciptakan manusia-manusia yang berkualitas dan mengurangi beban ketergantungan yang dimiliki oleh penduduk usia produktif maka kebijakan penanggulangan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) perlu ditingkatkan lagi pelaksanaannya



DAFTAR PUSTAKA

- Astri, Meylina. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Vol.1. No.1
- Ballenger, Nicole, and Carl Mabbs-Zeno. 1992. *Treating Food Security and Food Aid Issues at the GATT*. Food Policy 17 (4):264-276.
- Baltagi, Badi H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data*. Third Edition, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester.
- Bhakti, Nadia Ayu dan Istiqomah Suprpto. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Periode 2008-2012*, Ekuitas : Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 18, Nomor
- BPS. 2007 - 2016, Indeks Pembangunan Indonesia
- BPS.2007 – 2016. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi 2007: Berdasarkan Hasil Susenas Panel
- BPS.2007 – 2016. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi 2007: Berdasarkan Hasil Susenas Panel
- BPS. 2007 -2016. Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, SUSENAS,
- BPS. 2007-2016. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha
- BPS. 2017. Bali Dalam Angka
- BPS. 2017. Jambi Dalam Angka
- Bucher, Slavomir. 2017. *Quality of Human Resources In Europe-Measured by Selected Indicator of Human Potential*. Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, Volume 20, No 1
- Burchi, Francesco. 2012. *A Human Development and Capacity Approach to Food Security : Conceptual Framework and Informational Basis*. S. Working Paper, Februari, UNDP
- Barraclough,S., & Utting,P. 1987. *Food Security Trends and Prospects in Latin America*. Notre Dame. In: The Hellen Kellogg Institute of International Studies.

- Braun J,V., Bouis., Kumar.S, Lorch R.P., 1992. *Improving Food Security of The poor : Concept, Policy, and Programs*. International Food Policy Research Institute. Washington, D.C.
- Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian and World Food Programme (WFP), *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015: Versi Rangkuman*.
- Economics Intellegence Unit (EIU), 2016, *Global Food Security Index*
- Edeme, Richardson Kojo, Chigozie Nelson Nkalu and Innocent A. Ifelunini. 2017. *Distributional Impact Of PublicExpenditure On Human Development In Nigeria*. International Journal of Social Economics, Vol. 44 No. 12, 2017pp. 1683-1693
- FAO, 2017, *Food Security Indicators*
- FAO, 1992, *International Conference on Nutrition*, Rome, December
- Gani Azmat & Biman Chand Prasad. 2007. *Food Security and Human Development*. International Journal of Social Economics, Vol. 34 No.5. pp 310-219
- Gujarati. 2003.*Basic Econometric*. 5th Edition. Singapore: McGraw Hill
- Heka, Alison Jeackline Lawrence, dkk. 2017. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah, Efisiensi, Volume 17, No. 0
- Helen et al, 2001 *Food Security Assessment in Emergencies : a Livelihoods Approach*, Humanitarian Practices Net Wordk
- Information Management in Lesotho, FIVIMS Assesment Report
- International Food Policy Research Institute. 2016, *Global Hunger Index* Chichester: John Wiley & Sons. Ltd.
- Kahang, Merang dkk. 2016. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indkes Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Volume 18, (2), 2016 ISSN print: 1411-1713,
- Khan, Sarbuland. 2002. *Human Development, Health and Eduction*. United Nations Economic and Social Council

- Lengkong, Susye M.K dkk. 2017. *Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bitung*. Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Daerah, Vol. 19, No. 2
- Melliana, Ayunanda dan Ismaini Zein, 2013, *Analissi Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dengan Menggunakan Regresi Panel*. Jurnal Sains dan Semi Pomits Vo. 2, No. 2
- Nurhemi, Shinta R.I.Soekro, Guruh Suryani R,2014 *Pemetaaan Ketahanan Pangan di Indonsia: Pendekatan TFP dan Indeks Ketahanan Pangan*, Working Paper No.4.
- Prastowo, Nur Isa. 2011. Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Jurnal Studi Ekonomi Indonesia. Universitas Sebelas Maret
- Reddy. Amarender A, Ch Radhika rani, Timoty Cadman, Soor Naest Kumar, 2016, *Toward Sustainable Indicator of Food and Nutritional Outcomes in India*, World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, Vol. 13. No.2, 2016. Pp 128-142
- Rustariyuni, Surya Dewi, 2014, *Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan per Kapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode : 2004-2012*, Piramida. Vol. X. NO.1 : 45-55
- Safitri, Intan. 2016. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, Volume 1, Nomor 1, Hal.66-76
- Setiawan, Muhammad Bhakti dan Abdul Hakim, 2013, *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*, Jurnal Ekonomika, Volume 9, Nomor 1.
- Shuaibu, Mohammed and Popoola Timothy Oladayo. 2016. *Determinants of Human Capital Development in Africa: A Panel Data Analysis*. Quarterly Journal OeconomiA copernicana, Volume 7, Issue 4
- Smit Shah, 2016, *Determinant of Human Development Index : A Cross-Country Empirical Analysis*, MPRA, Paper No. 73759
- Sow. Mouhamadou. Moussa Berete, Gregory Uche, 2015. *The Relationship Between Safety, Security and Human Development in Africa*. International Researchers Volume No. 4, Issue No.2
- Syngenta, 2014, *Rice Bowl Indeks Report*. Ricebowlindex.com

- The Economics Intelligence Unit* , 2006, Global Food Security Index.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- UNDP, 1990, Human Development Report
- UNDP, 1996, Human Development Report
- UNDP, 2016, Human Development Report
- Verbeek, M. 2004. *A Guide to Modern Econometrics*. Second Edition. Suhardjo. 1996. *Pengertian dan Kerangka Pikir Ketahanan Pangan Rumah Tangga*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah tangga. Yogyakarta, 26-30 Mei.
- Verwimp, Philip, 2012, *Food Security, Violent Conflict and Human Development : Causes and Consequences*. Working Paper. No.016
- Widarjono. Agus . 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Ekonisia. Yogyakarta
- World Food Summit, 13- 17 November 1996, Rome, Italy
- Yanthi, Ni Putu Dera dan I Nyoman Budiantara, 2016, *Pemodelan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Menggunakan Regresi Non Parametrik Spline di Jawa Tengah*, Jurnal Sains dan Seni ITS, Vol. 5 NO. 2.



LAMPIRAN_1 : VARIABEL INDEX PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

No	Provinsi	2007					TAHUN 2008					TAHUN 2009				
		AHH THN	AMH %	RLS THN	EXP/CAP Rp ribu	IPM	AHH THN	AMH %	MYS THN	EXP/CAP Rp ribu	IPM	AHH THN	AMH %	MYS THN	EXP/CAP Rp ribu	IPM
1	ACEH	68,40	96,20	8,50	600,95	70,35	68,50	96,20	8,50	605,56	70,76	68,60	96,39	8,63	610,27	71,31
2	SUMATERA UTARA	69,10	97,03	8,60	624,12	72,78	69,20	97,08	8,60	629,97	73,29	69,35	97,15	8,65	634,73	73,80
3	SUMATERA BARAT	68,80	96,10	8,18	625,93	72,23	69,00	96,66	8,26	631,52	72,96	69,25	96,81	8,45	633,72	73,44
4	RIAU	71,00	97,80	8,40	634,11	74,63	71,10	97,81	8,51	638,31	75,09	71,25	98,11	8,56	642,55	75,60
5	JAMBI	68,60	96,00	7,63	622,99	71,46	68,80	96,05	7,63	628,25	71,99	68,95	96,06	7,68	632,60	72,45
6	SUMATERA SELATAN	69,00	96,66	7,60	617,59	71,40	69,20	97,05	7,60	623,49	72,05	69,40	97,21	7,66	628,30	72,61
7	BENGKULU	69,20	94,69	8,00	620,29	71,57	69,40	94,87	8,00	625,66	72,14	69,65	94,90	8,23	626,82	72,55
8	LAMPUNG	68,80	93,47	7,30	610,09	69,78	69,00	93,63	7,30	615,03	70,30	69,25	94,37	7,49	617,42	70,93
9	KEP. BABEL	68,50	95,40	7,18	631,75	71,62	68,60	95,57	7,37	636,07	72,19	68,75	95,63	7,41	639,10	72,55
10	KEPULAUAN RIAU	69,60	96,00	8,94	631,94	73,68	69,70	96,00	8,94	637,67	74,18	69,75	96,08	8,96	641,63	74,54
11	DKI JAKARTA	72,80	98,78	10,80	620,78	76,59	72,90	98,78	10,80	625,70	77,03	73,05	98,94	10,90	627,46	77,36
12	JAWA BARAT	67,60	95,32	7,50	623,64	70,71	67,80	95,53	7,50	626,81	71,12	68,00	95,98	7,72	628,71	71,64
13	JAWAB TENGAH	70,90	88,62	6,80	628,53	70,92	71,10	89,24	6,86	633,59	71,60	71,25	89,46	7,07	636,39	72,10
14	DI YOGYAKARTA	73,10	87,78	8,59	639,88	74,15	73,10	89,46	8,71	643,25	74,88	73,16	90,18	8,78	644,67	75,23
15	JAWA TIMUR	68,90	87,42	6,90	630,71	69,78	69,10	87,43	6,95	636,61	70,38	69,35	87,80	7,20	640,12	71,06
16	BANTEN	64,50	95,60	8,10	621,00	69,29	64,60	95,60	8,10	625,52	69,70	64,75	95,95	8,15	627,63	70,06
17	BALI	70,60	86,21	7,60	924,90	70,53	70,60	86,94	7,81	626,63	70,98	70,67	87,22	7,83	632,15	71,52
18	NTB	61,20	80,10	6,70	930,48	63,71	61,50	80,13	6,70	633,58	64,12	61,80	80,18	6,73	637,98	64,66
19	NTT	66,70	87,25	6,42	594,28	65,36	67,00	87,66	6,55	599,93	66,15	67,25	87,96	6,60	602,60	66,60
20	KALIMANTAN BARAT	66,10	89,40	6,70	617,90	67,53	66,30	89,40	6,70	624,74	68,17	66,45	89,70	6,75	630,34	68,79
21	KALIMANTAN TENGAH	70,90	97,50	8,00	624,79	73,49	71,00	97,67	8,00	628,64	73,88	71,10	97,69	8,02	633,91	74,36
22	KALIMANTAN SELATAN	62,60	95,26	7,40	625,80	68,01	63,10	95,30	7,44	630,83	68,72	63,45	95,41	7,54	634,59	69,30
23	KALIMANTAN TIMUR	70,60	95,70	8,80	628,10	73,77	70,80	96,36	8,80	634,52	74,52	71,00	96,89	8,85	638,73	75,11
24	SULAWESI UTARA	72,00	99,30	8,80	619,39	74,68	72,00	99,31	8,80	625,58	75,16	72,12	99,41	8,82	631,00	75,68
25	SULAWESI TENGAH	65,90	94,94	7,73	616,98	69,32	66,10	95,68	8,80	622,35	70,09	66,35	95,78	7,89	627,40	70,70
26	SULAWESI SELATAN	69,40	86,24	7,23	625,23	69,62	69,60	86,53	7,81	630,81	70,22	69,80	87,02	7,41	635,48	70,94
27	SULAWESI TENGGARA	67,20	91,30	7,71	604,96	68,32	67,40	91,42	7,23	611,72	69,00	67,60	91,51	7,90	615,29	69,52
28	GORONTALO	65,90	95,75	6,91	615,94	68,83	66,20	95,75	7,74	619,70	69,29	66,50	95,77	7,18	621,31	69,79
29	SULAWESI BARAT	67,20	86,40	6,51	622,90	67,72	67,40	87,31	6,91	625,04	68,55	67,60	87,59	7,05	630,32	69,18
30	MALUKU	66,80	98,00	8,60	601,26	69,96	67,00	98,12	6,99	605,02	70,38	67,20	98,13	8,63	610,73	70,96
31	MALUKU UTARA	65,10	95,20	8,60	593,88	67,82	65,40	95,44	8,60	595,69	68,18	65,70	95,74	8,61	598,45	68,63
32	PAPUA BARAT	67,60	90,32	7,65	592,07	67,28	67,90	92,15	8,60	593,13	67,95	68,20	92,34	8,01	595,28	68,58
33	PAPUA	67,90	75,41	6,52	593,42	63,41	68,10	75,41	7,67	599,65	64,00	68,35	75,58	6,57	603,88	64,53
	INDONESIA	68,26	92,64	7,78	636,87	70,31	68,44	92,96	7,90	634,26	70,88	68,63	93,18	7,94	627,02	71,40

No	Provinsi	TAHUN 2010					2011					TAHUN 2012				
		AHH THN	EYS %	MYS THN	EXP/CAP Rp ribu	IPM	AHH THN	AMH %	MYS THN	EXP/CAP Rp ribu	IPM	AHH THN	AMH %	MYS THN	EXP/CAP Rp ribu	IPM
1	ACEH	68,70	96,88	8,81	611,42	71,70	68,80	96,95	8,90	615,60	72,16	68,94	96,99	8,93	618,79	72,51
2	SUMATERA UTARA	69,50	97,32	8,85	636,33	74,19	69,65	97,46	8,91	640,23	74,65	69,81	97,51	9,07	643,63	75,13
3	SUMATERA BARAT	69,50	97,09	8,48	635,29	73,78	69,76	97,16	8,57	638,73	74,28	70,02	97,23	8,60	641,85	74,70
4	RIAU	71,40	98,35	8,58	646,63	76,07	71,55	98,42	8,63	650,83	76,53	71,69	98,45	8,64	654,48	76,90
5	JAMBI	69,10	96,07	7,84	633,67	72,74	69,25	96,16	8,05	637,60	73,30	69,44	96,50	8,20	640,82	73,78
6	SUMATERA SELATAN	69,60	97,36	7,82	629,38	72,95	69,80	97,44	7,84	633,57	73,42	70,05	95,69	7,99	637,47	73,99
7	BENGKULU	69,90	95,30	8,25	628,51	72,92	70,16	95,40	8,33	631,86	73,40	70,39	95,13	8,48	634,74	73,93
8	LAMPUNG	69,50	94,64	7,75	618,63	71,42	69,75	95,02	7,82	621,77	71,94	70,05	95,88	7,87	625,52	72,45
9	KEP. BABEL	68,90	95,69	7,45	641,51	72,86	69,05	95,83	7,58	645,37	73,37	69,21	97,80	7,68	648,49	73,78
10	KEPULAUAN RIAU	69,80	97,19	9,16	643,00	75,07	69,85	97,67	9,73	644,96	75,78	69,91	99,21	9,81	648,92	76,20
11	DKI JAKARTA	73,20	99,13	10,93	628,67	77,60	73,35	99,15	10,95	632,17	77,97	73,49	96,39	10,98	635,29	78,33
12	JAWA BARAT	68,20	96,18	8,02	632,22	72,29	68,40	96,29	8,06	635,80	72,73	68,60	90,45	8,08	638,90	73,11
13	JAWAB TENGAH	71,40	89,95	7,24	637,27	72,49	71,55	90,34	7,29	640,41	72,94	71,71	92,02	7,39	643,53	73,36
14	DI YOGYAKARTA	73,22	90,84	9,07	646,56	75,77	73,27	91,49	9,20	650,16	76,32	73,33	89,28	9,21	653,78	76,75
15	JAWA TIMUR	69,60	88,34	7,24	643,60	71,62	69,86	88,52	7,34	647,46	72,18	70,09	96,51	7,45	651,04	72,83
16	BANTEN	64,90	96,20	8,32	629,70	70,48	65,05	96,25	8,41	633,64	70,95	65,23	90,17	8,61	636,73	71,49
17	BALI	70,72	88,40	8,21	634,67	72,28	70,78	89,17	8,35	637,86	72,84	70,84	83,68	8,57	640,86	73,49
18	NTB	62,11	81,05	6,77	639,89	65,20	62,41	83,24	6,97	642,80	66,23	62,73	89,23	7,19	645,72	66,89
19	NTT	67,50	88,59	6,99	603,75	67,26	67,76	88,74	7,05	607,31	67,75	68,04	91,13	7,09	610,29	68,28
20	KALIMANTAN BARAT	66,60	90,26	6,82	631,65	69,15	66,75	90,51	6,89	635,85	69,66	66,92	97,88	7,14	638,82	70,31
21	KALIMANTAN TENGAH	71,20	97,78	8,03	636,47	74,64	71,30	97,84	8,06	640,73	75,06	71,41	96,88	8,15	644,21	75,46
22	KALIMANTAN SELATAN	63,81	95,94	7,65	637,46	69,92	64,17	96,14	7,68	640,73	70,44	64,52	96,43	7,89	643,66	71,08
23	KALIMANTAN TIMUR	71,20	97,05	8,87	642,51	75,56	71,40	97,21	9,19	646,01	76,22	71,58	97,55	9,22	649,85	76,71
24	SULAWESI UTARA	72,22	99,45	8,89	634,88	76,09	72,33	99,46	8,92	639,57	76,54	72,44	99,53	9,00	643,20	76,95
25	SULAWESI TENGAH	66,60	96,08	8,00	629,30	71,14	66,86	96,12	8,03	633,31	71,62	67,11	96,16	8,13	637,34	72,14
26	SULAWESI SELATAN	70,00	87,75	7,84	636,60	71,62	70,20	88,07	7,92	640,30	72,14	70,45	88,73	7,95	643,59	72,70
27	SULAWESI TENGGARA	67,80	91,85	8,11	616,99	70,00	68,00	91,95	8,21	621,44	70,55	68,21	92,04	8,25	625,81	71,05
28	GORONTALO	66,81	96,00	7,38	622,92	70,28	67,11	96,10	7,45	626,77	70,82	67,47	96,16	7,49	630,01	71,31
29	SULAWESI BARAT	67,80	88,48	7,11	631,76	69,64	68,00	88,54	7,15	635,84	70,11	68,27	88,79	7,32	639,56	70,73
30	MALUKU	67,40	98,14	8,76	614,01	71,42	67,60	98,15	8,82	617,75	71,87	67,84	98,17	9,15	620,08	72,42
31	MALUKU UTARA	66,01	96,08	8,63	600,20	69,03	66,31	96,19	8,66	603,20	69,47	66,65	96,43	8,71	606,22	69,98
32	PAPUA BARAT	68,51	93,19	8,21	596,08	69,15	68,81	93,39	8,26	599,28	69,65	69,14	93,74	8,45	601,56	70,22
33	PAPUA	68,60	75,60	6,66	606,38	64,94	68,85	75,81	6,69	609,18	65,36	69,12	75,83	6,87	611,99	65,86
	INDONESIA	68,83	93,58	8,08	629,03	71,86	69,02	93,82	8,18	632,67	72,37	69,23	94,05	8,29	635,96	72,87

No	Provinsi	TAHUN 2013					TAHUN 2014					TAHUN 2015				
		AHH THN	AMH THN	RLS THN	PDB/CAP Rp ribu	IPM	AHH THN	HLS THN	RLS THN	EXP/CAP Rp ribu	IPM	AHH THN	HLS THN	RLS THN	EXP/CAP Rp ribu	IPM
1	ACEH	69,40	97,04	9,02	621,40	73,05	69,35	13,53	8,71	8297,00	68,81	69,50	13,73	8,77	8533,00	69,45
2	SUMATERA UTARA	69,90	97,84	9,13	646,83	75,55	68,04	12,61	8,93	9391,00	68,87	68,29	12,82	9,03	9563,00	69,51
3	SUMATERA BARAT	70,09	97,38	8,63	644,59	75,01	68,32	13,48	8,29	9621,00	69,36	68,66	13,60	8,42	9804,00	69,98
4	RIAU	71,73	98,48	8,78	657,26	77,25	70,76	12,45	8,47	10262,00	70,33	70,93	12,74	8,49	10364,00	70,84
5	JAMBI	69,61	96,85	8,32	644,05	74,35	70,43	12,38	7,92	9141,00	68,24	70,56	12,57	7,96	9446,00	68,89
6	SUMATERA SELATAN	70,10	97,55	8,04	641,35	74,36	68,93	11,75	7,66	9302,00	66,75	69,14	12,02	7,77	9474,00	67,46
7	BENGKULU	70,44	96,55	8,55	637,50	74,41	68,37	13,01	8,28	8864,00	68,06	68,50	13,18	8,29	9123,00	68,59
8	LAMPUNG	70,09	95,92	7,89	628,24	72,87	69,66	12,24	7,48	8476,00	66,42	69,90	12,25	7,56	8729,00	66,95
9	KEP. BABEL	69,46	96,44	7,73	651,22	74,29	69,72	11,18	7,35	11691,00	68,27	69,88	11,60	7,46	11781,00	69,05
10	KEPULAUAN RIAU	69,97	98,07	9,91	651,37	76,56	69,15	12,51	9,64	13019,00	73,40	69,41	12,60	9,65	13177,00	73,75
11	DKI JAKARTA	73,56	99,22	11,00	637,92	78,59	72,27	12,38	10,54	16898,00	78,39	72,43	12,59	10,70	17075,00	78,99
12	JAWA BARAT	68,84	96,87	8,11	641,63	73,58	72,23	12,08	7,71	9447,00	68,80	72,41	12,15	7,86	9778,00	69,50
13	JAWAB TENGAH	71,97	91,71	7,43	646,44	74,05	73,88	12,17	6,93	9640,00	68,70	73,96	12,38	7,03	9930,00	69,49
14	DI YOGYAKARTA	73,62	92,86	9,33	656,19	77,37	74,50	14,85	8,84	12294,00	76,81	74,68	15,03	9,00	12684,00	77,59
15	JAWA TIMUR	70,37	90,49	7,53	654,02	73,54	70,45	12,45	7,05	10012,00	68,14	70,68	12,66	7,14	10383,00	68,95
16	BANTEN	65,47	96,87	8,61	639,28	71,90	69,13	12,31	8,19	1115,00	69,89	69,43	12,35	8,27	11261,00	70,27
17	BALI	71,20	91,03	8,58	643,78	74,11	71,20	12,64	8,11	12831,00	72,48	71,35	12,97	8,26	13078,00	73,27
18	NTB	63,21	85,19	7,20	648,66	67,71	64,90	12,73	6,67	8987,00	64,31	65,38	13,04	6,71	9241,00	65,19
19	NTT	68,05	90,34	7,16	612,88	68,77	65,91	12,65	6,85	6934,00	62,26	65,96	12,84	6,93	7003,00	62,67
20	KALIMANTAN BARAT	67,40	91,70	7,17	641,41	70,90	69,76	11,89	6,83	8175,00	64,89	69,87	12,25	6,93	8279,00	65,59
21	KALIMANTAN TENGAH	71,47	97,99	8,17	646,01	75,60	69,39	11,93	7,82	9682,00	67,77	69,54	12,22	8,03	9809,00	68,53
22	KALIMANTAN SELATAN	64,82	97,18	8,01	646,77	71,74	67,47	11,96	7,60	10748,00	67,63	67,80	12,21	7,76	10891,00	68,38
23	KALIMANTAN TIMUR	70,74	97,18	8,96	650,61	76,03	72,87	12,85	8,70	9654,00	71,23	72,91	12,86	8,76	9791,50	71,43
24	SULAWESI UTARA	72,62	99,56	9,09	646,19	77,36	70,94	12,16	8,86	9628,00	69,96	70,99	12,43	8,88	9729,00	70,39
25	SULAWESI TENGAH	67,21	96,22	8,22	640,69	72,54	67,18	12,71	7,89	8602,00	66,43	67,26	12,72	7,97	8768,00	66,76
26	SULAWESI SELATAN	70,60	89,69	8,01	646,71	73,28	69,60	12,90	7,49	9723,00	68,49	69,80	12,99	7,64	9992,00	69,15
27	SULAWESI TENGGARA	68,56	92,59	8,44	628,77	71,73	70,39	12,78	8,02	8555,00	68,07	70,44	13,07	8,18	8697,00	68,75
28	GORONTALO	67,54	96,87	7,52	633,14	71,77	67,00	12,49	6,97	8762,00	65,17	67,12	12,70	7,05	9035,00	65,86
29	SULAWESI BARAT	68,34	90,54	7,35	642,66	71,41	64,04	11,78	6,88	817,00	62,24	64,22	12,22	6,94	826,00	62,96
30	MALUKU	67,88	98,25	9,20	622,59	72,70	65,01	13,53	9,15	7925,00	66,74	65,31	13,56	9,16	8026,00	67,05
31	MALUKU UTARA	66,97	97,45	8,72	609,26	70,63	67,34	12,72	8,34	7234,00	65,18	67,44	13,10	8,37	7423,00	65,91
32	PAPUA BARAT	69,14	94,14	8,53	604,82	70,62	65,14	11,87	6,96	6944,00	61,28	65,19	12,06	7,01	7064,00	61,73
33	PAPUA	69,13	75,92	6,87	616,76	66,25	64,84	9,94	5,76	6416,00	56,75	65,09	9,95	5,99	6469,00	57,25
	INDONESIA	69,38	94,61	8,34	638,82	73,33	69,04	12,45	7,91	9063,24	67,88	69,21	12,65	8,00	9552,32	68,49

No	Provinsi	TAHUN 2016				
		AHH THN	HLS THN	RLS THN	EXP/CAP Rp ribu	IPM
1	ACEH	69,51	13,89	8,86	8768,00	70,00
2	SUMATERA UTARA	68,33	13,00	9,12	9744,00	70,00
3	SUMATERA BARAT	68,73	13,79	8,59	10126,00	70,00
4	RIAU	70,79	12,86	8,59	10465,00	71,20
5	JAMBI	70,71	12,72	8,07	9795,00	69,62
6	SUMATERA SELATAN	69,16	12,23	7,83	9935,00	68,24
7	BENGKULU	68,56	13,38	8,37	9492,00	69,33
8	LAMPUNG	69,94	12,35	7,63	9156,00	67,65
9	KEP. BABEL	69,92	11,71	7,62	1196,00	69,55
10	KEPULAUAN RIAU	69,45	12,66	9,67	13359,00	73,99
11	DKI JAKARTA	72,49	12,73	10,88	17468,00	79,60
12	JAWA BARAT	72,44	12,30	7,95	10035,00	70,05
13	JAWAB TENGAH	74,02	12,45	7,15	10153,00	69,98
14	DI YOGYAKARTA	74,71	15,23	9,12	13229,00	78,38
15	JAWA TIMUR	70,74	12,98	7,23	10715,00	69,74
16	BANTEN	69,46	12,70	8,37	11469,00	70,96
17	BALI	71,41	13,04	8,36	13279,00	73,65
18	NTB	65,48	13,16	6,79	9575,00	65,81
19	NTT	66,04	12,97	7,02	7122,00	63,13
20	KALIMANTAN BARAT	69,90	12,37	6,98	8348,00	65,81
21	KALIMANTAN TENGAH	69,57	12,33	8,13	10155,00	63,13
22	KALIMANTAN SELATAN	67,92	12,29	7,89	11307,00	69,05
23	KALIMANTAN TIMUR	73,06	12,97	8,87	9894,50	71,90
24	SULAWESI UTARA	71,02	12,55	8,96	10148,00	71,05
25	SULAWESI TENGAH	67,31	12,92	8,12	9034,00	67,47
26	SULAWESI SELATAN	69,82	13,16	7,75	10281,00	69,76
27	SULAWESI TENGGARA	70,46	13,24	8,32	8871,00	69,31
28	GORONTALO	67,13	12,88	7,12	9175,00	66,29
29	SULAWESI BARAT	64,31	12,34	7,14	8450,00	63,60
30	MALUKU	65,35	13,73	9,27	8215,00	67,60
31	MALUKU UTARA	67,51	13,45	8,52	7545,00	66,63
32	PAPUA BARAT	65,30	12,26	7,06	7175,00	62,21
33	PAPUA	65,12	10,23	6,15	6637,00	58,05
	INDONESIA	69,26	12,81	8,11	9706,56	68,87



LAMPIRAN_2 : VARIABEL KETAHANAN PANGAN

1. Dimensi : Availability

NO	PROVINSI	Rata-rata kecukupan pasokan energi makanan (kalori/kapita)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	2210,02	2080,83	2010,37	2010,37	1962,62	1869,93	1823,36	1794,04	1989,61	2021,08
2	SUMATERA UTARA	2069,52	2074,76	1921,70	1970,81	1993,59	1892,36	1848,80	1883,81	2010,98	1999,99
3	SUMATERA BARAT	2131,21	2160,13	2082,73	2056,46	2082,06	2023,38	1893,56	1901,48	2091,49	2162,82
4	RIAU	2128,83	2144,41	1932,54	1903,59	2020,46	1862,37	1871,37	1868,26	2061,26	2033,47
5	JAMBI	2074,99	2057,70	1904,06	1927,61	1960,08	1894,87	1775,98	1764,53	1986,49	1988,23
6	SUMATERA SELATAN	2058,19	2106,36	1991,76	1989,11	1999,53	1925,99	1848,17	1887,11	2062,86	2029,93
7	BENGKULU	2108,93	2074,01	1982,19	2007,41	1988,76	1892,07	1883,73	1876,48	2072,90	2099,87
8	LAMPUNG	2120,94	2169,98	1945,76	1953,67	1967,20	1880,60	1825,27	1750,15	1933,55	1952,08
9	KEP. BABEL	2106,63	2035,46	1800,29	1971,63	1831,20	1828,31	1779,35	1812,78	2074,55	2060,02
10	KEPULAUAN RIAU	1983,98	2131,56	2079,02	2004,71	1895,49	1832,21	1915,48	1860,85	2091,16	2157,61
11	DIKI JAKARTA	1943,24	1884,95	1896,40	1881,91	1880,46	1870,81	1812,89	1918,19	1948,93	1982,28
12	JAWA BARAT	2029,19	2085,83	1962,59	1930,91	1978,76	1815,57	1853,87	1864,94	2044,29	2126,43
13	JAWAB TENGAH	1924,94	1982,84	1860,83	1835,37	1893,82	1805,86	1821,33	1846,01	1936,26	1964,01
14	DI YOGYAKARTA	1915,43	1765,82	1802,61	1852,05	1832,26	1838,27	1946,37	1968,87	1939,53	2063,40
15	JAWA TIMUR	1930,53	1956,19	1856,72	1844,14	1886,85	1805,56	1795,19	1869,74	1972,96	2038,48
16	BANTEN	2079,79	2055,61	1979,58	1964,26	1987,55	1897,67	1956,01	1895,36	2067,41	2135,13
17	BALI	2585,29	2385,21	2192,83	2120,28	2131,76	2018,83	2056,78	2079,54	2183,09	2215,85
18	NTB	1974,60	2003,69	1956,21	2050,38	2061,86	2029,18	1972,28	1950,10	2006,52	2075,62
19	NTT	1904,24	2037,34	1971,70	1960,28	2061,86	1813,49	1741,23	1701,94	1775,22	1889,63
20	KALIMANTAN BARAT	2057,35	2010,41	1926,22	1917,06	1960,78	1841,38	1848,04	1822,28	1935,91	1955,17
21	KALIMANTAN TENGAH	2123,98	2203,65	2071,30	2058,25	2060,51	1918,08	1858,10	1900,10	2073,94	2111,25
22	KALIMANTAN SELATAN	2151,41	2084,36	2039,19	2080,53	2104,51	1980,01	1954,21	1966,66	2119,95	2144,62
23	KALIMANTAN TIMUR	1951,91	1816,03	1736,69	1829,15	1813,49	1761,92	1698,29	1632,88	1794,20	1870,52
24	SULAWESI UTARA	2099,11	2062,56	1910,19	2015,22	1978,53	1917,49	1873,16	1918,04	2041,87	2074,83
25	SULAWESI TENGAH	2044,31	2136,33	1950,63	1896,25	2014,43	1864,43	1892,44	1825,40	1985,74	1990,21
26	SULAWESI SELATAN	2094,74	2129,15	2006,11	2056,17	2078,70	1957,13	1921,69	1896,03	1995,00	2040,92
27	SULAWESI TENGGARA	2135,76	2136,50	1931,97	1926,63	1927,15	1891,36	1820,75	1829,50	1992,91	2034,18
28	GORONTALO	1901,24	2003,43	1826,90	1895,67	1882,41	1845,55	1730,83	1856,27	2068,46	2033,02
29	SULAWESI BARAT	2006,06	2006,06	1868,58	2136,21	1975,05	1905,39	1936,78	1900,87	1980,70	2061,73
30	MALUKU	1884,39	1939,04	1956,68	1841,53	1926,86	1796,05	1751,87	1715,28	1760,56	1837,22
31	MALUKU UTARA	1949,89	1974,11	1737,47	1854,53	1780,10	1678,41	1632,35	1663,56	1688,34	1720,41
32	PAPUA BARAT	1898,15	1873,31	1822,13	1892,73	1806,23	1696,60	1645,07	1637,37	1832,98	1828,53
33	PAPUA	1981,58	1906,18	1950,40	1992,89	1847,90	1806,31	1617,42	1667,36	1807,66	1764,80
Nilai Max		2585,29	2385,21	2192,83	2136,21	2131,76	2029,18	2056,78	2079,54	2183,09	2215,85
Nilai Min		1884,39	1765,82	1736,69	1829,15	1780,10	1678,41	1617,42	1632,88	1688,34	1720,41

NO	PROVINSI	Rata-rata nilai produksi pangan (produksi/kapita) Rp juta									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	1,0162	1,0518	1,2788	1,3259	1,8042	1,7985	1,9933	1,9429	2,4434	2,3678
2	SUMATERA UTARA	0,6812	0,9456	1,0805	1,2097	1,4312	1,4838	1,5737	1,5821	1,8418	2,0262
3	SUMATERA BARAT	1,1738	1,3713	1,5598	1,7588	2,1965	2,2567	2,4261	2,8897	2,8534	3,1143
4	RIAU	0,2586	0,3024	0,3622	0,3829	0,3968	0,3783	0,3376	0,3158	0,3300	0,3220
5	JAMBI	0,1325	0,6089	0,7447	0,6865	0,9157	0,8715	0,8516	0,9649	0,8957	9,6633
6	SUMATERA SELATAN	1,3703	1,5504	1,7336	2,0944	2,2506	2,4509	2,8758	2,8484	3,0216	3,7599
7	BENGKULU	0,8594	0,9574	1,0219	1,0939	1,2414	1,5135	1,5795	1,5997	1,7382	1,9127
8	LAMPUNG	1,4143	1,8333	2,2389	2,6538	3,1485	2,9461	3,2276	3,3584	3,5898	3,5873
9	KEP. BABEL	0,0437	0,0815	0,1076	0,1088	0,0751	0,0987	0,1155	0,1072	0,1476	0,2093
10	KEPULAUAN RIAU	0,0128	0,0161	0,0151	0,4921	0,0168	0,0181	0,0194	0,0200	0,0206	0,0423
11	DIKI JAKARTA	0,0023	0,0025	0,0034	0,0038	0,0041	0,0047	0,0044	0,0033	0,0030	0,0024
12	JAWA BARAT	0,6863	0,7427	0,8857	1,0146	1,2449	1,2122	1,3232	1,3271	1,3817	1,4655
13	JAWAB TENGAH	0,8302	0,9724	1,1036	1,2887	1,5460	1,7996	1,7138	1,7346	2,0860	2,0894
14	DI YOGYAKARTA	0,9117	1,0824	1,3056	1,5471	1,6680	1,8326	1,9191	1,9641	2,1859	2,3234
15	JAWA TIMUR	0,8996	1,1191	1,2493	1,4435	1,6514	1,8754	1,8957	1,9567	2,2742	2,3548
16	BANTEN	0,4151	0,4402	0,4857	0,5589	0,7205	0,6729	0,7459	0,7410	0,8847	0,8467
17	BALI	0,6971	0,7434	0,8549	0,8331	0,9955	1,0001	1,0280	0,9960	1,0361	1,0507
18	NTB	0,8883	1,1177	1,3541	1,3826	2,0167	2,1130	2,1397	2,2873	2,8431	2,8637
19	NTT	0,6610	1,0957	1,3415	1,3797	1,3620	1,7144	1,8216	1,8149	1,9478	2,0157
20	KALIMANTAN BARAT	0,8470	1,0219	1,0411	1,0975	1,3693	1,3202	1,4332	1,5514	1,4006	1,5193
21	KALIMANTAN TENGAH	0,7800	0,7927	0,9092	1,4020	1,3225	1,5737	1,6042	1,8707	2,1885	2,0065
22	KALIMANTAN SELATAN	1,5426	1,5519	1,6944	1,9946	2,3945	2,4205	2,2718	2,8672	3,3240	3,5309
23	KALIMANTAN TIMUR	0,6533	0,6496	0,6200	0,6744	0,7292	0,7185	0,5341	0,5147	0,5603	0,4684
24	SULAWESI UTARA	0,4199	1,1213	1,3001	1,4000	1,5595	1,6169	1,7369	1,8237	1,6837	2,1644
25	SULAWESI TENGAH	0,8505	1,0721	1,2626	1,1291	1,5399	1,4779	1,5605	1,6448	1,7729	2,0891
26	SULAWESI SELATAN	1,2468	1,5313	1,8454	1,9609	2,4633	2,8317	2,6939	3,0931	3,6709	3,8905
27	SULAWESI TENGGARA	0,8234	0,6483	0,7774	0,7544	0,9400	0,9508	0,9875	1,1188	1,3516	1,3642
28	GORONTALO	1,5934	2,0991	1,9246	2,0824	2,1426	2,1523	2,3559	2,6341	2,7989	3,9259
29	SULAWESI BARAT	0,7633	0,9514	0,9883	1,0599	1,3641	1,5339	1,5316	1,5707	1,9787	2,6153
30	MALUKU	0,3982	0,4951	0,7505	0,7181	0,6372	0,6311	0,5947	0,6055	0,9544	1,0371
31	MALUKU UTARA	0,4346	0,4690	0,4942	0,5544	0,7111	0,7087	0,7438	0,7810	0,7172	0,7333
32	PAPUA BARAT	0,0917	0,1068	0,0817	0,2692	0,2914	0,2532	0,2749	0,2749	0,2892	0,3036
33	PAPUA	2,3240	2,6580	3,4858	1,0023	1,0571	1,1603	1,3932	1,4716	1,4477	1,5438
Nilai Max		2,32	2,66	3,49	2,65	3,15	2,95	3,23	3,36	3,67	9,66
Nilai Min		0,002	0,002	0,003	0,004	0,004	0,005	0,004	0,003	0,003	0,002

NO	PROVINSI	Prosentase pasokan energi yang berasal dari sereal, akar dan umbi (kalori/kapita)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	1148,00	1094,42	1090,53	1104,84	1034,11	981,10	995,34	937,55	968,90	929,76
2	SUMATERA UTARA	1116,77	1091,80	1043,48	1044,86	1053,19	984,30	957,51	1032,27	972,32	969,54
3	SUMATERA BARAT	1116,10	1095,29	1039,65	1002,07	1049,79	964,62	959,79	951,38	926,62	917,93
4	RIAU	932,64	931,38	894,78	873,59	946,22	867,43	857,85	892,38	868,97	860,69
5	JAMBI	1027,12	1028,26	974,35	972,03	989,45	917,11	912,86	900,71	890,86	902,00
6	SUMATERA SELATAN	1038,27	1093,48	1066,18	1050,52	1026,30	960,88	965,28	951,52	957,94	969,73
7	BENGKULU	1176,40	1163,56	1109,24	1121,42	1056,73	989,75	997,87	1013,35	1033,87	1004,89
8	LAMPUNG	1071,93	1086,59	1046,60	1045,13	1013,90	935,77	917,14	890,76	887,02	899,70
9	KEP. BABEL	936,44	964,06	901,50	920,98	866,69	852,63	958,37	866,22	900,36	880,50
10	KEPULAUAN RIAU	781,95	868,18	859,73	845,47	813,27	741,22	723,80	696,70	706,24	726,23
11	DIKI JAKARTA	764,82	700,54	703,33	708,61	632,48	686,80	676,46	753,57	695,91	726,32
12	JAWA BARAT	1018,51	1062,56	1017,47	981,44	1001,02	922,12	901,98	906,50	906,27	913,72
13	JAWAB TENGAH	888,13	917,49	879,17	863,70	881,15	815,73	810,65	794,36	803,16	794,95
14	DI YOGYAKARTA	724,57	716,34	704,54	734,07	726,35	726,31	767,37	789,93	783,53	734,47
15	JAWA TIMUR	949,54	977,62	923,64	907,39	925,82	877,44	865,14	869,34	889,22	850,83
16	BANTEN	1000,32	978,91	956,51	898,92	907,70	932,88	864,41	847,49	899,85	912,26
17	BALI	1162,43	1130,18	198,91	1081,97	1078,10	1038,09	1018,97	1010,01	1030,26	960,71
18	NTB	1181,83	1215,43	1163,07	1189,93	1176,68	1192,69	1145,25	1123,42	1178,84	1105,68
19	NTT	1318,86	1371,42	1349,15	1327,77	1321,46	1284,95	1244,13	1225,05	1321,36	1311,63
20	KALIMANTAN BARAT	1112,69	1105,14	1097,07	1081,63	1046,53	1004,85	976,73	946,57	960,44	972,85
21	KALIMANTAN TENGAH	1084,44	1174,57	1079,24	1084,74	1033,98	931,41	948,81	877,51	908,32	897,89
22	KALIMANTAN SELATAN	961,43	938,79	891,11	870,98	887,91	854,11	841,18	844,17	864,01	868,39
23	KALIMANTAN TIMUR	855,63	817,13	750,66	778,96	788,34	774,18	771,10	770,05	877,78	877,39
24	SULAWESI UTARA	1147,91	1210,67	1185,02	1079,53	1090,72	1018,98	1005,48	1024,61	1017,15	984,21
25	SULAWESI TENGAH	1133,73	1145,65	1091,64	1094,11	1189,90	1043,08	1037,99	1040,23	1051,67	1109,43
26	SULAWESI SELATAN	1167,32	1181,80	1144,56	1114,64	1150,58	1106,38	1081,24	1034,33	1050,99	1058,81
27	SULAWESI TENGGARA	1272,15	1309,76	1140,12	1107,20	1113,65	1077,16	1104,50	1106,63	1138,65	1148,45
28	GORONTALO	1088,53	1154,46	1035,06	1018,40	998,06	985,21	1002,96	992,69	1039,37	1005,29
29	SULAWESI BARAT	1198,25	1183,70	1141,61	1273,21	1202,78	1107,14	1176,09	1131,23	1179,93	1135,70
30	MALUKU	961,42	1010,75	1037,55	988,80	1013,48	998,32	963,22	927,68	986,63	934,49
31	MALUKU UTARA	869,22	989,71	859,16	895,39	890,88	879,06	984,56	835,15	845,75	879,26
32	PAPUA BARAT	1058,28	989,32	959,75	1057,75	989,58	881,35	922,05	893,71	937,53	916,29
33	PAPUA	1152,24	1108,11	1106,01	1167,81	1106,57	1055,76	1048,26	1052,49	1073,73	1071,91
Nilai Max		1318,86	1371,42	1349,15	1327,77	1321,46	1284,95	1244,13	1225,05	1321,36	1311,63
Nilai Min		724,57	700,54	198,91	708,61	632,48	686,80	676,46	696,70	695,91	726,23

NO	PROVINSI	Rata-rata pasokan protein (gr/cap/hari)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	61,19	57,49	54,57	57,45	55,58	53,39	51,41	51,76	54,08	55,12
2	SUMATERA UTARA	58,52	60,13	55,04	57,13	57,58	54,15	53,43	54,98	54,66	54,93
3	SUMATERA BARAT	56,07	56,98	55,28	56,87	56,89	54,66	50,54	51,44	53,68	56,71
4	RIAU	60,85	57,95	54,73	55,03	57,71	52,77	53,06	53,43	54,71	54,84
5	JAMBI	57,13	56,22	51,54	52,62	54,56	52,06	49,32	48,14	51,31	51,89
6	SUMATERA SELATAN	58,21	56,86	53,62	54,67	55,86	52,84	51,81	53,43	55,35	54,67
7	BENGKULU	56,56	55,18	52,84	54,40	55,93	52,90	51,75	52,30	54,32	54,84
8	LAMPUNG	57,06	57,64	51,49	52,78	52,82	50,95	49,13	46,97	50,35	51,15
9	KEP. BABEL	61,98	59,31	51,57	58,37	54,90	55,24	54,17	55,22	60,39	59,13
10	KEPULAUAN RIAU	56,11	62,23	60,69	57,61	57,06	55,95	60,87	59,28	62,59	64,55
11	DIKI JAKARTA	59,23	58,49	59,54	59,17	61,35	59,53	58,73	62,89	58,39	60,30
12	JAWA BARAT	59,23	59,50	56,05	56,19	58,17	52,52	53,48	54,80	57,34	60,43
13	JAWAB TENGAH	55,94	55,80	51,48	51,27	53,42	51,22	51,74	52,70	53,76	54,42
14	DI YOGYAKARTA	55,30	49,56	51,35	52,89	53,81	53,13	60,06	60,63	57,48	61,71
15	JAWA TIMUR	55,87	55,30	52,70	52,53	54,17	51,81	50,00	54,27	55,21	56,70
16	BANTEN	62,39	60,03	57,32	58,34	59,20	56,24	57,74	56,31	58,64	61,58
17	BALI	65,50	68,81	64,10	62,08	61,65	60,12	60,40	61,72	61,60	62,28
18	NTB	55,81	56,81	54,87	57,93	60,06	58,57	58,05	55,37	54,15	56,43
19	NTT	51,91	56,14	54,12	54,00	52,30	50,01	46,94	46,16	46,27	49,40
20	KALIMANTAN BARAT	57,51	55,84	53,01	53,58	55,85	51,73	52,74	52,16	51,95	52,79
21	KALIMANTAN TENGAH	60,19	63,34	60,87	60,72	60,73	55,77	54,22	55,24	56,23	58,11
22	KALIMANTAN SELATAN	61,04	58,86	58,46	60,12	62,22	57,76	58,34	57,75	59,31	60,43
23	KALIMANTAN TIMUR	58,45	54,04	52,58	57,92	56,27	54,24	53,49	50,89	52,58	54,88
24	SULAWESI UTARA	56,98	56,90	52,10	56,01	56,43	55,11	54,82	55,59	57,90	58,66
25	SULAWESI TENGAH	53,48	55,94	51,72	51,12	54,33	50,20	51,64	50,61	53,36	53,36
26	SULAWESI SELATAN	60,90	61,97	57,49	60,03	60,81	57,83	55,20	54,57	55,20	56,96
27	SULAWESI TENGGARA	56,86	57,10	54,12	56,31	56,82	55,94	52,91	54,22	55,74	56,97
28	GORONTALO	52,71	55,19	48,95	53,96	52,85	50,45	47,97	51,29	57,19	55,34
29	SULAWESI BARAT	54,58	52,48	52,80	59,59	56,11	53,32	54,60	53,24	53,07	55,91
30	MALUKU	49,42	53,00	49,90	46,76	54,06	49,92	46,52	46,48	47,60	50,07
31	MALUKU UTARA	47,69	50,76	42,87	46,91	45,81	43,68	43,17	44,98	45,13	46,57
32	PAPUA BARAT	47,95	48,49	49,35	51,08	51,03	48,13	46,66	48,01	49,69	50,00
33	PAPUA	47,89	46,90	49,75	48,06	43,45	40,54	39,60	39,45	39,48	38,40
Nilai Max		65,50	68,81	64,10	62,08	62,22	60,12	60,87	62,89	62,59	64,55
Nilai Min		47,69	46,90	42,87	46,76	43,45	40,54	39,60	39,45	39,48	38,40

NO	PROVINSI	Prosentase pasokan energi yang berasal dari hewan (gr/cap/hari)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	166,84	152,40	139,06	163,68	155,55	147,10	134,60	134,47	180,70	183,18
2	SUMATERA UTARA	166,91	162,26	141,28	164,28	166,33	168,97	153,84	168,83	165,87	192,44
3	SUMATERA BARAT	137,33	144,28	137,08	161,41	156,99	154,49	144,93	147,02	161,90	173,27
4	RIAU	225,21	196,15	191,82	197,29	210,35	201,75	196,75	209,63	214,01	229,21
5	JAMBI	174,55	170,27	150,27	171,17	179,95	181,51	156,47	152,65	157,10	190,80
6	SUMATERA SELATAN	170,74	159,28	142,07	165,00	173,44	162,82	155,58	176,54	172,32	204,88
7	BENGKULU	121,95	123,75	124,06	136,44	149,56	134,44	132,96	132,33	154,38	180,86
8	LAMPUNG	123,44	132,30	114,37	124,28	131,38	125,73	110,60	108,24	110,27	163,19
9	KEP. BABEL	222,86	209,99	170,64	205,93	200,98	196,04	209,02	204,57	219,06	248,16
10	KEPULAUAN RIAU	210,28	227,22	225,09	230,08	230,74	283,22	325,57	269,73	281,62	271,09
11	DIKI JAKARTA	219,67	203,42	209,93	209,85	232,21	381,03	193,96	236,83	244,57	281,69
12	JAWA BARAT	146,66	135,79	128,94	140,41	146,01	153,07	133,46	144,25	170,06	196,75
13	JAWAB TENGAH	105,00	101,40	92,22	98,43	102,20	112,15	101,95	103,92	112,42	144,21
14	DI YOGYAKARTA	129,22	99,95	109,03	117,11	117,19	135,56	118,29	146,52	170,14	195,68
15	JAWA TIMUR	117,08	109,99	105,38	111,25	116,14	123,66	110,45	121,41	130,74	155,73
16	BANTEN	167,86	167,48	155,95	166,58	168,79	176,75	161,73	160,53	173,81	214,17
17	BALI	211,09	195,97	153,59	171,53	185,83	274,56	155,17	172,60	163,05	312,80
18	NTB	83,97	88,78	82,31	96,93	114,10	104,79	110,39	113,11	123,19	143,98
19	NTT	85,50	96,54	94,43	105,91	100,36	100,92	104,98	85,29	92,93	116,22
20	KALIMANTAN BARAT	191,60	177,39	161,15	173,80	193,29	195,06	175,47	196,98	275,60	228,87
21	KALIMANTAN TENGAH	198,43	211,39	208,16	219,19	231,85	215,17	217,52	204,19	240,56	225,21
22	KALIMANTAN SELATAN	176,92	166,85	160,74	178,38	193,12	188,32	182,01	182,42	215,96	216,90
23	KALIMANTAN TIMUR	241,58	214,94	204,45	244,24	229,93	218,43	207,87	212,02	230,83	270,72
24	SULAWESI UTARA	160,45	151,57	172,66	157,26	169,82	179,99	155,57	175,70	198,84	188,63
25	SULAWESI TENGAH	115,45	130,43	120,52	130,92	129,06	122,88	115,67	120,80	127,21	186,18
26	SULAWESI SELATAN	157,63	170,24	152,36	171,48	175,35	166,02	149,36	156,96	164,60	238,26
27	SULAWESI TENGGARA	139,73	132,70	137,93	155,18	148,34	152,78	152,88	151,14	140,26	219,45
28	GORONTALO	115,84	116,66	104,57	118,19	128,28	116,75	132,63	131,62	139,93	170,72
29	SULAWESI BARAT	124,20	123,35	121,44	149,30	137,67	143,08	112,43	145,10	117,89	202,50
30	MALUKU	151,08	164,44	149,65	133,94	172,38	139,41	143,04	92,96	152,55	158,39
31	MALUKU UTARA	142,40	147,35	114,97	133,57	131,96	144,73	136,20	118,16	127,28	148,26
32	PAPUA BARAT	174,55	176,48	185,23	165,42	190,65	183,01	184,06	171,37	194,83	212,37
33	PAPUA	190,63	185,59	179,43	179,80	159,81	153,66	129,47	150,12	126,43	144,36
Nilai Max		241,58	227,22	225,09	244,24	232,21	381,03	325,57	269,73	281,62	312,80
Nilai Min		83,97	88,78	82,31	96,93	100,36	100,92	101,95	85,29	92,93	116,22

No	Provinsi	Indeks Rata-rata kecukupan pasokan energi makanan (%)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	46,46	50,86	60,00	59,02	51,90	54,60	46,87	36,08	60,89	60,69
2	SUMATERA UTARA	26,41	49,88	40,56	46,13	60,71	60,99	52,66	56,18	65,21	56,43
3	SUMATERA BARAT	35,21	63,66	75,86	74,03	85,87	98,35	62,85	60,14	81,49	89,30
4	RIAU	34,88	61,12	42,94	24,24	68,35	52,44	57,80	52,70	75,38	63,19
5	JAMBI	27,19	47,12	36,69	32,07	51,18	61,71	36,09	29,47	60,26	54,06
6	SUMATERA SELATAN	24,80	54,98	55,92	52,09	62,40	70,58	52,52	56,92	75,70	62,47
7	BENGKULU	32,04	49,76	53,82	58,05	59,34	60,91	60,61	54,54	77,73	76,59
8	LAMPUNG	33,75	65,25	45,83	40,55	53,20	57,64	47,31	26,25	49,56	46,76
9	KEP. BABEL	31,71	43,53	13,94	46,40	14,53	42,73	36,86	40,28	78,06	68,55
10	KEPULAUAN RIAU	14,21	59,05	75,05	57,17	32,81	43,85	67,84	51,04	81,42	88,24
11	DIKI JAKARTA	8,40	19,23	35,01	17,18	28,54	54,85	44,49	63,88	52,67	52,86
12	JAWA BARAT	20,66	51,67	49,52	33,14	56,49	39,10	53,82	51,95	71,95	81,95
13	JAWAB TENGAH	5,79	35,04	27,22	2,03	32,34	36,33	46,41	47,72	50,11	49,17
14	DI YOGYAKARTA	4,43	0,00	14,45	7,46	14,83	45,57	74,87	75,22	50,77	69,23
15	JAWA TIMUR	6,58	30,74	26,31	4,88	30,36	36,25	40,46	53,03	57,53	64,20
16	BANTEN	27,88	46,79	53,25	44,00	58,99	62,51	77,06	58,77	76,62	83,71
17	BALI	100,00	100,00	100,00	94,81	100,00	97,05	100,00	100,00	100,00	100,00
18	NTB	12,87	38,40	48,13	72,05	80,12	100,00	80,77	71,02	64,31	71,70
19	NTT	2,83	43,84	51,52	42,71	80,12	38,51	28,18	15,46	17,56	34,16
20	KALIMANTAN BARAT	24,68	39,49	41,55	28,63	51,38	46,46	52,49	42,40	50,04	47,38
21	KALIMANTAN TENGAH	34,18	70,69	73,36	74,61	79,74	68,33	54,78	59,83	77,94	78,89
22	KALIMANTAN SELATAN	38,10	51,43	66,32	81,87	92,25	85,98	76,65	74,73	87,24	85,62
23	KALIMANTAN TIMUR	9,63	8,11	0,00	0,00	9,49	23,81	18,41	0,00	21,40	30,30
24	SULAWESI UTARA	30,63	47,91	38,04	60,60	56,43	68,16	58,21	63,84	71,46	71,54
25	SULAWESI TENGAH	22,82	59,82	46,90	21,85	66,64	53,03	62,60	43,10	60,11	54,46
26	SULAWESI SELATAN	30,01	58,66	59,07	73,93	84,91	79,46	69,25	58,92	61,98	64,69
27	SULAWESI TENGGARA	35,86	59,85	42,81	31,75	41,82	60,71	46,28	44,02	61,56	63,33
28	GORONTALO	2,40	38,36	19,78	21,66	29,09	47,65	25,81	50,01	76,83	63,10
29	SULAWESI BARAT	17,36	38,79	28,91	100,00	55,44	64,71	72,69	60,00	59,09	68,89
30	MALUKU	0,00	27,97	48,23	4,03	41,73	33,54	30,60	18,45	14,60	23,58
31	MALUKU UTARA	9,35	33,63	0,17	8,27	0,00	0,00	3,40	6,87	0,00	0,00
32	PAPUA BARAT	1,96	17,35	18,73	20,71	7,43	5,19	6,29	1,01	29,23	21,82
33	PAPUA	13,87	22,66	46,85	53,33	19,28	36,46	0,00	7,72	24,12	8,96

No	Provinsi	Indeks Rata-rata nilai produksi pangan (%)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	43,67	39,52	36,62	49,89	57,25	60,98	61,71	57,81	66,53	24,48
2	SUMATERA UTARA	29,24	35,52	30,93	45,50	45,38	50,29	48,69	47,06	50,13	20,95
3	SUMATERA BARAT	50,46	51,55	44,69	66,23	69,72	76,56	75,13	86,03	77,71	32,21
4	RIAU	11,04	11,30	10,30	14,31	12,49	12,70	10,34	9,31	8,91	3,31
5	JAMBI	5,61	22,84	21,29	25,76	28,99	29,47	26,29	28,66	24,34	100,00
6	SUMATERA SELATAN	58,92	58,29	49,68	78,89	71,44	83,16	89,09	84,80	82,30	38,89
7	BENGKULU	36,92	35,96	29,25	41,13	39,35	51,29	48,87	47,58	47,31	19,77
8	LAMPUNG	60,82	68,95	64,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,79	37,11
9	KEP. BABEL	1,79	2,97	2,99	3,96	2,26	3,20	3,45	3,09	3,94	2,14
10	KEPULAUAN RIAU	0,46	0,51	0,34	18,43	0,40	0,46	0,47	0,50	0,48	0,41
11	DIKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	JAWA BARAT	29,46	27,87	25,34	38,14	39,46	41,05	40,92	39,46	37,59	15,15
13	JAWAB TENGAH	35,66	36,52	31,59	48,49	49,04	61,02	53,04	51,60	56,79	21,60
14	DI YOGYAKARTA	39,17	40,67	37,39	58,24	52,91	62,14	59,41	58,44	59,51	24,03
15	JAWA TIMUR	38,65	42,05	35,78	54,33	52,39	63,60	58,68	58,22	61,92	24,35
16	BANTEN	17,78	16,48	13,85	20,94	22,78	22,72	23,01	21,99	24,04	8,74
17	BALI	29,93	27,90	24,45	31,29	31,53	33,84	31,76	29,59	28,17	10,85
18	NTB	38,16	42,00	38,79	52,03	64,00	71,68	66,25	68,08	77,43	29,62
19	NTT	28,37	41,17	38,42	51,92	43,18	58,13	56,38	54,00	53,02	20,84
20	KALIMANTAN BARAT	36,39	38,39	29,80	41,27	43,42	44,72	44,33	46,14	38,10	15,70
21	KALIMANTAN TENGAH	33,50	29,76	26,01	52,76	41,93	53,34	49,64	55,66	59,58	20,74
22	KALIMANTAN SELATAN	66,34	58,35	48,56	75,12	76,02	82,13	70,35	85,36	90,54	36,52
23	KALIMANTAN TIMUR	28,04	24,37	17,71	25,31	23,06	24,27	16,43	15,24	15,19	4,82
24	SULAWESI UTARA	17,99	42,13	37,23	52,69	49,47	54,81	53,75	54,26	45,82	22,38
25	SULAWESI TENGAH	36,53	40,28	36,16	42,46	48,84	50,09	48,28	48,93	48,25	21,60
26	SULAWESI SELATAN	53,60	57,57	52,89	73,85	78,21	96,11	83,44	92,09	100,00	40,25
27	SULAWESI TENGGARA	35,37	24,32	22,23	28,32	29,77	32,17	30,50	33,25	36,77	14,10
28	GORONTALO	68,53	78,96	55,17	78,44	68,01	73,01	72,96	78,41	76,22	40,61
29	SULAWESI BARAT	32,78	35,73	28,28	39,85	43,25	51,99	47,38	46,72	53,86	27,05
30	MALUKU	17,06	18,55	21,45	26,95	20,13	21,30	18,31	17,95	25,94	10,71
31	MALUKU UTARA	18,62	17,57	14,09	20,78	22,48	23,93	22,94	23,18	19,47	7,57
32	PAPUA BARAT	3,85	3,93	2,25	10,01	9,14	8,45	8,39	8,10	7,80	3,12
33	PAPUA	100,00	100,00	100,00	37,68	33,49	39,29	43,09	43,76	39,39	15,96

No	Provinsi	Indeks pasokan energi yang berasal dari sereal, akar dan umbi (%)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	71,25	58,71	77,52	63,99	58,29	49,20	56,17	45,59	43,65	34,77
2	SUMATERA UTARA	65,99	58,32	73,43	54,31	61,06	49,74	49,51	63,51	44,19	41,56
3	SUMATERA BARAT	65,88	58,84	73,09	47,40	60,57	46,45	49,91	48,20	36,89	32,75
4	RIAU	35,01	34,41	60,50	26,65	45,54	30,20	31,95	37,04	27,67	22,97
5	JAMBI	50,91	48,85	67,42	42,54	51,81	38,50	41,64	38,61	31,17	30,03
6	SUMATERA SELATAN	52,79	58,57	75,40	55,22	57,16	45,82	50,88	48,23	41,89	41,60
7	BENGKULU	76,03	69,02	79,14	66,67	61,58	50,65	56,62	59,93	54,03	47,60
8	LAMPUNG	58,45	57,54	73,70	54,35	55,36	41,62	42,40	36,73	30,56	29,63
9	KEP. BABEL	35,65	39,28	61,08	34,30	33,99	27,72	49,66	32,08	32,69	26,35
10	KEPULAUAN RIAU	9,66	24,99	57,45	22,10	26,24	9,10	8,34	0,00	1,65	0,00
11	DIKI JAKARTA	6,77	0,00	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,02
12	JAWA BARAT	49,46	53,96	71,16	44,06	53,49	39,34	39,73	39,71	33,63	32,03
13	JAWAB TENGAH	27,52	32,34	59,14	25,05	36,09	21,55	23,64	18,48	17,15	11,74
14	DI YOGYAKARTA	0,00	2,36	43,96	4,11	13,62	6,61	16,01	17,65	14,01	1,41
15	JAWA TIMUR	37,86	41,30	63,01	32,10	42,58	31,87	33,24	32,68	30,91	21,28
16	BANTEN	46,40	41,49	65,86	30,74	39,95	41,14	33,11	28,54	32,61	31,78
17	BALI	73,68	64,04	0,00	60,30	64,68	58,73	60,34	59,30	53,46	40,05
18	NTB	76,94	76,75	83,82	77,74	78,99	84,58	82,58	80,76	77,21	64,82
19	NTT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	KALIMANTAN BARAT	65,31	60,31	78,08	60,25	60,10	53,17	52,90	47,29	42,29	42,13
21	KALIMANTAN TENGAH	60,55	70,66	76,53	60,75	58,27	40,89	47,98	34,22	33,96	29,32
22	KALIMANTAN SELATAN	39,86	35,51	60,18	26,22	37,07	27,97	29,02	27,91	26,88	24,28
23	KALIMANTAN TIMUR	22,05	17,38	47,97	11,36	22,62	14,61	16,67	13,88	6,79	7,57
24	SULAWESI UTARA	71,23	76,04	85,73	59,91	66,51	55,53	57,96	62,06	51,36	44,07
25	SULAWESI TENGAH	68,85	66,35	77,61	62,26	80,91	59,56	63,69	65,02	56,88	65,46
26	SULAWESI SELATAN	74,50	71,74	82,21	65,58	75,20	70,15	71,31	63,90	56,77	56,81
27	SULAWESI TENGGARA	92,14	90,81	81,83	64,38	69,84	65,26	75,40	77,59	70,79	72,13
28	GORONTALO	61,24	67,66	72,69	50,03	53,06	49,89	57,52	56,02	54,91	47,67
29	SULAWESI BARAT	79,71	72,02	81,96	91,19	82,77	70,27	88,01	82,24	77,39	69,95
30	MALUKU	39,85	46,24	72,91	45,25	55,30	52,08	50,52	43,72	46,48	35,58
31	MALUKU UTARA	24,34	43,10	57,40	30,17	37,50	32,14	54,27	26,20	23,96	26,14
32	PAPUA BARAT	56,15	43,04	66,15	56,39	51,83	32,53	43,26	37,29	38,63	32,47
33	PAPUA	71,96	60,75	78,86	74,16	68,81	61,68	65,50	67,34	60,41	59,05

No	Provinsi	Indeks Rata-rata pasokan protein (%)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	75,80	48,33	55,11	69,78	64,62	65,63	55,52	52,52	63,18	63,94
2	SUMATERA UTARA	60,81	60,38	57,32	67,69	75,28	69,51	65,02	66,25	65,69	63,21
3	SUMATERA BARAT	47,05	46,01	58,46	65,99	71,60	72,11	51,43	51,15	61,45	70,02
4	RIAU	73,89	50,43	55,86	53,98	75,97	62,46	63,28	59,64	65,90	62,87
5	JAMBI	53,00	42,54	40,84	38,25	59,19	58,84	45,70	37,07	51,19	51,59
6	SUMATERA SELATAN	59,07	45,46	50,64	51,63	66,12	62,82	57,40	59,64	68,67	62,22
7	BENGKULU	49,80	37,79	46,96	49,87	66,49	63,13	57,12	54,82	64,21	62,87
8	LAMPUNG	52,61	49,02	40,60	39,30	49,92	53,17	44,80	32,08	47,04	48,76
9	KEP. BABEL	80,24	56,64	40,98	75,78	61,00	75,08	68,50	67,28	90,48	79,27
10	KEPULAUAN RIAU	47,28	69,97	83,94	70,82	72,51	78,70	100,00	84,60	100,00	100,00
11	DIKI JAKARTA	64,80	52,90	78,52	81,01	95,36	96,99	89,94	100,00	81,83	83,75
12	JAWA BARAT	64,80	57,51	62,08	61,55	78,42	61,18	65,26	65,49	77,28	84,24
13	JAWAB TENGAH	46,32	40,62	40,56	29,44	53,12	54,55	57,08	56,53	61,79	61,26
14	DI YOGYAKARTA	42,73	12,14	39,94	40,01	55,19	64,30	96,19	90,36	77,89	89,14
15	JAWA TIMUR	45,93	38,34	46,30	37,66	57,11	57,56	48,90	63,23	68,07	69,98
16	BANTEN	82,54	59,93	68,06	75,59	83,91	80,18	85,28	71,93	82,91	88,64
17	BALI	100,00	100,00	100,00	100,00	96,96	100,00	97,79	95,01	95,72	91,32
18	NTB	45,59	45,23	56,52	72,91	88,49	92,08	86,74	67,92	63,48	68,95
19	NTT	23,69	42,17	52,99	47,26	47,15	48,37	34,51	28,63	29,38	42,07
20	KALIMANTAN BARAT	55,14	40,80	47,76	44,52	66,06	57,15	61,78	54,22	53,96	55,03
21	KALIMANTAN TENGAH	70,19	75,03	84,79	91,12	92,06	77,78	68,74	67,36	72,48	75,37
22	KALIMANTAN SELATAN	74,96	54,59	73,43	87,21	100,00	87,95	88,11	78,07	85,81	84,24
23	KALIMANTAN TIMUR	60,42	32,59	45,74	72,85	68,30	69,97	65,30	48,81	56,69	63,00
24	SULAWESI UTARA	52,16	45,64	43,48	60,38	69,15	74,41	71,56	68,86	79,71	77,48
25	SULAWESI TENGAH	32,51	41,26	41,69	28,46	57,96	49,34	56,61	47,61	60,06	57,21
26	SULAWESI SELATAN	74,17	68,78	68,86	86,62	92,49	88,30	73,34	64,51	68,02	70,98
27	SULAWESI TENGGARA	51,49	46,55	52,99	62,34	71,23	78,65	62,58	63,01	70,36	71,01
28	GORONTALO	28,19	37,84	28,64	47,00	50,08	50,61	39,35	50,51	76,63	64,78
29	SULAWESI BARAT	38,69	25,47	46,77	83,75	67,45	65,27	70,52	58,83	58,81	66,96
30	MALUKU	9,71	27,84	33,11	0,00	56,53	47,91	32,53	29,99	35,14	44,63
31	MALUKU UTARA	0,00	17,62	0,00	0,98	12,57	16,04	16,78	23,59	24,45	31,24
32	PAPUA BARAT	1,46	7,26	30,52	28,20	40,38	38,76	33,19	36,52	44,18	44,36
33	PAPUA	1,12	0,00	32,41	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Provinsi	Indeks pasokan energi yang berasal dari hewan (%)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	52,58	45,95	39,75	45,31	41,86	16,49	14,60	26,66	46,52	34,06
2	SUMATERA UTARA	52,62	53,08	41,30	45,72	50,03	24,29	23,20	45,29	38,66	38,77
3	SUMATERA BARAT	33,86	40,09	38,36	43,77	42,95	19,12	19,22	33,47	36,55	29,02
4	RIAU	89,61	77,56	76,70	68,13	83,42	36,00	42,39	67,41	64,17	57,48
5	JAMBI	57,47	58,86	47,60	50,40	60,36	28,77	24,38	36,52	34,01	37,94
6	SUMATERA SELATAN	55,05	50,92	41,85	46,21	55,43	22,10	23,98	49,47	42,07	45,10
7	BENGKULU	24,10	25,26	29,24	26,82	37,32	11,97	13,87	25,50	32,57	32,88
8	LAMPUNG	25,04	31,44	22,45	18,57	23,53	8,86	3,87	12,44	9,19	23,89
9	KEP. BABEL	88,12	87,55	61,86	73,99	76,31	33,96	47,88	64,67	66,85	67,12
10	KEPULAUAN RIAU	80,14	100,00	100,00	90,39	98,89	65,08	100,00	100,00	100,00	78,78
11	DIKI JAKARTA	86,10	82,81	89,38	76,65	100,00	100,00	41,15	82,16	80,36	84,17
12	JAWA BARAT	39,78	33,96	32,66	29,52	34,62	18,62	14,09	31,97	40,88	40,97
13	JAWAB TENGAH	13,34	9,12	6,94	1,02	1,40	4,01	0,00	10,10	10,33	14,24
14	DI YOGYAKARTA	28,71	8,07	18,71	13,70	12,76	12,37	7,31	33,20	40,92	40,42
15	JAWA TIMUR	21,01	15,32	16,16	9,72	11,97	8,12	3,80	19,58	20,04	20,10
16	BANTEN	53,23	56,85	51,58	47,28	51,90	27,07	26,73	40,79	42,86	49,83
17	BALI	80,65	77,43	49,92	50,64	64,82	61,99	23,80	47,34	37,16	100,00
18	NTB	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	1,38	3,77	15,08	16,04	14,12
19	NTT	0,97	5,61	8,49	6,10	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00
20	KALIMANTAN BARAT	68,29	64,01	55,22	52,18	70,48	33,61	32,88	60,56	96,81	57,30
21	KALIMANTAN TENGAH	72,62	88,57	88,14	83,00	99,73	40,79	51,68	64,47	78,24	55,44
22	KALIMANTAN SELATAN	58,97	56,39	54,93	55,29	70,35	31,20	35,80	52,66	65,20	51,22
23	KALIMANTAN TIMUR	100,00	91,13	85,54	100,00	98,27	41,95	47,37	68,71	73,08	78,59
24	SULAWESI UTARA	48,52	45,36	63,28	40,95	52,68	28,23	23,98	49,02	56,13	36,83
25	SULAWESI TENGAH	19,97	30,09	26,76	23,07	21,77	7,84	6,14	19,25	18,17	35,59
26	SULAWESI SELATAN	46,74	58,84	49,06	50,61	56,88	23,24	21,20	38,86	37,98	62,08
27	SULAWESI TENGGARA	35,38	31,72	38,96	39,54	36,39	18,51	22,78	35,70	25,08	52,51
28	GORONTALO	20,22	20,14	15,59	14,43	21,18	5,65	13,72	25,12	24,91	27,72
29	SULAWESI BARAT	25,53	24,97	27,41	35,55	28,30	15,05	4,69	32,43	13,23	43,89
30	MALUKU	42,58	54,65	47,16	25,12	54,62	13,74	18,37	4,16	31,60	21,45
31	MALUKU UTARA	37,07	42,31	22,87	24,87	23,97	15,64	15,32	17,82	18,20	16,30
32	PAPUA BARAT	57,47	63,35	72,08	46,49	68,48	29,31	36,72	46,67	54,00	48,91
33	PAPUA	67,67	69,93	68,02	56,26	45,09	18,83	12,31	35,15	17,75	14,31

No	Provinsi	Indeks dimensi Availability (%)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	57,95	48,67	53,80	57,60	54,78	49,38	46,98	43,73	56,15	43,59
2	SUMATERA UTARA	47,02	51,44	48,71	51,87	58,49	50,96	47,82	55,66	52,78	44,19
3	SUMATERA BARAT	46,49	52,03	58,09	59,48	66,14	62,52	51,71	55,80	58,82	50,66
4	RIAU	48,89	46,96	49,26	37,46	57,15	38,76	41,15	45,22	48,41	41,96
5	JAMBI	38,84	44,04	42,77	37,80	50,31	43,46	34,82	34,07	40,19	54,72
6	SUMATERA SELATAN	50,13	53,65	54,70	56,81	62,51	56,90	54,77	59,81	62,13	50,06
7	BENGKULU	43,78	43,56	47,68	48,51	52,81	47,59	47,42	48,48	55,17	47,94
8	LAMPUNG	46,13	54,44	49,36	50,55	56,40	52,26	47,68	41,50	46,83	37,23
9	KEP. BABEL	47,50	46,00	36,17	46,89	37,62	36,54	41,27	41,48	54,40	48,69
10	KEPULAUAN RIAU	30,35	50,90	63,35	51,78	46,17	39,44	55,33	47,23	56,71	53,49
11	DIKI JAKARTA	33,21	30,99	49,35	34,97	44,78	50,37	35,11	51,36	42,97	44,16
12	JAWA BARAT	40,83	44,99	48,15	41,28	52,50	39,86	42,76	45,71	52,26	50,87
13	JAWAB TENGAH	25,73	30,73	33,09	21,20	34,40	35,49	36,03	36,89	39,23	31,60
14	DI YOGYAKARTA	23,01	12,65	30,89	24,70	29,87	38,20	50,76	54,97	48,62	44,84
15	JAWA TIMUR	30,00	33,55	37,51	27,74	38,88	39,48	37,01	45,35	47,69	39,98
16	BANTEN	45,56	44,31	50,52	43,71	51,51	46,72	49,04	44,40	51,81	52,54
17	BALI	76,85	73,87	54,87	67,41	71,60	70,32	62,74	66,25	62,90	68,45
18	NTB	34,71	40,48	45,45	54,95	64,41	69,94	64,02	60,57	59,69	49,84
19	NTT	31,17	46,56	50,29	49,60	54,09	49,00	44,08	39,62	39,99	39,41
20	KALIMANTAN BARAT	49,96	48,60	50,48	45,37	58,29	47,02	48,87	50,12	56,24	43,51
21	KALIMANTAN TENGAH	54,21	66,94	69,77	72,45	74,35	56,23	54,56	56,31	64,44	51,95
22	KALIMANTAN SELATAN	55,65	51,25	60,68	65,14	75,14	63,05	59,99	63,75	71,13	56,38
23	KALIMANTAN TIMUR	44,03	34,71	39,39	41,90	44,35	34,92	32,84	29,33	34,63	36,86
24	SULAWESI UTARA	44,11	51,41	53,55	54,91	58,85	56,23	53,09	59,61	60,89	50,46
25	SULAWESI TENGAH	36,14	47,56	45,82	35,62	55,22	43,97	47,46	44,78	48,69	46,86
26	SULAWESI SELATAN	55,80	63,12	62,42	70,12	77,54	71,45	63,71	63,65	64,95	58,96
27	SULAWESI TENGGARA	50,05	50,65	47,76	45,26	49,81	51,06	47,51	50,71	52,91	54,62
28	GORONTALO	36,12	48,59	38,37	42,31	44,28	45,36	41,87	52,02	61,90	48,78
29	SULAWESI BARAT	38,81	39,40	42,67	70,07	55,44	53,46	56,66	56,04	52,48	55,35
30	MALUKU	21,84	35,05	44,57	20,27	45,66	33,71	30,07	22,85	30,75	27,19
31	MALUKU UTARA	17,88	30,85	18,91	17,01	19,31	17,55	22,54	19,53	17,22	16,25
32	PAPUA BARAT	24,18	26,99	37,95	32,36	35,45	22,85	25,57	25,92	34,77	30,14
33	PAPUA	50,93	50,67	65,23	45,98	33,33	31,25	24,18	30,79	28,33	19,66

2. Dimensi : Access

No	Provinsi	Produk Domestik Bruto Perkapita (Rp juta)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	26133	24359	22650	22450	22705	23099	23229	23129	22526	22838
2	SUMATERA UTARA	21684	22703	23483	25412	26711	28037	29339	30477	31637	32885
3	SUMATERA BARAT	18933	19958	20532	21585	22639	23744	24858	25978	27044	28161
4	RIAU	67593	69786	70267	69701	71638	72396	72297	72385	70761	70604
5	JAMBI	26999	28456	29783	29160	30857	32418	34012	35876	36754	3773
6	SUMATERA SELATAN	23917	24770	25429	25932	27158	28578	29657	30611	31547	32694
7	BENGKULU	14798	15409	16030	16464	17282	18143	18919	19626	20303	21043
8	LAMPUNG	17590	18276	18979	19722	20739	21795	22771	23646	24580	25570
9	KEP. BABEL	27941	28814	29481	28907	30212	31172	32081	32860	33480	34137
10	KEPULAUAN RIAU	67483	68975	68474	65704	68024	70930	73743	76330	78641	80329
11	DKI JAKARTA	99830	105105	109459	111529	117673	123962	129860	136312	142868	149780
12	JAWA BARAT	19130	20025	20571	20975	21977	23036	24118	24967	25841	26922
13	JAWAB TENGAH	16377	17165	17917	18635	20054	20951	21845	22820	23882	24968
14	DI YOGYAKARTA	16369	17024	17610	18653	19387	20184	21038	21867	22685	23566
15	JAWA TIMUR	22624	23839	24906	26371	27864	29508	31092	32704	34273	35962
16	BANTEN	24513	24976	26152	25398	26549	27717	28911	29834	30778	31762
17	BALI	22807	23920	24946	23993	25266	26689	28130	29667	31096	32664
18	NTB	13322	13475	14870	15527	14706	14277	14810	15354	18378	19310
19	NTT	8564	8809	9018	9317	9676	10031	10397	10742	11098	11488
20	KALIMANTAN BARAT	17671	19287	18894	19510	20227	21062	21972	22712	23439	24309
21	KALIMANTAN TENGAH	23349	24439	25448	25455	26589	27749	29106	30217	31619	32903
22	KALIMANTAN SELATAN	21223	22264	23109	23418	24567	25548	26424	27223	27343	28536
23	KALIMANTAN TIMUR	122609	125704	125728	137232	142559	146778	147328	147136	142678	125379
24	SULAWESI UTARA	18461	20270	21655	22708	23813	25146	26446	27805	29194	30683
25	SULAWESI TENGAH	17109	18120	19189	19559	21106	22725	24491	25316	28793	31171
26	SULAWESI SELATAN	18005	19146	20073	21307	22769	24507	26083	27751	29427	31295
27	SULAWESI TENGGARA	19078	20037	21114	21573	23338	25490	26815	27896	28841	30474
28	GORONTALO	12922	13757	14617	14812	15688	16650	17639	18622	19476	20427
29	SULAWESI BARAT	12712	14032	14656	14756	16024	17169	18009	19236	20265	21087
30	MALUKU	12097	12431	12923	11952	12477	13129	13572	14217	14731	15326
31	MALUKU UTARA	13072	13635	14234	14362	14994	15691	16332	16942	17531	18177
32	PAPUA BARAT	13008	13751	15351	54050	54540	55047	57581	59175	60065	61239
33	PAPUA	132651	128291	153863	38785	36383	36280	38621	39333	41682	44421
Max		132651	128291	153863	137232	142559	146778	147328	147136	142868	149780
Min		8564	8809	9018	9317	9676	10031	10397	10742	11098	3773

No	Provinsi	inflasi berdasarkan harga konsumen bahan makanan (%)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	15,224	14,620	7,241	3,702	9,383	0,394	5,965	8,073	6,086	6,898
2	SUMATERA UTARA	11,775	17,460	5,091	6,756	7,566	2,194	10,831	5,963	5,969	10,663
3	SUMATERA BARAT	18,474	18,340	7,267	8,981	12,252	2,138	12,067	11,647	4,803	9,578
4	RIAU	13,749	15,920	6,772	5,963	10,591	3,371	8,257	7,125	6,907	7,590
5	JAMBI	13,486	21,800	2,718	10,487	7,951	1,649	10,542	5,327	1,409	6,132
6	SUMATERA SELATAN	11,302	20,250	5,464	8,524	8,784	4,114	9,482	2,364	5,595	7,614
7	BENGKULU	11,124	19,520	7,681	13,574	8,517	3,133	12,330	9,811	8,885	4,735
8	LAMPUNG	4,928	22,130	8,466	5,835	8,231	4,811	11,852	5,729	10,460	6,561
9	KEP. BABEL	6,376	18,580	1,020	10,518	10,711	6,359	11,155	2,559	5,579	9,571
10	KEPULAUAN RIAU	8,532	14,510	11,877	6,260	8,639	3,814	11,874	7,809	6,210	5,792
11	DKI JAKARTA	12,346	14,720	7,993	10,291	8,665	7,967	13,792	8,804	7,560	7,179
12	JAWA BARAT	10,939	13,510	6,114	7,713	6,390	7,679	11,855	6,343	8,314	8,320
13	JAWAB TENGAH	10,339	14,480	5,241	9,163	7,018	7,133	11,599	6,990	8,183	8,260
14	DI YOGYAKARTA	13,775	18,550	5,694	10,423	8,760	5,496	15,666	5,018	5,746	7,038
15	JAWA TIMUR	10,913	17,500	5,864	10,041	10,228	5,660	13,160	4,940	6,509	5,867
16	BANTEN	9,141	19,400	7,328	6,968	5,683	6,206	15,950	6,443	6,644	7,643
17	BALI	7,551	17,470	8,811	12,690	10,365	5,183	12,152	4,117	8,324	6,404
18	NTB	10,517	20,110	9,083	13,311	9,444	4,271	12,767	5,093	4,312	5,994
19	NTT	13,342	11,800	12,791	20,841	6,910	-2,468	5,513	2,726	5,794	7,840
20	KALIMANTAN BARAT	9,630	16,750	10,510	11,107	8,908	9,032	8,888	7,808	10,725	6,609
21	KALIMANTAN TENGAH	11,500	21,100	7,407	15,653	8,542	8,703	8,485	5,701	6,479	2,465
22	KALIMANTAN SELATAN	11,368	15,630	7,956	16,142	7,346	7,499	9,259	7,406	6,826	4,212
23	KALIMANTAN TIMUR	9,590	22,780	8,348	9,163	9,179	6,881	10,829	5,379	5,711	6,415
24	SULAWESI UTARA	13,727	23,800	7,738	9,297	8,177	4,318	10,978	6,057	12,345	9,733
25	SULAWESI TENGAH	8,086	20,600	10,141	8,838	7,325	2,726	7,466	6,610	5,027	6,623
26	SULAWESI SELATAN	11,965	17,630	7,405	9,633	8,859	5,127	8,182	4,851	14,899	10,888
27	SULAWESI TENGGARA	19,972	23,030	17,297	4,109	9,278	4,440	7,167	0,674	8,073	9,331
28	GORONTALO	9,401	14,310	12,510	8,063	6,253	4,889	5,249	1,056	5,124	12,888
29	SULAWESI BARAT	8,544	24,890	7,583	7,309	10,626	0,445	6,379	2,765	10,163	6,734
30	MALUKU	8,953	20,760	2,824	19,272	-0,412	10,943	10,780	6,264	9,854	-1,083
31	MALUKU UTARA	7,741	25,620	6,607	8,699	7,234	3,607	5,200	5,380	7,911	2,708
32	PAPUA BARAT	7,322	20,730	12,574	4,974	2,236	4,340	9,843	1,727	2,551	6,920
33	PAPUA	16,176	19,040	3,973	5,413	5,511	2,920	9,183	7,013	8,413	8,187
Max		19,97	25,62	17,30	20,84	12,25	10,94	15,95	11,65	14,90	12,89
Min		4,93	11,80	1,02	3,70	-0,41	-2,47	5,20	0,67	1,41	-1,08

No	Provinsi	Prevalensi Kekurangan Gizi (%)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	1,0968	1,0209	1,0429	1,0440	1,0054	1,0093	0,9895	0,9649	0,9985	0,9920
2	SUMATERA UTARA	1,0271	1,0180	0,9969	1,0235	1,0213	1,0214	1,0033	1,0132	1,0092	0,9816
3	SUMATERA BARAT	1,0577	1,0598	1,0805	1,0680	1,0666	1,0922	1,0276	1,0227	1,0496	1,0616
4	RIAU	1,0565	1,0521	1,0025	0,9886	1,0351	1,0053	1,0155	1,0048	1,0344	0,9981
5	JAMBI	1,0298	1,0096	0,9878	1,0010	1,0041	1,0228	0,9638	0,9490	0,9969	0,9759
6	SUMATERA SELATAN	1,0215	1,0335	1,0333	1,0330	1,0243	1,0396	1,0029	1,0150	1,0352	0,9963
7	BENGKULU	1,0467	1,0176	1,0283	1,0425	1,0188	1,0213	1,0222	1,0092	1,0403	1,0307
8	LAMPUNG	1,0526	1,0647	1,0094	1,0146	1,0078	1,0151	0,9905	0,9413	0,9703	0,9581
9	KEP. BABEL	1,0455	0,9987	0,9339	1,0239	0,9381	0,9869	0,9656	0,9750	1,0411	1,0111
10	KEPULAUAN RIAU	0,9846	1,0458	1,0785	1,0411	0,9710	0,9890	1,0395	1,0008	1,0494	1,0590
11	DKI JAKARTA	0,9644	0,9248	0,9838	0,9773	0,9633	1,0098	0,9838	1,0317	0,9780	0,9729
12	JAWA BARAT	1,0071	1,0234	1,0181	1,0028	1,0137	0,9800	1,0060	1,0030	1,0259	1,0437
13	JAWAB TENGAH	0,9553	0,9729	0,9653	0,9531	0,9702	0,9747	0,9884	0,9929	0,9717	0,9640
14	DI YOGYAKARTA	0,9506	0,8664	0,9351	0,9618	0,9387	0,9922	1,0562	1,0589	0,9733	1,0128
15	JAWA TIMUR	0,9581	0,9598	0,9632	0,9577	0,9666	0,9746	0,9742	1,0056	0,9901	1,0005
16	BANTEN	1,0322	1,0086	1,0270	1,0201	1,0182	1,0243	1,0615	1,0194	1,0375	1,0480
17	BALI	1,2831	1,1703	1,1376	1,1011	1,0921	1,0897	1,1161	1,1185	1,0955	1,0876
18	NTB	0,9800	0,9831	1,0148	1,0648	1,0563	1,0953	1,0703	1,0488	1,0069	1,0188
19	NTT	0,9451	0,9996	1,0229	1,0180	1,0563	0,9789	0,9449	0,9154	0,8909	0,9275
20	KALIMANTAN BARAT	1,0211	0,9864	0,9993	0,9956	1,0045	0,9939	1,0029	0,9801	0,9715	0,9596
21	KALIMANTAN TENGAH	1,0541	1,0812	1,0745	1,0689	1,0556	1,0353	1,0083	1,0219	1,0408	1,0362
22	KALIMANTAN SELATAN	1,0677	1,0227	1,0579	1,0805	1,0781	1,0688	1,0605	1,0577	1,0639	1,0526
23	KALIMANTAN TIMUR	0,9687	0,8910	0,9009	0,9499	0,9290	0,9510	0,9216	0,8782	0,9375	0,9374
24	SULAWESI UTARA	1,0418	1,0120	0,9910	1,0465	1,0136	1,0350	1,0165	1,0316	1,0247	1,0184
25	SULAWESI TENGAH	1,0146	1,0482	1,0119	0,9848	1,0320	1,0064	1,0270	0,9818	0,9965	0,9768
26	SULAWESI SELATAN	1,0396	1,0446	1,0407	1,0678	1,0649	1,0564	1,0428	1,0198	1,0012	1,0017
27	SULAWESI TENGGARA	1,0600	1,0482	1,0023	1,0005	0,9873	1,0209	0,9881	0,9840	1,0001	0,9984
28	GORONTALO	0,9436	0,9830	0,9477	0,9845	0,9643	0,9962	0,9393	0,9984	1,0380	0,9979
29	SULAWESI BARAT	0,9956	0,9842	0,9694	1,1094	1,0118	1,0285	1,0510	1,0224	0,9940	1,0119
30	MALUKU	0,9352	0,9514	1,0151	0,9563	0,9871	0,9695	0,9507	0,9225	0,8835	0,9017
31	MALUKU UTARA	0,9677	0,9686	0,9014	0,9631	0,9119	0,9060	0,8858	0,8947	0,8473	0,8444
32	PAPUA BARAT	0,9421	0,9191	0,9453	0,9829	0,9253	0,9158	0,8927	0,8806	0,9199	0,8975
33	PAPUA	0,9835	0,9352	1,0118	1,0349	0,9467	0,9750	0,8777	0,8968	0,9071	0,8662
Max		1,28	1,17	1,14	1,11	1,09	1,10	1,12	1,12	1,10	1,09
Min		0,94	0,87	0,90	0,95	0,91	0,91	0,88	0,88	0,85	0,84

No	Provinsi	Prosentasi Pengeluaran Untuk Makanan Masing-masing Provinsi									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	60,62	60,24	64,45	61,03	59,43	60,97	59,27	59,84	55,22	55,93
2	SUMATERA UTARA	53,48	54,06	54,79	53,47	56,03	57,50	55,38	57,05	53,48	55,31
3	SUMATERA BARAT	56,22	57,19	56,85	56,87	55,96	57,36	55,40	56,75	52,80	54,54
4	RIAU	49,19	50,30	51,53	52,95	51,14	51,70	53,25	52,67	49,26	51,32
5	JAMBI	52,83	53,38	56,20	56,34	55,25	54,02	55,27	55,99	50,96	51,35
6	SUMATERA SELATAN	53,83	54,80	56,46	56,97	57,86	51,50	54,90	53,49	51,95	53,16
7	BENGKULU	53,50	52,39	54,22	54,58	55,37	58,37	53,20	54,42	50,95	50,00
8	LAMPUNG	49,66	51,89	52,20	53,42	53,35	54,83	54,81	54,23	51,59	52,29
9	KEP. BABEL	54,13	53,82	52,03	53,37	53,16	51,12	52,26	52,68	51,77	49,21
10	KEPULAUAN RIAU	47,08	48,96	52,27	53,68	47,66	54,83	46,22	45,21	44,77	46,52
11	DKI JAKARTA	35,28	36,34	38,14	38,94	33,76	36,99	39,47	36,48	34,71	36,89
12	JAWA BARAT	49,15	50,23	49,51	52,33	48,89	52,34	51,17	47,90	47,48	48,56
13	JAWAB TENGAH	49,97	51,55	51,83	51,79	49,53	52,32	50,37	51,09	47,52	49,11
14	DI YOGYAKARTA	41,80	42,86	44,45	44,05	44,21	46,73	45,51	43,00	39,31	40,52
15	JAWA TIMUR	48,59	49,61	51,16	52,24	50,52	51,21	50,19	51,40	45,88	49,08
16	BANTEN	45,68	46,95	43,46	46,09	47,35	51,44	52,56	50,57	46,88	46,90
17	BALI	43,82	45,60	44,22	44,78	41,56	37,36	44,51	43,71	40,34	42,38
18	NTB	55,09	55,77	53,15	52,75	55,93	60,08	57,81	57,68	53,11	53,92
19	NTT	59,70	59,66	58,14	58,96	57,96	57,58	55,60	54,27	55,85	54,16
20	KALIMANTAN BARAT	58,15	57,68	58,49	56,35	53,30	57,33	54,60	53,40	54,45	52,45
21	KALIMANTAN TENGAH	57,79	60,21	60,38	59,95	58,45	55,57	53,29	54,97	53,74	52,29
22	KALIMANTAN SELATAN	53,70	53,13	52,30	53,04	53,37	50,58	54,16	51,87	49,20	50,72
23	KALIMANTAN TIMUR	44,06	43,38	45,45	47,21	45,35	47,48	44,78	45,77	46,02	45,33
24	SULAWESI UTARA	52,63	53,66	52,81	52,69	49,56	50,14	50,26	49,81	51,95	50,65
25	SULAWESI TENGAH	54,55	54,55	52,77	52,08	53,29	53,69	49,47	51,56	50,43	59,85
26	SULAWESI SELATAN	52,03	52,35	50,22	53,12	51,40	51,76	50,53	51,25	48,10	47,40
27	SULAWESI TENGGARA	54,45	54,02	51,53	52,70	50,12	51,05	50,25	48,60	48,88	46,09
28	GORONTALO	51,80	54,37	54,46	51,58	49,61	49,71	47,62	52,54	48,92	49,18
29	SULAWESI BARAT	58,00	57,34	56,82	55,66	59,06	56,82	58,42	54,12	53,76	52,13
30	MALUKU	57,02	57,47	59,17	57,98	50,19	53,63	51,85	51,86	52,97	51,00
31	MALUKU UTARA	55,62	52,80	53,40	54,50	53,20	50,86	55,53	52,39	53,33	51,10
32	PAPUA BARAT	59,45	55,97	60,20	61,10	59,46	59,17	61,67	49,41	49,77	47,81
33	PAPUA	57,76	59,19	60,31	56,80	49,03	50,65	56,20	69,61	57,05	56,02
Max		60,62	60,24	64,45	61,10	59,46	60,97	61,67	69,61	57,05	59,85
Min		35,28	36,34	38,14	38,94	33,76	36,99	39,47	36,48	34,71	36,89

No	Provinsi	Tingkat Devisit Pangan									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	-60,0	69,2	139,6	139,6	187,4	280,1	326,6	356,0	160,4	128,9
2	SUMATERA UTARA	80,5	75,2	228,3	179,2	156,4	257,6	301,2	266,2	139,0	150,0
3	SUMATERA BARAT	18,8	-10,1	67,3	93,5	67,9	126,6	256,4	248,5	58,5	-12,8
4	RIAU	21,2	5,6	217,5	246,4	129,5	287,6	278,6	281,7	88,7	116,5
5	JAMBI	75,0	92,3	245,9	222,4	189,9	255,1	374,0	385,5	163,5	161,8
6	SUMATERA SELATAN	91,8	43,6	158,2	160,9	150,5	224,0	301,8	262,9	87,1	120,1
7	BENGKULU	41,1	76,0	167,8	142,6	161,2	257,9	266,3	273,5	77,1	50,1
8	LAMPUNG	29,1	-20,0	204,2	196,3	182,8	269,4	324,7	399,9	216,5	197,9
9	KEP. BABEL	43,4	114,5	349,7	178,4	318,8	321,7	370,7	337,2	75,4	90,0
10	KEPULAUAN RIAU	166,0	18,4	71,0	145,3	254,5	317,8	234,5	289,2	58,8	-7,6
11	DKI JAKARTA	206,8	265,1	253,6	268,1	269,5	279,2	337,1	231,8	201,1	167,7
12	JAWA BARAT	120,8	64,2	187,4	219,1	171,2	334,4	296,1	285,1	105,7	23,6
13	JAWAB TENGAH	225,1	167,2	289,2	314,6	256,2	344,1	328,7	304,0	213,7	186,0
14	DI YOGYAKARTA	234,6	384,2	347,4	298,0	317,7	311,7	203,6	181,1	210,5	86,6
15	JAWA TIMUR	219,5	193,8	293,3	305,9	263,2	344,4	354,8	280,3	177,0	111,5
16	BANTEN	70,2	94,4	170,4	185,7	162,5	252,3	194,0	254,6	82,6	14,9
17	BALI	-435,3	-235,2	-42,8	29,7	18,2	131,2	93,2	70,5	-33,1	-65,8
18	NTB	175,4	146,3	193,8	99,6	88,1	120,8	177,7	199,9	143,5	74,4
19	NTT	245,8	112,7	178,3	189,7	88,1	336,5	408,8	448,1	374,8	260,4
20	KALIMANTAN BARAT	92,7	139,6	223,8	232,9	189,2	308,6	302,0	327,7	214,1	194,8
21	KALIMANTAN TENGAH	26,0	-53,7	78,7	91,8	89,5	231,9	291,9	249,9	76,1	38,8
22	KALIMANTAN SELATAN	-1,4	65,6	110,8	69,5	45,5	170,0	195,8	183,3	30,1	5,4
23	KALIMANTAN TIMUR	198,1	334,0	413,3	320,9	336,5	388,1	451,7	517,1	281,8	240,1
24	SULAWESI UTARA	50,9	87,4	239,8	134,8	171,5	232,5	276,8	232,0	108,1	75,2
25	SULAWESI TENGAH	105,7	13,7	199,4	253,8	135,6	285,6	257,6	324,6	164,3	159,8
26	SULAWESI SELATAN	55,3	20,8	143,9	93,8	71,3	192,9	228,3	254,0	155,0	109,1
27	SULAWESI TENGGARA	14,2	13,5	218,0	223,4	222,9	258,6	329,3	320,5	157,1	115,8
28	GORONTALO	248,8	146,6	323,1	254,3	267,6	304,5	419,2	293,7	81,5	117,0
29	SULAWESI BARAT	143,9	143,9	281,4	13,8	175,0	244,6	213,2	249,1	169,3	88,3
30	MALUKU	265,6	211,0	193,3	308,5	223,1	354,0	398,1	434,7	389,4	312,8
31	MALUKU UTARA	200,1	175,9	412,5	295,5	369,9	471,6	517,7	486,4	461,7	429,6
32	PAPUA BARAT	251,9	276,7	327,9	257,3	343,8	453,4	504,9	512,6	317,0	321,5
33	PAPUA	168,4	243,8	199,6	157,1	302,1	343,7	532,6	482,6	342,3	385,2
Max		266	384	413	321	370	472	533	517	462	430
Min		-435	-235	-43	14	18	121	93	70	-33	-66

No	Provinsi	Indeks Produk Domestik Bruto Perkapita (%)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	14,16	13,01	9,41	10,27	9,80	9,56	9,37	9,08	8,67	13,06
2	SUMATERA UTARA	10,57	11,63	9,99	12,58	12,82	13,17	13,83	14,47	15,59	19,94
3	SUMATERA BARAT	8,36	9,33	7,95	9,59	9,76	10,03	10,56	11,17	12,10	16,70
4	RIAU	47,57	51,03	42,29	47,21	46,63	45,61	45,21	45,20	45,28	45,77
5	JAMBI	14,86	16,44	14,34	15,51	15,94	16,37	17,25	18,43	19,47	0,00
6	SUMATERA SELATAN	12,37	13,36	11,33	12,99	13,16	13,56	14,07	14,57	15,52	19,81
7	BENGKULU	5,02	5,52	4,84	5,59	5,72	5,93	6,22	6,51	6,99	11,83
8	LAMPUNG	7,27	7,92	6,88	8,13	8,33	8,60	9,04	9,46	10,23	14,93
9	KEP. BABEL	15,62	16,74	14,13	15,31	15,45	15,46	15,84	16,22	16,99	20,80
10	KEPULAUAN RIAU	47,48	50,36	41,05	44,08	43,91	44,53	46,26	48,09	51,26	52,43
11	DKI JAKARTA	73,55	80,59	69,34	79,91	81,27	83,32	87,24	92,06	100,00	100,00
12	JAWA BARAT	8,52	9,39	7,98	9,11	9,26	9,51	10,02	10,43	11,19	15,85
13	JAWAB TENGAH	6,30	6,99	6,14	7,28	7,81	7,99	8,36	8,86	9,70	14,52
14	DI YOGYAKARTA	6,29	6,88	5,93	7,30	7,31	7,42	7,77	8,16	8,79	13,56
15	JAWA TIMUR	11,33	12,58	10,97	13,33	13,69	14,24	15,11	16,10	17,59	22,05
16	BANTEN	12,85	13,53	11,83	12,57	12,70	12,93	13,52	14,00	14,94	19,17
17	BALI	11,48	12,65	11,00	11,47	11,73	12,18	12,95	13,88	15,18	19,79
18	NTB	3,83	3,90	4,04	4,86	3,79	3,10	3,22	3,38	5,52	10,64
19	NTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28
20	KALIMANTAN BARAT	7,34	8,77	6,82	7,97	7,94	8,07	8,45	8,78	9,37	14,07
21	KALIMANTAN TENGAH	11,92	13,08	11,34	12,62	12,73	12,96	13,66	14,28	15,57	19,95
22	KALIMANTAN SELATAN	10,20	11,26	9,73	11,02	11,21	11,35	11,70	12,08	12,33	16,96
23	KALIMANTAN TIMUR	91,91	97,83	80,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,86	83,29
24	SULAWESI UTARA	7,98	9,59	8,72	10,47	10,64	11,05	11,72	12,51	13,73	18,43
25	SULAWESI TENGAH	6,89	7,79	7,02	8,01	8,60	9,28	10,29	10,69	13,43	18,76
26	SULAWESI SELATAN	7,61	8,65	7,63	9,37	9,85	10,59	11,46	12,47	13,91	18,85
27	SULAWESI TENGGARA	8,47	9,40	8,35	9,58	10,28	11,30	11,99	12,58	13,47	18,29
28	GORONTALO	3,51	4,14	3,87	4,30	4,52	4,84	5,29	5,78	6,36	11,41
29	SULAWESI BARAT	3,34	4,37	3,89	4,25	4,78	5,22	5,56	6,23	6,96	11,86
30	MALUKU	2,85	3,03	2,70	2,06	2,11	2,27	2,32	2,55	2,76	7,91
31	MALUKU UTARA	3,63	4,04	3,60	3,94	4,00	4,14	4,33	4,55	4,88	9,87
32	PAPUA BARAT	3,58	4,14	4,37	34,97	33,76	32,92	34,46	35,51	37,16	39,36
33	PAPUA	100,00	100,00	100,00	23,04	20,10	19,20	20,61	20,96	23,21	27,84

No	Provinsi	Indek Harga Pangan (%)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	31,558	79,595	61,779	100,000	22,661	78,658	92,882	32,570	65,326	42,878
2	SUMATERA UTARA	54,487	59,045	74,990	82,177	37,008	65,240	47,615	51,802	66,195	15,927
3	SUMATERA BARAT	9,955	52,677	61,620	69,199	0,000	65,658	36,115	0,000	74,835	23,690
4	RIAU	41,362	70,188	64,663	86,807	13,120	56,459	71,560	41,216	59,242	37,923
5	JAMBI	43,109	27,641	89,573	60,411	33,969	69,307	50,306	57,602	100,000	48,359
6	SUMATERA SELATAN	57,630	38,857	72,701	71,864	27,384	50,920	60,169	84,599	68,970	37,753
7	BENGKULU	58,813	44,139	59,079	42,397	29,492	58,236	33,675	16,736	44,578	58,356
8	LAMPUNG	100,000	25,253	54,252	87,551	31,753	45,726	38,115	53,937	32,905	45,291
9	KEP. BABEL	90,373	50,941	100,000	60,226	12,173	34,184	44,600	82,822	69,087	23,740
10	KEPULAUAN RIAU	76,044	80,391	33,300	85,071	28,534	53,162	37,915	34,980	64,408	50,790
11	DKI JAKARTA	50,691	78,871	57,158	61,551	28,326	22,189	20,071	25,913	54,402	40,866
12	JAWA BARAT	60,044	87,627	68,705	76,596	46,293	24,336	38,091	48,338	48,810	32,694
13	JAWAB TENGAH	64,027	80,608	74,068	68,133	41,333	28,409	40,473	42,440	49,787	33,123
14	DI YOGYAKARTA	41,193	51,158	71,287	60,783	27,579	40,619	2,637	60,416	67,846	41,875
15	JAWA TIMUR	60,217	58,755	70,242	63,012	15,986	39,394	25,949	61,127	62,189	50,259
16	BANTEN	71,997	45,007	61,245	80,939	51,875	35,327	0,000	47,429	61,192	37,541
17	BALI	82,560	58,973	52,137	47,557	14,902	42,949	35,324	68,622	48,738	46,414
18	NTB	62,850	39,870	50,462	43,933	22,179	49,750	29,606	59,733	78,479	49,345
19	NTT	44,069	100,000	27,684	0,000	42,182	100,000	97,086	81,298	67,493	36,134
20	KALIMANTAN BARAT	68,746	64,182	41,699	56,793	26,406	14,254	65,687	34,992	30,941	44,946
21	KALIMANTAN TENGAH	56,311	32,706	60,761	30,267	29,297	16,705	69,441	54,187	62,411	74,605
22	KALIMANTAN SELATAN	57,189	72,287	57,386	27,415	38,743	25,685	62,242	38,656	59,845	62,103
23	KALIMANTAN TIMUR	69,011	20,550	54,978	68,133	24,267	30,289	47,640	57,124	68,107	46,333
24	SULAWESI UTARA	41,511	13,169	58,726	67,354	32,183	49,399	46,249	50,945	18,933	22,583
25	SULAWESI TENGAH	79,006	36,324	43,964	70,029	38,907	61,271	78,921	45,901	73,174	44,841
26	SULAWESI SELATAN	53,223	57,815	60,776	65,394	26,799	43,372	72,255	61,939	0,000	14,317
27	SULAWESI TENGGARA	0,000	18,741	0,000	97,622	23,483	48,490	81,698	100,000	50,599	25,460
28	GORONTALO	70,266	81,838	29,410	74,552	47,375	45,142	99,545	96,524	72,458	0,000
29	SULAWESI BARAT	75,964	5,282	59,682	78,954	12,846	78,280	89,031	80,951	35,108	44,048
30	MALUKU	73,240	35,166	88,920	9,152	100,000	0,000	48,087	49,056	37,398	100,000
31	MALUKU UTARA	81,301	0,000	65,675	70,841	39,629	54,706	100,000	57,113	51,801	72,865
32	PAPUA BARAT	84,087	35,384	29,018	92,577	79,092	49,239	56,808	90,405	91,535	42,716
33	PAPUA	25,231	47,612	81,857	90,013	53,233	59,824	62,951	42,230	48,077	33,652

No	Provinsi	Indeks Prevalensi Kekurangan Gizi (%)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	46,46	50,86	60,00	59,02	51,90	54,60	46,87	36,08	60,89	60,69
2	SUMATERA UTARA	26,41	49,88	40,56	46,13	60,71	60,99	52,66	56,18	65,21	56,43
3	SUMATERA BARAT	35,21	63,66	75,86	74,03	85,87	98,35	62,85	60,14	81,49	89,30
4	RIAU	34,88	61,12	42,94	24,24	68,35	52,44	57,80	52,70	75,38	63,19
5	JAMBI	27,19	47,12	36,69	32,07	51,18	61,71	36,09	29,47	60,26	54,06
6	SUMATERA SELATAN	24,80	54,98	55,92	52,09	62,40	70,58	52,52	56,92	75,70	62,47
7	BENGKULU	32,04	49,76	53,82	58,05	59,34	60,91	60,61	54,54	77,73	76,59
8	LAMPUNG	33,75	65,25	45,83	40,55	53,20	57,64	47,31	26,25	49,56	46,76
9	KEP. BABEL	31,71	43,53	13,94	46,40	14,53	42,73	36,86	40,28	78,06	68,55
10	KEPULAUAN RIAU	14,21	59,05	75,05	57,17	32,81	43,85	67,84	51,04	81,42	88,24
11	DKI JAKARTA	8,40	19,23	35,01	17,18	28,54	54,85	44,49	63,88	52,67	52,86
12	JAWA BARAT	20,66	51,67	49,52	33,14	56,49	39,10	53,82	51,95	71,95	81,95
13	JAWAB TENGAH	5,79	35,04	27,22	2,03	32,34	36,33	46,41	47,72	50,11	49,17
14	DI YOGYAKARTA	4,43	0,00	14,45	7,46	14,83	45,57	74,87	75,22	50,77	69,23
15	JAWA TIMUR	6,58	30,74	26,31	4,88	30,36	36,25	40,46	53,03	57,53	64,20
16	BANTEN	27,88	46,79	53,25	44,00	58,99	62,51	77,06	58,77	76,62	83,71
17	BALI	100,00	100,00	100,00	94,81	100,00	97,05	100,00	100,00	100,00	100,00
18	NTB	12,87	38,40	48,13	72,05	80,12	100,00	80,77	71,02	64,31	71,70
19	NTT	2,83	43,84	51,52	42,71	80,12	38,51	28,18	15,46	17,56	34,16
20	KALIMANTAN BARAT	24,68	39,49	41,55	28,63	51,38	46,46	52,49	42,40	50,04	47,38
21	KALIMANTAN TENGAH	34,18	70,69	73,36	74,61	79,74	68,33	54,78	59,83	77,94	78,89
22	KALIMANTAN SELATAN	38,10	51,43	66,32	81,87	92,25	85,98	76,65	74,73	87,24	85,62
23	KALIMANTAN TIMUR	9,63	8,11	0,00	0,00	9,49	23,81	18,41	0,00	36,35	38,24
24	SULAWESI UTARA	30,63	47,91	38,04	60,60	56,43	68,16	58,21	63,84	71,46	71,54
25	SULAWESI TENGAH	22,82	59,82	46,90	21,85	66,64	53,03	62,60	43,10	60,11	54,46
26	SULAWESI SELATAN	30,01	58,66	59,07	73,93	84,91	79,46	69,25	58,92	61,98	64,69
27	SULAWESI TENGGARA	35,86	59,85	42,81	31,75	41,82	60,71	46,28	44,02	61,56	63,33
28	GORONTALO	2,40	38,36	19,78	21,66	29,09	47,65	25,81	50,01	76,83	63,10
29	SULAWESI BARAT	17,36	38,79	28,91	100,00	55,44	64,71	72,69	60,00	59,09	68,89
30	MALUKU	0,00	27,97	48,23	4,03	41,73	33,54	30,60	18,45	14,60	23,58
31	MALUKU UTARA	9,35	33,63	0,17	8,27	0,00	0,00	3,40	6,87	0,00	0,00
32	PAPUA BARAT	1,96	17,35	18,73	20,71	7,43	5,19	6,29	1,01	29,23	21,82
33	PAPUA	13,87	22,66	46,85	53,33	19,28	36,46	0,00	7,72	24,12	8,96

No	Provinsi	Indeks Pengeluaran Untuk Makanan Masing-masing Provinsi (%)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	0,00	0,00	0,00	0,32	0,12	0,00	10,81	29,49	8,19	17,07
2	SUMATERA UTARA	28,18	25,86	36,72	34,43	13,35	14,47	28,33	37,91	15,98	19,77
3	SUMATERA BARAT	17,36	12,76	28,89	19,09	13,62	15,05	28,24	38,82	19,02	23,13
4	RIAU	45,11	41,59	49,11	36,78	32,37	38,66	37,93	51,13	34,87	37,15
5	JAMBI	30,74	28,70	31,36	21,48	16,38	28,98	28,83	41,11	27,26	37,02
6	SUMATERA SELATAN	26,80	22,76	30,37	18,64	6,23	39,49	30,50	48,66	22,83	29,14
7	BENGKULU	28,10	32,85	38,88	29,42	15,91	10,84	38,15	45,85	27,31	42,90
8	LAMPUNG	43,25	34,94	46,56	34,66	23,77	25,60	30,90	46,42	24,44	32,93
9	KEP. BABEL	25,61	26,86	47,21	34,88	24,51	41,08	42,39	51,10	23,63	46,34
10	KEPULAUAN RIAU	53,43	47,20	46,29	33,48	45,91	25,60	69,59	73,65	54,97	58,06
11	DKI JAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	JAWA BARAT	45,26	41,88	56,78	39,58	41,13	35,99	47,30	65,53	42,84	49,17
13	JAWAB TENGAH	42,03	36,36	47,97	42,01	38,64	36,07	50,90	55,90	42,66	46,78
14	DI YOGYAKARTA	74,27	72,72	76,02	76,94	59,34	59,38	72,79	80,32	79,41	84,19
15	JAWA TIMUR	47,47	44,48	50,51	39,98	34,79	40,70	51,71	54,97	50,00	46,91
16	BANTEN	58,96	55,61	79,78	67,73	47,12	39,74	41,04	57,47	45,52	56,40
17	BALI	66,30	61,26	76,89	73,65	69,65	98,46	77,30	78,18	74,80	76,09
18	NTB	21,82	18,70	42,95	37,68	13,74	3,71	17,39	36,01	17,64	25,83
19	NTT	3,63	2,43	23,98	9,66	5,84	14,14	27,34	46,30	5,37	24,78
20	KALIMANTAN BARAT	9,75	10,71	22,65	21,44	23,97	15,18	31,85	48,93	11,64	32,23
21	KALIMANTAN TENGAH	11,17	0,13	15,47	5,19	3,93	22,52	37,75	44,19	14,82	32,93
22	KALIMANTAN SELATAN	27,31	29,75	46,18	36,37	23,70	43,33	33,83	53,55	35,14	39,76
23	KALIMANTAN TIMUR	65,35	70,54	72,22	62,68	54,90	56,26	76,08	71,96	49,37	63,24
24	SULAWESI UTARA	31,53	27,53	44,24	37,95	38,52	45,16	51,40	59,76	22,83	40,07
25	SULAWESI TENGAH	23,95	23,81	44,39	40,70	24,01	30,36	54,95	54,48	29,63	0,00
26	SULAWESI SELATAN	33,90	33,01	54,09	36,01	31,36	38,41	50,18	55,42	40,06	54,22
27	SULAWESI TENGGARA	24,35	26,03	49,11	37,91	36,34	41,37	51,44	63,42	36,57	59,93
28	GORONTALO	34,81	24,56	37,97	42,96	38,33	46,96	63,29	51,52	36,39	46,47
29	SULAWESI BARAT	10,34	12,13	29,00	24,55	1,56	17,31	14,64	46,76	14,73	33,62
30	MALUKU	14,21	11,59	20,07	14,08	36,07	30,61	44,23	53,58	18,26	38,55
31	MALUKU UTARA	19,73	31,13	42,00	29,78	24,36	42,16	27,66	51,98	16,65	38,11
32	PAPUA BARAT	4,62	17,87	16,15	0,00	0,00	7,51	0,00	60,97	32,59	52,44
33	PAPUA	11,29	4,39	15,74	19,40	40,58	43,04	24,64	0,00	0,00	16,68

No	Provinsi	Indeks Tingkat Devisit Pangan (%)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	46,5	50,9	60,0	59,0	51,9	54,6	46,9	36,1	60,9	60,7
2	SUMATERA UTARA	26,4	49,9	40,6	46,1	60,7	61,0	52,7	56,2	65,2	56,4
3	SUMATERA BARAT	35,2	63,7	75,9	74,0	85,9	98,3	62,9	60,1	81,5	89,3
4	RIAU	34,9	61,1	42,9	24,2	68,4	52,4	57,8	52,7	75,4	63,2
5	JAMBI	27,2	47,1	36,7	32,1	51,2	61,7	36,1	29,5	60,3	54,1
6	SUMATERA SELATAN	24,8	55,0	55,9	52,1	62,4	70,6	52,5	56,9	75,7	62,5
7	BENGKULU	32,0	49,8	53,8	58,1	59,3	60,9	60,6	54,5	77,7	76,6
8	LAMPUNG	33,7	65,3	45,8	40,6	53,2	57,6	47,3	26,3	49,6	46,8
9	KEP. BABEL	31,7	43,5	13,9	46,4	14,5	42,7	36,9	40,3	78,1	68,5
10	KEPULAUAN RIAU	14,2	59,0	75,0	57,2	32,8	43,8	67,8	51,0	81,4	88,2
11	DKI JAKARTA	8,4	19,2	35,0	17,2	28,5	54,9	44,5	63,9	52,7	52,9
12	JAWA BARAT	20,7	51,7	49,5	33,1	56,5	39,1	53,8	52,0	71,9	82,0
13	JAWAB TENGAH	5,8	35,0	27,2	2,0	32,3	36,3	46,4	47,7	50,1	49,2
14	DI YOGYAKARTA	4,4	0,0	14,5	7,5	14,8	45,6	74,9	75,2	50,8	69,2
15	JAWA TIMUR	6,6	30,7	26,3	4,9	30,4	36,2	40,5	53,0	57,5	64,2
16	BANTEN	27,9	46,8	53,2	44,0	59,0	62,5	77,1	58,8	76,6	83,7
17	BALI	100,0	100,0	100,0	94,8	100,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0
18	NTB	12,9	38,4	48,1	72,0	80,1	100,0	80,8	71,0	64,3	71,7
19	NTT	2,8	43,8	51,5	42,7	80,1	38,5	28,2	15,5	17,6	34,2
20	KALIMANTAN BARAT	24,7	39,5	41,6	28,6	51,4	46,5	52,5	42,4	50,0	47,4
21	KALIMANTAN TENGAH	34,2	70,7	73,4	74,6	79,7	68,3	54,8	59,8	77,9	78,9
22	KALIMANTAN SELATAN	38,1	51,4	66,3	81,9	92,3	86,0	76,7	74,7	87,2	85,6
23	KALIMANTAN TIMUR	9,6	8,1	0,0	0,0	9,5	23,8	18,4	0,0	36,4	38,2
24	SULAWESI UTARA	30,6	47,9	38,0	60,6	56,4	68,2	58,2	63,8	71,5	71,5
25	SULAWESI TENGAH	22,8	59,8	46,9	21,9	66,6	53,0	62,6	43,1	60,1	54,5
26	SULAWESI SELATAN	30,0	58,7	59,1	73,9	84,9	79,5	69,3	58,9	62,0	64,7
27	SULAWESI TENGGARA	35,9	59,8	42,8	31,7	41,8	60,7	46,3	44,0	61,6	63,3
28	GORONTALO	2,4	38,4	19,8	21,7	29,1	47,6	25,8	50,0	76,8	63,1
29	SULAWESI BARAT	17,4	38,8	28,9	100,0	55,4	64,7	72,7	60,0	59,1	68,9
30	MALUKU	0,0	28,0	48,2	4,0	41,7	33,5	30,6	18,4	14,6	23,6
31	MALUKU UTARA	9,3	33,6	0,2	8,3	0,0	0,0	3,4	6,9	0,0	0,0
32	PAPUA BARAT	2,0	17,4	18,7	20,7	7,4	5,2	6,3	1,0	29,2	21,8
33	PAPUA	13,9	22,7	46,9	53,3	19,3	36,5	0,0	7,7	24,1	9,0

No	Provinsi	Indeks dimensi Access (%)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	27,73	38,87	38,24	45,72	27,28	39,48	41,36	28,66	40,80	38,88
2	SUMATERA UTARA	29,21	39,26	40,56	44,29	36,92	42,97	39,02	43,31	45,64	33,70
3	SUMATERA BARAT	21,22	40,42	50,04	49,19	39,02	57,49	40,12	34,05	53,79	48,42
4	RIAU	40,76	57,01	48,39	43,86	45,76	49,12	54,06	48,59	58,03	49,44
5	JAMBI	28,62	33,41	41,73	32,31	33,73	47,62	33,71	35,22	53,45	38,70
6	SUMATERA SELATAN	29,28	36,99	45,25	41,54	34,31	49,03	41,95	52,33	51,74	42,33
7	BENGKULU	31,20	36,40	42,09	38,70	33,96	39,37	39,86	35,64	46,87	53,25
8	LAMPUNG	43,60	39,72	39,87	42,29	34,05	39,04	34,53	32,47	33,34	37,33
9	KEP. BABEL	39,00	36,32	37,84	40,65	16,24	35,24	35,31	46,14	53,17	45,59
10	KEPULAUAN RIAU	41,08	59,21	54,15	55,40	36,80	42,20	57,89	51,76	66,69	67,55
11	DKI JAKARTA	48,21	59,59	59,31	55,16	53,34	63,04	59,26	69,15	71,95	69,32
12	JAWA BARAT	31,03	48,45	46,50	38,31	41,93	29,61	40,61	45,64	49,35	52,32
13	JAWAB TENGAH	24,78	38,81	36,52	24,30	30,49	29,03	38,51	40,53	40,47	38,55
14	DI YOGYAKARTA	26,12	26,15	36,43	31,99	24,78	39,71	46,59	59,87	51,52	55,62
15	JAWA TIMUR	26,44	35,46	36,87	25,22	25,03	33,37	34,74	47,65	48,97	49,52
16	BANTEN	39,91	41,54	51,87	49,85	45,94	42,60	41,74	47,29	54,98	56,11
17	BALI	72,07	66,57	68,00	64,46	59,26	69,54	65,11	72,13	67,74	68,46
18	NTB	22,85	27,86	38,74	46,11	39,99	51,31	42,35	48,23	46,05	45,84
19	NTT	10,67	38,02	30,94	19,01	41,65	38,23	36,16	31,70	21,60	26,90
20	KALIMANTAN BARAT	27,04	32,53	30,85	28,69	32,21	26,08	42,19	35,50	30,40	37,20
21	KALIMANTAN TENGAH	29,55	37,46	46,86	39,46	41,09	37,77	46,08	46,46	49,74	57,05
22	KALIMANTAN SELATAN	34,18	43,23	49,19	47,71	51,63	50,46	52,22	50,75	56,36	58,01
23	KALIMANTAN TIMUR	49,11	41,03	41,55	46,16	39,63	46,83	52,11	45,82	58,01	53,87
24	SULAWESI UTARA	28,46	29,22	37,55	47,39	38,84	48,39	45,16	50,18	39,68	44,83
25	SULAWESI TENGAH	31,10	37,51	37,84	32,49	40,96	41,40	53,87	39,45	47,29	34,50
26	SULAWESI SELATAN	30,95	43,36	48,12	51,73	47,57	50,26	54,48	49,53	35,59	43,36
27	SULAWESI TENGGARA	20,91	34,77	28,62	41,72	30,75	44,52	47,54	52,81	44,75	46,07
28	GORONTALO	22,68	37,45	22,16	33,03	29,68	38,45	43,95	50,77	53,77	36,81
29	SULAWESI BARAT	24,87	19,87	30,08	61,55	26,01	46,04	50,92	50,79	35,00	45,46
30	MALUKU	18,06	21,14	41,63	6,67	44,33	19,99	31,17	28,42	17,52	38,72
31	MALUKU UTARA	24,67	20,48	22,32	24,22	13,60	20,20	27,76	25,47	14,67	24,17
32	PAPUA BARAT	19,24	18,42	17,40	33,79	25,54	20,01	20,77	37,78	43,95	35,63
33	PAPUA	32,85	39,47	58,26	47,82	30,50	39,00	21,64	15,73	23,90	19,22

3. Dimensi : Stability

No	Provinsi	Gajolak pangan domestik									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	4,512	4,512	4,512	4,512	4,512	4,512	4,512	4,512	4,512	4,512
2	SUMATERA UTARA	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336
3	SUMATERA BARAT	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248	5,248
4	RIAU	3,769	3,769	3,769	3,769	3,769	3,769	3,769	3,769	3,769	3,769
5	JAMBI	6,283	6,283	6,283	6,283	6,283	6,283	6,283	6,283	6,283	6,283
6	SUMATERA SELATAN	4,967	4,967	4,967	4,967	4,967	4,967	4,967	4,967	4,967	4,967
7	BENGKULU	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640
8	LAMPUNG	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209	5,209
9	KEP. BABEL	5,022	5,022	5,022	5,022	5,022	5,022	5,022	5,022	5,022	5,022
10	KEPULAUAN RIAU	3,316	3,316	3,316	3,316	3,316	3,316	3,316	3,316	3,316	3,316
11	DIKI JAKARTA	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738	2,738
12	JAWA BARAT	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538
13	JAWAB TENGAH	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690
14	DI YOGYAKARTA	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833	4,833
15	JAWA TIMUR	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072
16	BANTEN	4,666	4,666	4,666	4,666	4,666	4,666	4,666	4,666	4,666	4,666
17	BALI	3,999	3,999	3,999	3,999	3,999	3,999	3,999	3,999	3,999	3,999
18	NTB	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999
19	NTT	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480
20	KALIMANTAN BARAT	2,736	2,736	2,736	2,736	2,736	2,736	2,736	2,736	2,736	2,736
21	KALIMANTAN TENGAH	5,337	5,337	5,337	5,337	5,337	5,337	5,337	5,337	5,337	5,337
22	KALIMANTAN SELATAN	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881	3,881
23	KALIMANTAN TIMUR	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026	5,026
24	SULAWESI UTARA	4,762	4,762	4,762	4,762	4,762	4,762	4,762	4,762	4,762	4,762
25	SULAWESI TENGAH	4,063	4,063	4,063	4,063	4,063	4,063	4,063	4,063	4,063	4,063
26	SULAWESI SELATAN	7,353	7,353	7,353	7,353	7,353	7,353	7,353	7,353	7,353	7,353
27	SULAWESI TENGGARA	4,253	4,253	4,253	4,253	4,253	4,253	4,253	4,253	4,253	4,253
28	GORONTALO	6,528	6,528	6,528	6,528	6,528	6,528	6,528	6,528	6,528	6,528
29	SULAWESI BARAT	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356
30	MALUKU	6,459	6,459	6,459	6,459	6,459	6,459	6,459	6,459	6,459	6,459
31	MALUKU UTARA	5,852	5,852	5,852	5,852	5,852	5,852	5,852	5,852	5,852	5,852
32	PAPUA BARAT	5,194	5,194	5,194	5,194	5,194	5,194	5,194	5,194	5,194	5,194
33	PAPUA	4,742	4,742	4,742	4,742	4,742	4,742	4,742	4,742	4,742	4,742
MAX		7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356	7,356
MIN		2,538	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538

No	Provinsi	Variabilitas produksi pangan perkapita									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	513,067	513,067	513,067	513,067	513,067	513,067	513,067	513,067	513,067	513,067
2	SUMATERA UTARA	410,696	410,696	410,696	410,696	410,696	410,696	410,696	410,696	410,696	410,696
3	SUMATERA BARAT	676,708	676,708	676,708	676,708	676,708	676,708	676,708	676,708	676,708	676,708
4	RIAU	42,254	42,254	42,254	42,254	42,254	42,254	42,254	42,254	42,254	42,254
5	JAMBI	2831,685	2831,685	2831,685	2831,685	2831,685	2831,685	2831,685	2831,685	2831,685	2831,685
6	SUMATERA SELATAN	745,904	745,904	745,904	745,904	745,904	745,904	745,904	745,904	745,904	745,904
7	BENGKULU	363,449	363,449	363,449	363,449	363,449	363,449	363,449	363,449	363,449	363,449
8	LAMPUNG	750,695	750,695	750,695	750,695	750,695	750,695	750,695	750,695	750,695	750,695
9	KEP. BABEL	44,561	44,561	44,561	44,561	44,561	44,561	44,561	44,561	44,561	44,561
10	KEPULAUAN RIAU	149,478	149,478	149,478	149,478	149,478	149,478	149,478	149,478	149,478	149,478
11	DIKI JAKARTA	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853
12	JAWA BARAT	277,274	277,274	277,274	277,274	277,274	277,274	277,274	277,274	277,274	277,274
13	JAWAB TENGAH	448,394	448,394	448,394	448,394	448,394	448,394	448,394	448,394	448,394	448,394
14	DI YOGYAKARTA	463,835	463,835	463,835	463,835	463,835	463,835	463,835	463,835	463,835	463,835
15	JAWA TIMUR	487,050	487,050	487,050	487,050	487,050	487,050	487,050	487,050	487,050	487,050
16	BANTEN	167,076	167,076	167,076	167,076	167,076	167,076	167,076	167,076	167,076	167,076
17	BALI	130,248	130,248	130,248	130,248	130,248	130,248	130,248	130,248	130,248	130,248
18	NTB	690,078	690,078	690,078	690,078	690,078	690,078	690,078	690,078	690,078	690,078
19	NTT	426,707	426,707	426,707	426,707	426,707	426,707	426,707	426,707	426,707	426,707
20	KALIMANTAN BARAT	240,145	240,145	240,145	240,145	240,145	240,145	240,145	240,145	240,145	240,145
21	KALIMANTAN TENGAH	501,417	501,417	501,417	501,417	501,417	501,417	501,417	501,417	501,417	501,417
22	KALIMANTAN SELATAN	704,586	704,586	704,586	704,586	704,586	704,586	704,586	704,586	704,586	704,586
23	KALIMANTAN TIMUR	88,814	88,814	88,814	88,814	88,814	88,814	88,814	88,814	88,814	88,814
24	SULAWESI UTARA	472,614	472,614	472,614	472,614	472,614	472,614	472,614	472,614	472,614	472,614
25	SULAWESI TENGAH	366,812	366,812	366,812	366,812	366,812	366,812	366,812	366,812	366,812	366,812
26	SULAWESI SELATAN	883,703	883,703	883,703	883,703	883,703	883,703	883,703	883,703	883,703	883,703
27	SULAWESI TENGGARA	243,414	243,414	243,414	243,414	243,414	243,414	243,414	243,414	243,414	243,414
28	GORONTALO	643,903	643,903	643,903	643,903	643,903	643,903	643,903	643,903	643,903	643,903
29	SULAWESI BARAT	553,437	553,437	553,437	553,437	553,437	553,437	553,437	553,437	553,437	553,437
30	MALUKU	194,317	194,317	194,317	194,317	194,317	194,317	194,317	194,317	194,317	194,317
31	MALUKU UTARA	131,155	131,155	131,155	131,155	131,155	131,155	131,155	131,155	131,155	131,155
32	PAPUA BARAT	91,117	91,117	91,117	91,117	91,117	91,117	91,117	91,117	91,117	91,117
33	PAPUA	809,148	809,148	809,148	809,148	809,148	809,148	809,148	809,148	809,148	809,148
	MAX	2831,685	2831,685	2831,685	2831,685	2831,685	2831,685	2831,685	2831,685	2831,685	2831,685
	MIN	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853	0,853

No	Provinsi	Volatilitas pasokan makanan perkapita									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	312,678	312,68	312,68	312,68	312,68	312,68	312,68	312,68	312,68	312,68
2	SUMATERA UTARA	394,512	394,51	394,51	394,51	394,51	394,51	394,51	394,51	394,51	394,51
3	SUMATERA BARAT	281,684	281,68	281,68	281,68	281,68	281,68	281,68	281,68	281,68	281,68
4	RIAU	529,961	529,96	529,96	529,96	529,96	529,96	529,96	529,96	529,96	529,96
5	JAMBI	551,933	551,93	551,93	551,93	551,93	551,93	551,93	551,93	551,93	551,93
6	SUMATERA SELATAN	202,225	202,23	202,23	202,23	202,23	202,23	202,23	202,23	202,23	202,23
7	BENGKULU	354,044	354,04	354,04	354,04	354,04	354,04	354,04	354,04	354,04	354,04
8	LAMPUNG	199,833	199,83	199,83	199,83	199,83	199,83	199,83	199,83	199,83	199,83
9	KEP. BABEL	582,227	582,23	582,23	582,23	582,23	582,23	582,23	582,23	582,23	582,23
10	KEPULAUAN RIAU	607,851	607,85	607,85	607,85	607,85	607,85	607,85	607,85	607,85	607,85
11	DIKI JAKARTA	574,596	574,60	574,60	574,60	574,60	574,60	574,60	574,60	574,60	574,60
12	JAWA BARAT	399,150	399,15	399,15	399,15	399,15	399,15	399,15	399,15	399,15	399,15
13	JAWAB TENGAH	324,110	324,11	324,11	324,11	324,11	324,11	324,11	324,11	324,11	324,11
14	DI YOGYAKARTA	307,814	307,81	307,81	307,81	307,81	307,81	307,81	307,81	307,81	307,81
15	JAWA TIMUR	309,246	309,25	309,25	309,25	309,25	309,25	309,25	309,25	309,25	309,25
16	BANTEN	484,383	484,38	484,38	484,38	484,38	484,38	484,38	484,38	484,38	484,38
17	BALI	480,336	480,34	480,34	480,34	480,34	480,34	480,34	480,34	480,34	480,34
18	NTB	340,302	340,30	340,30	340,30	340,30	340,30	340,30	340,30	340,30	340,30
19	NTT	387,677	387,68	387,68	387,68	387,68	387,68	387,68	387,68	387,68	387,68
20	KALIMANTAN BARAT	333,433	333,43	333,43	333,43	333,43	333,43	333,43	333,43	333,43	333,43
21	KALIMANTAN TENGAH	393,417	393,42	393,42	393,42	393,42	393,42	393,42	393,42	393,42	393,42
22	KALIMANTAN SELATAN	171,622	171,62	171,62	171,62	171,62	171,62	171,62	171,62	171,62	171,62
23	KALIMANTAN TIMUR	358,332	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33
24	SULAWESI UTARA	479,244	479,24	479,24	479,24	479,24	479,24	479,24	479,24	479,24	479,24
25	SULAWESI TENGAH	346,098	346,10	346,10	346,10	346,10	346,10	346,10	346,10	346,10	346,10
26	SULAWESI SELATAN	243,429	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43	243,43
27	SULAWESI TENGGARA	359,540	359,54	359,54	359,54	359,54	359,54	359,54	359,54	359,54	359,54
28	GORONTALO	135,526	135,53	135,53	135,53	135,53	135,53	135,53	135,53	135,53	135,53
29	SULAWESI BARAT	374,076	374,08	374,08	374,08	374,08	374,08	374,08	374,08	374,08	374,08
30	MALUKU	442,343	442,34	442,34	442,34	442,34	442,34	442,34	442,34	442,34	442,34
31	MALUKU UTARA	417,871	417,87	417,87	417,87	417,87	417,87	417,87	417,87	417,87	417,87
32	PAPUA BARAT	521,452	521,45	521,45	521,45	521,45	521,45	521,45	521,45	521,45	521,45
33	PAPUA	191,036	191,04	191,04	191,04	191,04	191,04	191,04	191,04	191,04	191,04
	MAX	607,851	607,851	607,851	607,851	607,851	607,851	607,851	607,851	607,851	607,851
	MIN	135,526	135,526	135,526	135,526	135,526	135,526	135,526	135,526	135,526	135,526

No	Provinsi	Indeks Gejolak pangan domestik									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	59,024	59,024	59,024	59,024	59,024	59,024	59,024	59,024	59,024	59,024
2	SUMATERA UTARA	62,687	62,687	62,687	62,687	62,687	62,687	62,687	62,687	62,687	62,687
3	SUMATERA BARAT	43,762	43,762	43,762	43,762	43,762	43,762	43,762	43,762	43,762	43,762
4	RIAU	74,448	74,448	74,448	74,448	74,448	74,448	74,448	74,448	74,448	74,448
5	JAMBI	22,273	22,273	22,273	22,273	22,273	22,273	22,273	22,273	22,273	22,273
6	SUMATERA SELATAN	49,585	49,585	49,585	49,585	49,585	49,585	49,585	49,585	49,585	49,585
7	BENGKULU	56,376	56,376	56,376	56,376	56,376	56,376	56,376	56,376	56,376	56,376
8	LAMPUNG	44,558	44,558	44,558	44,558	44,558	44,558	44,558	44,558	44,558	44,558
9	KEP. BABEL	48,451	48,451	48,451	48,451	48,451	48,451	48,451	48,451	48,451	48,451
10	KEPULAUAN RIAU	83,864	83,864	83,864	83,864	83,864	83,864	83,864	83,864	83,864	83,864
11	DIKI JAKARTA	95,850	95,850	95,850	95,850	95,850	95,850	95,850	95,850	95,850	95,850
12	JAWA BARAT	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
13	JAWAB TENGAH	96,841	96,841	96,841	96,841	96,841	96,841	96,841	96,841	96,841	96,841
14	DI YOGYAKARTA	52,370	52,370	52,370	52,370	52,370	52,370	52,370	52,370	52,370	52,370
15	JAWA TIMUR	68,159	68,159	68,159	68,159	68,159	68,159	68,159	68,159	68,159	68,159
16	BANTEN	55,837	55,837	55,837	55,837	55,837	55,837	55,837	55,837	55,837	55,837
17	BALI	69,674	69,674	69,674	69,674	69,674	69,674	69,674	69,674	69,674	69,674
18	NTB	48,917	48,917	48,917	48,917	48,917	48,917	48,917	48,917	48,917	48,917
19	NTT	18,195	18,195	18,195	18,195	18,195	18,195	18,195	18,195	18,195	18,195
20	KALIMANTAN BARAT	95,892	95,892	95,892	95,892	95,892	95,892	95,892	95,892	95,892	95,892
21	KALIMANTAN TENGAH	41,917	41,917	41,917	41,917	41,917	41,917	41,917	41,917	41,917	41,917
22	KALIMANTAN SELATAN	72,122	72,122	72,122	72,122	72,122	72,122	72,122	72,122	72,122	72,122
23	KALIMANTAN TIMUR	48,368	48,368	48,368	48,368	48,368	48,368	48,368	48,368	48,368	48,368
24	SULAWESI UTARA	53,847	53,847	53,847	53,847	53,847	53,847	53,847	53,847	53,847	53,847
25	SULAWESI TENGAH	68,352	68,352	68,352	68,352	68,352	68,352	68,352	68,352	68,352	68,352
26	SULAWESI SELATAN	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
27	SULAWESI TENGGARA	64,408	64,408	64,408	64,408	64,408	64,408	64,408	64,408	64,408	64,408
28	GORONTALO	17,186	17,186	17,186	17,186	17,186	17,186	17,186	17,186	17,186	17,186
29	SULAWESI BARAT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30	MALUKU	18,614	18,614	18,614	18,614	18,614	18,614	18,614	18,614	18,614	18,614
31	MALUKU UTARA	31,220	31,220	31,220	31,220	31,220	31,220	31,220	31,220	31,220	31,220
32	PAPUA BARAT	44,875	44,875	44,875	44,875	44,875	44,875	44,875	44,875	44,875	44,875
33	PAPUA	54,264	54,264	54,264	54,264	54,264	54,264	54,264	54,264	54,264	54,264

No	Provinsi	Indeks Variabilitas produksi pangan perkapita									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	81,906	81,906	81,906	81,906	81,906	81,906	81,906	81,906	81,906	81,906
2	SUMATERA UTARA	85,522	85,522	85,522	85,522	85,522	85,522	85,522	85,522	85,522	85,522
3	SUMATERA BARAT	76,125	76,125	76,125	76,125	76,125	76,125	76,125	76,125	76,125	76,125
4	RIAU	98,537	98,537	98,537	98,537	98,537	98,537	98,537	98,537	98,537	98,537
5	JAMBI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	SUMATERA SELATAN	73,681	73,681	73,681	73,681	73,681	73,681	73,681	73,681	73,681	73,681
7	BENGKULU	87,191	87,191	87,191	87,191	87,191	87,191	87,191	87,191	87,191	87,191
8	LAMPUNG	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512
9	KEP. BABEL	98,456	98,456	98,456	98,456	98,456	98,456	98,456	98,456	98,456	98,456
10	KEPULAUAN RIAU	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750	94,750
11	DIKI JAKARTA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
12	JAWA BARAT	90,235	90,235	90,235	90,235	90,235	90,235	90,235	90,235	90,235	90,235
13	JAWAB TENGAH	84,190	84,190	84,190	84,190	84,190	84,190	84,190	84,190	84,190	84,190
14	DI YOGYAKARTA	83,645	83,645	83,645	83,645	83,645	83,645	83,645	83,645	83,645	83,645
15	JAWA TIMUR	82,825	82,825	82,825	82,825	82,825	82,825	82,825	82,825	82,825	82,825
16	BANTEN	94,128	94,128	94,128	94,128	94,128	94,128	94,128	94,128	94,128	94,128
17	BALI	95,429	95,429	95,429	95,429	95,429	95,429	95,429	95,429	95,429	95,429
18	NTB	75,653	75,653	75,653	75,653	75,653	75,653	75,653	75,653	75,653	75,653
19	NTT	84,957	84,957	84,957	84,957	84,957	84,957	84,957	84,957	84,957	84,957
20	KALIMANTAN BARAT	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547	91,547
21	KALIMANTAN TENGAH	82,317	82,317	82,317	82,317	82,317	82,317	82,317	82,317	82,317	82,317
22	KALIMANTAN SELATAN	75,140	75,140	75,140	75,140	75,140	75,140	75,140	75,140	75,140	75,140
23	KALIMANTAN TIMUR	96,893	96,893	96,893	96,893	96,893	96,893	96,893	96,893	96,893	96,893
24	SULAWESI UTARA	83,335	83,335	83,335	83,335	83,335	83,335	83,335	83,335	83,335	83,335
25	SULAWESI TENGAH	87,072	87,072	87,072	87,072	87,072	87,072	87,072	87,072	87,072	87,072
26	SULAWESI SELATAN	68,813	68,813	68,813	68,813	68,813	68,813	68,813	68,813	68,813	68,813
27	SULAWESI TENGGARA	91,431	91,431	91,431	91,431	91,431	91,431	91,431	91,431	91,431	91,431
28	GORONTALO	77,284	77,284	77,284	77,284	77,284	77,284	77,284	77,284	77,284	77,284
29	SULAWESI BARAT	80,480	80,480	80,480	80,480	80,480	80,480	80,480	80,480	80,480	80,480
30	MALUKU	93,166	93,166	93,166	93,166	93,166	93,166	93,166	93,166	93,166	93,166
31	MALUKU UTARA	95,397	95,397	95,397	95,397	95,397	95,397	95,397	95,397	95,397	95,397
32	PAPUA BARAT	96,811	96,811	96,811	96,811	96,811	96,811	96,811	96,811	96,811	96,811
33	PAPUA	71,447	71,447	71,447	71,447	71,447	71,447	71,447	71,447	71,447	71,447

No	Provinsi	Indeks Volatilitas pasokan makanan perkapita									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	62,494	62,494	62,494	62,494	62,494	62,494	62,494	62,494	62,494	62,494
2	SUMATERA UTARA	45,168	45,168	45,168	45,168	45,168	45,168	45,168	45,168	45,168	45,168
3	SUMATERA BARAT	69,056	69,056	69,056	69,056	69,056	69,056	69,056	69,056	69,056	69,056
4	RIAU	16,491	16,491	16,491	16,491	16,491	16,491	16,491	16,491	16,491	16,491
5	JAMBI	11,839	11,839	11,839	11,839	11,839	11,839	11,839	11,839	11,839	11,839
6	SUMATERA SELATAN	85,879	85,879	85,879	85,879	85,879	85,879	85,879	85,879	85,879	85,879
7	BENGKULU	53,736	53,736	53,736	53,736	53,736	53,736	53,736	53,736	53,736	53,736
8	LAMPUNG	86,385	86,385	86,385	86,385	86,385	86,385	86,385	86,385	86,385	86,385
9	KEP. BABEL	5,425	5,425	5,425	5,425	5,425	5,425	5,425	5,425	5,425	5,425
10	KEPULAUAN RIAU	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	DIKI JAKARTA	7,041	7,041	7,041	7,041	7,041	7,041	7,041	7,041	7,041	7,041
12	JAWA BARAT	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186
13	JAWAB TENGAH	60,073	60,073	60,073	60,073	60,073	60,073	60,073	60,073	60,073	60,073
14	DI YOGYAKARTA	63,523	63,523	63,523	63,523	63,523	63,523	63,523	63,523	63,523	63,523
15	JAWA TIMUR	63,220	63,220	63,220	63,220	63,220	63,220	63,220	63,220	63,220	63,220
16	BANTEN	26,140	26,140	26,140	26,140	26,140	26,140	26,140	26,140	26,140	26,140
17	BALI	26,997	26,997	26,997	26,997	26,997	26,997	26,997	26,997	26,997	26,997
18	NTB	56,645	56,645	56,645	56,645	56,645	56,645	56,645	56,645	56,645	56,645
19	NTT	46,615	46,615	46,615	46,615	46,615	46,615	46,615	46,615	46,615	46,615
20	KALIMANTAN BARAT	58,099	58,099	58,099	58,099	58,099	58,099	58,099	58,099	58,099	58,099
21	KALIMANTAN TENGAH	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400
22	KALIMANTAN SELATAN	92,358	92,358	92,358	92,358	92,358	92,358	92,358	92,358	92,358	92,358
23	KALIMANTAN TIMUR	52,828	52,828	52,828	52,828	52,828	52,828	52,828	52,828	52,828	52,828
24	SULAWESI UTARA	27,229	27,229	27,229	27,229	27,229	27,229	27,229	27,229	27,229	27,229
25	SULAWESI TENGAH	55,418	55,418	55,418	55,418	55,418	55,418	55,418	55,418	55,418	55,418
26	SULAWESI SELATAN	77,155	77,155	77,155	77,155	77,155	77,155	77,155	77,155	77,155	77,155
27	SULAWESI TENGGARA	52,572	52,572	52,572	52,572	52,572	52,572	52,572	52,572	52,572	52,572
28	GORONTALO	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
29	SULAWESI BARAT	49,495	49,495	49,495	49,495	49,495	49,495	49,495	49,495	49,495	49,495
30	MALUKU	35,041	35,041	35,041	35,041	35,041	35,041	35,041	35,041	35,041	35,041
31	MALUKU UTARA	40,222	40,222	40,222	40,222	40,222	40,222	40,222	40,222	40,222	40,222
32	PAPUA BARAT	18,292	18,292	18,292	18,292	18,292	18,292	18,292	18,292	18,292	18,292
33	PAPUA	88,247	88,247	88,247	88,247	88,247	88,247	88,247	88,247	88,247	88,247

No	Provinsi	Indeks Stability (%)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	67,808	67,808	67,808	67,808	67,808	67,808	67,808	67,808	67,808	67,808
2	SUMATERA UTARA	64,459	64,459	64,459	64,459	64,459	64,459	64,459	64,459	64,459	64,459
3	SUMATERA BARAT	62,981	62,981	62,981	62,981	62,981	62,981	62,981	62,981	62,981	62,981
4	RIAU	63,159	63,159	63,159	63,159	63,159	63,159	63,159	63,159	63,159	63,159
5	JAMBI	11,371	11,371	11,371	11,371	11,371	11,371	11,371	11,371	11,371	11,371
6	SUMATERA SELATAN	69,715	69,715	69,715	69,715	69,715	69,715	69,715	69,715	69,715	69,715
7	BENGKULU	65,768	65,768	65,768	65,768	65,768	65,768	65,768	65,768	65,768	65,768
8	LAMPUNG	68,152	68,152	68,152	68,152	68,152	68,152	68,152	68,152	68,152	68,152
9	KEP. BABEL	50,777	50,777	50,777	50,777	50,777	50,777	50,777	50,777	50,777	50,777
10	KEPULAUAN RIAU	59,538	59,538	59,538	59,538	59,538	59,538	59,538	59,538	59,538	59,538
11	DIKI JAKARTA	67,630	67,630	67,630	67,630	67,630	67,630	67,630	67,630	67,630	67,630
12	JAWA BARAT	78,140	78,140	78,140	78,140	78,140	78,140	78,140	78,140	78,140	78,140
13	JAWAB TENGAH	80,368	80,368	80,368	80,368	80,368	80,368	80,368	80,368	80,368	80,368
14	DI YOGYAKARTA	66,513	66,513	66,513	66,513	66,513	66,513	66,513	66,513	66,513	66,513
15	JAWA TIMUR	71,401	71,401	71,401	71,401	71,401	71,401	71,401	71,401	71,401	71,401
16	BANTEN	58,702	58,702	58,702	58,702	58,702	58,702	58,702	58,702	58,702	58,702
17	BALI	64,033	64,033	64,033	64,033	64,033	64,033	64,033	64,033	64,033	64,033
18	NTB	60,405	60,405	60,405	60,405	60,405	60,405	60,405	60,405	60,405	60,405
19	NTT	49,922	49,922	49,922	49,922	49,922	49,922	49,922	49,922	49,922	49,922
20	KALIMANTAN BARAT	81,846	81,846	81,846	81,846	81,846	81,846	81,846	81,846	81,846	81,846
21	KALIMANTAN TENGAH	56,545	56,545	56,545	56,545	56,545	56,545	56,545	56,545	56,545	56,545
22	KALIMANTAN SELATAN	79,873	79,873	79,873	79,873	79,873	79,873	79,873	79,873	79,873	79,873
23	KALIMANTAN TIMUR	66,029	66,029	66,029	66,029	66,029	66,029	66,029	66,029	66,029	66,029
24	SULAWESI UTARA	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803	54,803
25	SULAWESI TENGAH	70,281	70,281	70,281	70,281	70,281	70,281	70,281	70,281	70,281	70,281
26	SULAWESI SELATAN	48,677	48,677	48,677	48,677	48,677	48,677	48,677	48,677	48,677	48,677
27	SULAWESI TENGGARA	69,471	69,471	69,471	69,471	69,471	69,471	69,471	69,471	69,471	69,471
28	GORONTALO	64,823	64,823	64,823	64,823	64,823	64,823	64,823	64,823	64,823	64,823
29	SULAWESI BARAT	43,325	43,325	43,325	43,325	43,325	43,325	43,325	43,325	43,325	43,325
30	MALUKU	48,940	48,940	48,940	48,940	48,940	48,940	48,940	48,940	48,940	48,940
31	MALUKU UTARA	55,613	55,613	55,613	55,613	55,613	55,613	55,613	55,613	55,613	55,613
32	PAPUA BARAT	53,326	53,326	53,326	53,326	53,326	53,326	53,326	53,326	53,326	53,326
33	PAPUA	71,319	71,319	71,319	71,319	71,319	71,319	71,319	71,319	71,319	71,319

4. Dimensi : Utilization

No	Provinsi	Akses untuk mendapatkan sumber air bersih (%)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	62,23	73,32	61,12	54,72	51,58	52,71	51,68	50,60	49,61	50,53
2	SUMATERA UTARA	71,91	76,45	73,52	66,45	59,63	56,80	55,88	54,73	53,79	54,75
3	SUMATERA BARAT	64,64	72,11	67,00	58,12	52,81	48,05	47,64	45,76	47,24	46,12
4	RIAU	41,37	52,53	40,07	34,80	30,45	25,20	28,97	30,01	28,34	28,93
5	JAMBI	51,96	69,12	52,79	50,57	43,16	61,89	43,14	43,75	42,88	44,27
6	SUMATERA SELATAN	58,74	70,09	62,40	61,18	58,71	37,77	58,01	55,87	60,13	59,78
7	BENGKULU	42,99	82,59	50,41	38,97	39,91	38,73	36,00	35,97	43,26	38,34
8	LAMPUNG	53,93	82,26	63,09	58,54	64,61	24,64	56,75	51,24	54,51	50,35
9	KEP. BABEL	62,02	80,04	62,15	54,87	40,70	56,08	33,47	32,57	37,86	34,66
10	KEPULAUAN RIAU	52,75	68,06	59,23	31,15	27,81	42,52	21,14	20,33	27,05	21,64
11	DKI JAKARTA	67,51	49,98	45,82	36,74	32,37	28,27	28,88	28,66	29,28	27,68
12	JAWA BARAT	76,23	71,63	72,81	65,41	63,34	57,68	56,40	54,79	56,56	54,52
13	JAWAB TENGAH	83,89	78,50	83,53	82,41	81,41	79,92	76,92	75,64	75,14	73,15
14	DI YOGYAKARTA	76,69	76,14	76,57	71,47	72,96	76,18	72,49	69,32	69,93	67,70
15	JAWA TIMUR	81,93	75,93	81,27	78,17	76,09	50,76	74,10	71,86	71,18	68,95
16	BANTEN	67,53	61,92	61,97	49,94	47,90	78,68	42,43	40,30	44,83	42,75
17	BALI	67,29	52,17	67,47	55,95	58,20	55,84	54,56	54,39	53,87	49,42
18	NTB	80,27	74,21	80,69	82,11	79,84	75,80	81,01	78,81	78,25	77,51
19	NTT	58,35	46,59	66,51	69,98	66,81	71,42	66,75	66,28	68,76	65,70
20	KALIMANTAN BARAT	20,06	24,09	20,28	18,80	18,99	19,04	17,78	18,83	20,86	16,89
21	KALIMANTAN TENGAH	43,36	52,35	42,89	44,09	38,65	35,01	34,24	32,51	30,76	30,59
22	KALIMANTAN SELATAN	61,79	74,75	60,67	55,24	55,40	55,62	52,52	49,97	50,10	45,27
23	KALIMANTAN TIMUR	62,28	62,23	56,41	41,64	33,89	28,63	31,10	28,34	29,83	26,69
24	SULAWESI UTARA	73,51	73,79	68,74	68,30	54,63	52,70	51,46	51,62	54,95	49,63
25	SULAWESI TENGAH	67,39	50,16	71,12	69,29	64,98	65,65	61,89	61,02	62,95	56,58
26	SULAWESI SELATAN	72,48	65,27	72,51	67,81	62,76	70,89	63,78	60,15	62,15	60,98
27	SULAWESI TENGGARA	71,55	65,79	78,60	68,25	72,23	53,54	68,37	69,96	67,20	61,71
28	GORONTALO	79,75	84,28	81,70	78,13	44,85	64,95	69,87	64,14	65,06	61,41
29	SULAWESI BARAT	63,38	60,48	62,20	58,15	54,42	68,88	54,30	51,15	54,68	54,04
30	MALUKU	78,93	57,76	78,54	80,19	79,25	76,06	76,02	78,13	75,31	68,19
31	MALUKU UTARA	67,84	78,79	67,98	72,66	66,17	67,27	64,03	61,83	68,95	63,01
32	PAPUA BARAT	52,02	45,99	42,03	35,08	31,30	24,60	32,56	30,48	31,94	35,60
33	PAPUA	33,44	34,42	36,23	28,57	25,94	35,94	23,80	24,64	25,18	23,07
	Max	83,89	84,28	83,53	82,41	81,41	79,92	81,01	78,81	78,25	77,51
	Min	20,06	24,09	20,28	18,80	18,99	19,04	17,78	18,83	20,86	16,89

No	Provinsi	Akses untuk mendapatkan fasilitas sanitasi yang lebih baik (%)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	50,35	56,05	57,02	59,21	60,34	61,44	62,50	64,17	67,12	68,88
2	SUMATERA UTARA	71,90	72,76	73,01	74,11	74,88	76,81	78,06	79,75	81,08	81,66
3	SUMATERA BARAT	49,18	51,18	51,87	52,57	54,65	56,15	58,71	59,82	64,69	65,23
4	RIAU	80,37	81,88	81,27	80,78	83,81	83,69	86,42	87,94	87,84	89,37
5	JAMBI	63,13	66,24	65,07	70,14	68,12	73,00	74,45	73,37	77,58	78,83
6	SUMATERA SELATAN	61,44	63,31	64,27	64,51	64,59	68,69	70,50	72,11	74,16	75,30
7	BENGKULU	59,02	61,16	66,27	65,65	66,57	75,68	72,27	74,89	77,40	77,00
8	LAMPUNG	64,19	70,19	73,18	76,25	76,98	85,79	80,30	81,83	83,77	82,22
9	KEP. BABEL	60,39	66,11	68,78	67,73	71,75	76,78	78,08	79,83	83,22	84,59
10	KEPULAUAN RIAU	77,74	82,54	79,88	85,51	82,04	69,78	85,67	88,94	89,68	88,61
11	DKI JAKARTA	73,40	74,03	77,19	72,81	76,30	76,61	77,87	79,19	80,53	81,41
12	JAWA BARAT	61,96	62,92	65,51	66,92	67,60	67,42	71,89	73,24	76,14	78,21
13	JAWAB TENGAH	58,65	60,53	63,02	64,54	64,51	73,47	70,70	72,49	75,73	77,83
14	DI YOGYAKARTA	64,59	65,67	69,38	71,40	69,82	64,22	72,41	74,28	78,10	77,26
15	JAWA TIMUR	57,16	58,42	62,80	61,13	61,63	61,48	66,58	67,88	70,98	73,23
16	BANTEN	53,23	58,66	59,56	62,77	62,92	66,29	69,04	72,25	75,00	78,63
17	BALI	59,14	63,17	61,54	63,42	65,50	65,41	69,25	71,76	72,82	74,50
18	NTB	35,60	37,76	37,11	39,46	41,85	38,80	45,41	52,24	55,25	56,63
19	NTT	59,86	62,23	59,59	62,18	62,35	60,06	65,07	67,96	69,03	68,43
20	KALIMANTAN BARAT	57,65	58,67	59,47	61,52	64,68	67,38	68,37	69,22	73,46	74,25
21	KALIMANTAN TENGAH	50,75	53,29	54,48	56,63	53,60	56,74	59,54	65,18	70,24	71,65
22	KALIMANTAN SELATAN	59,22	58,56	60,93	61,92	63,80	64,36	69,25	70,78	73,95	74,96
23	KALIMANTAN TIMUR	75,81	77,03	79,14	81,26	80,96	85,14	85,00	87,30	89,71	89,75
24	SULAWESI UTARA	61,99	62,49	65,05	65,91	63,42	65,79	67,52	69,52	71,75	73,25
25	SULAWESI TENGAH	45,06	50,58	47,67	51,45	50,89	62,95	56,34	57,71	58,58	59,82
26	SULAWESI SELATAN	58,11	58,20	60,78	64,00	62,29	59,12	68,52	70,47	73,96	76,60
27	SULAWESI TENGGARA	56,78	58,15	59,21	58,87	58,63	46,92	61,12	64,20	68,78	69,44
28	GORONTALO	29,61	31,82	35,15	35,27	33,06	54,78	36,51	39,92	42,17	45,95
29	SULAWESI BARAT	41,52	46,14	50,82	44,09	44,85	30,93	48,93	50,60	52,02	55,71
30	MALUKU	45,74	47,15	45,67	52,75	49,53	52,26	56,24	59,92	60,72	63,92
31	MALUKU UTARA	39,93	44,21	42,89	49,48	49,88	51,59	54,26	58,36	59,20	58,75
32	PAPUA BARAT	41,54	44,32	59,49	61,07	54,83	47,04	59,24	59,73	67,11	66,63
33	PAPUA	46,40	46,27	41,50	42,71	46,54	58,21	45,07	46,16	56,18	56,09
	Max	80,37	82,54	81,27	85,51	83,81	85,79	86,42	88,94	89,71	89,75
	Min	29,61	31,82	35,15	35,27	33,06	30,93	36,51	39,92	42,17	45,95

No	Provinsi	Indeks Akses untuk mendapatkan sumber air bersih (%)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	66,07	81,79	64,57	56,47	52,21	55,31	53,61	52,97	50,10	55,49
2	SUMATERA UTARA	81,23	86,99	84,17	74,91	65,11	62,02	60,26	59,85	57,38	62,45
3	SUMATERA BARAT	69,84	79,78	73,87	61,81	54,18	47,65	47,22	44,90	45,97	48,22
4	RIAU	33,39	47,25	31,29	25,15	18,36	10,12	17,70	18,64	13,03	19,86
5	JAMBI	49,98	74,81	51,40	49,94	38,72	70,38	40,11	41,55	38,37	45,17
6	SUMATERA SELATAN	60,60	76,42	66,59	66,62	63,63	30,77	63,62	61,75	68,43	70,75
7	BENGKULU	35,92	97,19	47,64	31,71	33,51	32,34	28,82	28,58	39,03	35,38
8	LAMPUNG	53,06	96,64	67,68	62,47	73,09	9,20	61,63	54,03	58,63	55,20
9	KEP. BABEL	65,74	92,96	66,20	56,70	34,78	60,84	24,81	22,91	29,62	29,31
10	KEPULAUAN RIAU	51,21	73,05	61,58	19,42	14,13	38,57	5,31	2,50	10,79	7,84
11	DIKI JAKARTA	74,34	43,01	40,38	28,20	21,44	15,16	17,55	16,39	14,67	17,80
12	JAWA BARAT	88,00	78,98	83,05	73,27	71,05	63,47	61,08	59,95	62,21	62,08
13	JAWAB TENGAH	100,00	90,40	100,00	100,00	100,00	100,00	93,53	94,71	94,58	92,81
14	DI YOGYAKARTA	88,72	86,48	89,00	82,80	86,46	93,86	86,53	84,18	85,50	83,82
15	JAWA TIMUR	96,93	86,13	96,43	93,33	91,48	52,10	89,07	88,41	87,68	85,88
16	BANTEN	74,37	62,85	65,91	48,95	46,32	97,96	38,98	35,80	41,77	42,66
17	BALI	73,99	46,65	74,61	58,40	62,82	60,45	58,17	59,29	57,52	53,66
18	NTB	94,33	83,27	95,51	99,53	97,48	93,23	100,00	100,00	100,00	100,00
19	NTT	59,99	37,38	73,09	80,46	76,61	86,04	77,45	79,11	83,46	80,52
20	KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	KALIMANTAN TENGAH	36,50	46,95	35,75	39,76	31,50	26,23	26,03	22,81	17,25	22,60
22	KALIMANTAN SELATAN	65,38	84,17	63,86	57,29	58,33	60,09	54,94	51,92	50,95	46,82
23	KALIMANTAN TIMUR	66,14	63,37	57,12	35,91	23,87	15,75	21,07	15,86	15,63	16,17
24	SULAWESI UTARA	83,74	82,57	76,62	77,82	57,10	55,29	53,27	54,67	59,40	54,01
25	SULAWESI TENGAH	74,15	43,31	80,38	79,37	73,68	76,56	69,76	70,34	73,34	65,47
26	SULAWESI SELATAN	82,12	68,42	82,58	77,05	70,12	85,17	72,75	68,89	71,95	72,73
27	SULAWESI TENGGARA	80,67	69,28	92,21	77,74	85,29	56,67	80,01	85,25	80,75	73,94
28	GORONTALO	93,51	100,00	97,11	93,27	41,43	75,41	82,38	75,54	77,02	73,44
29	SULAWESI BARAT	67,87	60,46	66,28	61,86	56,76	81,87	57,76	53,88	58,93	61,28
30	MALUKU	92,23	55,94	92,11	96,51	96,54	93,66	92,11	98,87	94,88	84,63
31	MALUKU UTARA	74,86	90,88	75,42	84,67	75,58	79,22	73,15	71,69	83,80	76,08
32	PAPUA BARAT	50,07	36,38	34,39	25,59	19,72	9,13	23,37	19,42	19,31	30,86
33	PAPUA	20,96	17,16	25,22	15,36	11,13	27,76	9,52	9,69	7,53	10,19

No	Provinsi	Indeks Akses untuk mendapatkan fasilitas sanitasi yang lebih baik (%)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	40,86	47,77	47,42	47,65	53,75	55,61	52,07	49,47	52,48	52,35
2	SUMATERA UTARA	83,31	80,72	82,09	77,31	82,40	83,63	83,25	81,25	81,85	81,53
3	SUMATERA BARAT	38,55	38,17	36,25	34,43	42,54	45,97	44,48	40,60	47,37	44,02
4	RIAU	100,00	98,70	100,00	90,59	100,00	96,17	100,00	97,96	96,07	99,13
5	JAMBI	66,04	67,86	64,87	69,41	69,08	76,69	76,02	68,24	74,48	75,07
6	SUMATERA SELATAN	62,71	62,09	63,14	58,20	62,13	68,83	68,10	65,67	67,29	67,01
7	BENGKULU	57,94	57,85	67,48	60,47	66,03	81,57	71,65	71,34	74,11	70,89
8	LAMPUNG	68,12	75,65	82,46	81,57	86,54	100,00	87,74	85,50	87,51	82,81
9	KEP. BABEL	60,64	67,61	72,92	64,61	76,24	83,58	83,29	81,42	86,35	88,22
10	KEPULAUAN RIAU	94,82	100,00	96,99	100,00	96,51	70,82	98,50	100,00	99,94	97,40
11	DIKI JAKARTA	86,27	83,22	91,15	74,72	85,20	83,27	82,87	80,11	80,69	80,96
12	JAWA BARAT	63,73	61,32	65,83	63,00	68,06	66,51	70,89	67,97	71,46	73,65
13	JAWAB TENGAH	57,21	56,60	60,43	58,26	61,97	77,54	68,50	66,44	70,59	72,79
14	DI YOGYAKARTA	68,91	66,74	74,22	71,91	72,43	60,68	71,93	70,09	75,58	71,48
15	JAWA TIMUR	54,28	52,44	59,95	51,47	56,30	55,69	60,25	57,04	60,60	62,28
16	BANTEN	46,53	52,92	52,93	54,74	58,84	64,45	65,18	65,95	69,06	74,61
17	BALI	58,18	61,81	57,22	56,03	63,92	62,85	65,60	64,95	64,47	65,18
18	NTB	11,80	11,71	4,25	8,34	17,32	14,35	17,83	25,13	27,51	24,38
19	NTT	59,59	59,96	52,99	53,56	57,71	53,10	57,22	57,20	56,50	51,32
20	KALIMANTAN BARAT	55,24	52,94	52,73	52,25	62,31	66,44	63,83	59,77	65,82	64,61
21	KALIMANTAN TENGAH	41,65	42,33	41,91	42,52	40,47	47,05	46,14	51,53	59,05	58,68
22	KALIMANTAN SELATAN	58,33	52,72	55,90	53,05	60,57	60,94	65,60	62,95	66,85	66,23
23	KALIMANTAN TIMUR	91,02	89,14	95,38	91,54	94,38	98,82	97,15	96,65	100,00	100,00
24	SULAWESI UTARA	63,79	60,47	64,83	60,99	59,82	63,54	62,13	60,38	62,22	62,33
25	SULAWESI TENGAH	30,44	36,99	27,15	32,21	35,13	58,37	39,73	36,29	34,52	31,67
26	SULAWESI SELATAN	56,15	52,01	55,57	57,19	57,60	51,39	64,14	62,32	66,87	69,98
27	SULAWESI TENGGARA	53,53	51,91	52,17	46,97	50,38	29,15	49,31	49,53	55,97	53,63
28	GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00
29	SULAWESI BARAT	23,46	28,23	33,98	17,56	23,23	0,00	24,88	21,79	20,72	22,28
30	MALUKU	31,78	30,22	22,81	34,79	32,45	38,88	39,53	40,80	39,02	41,03
31	MALUKU UTARA	20,33	24,43	16,78	28,28	33,14	37,66	35,56	37,62	35,82	29,22
32	PAPUA BARAT	23,50	24,65	52,78	51,35	42,90	29,37	45,54	40,41	52,46	47,21
33	PAPUA	33,08	28,49	13,77	14,81	26,56	49,73	17,15	12,73	29,47	23,15

No	Provinsi	Indeks Utilization (%)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	53,46	64,78	55,99	52,06	52,98	55,46	52,84	51,22	51,29	53,92
2	SUMATERA UTARA	82,27	83,85	83,13	76,11	73,76	72,83	71,75	70,55	69,61	71,99
3	SUMATERA BARAT	54,20	58,98	55,06	48,12	48,36	46,81	45,85	42,75	46,67	46,12
4	RIAU	66,69	72,97	65,64	57,87	59,18	53,15	58,85	58,30	54,55	59,50
5	JAMBI	58,01	71,34	58,14	59,68	53,90	73,54	58,06	54,89	56,43	60,12
6	SUMATERA SELATAN	61,65	69,26	64,87	62,41	62,88	49,80	65,86	63,71	67,86	68,88
7	BENGKULU	46,93	77,52	57,56	46,09	49,77	56,96	50,23	49,96	56,57	53,14
8	LAMPUNG	60,59	86,15	75,07	72,02	79,81	54,60	74,69	69,77	73,07	69,00
9	KEP. BABEL	63,19	80,28	69,56	60,66	55,51	72,21	54,05	52,16	57,99	58,77
10	KEPULAUAN RIAU	73,02	86,53	79,28	59,71	55,32	54,69	51,91	51,25	55,36	52,62
11	DIKI JAKARTA	80,30	63,12	65,77	51,46	53,32	49,21	50,21	48,25	47,68	49,38
12	JAWA BARAT	75,87	70,15	74,44	68,14	69,56	64,99	65,98	63,96	66,83	67,86
13	JAWAB TENGAH	78,61	73,50	80,21	79,13	80,99	88,77	81,02	80,58	82,59	82,80
14	DI YOGYAKARTA	78,82	76,61	81,61	77,36	79,45	77,27	79,23	77,14	80,54	77,65
15	JAWA TIMUR	75,60	69,29	78,19	72,40	73,89	53,89	74,66	72,73	74,14	74,08
16	BANTEN	60,45	57,88	59,42	51,85	52,58	81,21	52,08	50,87	55,41	58,64
17	BALI	66,08	54,23	65,91	57,22	63,37	61,65	61,88	62,12	61,00	59,42
18	NTB	53,06	47,49	49,88	53,93	57,40	53,79	58,92	62,57	63,76	62,19
19	NTT	59,79	48,67	63,04	67,01	67,16	69,57	67,34	68,16	69,98	65,92
20	KALIMANTAN BARAT	27,62	26,47	26,37	26,12	31,15	33,22	31,92	29,89	32,91	32,31
21	KALIMANTAN TENGAH	39,08	44,64	38,83	41,14	35,98	36,64	36,09	37,17	38,15	40,64
22	KALIMANTAN SELATAN	61,86	68,44	59,88	55,17	59,45	60,51	60,27	57,44	58,90	56,52
23	KALIMANTAN TIMUR	78,58	76,25	76,25	63,72	59,13	57,28	59,11	56,25	57,81	58,08
24	SULAWESI UTARA	73,76	71,52	70,72	69,40	58,46	59,42	57,70	57,53	60,81	58,17
25	SULAWESI TENGAH	52,29	40,15	53,76	55,79	54,41	67,46	54,75	53,32	53,93	48,57
26	SULAWESI SELATAN	69,14	60,21	69,07	67,12	63,86	68,28	68,44	65,61	69,41	71,35
27	SULAWESI TENGGARA	67,10	60,60	72,19	62,36	67,84	42,91	64,66	67,39	68,36	63,78
28	GORONTALO	46,76	50,00	48,55	46,64	20,71	59,44	41,19	37,77	38,51	36,72
29	SULAWESI BARAT	45,67	44,35	50,13	39,71	40,00	40,93	41,32	37,84	39,82	41,78
30	MALUKU	62,00	43,08	57,46	65,65	64,50	66,27	65,82	69,83	66,95	62,83
31	MALUKU UTARA	47,59	57,65	46,10	56,48	54,36	58,44	54,35	54,65	59,81	52,65
32	PAPUA BARAT	36,79	30,51	43,58	38,47	31,31	19,25	34,46	29,92	35,88	39,04
33	PAPUA	27,02	22,83	19,49	15,08	18,85	38,74	13,34	11,21	18,50	16,67

No	Provinsi	Indeks Ketahanan Pangan (%)									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ACEH	49,12	49,87	51,26	55,21	47,67	49,91	49,47	43,65	52,87	47,30
2	SUMATERA UTARA	46,04	51,40	50,73	52,95	52,90	51,96	49,26	53,84	53,46	45,96
3	SUMATERA BARAT	41,33	50,50	56,10	56,01	55,13	60,06	49,62	48,97	57,28	52,11
4	RIAU	49,79	55,02	52,55	45,86	54,47	47,99	50,96	50,64	55,03	49,70
5	JAMBI	30,73	35,15	36,89	31,69	36,90	40,00	30,90	30,97	39,88	40,71
6	SUMATERA SELATAN	47,32	51,81	54,90	54,32	54,10	56,35	53,83	59,37	60,30	52,22
7	BENGKULU	43,93	47,19	49,84	48,41	48,65	48,82	48,58	47,51	54,45	53,63
8	LAMPUNG	50,38	53,62	51,08	52,25	52,10	50,93	48,52	45,08	47,68	45,04
9	KEP. BABEL	45,97	45,28	41,35	46,17	33,66	40,71	41,72	45,50	53,42	48,53
10	KEPULAUAN RIAU	42,07	57,32	60,17	55,00	46,02	45,19	56,90	51,48	60,70	59,58
11	DKI JAKARTA	47,70	49,93	57,31	49,39	52,77	58,20	50,82	60,68	58,28	57,92
12	JAWA BARAT	46,61	54,09	54,89	48,96	54,78	45,18	50,24	53,09	57,15	57,68
13	JAWAB TENGAH	38,97	45,62	46,10	37,02	44,55	44,87	48,02	49,04	50,06	46,35
14	DI YOGYAKARTA	35,59	31,34	42,49	38,25	37,89	46,35	53,87	60,10	54,81	54,59
15	JAWA TIMUR	39,32	43,57	46,10	37,82	42,29	44,45	44,98	52,73	54,20	51,31
16	BANTEN	46,96	46,90	53,07	49,26	51,05	49,40	48,57	48,60	54,48	55,32
17	BALI	72,08	68,37	61,85	65,19	65,35	68,36	63,79	67,66	64,73	67,12
18	NTB	36,62	40,40	46,31	52,90	54,71	60,71	55,46	56,32	55,26	51,17
19	NTT	29,18	44,35	44,08	39,83	49,56	46,44	43,64	40,34	37,04	38,46
20	KALIMANTAN BARAT	47,20	48,52	48,68	45,87	52,52	45,97	52,28	50,34	51,15	48,41
21	KALIMANTAN TENGAH	45,29	53,43	57,56	56,16	57,23	48,85	51,07	51,95	56,40	54,09
22	KALIMANTAN SELATAN	53,29	55,03	60,46	61,49	67,07	61,88	61,26	62,11	67,10	61,66
23	KALIMANTAN TIMUR	51,93	45,26	47,32	49,31	47,77	46,43	47,53	43,79	52,02	49,33
24	SULAWESI UTARA	42,25	45,33	49,06	52,98	51,02	53,36	50,89	55,24	52,25	49,74
25	SULAWESI TENGAH	42,01	48,22	48,32	42,47	53,20	49,51	54,63	48,44	52,78	47,31
26	SULAWESI SELATAN	46,35	53,17	55,00	59,24	60,59	59,32	57,71	55,81	51,64	52,06
27	SULAWESI TENGGARA	44,59	49,35	46,62	49,72	47,97	52,04	52,77	56,03	54,14	55,05
28	GORONTALO	37,69	48,01	38,50	43,78	42,10	47,54	47,16	53,43	58,47	47,20
29	SULAWESI BARAT	35,18	33,60	38,77	60,22	41,95	48,21	51,22	50,75	43,89	48,81
30	MALUKU	27,95	33,36	45,06	23,51	46,79	33,58	36,02	32,37	31,57	37,36
31	MALUKU UTARA	29,29	33,51	28,80	29,23	26,32	28,14	32,57	30,58	26,13	28,71
32	PAPUA BARAT	28,91	29,43	34,11	37,36	35,35	27,77	29,89	35,75	41,75	37,14
33	PAPUA	47,48	49,49	61,72	50,15	39,21	42,35	32,18	32,65	34,89	29,69



LAMPIRAN_3 : VARIABEL RASIO KETERGANTUNGAN (DEPENDENCY RATIO)

No	Provinsi	2007				2008				2009			
		Laki-laki + Perempuan			DR	Laki-laki + Perempuan			DR	Laki-laki + Perempuan			DR
		0 - 14 thn	15-64 tn	+65 thn		0 - 14 thn	15-64 tn	+65 thn		0 - 14 thn	15-64 tn	+65 thn	
1	ACEH	31,280	64,600	4,120	0,548	31,000	64,560	4,430	0,549	31,800	64,270	3,930	0,556
2	SUMATERA UTARA	33,950	61,600	4,450	0,623	33,160	62,420	4,430	0,602	33,040	62,510	4,460	0,600
3	SUMATERA BARAT	32,430	61,320	6,250	0,631	31,910	61,740	6,350	0,620	31,440	62,400	6,150	0,602
4	RIAU	33,030	63,850	3,120	0,566	33,080	63,500	3,410	0,575	31,900	65,180	2,930	0,534
5	JAMBI	30,780	65,600	3,620	0,524	30,870	65,170	3,960	0,534	28,270	68,870	2,860	0,452
6	SUMATERA SELATAN	29,680	65,910	4,410	0,517	30,200	65,090	4,700	0,536	30,410	65,950	3,640	0,516
7	BENGKULU	31,260	64,190	4,550	0,558	31,430	64,350	4,220	0,554	29,800	66,060	4,140	0,514
8	LAMPUNG	30,860	63,600	5,530	0,572	30,110	64,220	5,670	0,557	28,670	67,040	4,290	0,492
9	KEP. BABEL	29,120	66,680	4,210	0,500	30,030	65,620	4,350	0,524	30,370	65,270	4,360	0,532
10	KEPULAUAN RIAU	28,890	68,830	2,280	0,453	30,030	66,640	3,330	0,501	29,680	64,670	5,650	0,546
11	DKI JAKARTA	24,230	72,320	3,450	0,383	24,810	71,410	3,780	0,400	24,740	71,470	3,790	0,399
12	JAWA BARAT	29,740	64,920	5,340	0,540	29,490	65,080	5,420	0,536	29,310	65,520	5,160	0,526
13	JAWAB TENGAH	27,030	65,210	7,760	0,534	26,570	65,660	7,770	0,523	30,870	65,580	3,550	0,525
14	DI YOGYAKARTA	21,490	68,280	10,220	0,464	20,840	68,840	10,320	0,453	26,730	65,720	7,550	0,522
15	JAWA TIMUR	25,350	66,950	7,710	0,494	25,100	67,150	7,750	0,489	21,640	67,870	10,500	0,474
16	BANTEN	30,930	65,850	3,230	0,519	30,320	65,980	3,700	0,516	25,320	67,190	7,500	0,488
17	BALI	26,100	66,490	7,410	0,504	25,730	67,190	7,080	0,488	25,890	66,870	7,250	0,496
18	NTB	31,600	63,110	5,300	0,585	31,610	63,070	5,320	0,586	31,260	63,100	5,640	0,585
19	NTT	37,760	57,210	5,040	0,748	37,960	56,670	5,370	0,765	37,250	57,380	5,360	0,743
20	KALIMANTAN BARAT	32,120	63,890	3,990	0,565	32,000	63,850	4,150	0,566	32,050	64,090	3,870	0,560
21	KALIMANTAN TENGAH	31,400	65,380	3,220	0,530	30,740	65,820	3,440	0,519	31,690	65,160	3,150	0,535
22	KALIMANTAN SELATAN	29,530	66,510	3,960	0,504	28,940	67,010	4,050	0,492	29,420	66,630	3,940	0,501
23	KALIMANTAN TIMUR	30,740	66,760	2,500	0,498	30,820	66,540	2,630	0,503	30,410	66,740	2,850	0,498
24	SULAWESI UTARA	27,820	66,120	6,050	0,512	27,400	66,340	6,270	0,508	27,650	66,140	6,210	0,512
25	SULAWESI TENGAH	33,670	62,760	3,570	0,593	33,190	63,150	3,660	0,584	31,340	65,110	3,550	0,536
26	SULAWESI SELATAN	30,810	63,300	5,890	0,580	31,520	62,710	5,770	0,595	32,970	63,230	3,800	0,582
27	SULAWESI TENGGARA	36,010	59,900	4,090	0,669	35,120	60,770	4,110	0,646	31,020	63,060	5,910	0,586
28	GORONTALO	33,540	63,120	3,340	0,584	32,600	63,730	3,670	0,569	34,730	60,790	4,480	0,645
29	SULAWESI BARAT	36,870	59,130	4,000	0,691	36,700	59,280	4,020	0,687	35,110	60,880	4,010	0,643
30	MALUKU	36,120	59,580	4,300	0,678	36,800	58,890	4,310	0,698	36,820	58,390	4,790	0,713
31	MALUKU UTARA	36,150	60,570	3,280	0,651	35,280	61,680	3,040	0,621	34,660	61,970	3,370	0,614
32	PAPUA BARAT	38,040	60,360	1,600	0,657	38,430	60,120	1,450	0,663	36,230	62,680	1,090	0,595
33	PAPUA	36,810	62,180	1,010	0,608	37,190	61,690	1,110	0,621	35,160	63,020	1,820	0,587

No	Provinsi	2010				2011				2012			
		Laki-laki + Perempuan			DR	Laki-laki + Perempuan			DR	Laki-laki + Perempuan			DR
		0 - 14 thn	15-64 tn	+65 thn		0 - 14 thn	15-64 tn	+65 thn		0 - 14 thn	15-64 tn	+65 thn	
1	ACEH	31,550	64,280	4,180	0,556	32,250	64,140	3,610	0,559	32,330	64,040	3,640	0,562
2	SUMATERA UTARA	32,990	62,740	4,270	0,594	33,520	62,700	3,780	0,595	33,630	62,740	3,630	0,594
3	SUMATERA BARAT	31,980	62,080	5,950	0,611	32,230	62,230	5,550	0,607	32,350	62,230	5,420	0,607
4	RIAU	33,140	64,200	2,660	0,558	33,460	64,090	2,450	0,560	33,850	63,670	2,480	0,571
5	JAMBI	31,690	66,050	2,260	0,514	30,230	67,670	2,100	0,478	30,090	67,860	2,040	0,473
6	SUMATERA SELATAN	29,770	66,230	4,000	0,510	30,680	66,010	3,310	0,515	30,990	65,640	3,370	0,523
7	BENGKULU	30,300	65,480	4,220	0,527	30,630	65,430	3,930	0,528	31,000	65,040	3,960	0,538
8	LAMPUNG	28,720	66,810	4,470	0,497	30,100	66,380	3,520	0,506	29,850	66,570	3,580	0,502
9	KEP. BABEL	30,600	65,140	4,260	0,535	30,960	65,300	3,740	0,531	31,320	65,020	3,660	0,538
10	KEPULAUAN RIAU	29,290	65,490	5,220	0,527	29,680	65,620	4,710	0,524	29,920	65,440	4,650	0,528
11	DKI JAKARTA	23,860	72,680	3,460	0,376	24,290	72,490	3,220	0,380	24,460	72,720	2,820	0,375
12	JAWA BARAT	29,330	65,910	4,750	0,517	29,630	65,990	4,380	0,515	29,680	65,800	4,520	0,520
13	JAWAB TENGAH	29,550	67,120	3,330	0,490	30,280	67,070	2,650	0,491	30,310	67,050	2,640	0,491
14	DI YOGYAKARTA	26,470	65,810	7,710	0,519	27,010	65,980	7,020	0,516	27,010	66,190	6,790	0,511
15	JAWA TIMUR	22,440	68,220	9,340	0,466	22,260	68,470	9,270	0,460	22,300	68,420	9,270	0,461
16	BANTEN	24,630	67,680	7,700	0,478	25,060	68,060	6,880	0,469	24,980	68,230	6,790	0,466
17	BALI	26,230	66,720	7,050	0,499	26,540	66,920	6,540	0,494	26,370	67,220	6,400	0,488
18	NTB	31,240	63,670	5,090	0,571	31,840	63,830	4,330	0,567	31,890	63,590	4,520	0,573
19	NTT	37,000	57,750	5,250	0,732	38,050	56,840	5,110	0,759	37,850	57,300	4,850	0,745
20	KALIMANTAN BARAT	31,500	64,750	3,760	0,545	32,440	63,990	3,570	0,563	32,450	64,100	3,450	0,560
21	KALIMANTAN TENGAH	31,290	65,540	3,170	0,526	31,620	65,530	2,850	0,526	31,710	65,440	2,860	0,528
22	KALIMANTAN SELATAN	28,990	67,300	3,710	0,486	29,650	66,850	3,500	0,496	29,840	66,520	3,640	0,503
23	KALIMANTAN TIMUR	30,980	66,260	2,760	0,509	31,210	66,470	2,330	0,505	31,530	66,140	2,330	0,512
24	SULAWESI UTARA	27,460	66,530	6,010	0,503	28,350	66,120	5,530	0,512	28,410	66,260	5,330	0,509
25	SULAWESI TENGAH	31,320	65,100	3,570	0,536	32,150	64,400	3,460	0,553	32,480	64,110	3,410	0,560
26	SULAWESI SELATAN	33,070	63,290	3,650	0,580	33,650	62,730	3,620	0,594	33,860	62,650	3,490	0,596
27	SULAWESI TENGGARA	30,190	63,940	5,870	0,564	31,240	63,420	5,340	0,577	31,430	62,970	5,590	0,588
28	GORONTALO	35,950	59,970	4,090	0,668	36,310	59,830	3,860	0,671	36,170	59,750	4,070	0,673
29	SULAWESI BARAT	34,020	61,730	4,250	0,620	35,570	60,850	3,580	0,643	35,720	60,470	3,810	0,654
30	MALUKU	35,340	60,510	4,160	0,653	36,660	59,610	3,740	0,678	36,650	59,260	4,090	0,687
31	MALUKU UTARA	34,890	61,620	3,490	0,623	35,860	61,160	2,980	0,635	35,800	61,360	2,840	0,630
32	PAPUA BARAT	36,890	62,200	0,910	0,608	35,600	63,520	0,880	0,574	36,380	62,620	0,990	0,597
33	PAPUA	34,190	63,620	2,190	0,572	35,420	63,060	1,520	0,586	34,950	63,540	1,510	0,574

No	Provinsi	2013				2014				2015				2016			
		Laki-laki + Perempuan			DR	Laki-laki + Perempuan			DR	Laki-laki + Perempuan			DR	Laki-laki + Perempuan			DR
		0 - 14 thn	15-64 tn	+65 thn		0 - 14 thn	15-64 tn	+65 thn		0 - 14 thn	15-64 tn	+65 thn		0 - 14 thn	15-64 tn	+65 thn	
1	ACEH	32,530	63,830	3,640	0,567	32,510	63,950	3,540	0,564	31,800	64,490	3,710	0,551	31,450	64,510	4,040	0,550
2	SUMATERA UTARA	33,250	63,080	3,660	0,585	33,350	62,860	3,790	0,591	32,530	63,600	3,870	0,572	32,320	63,710	3,960	0,569
3	SUMATERA BARAT	31,290	63,550	5,160	0,574	31,540	63,420	5,040	0,577	30,670	63,990	5,340	0,563	30,380	64,350	5,270	0,554
4	RIAU	32,560	64,900	2,540	0,541	32,690	64,850	2,460	0,542	32,060	65,260	2,670	0,532	31,670	65,560	2,770	0,525
5	JAMBI	30,930	66,890	2,180	0,495	30,950	67,010	2,040	0,492	29,000	67,320	3,680	0,485	28,700	67,260	4,040	0,487
6	SUMATERA SELATAN	29,760	66,770	3,470	0,498	30,290	66,300	3,410	0,508	29,440	66,430	4,130	0,505	29,170	66,570	4,260	0,502
7	BENGKULU	30,090	65,960	3,950	0,516	29,720	66,400	3,880	0,506	28,880	67,320	3,800	0,485	28,810	67,240	3,950	0,487
8	LAMPUNG	28,870	67,340	3,790	0,485	28,960	67,420	3,620	0,483	28,530	66,650	4,820	0,500	28,480	66,570	4,960	0,502
9	KEP. BABEL	29,820	66,550	3,630	0,503	29,840	66,440	3,720	0,505	28,580	67,770	3,650	0,476	27,990	68,070	3,950	0,469
10	KEPULAUAN RIAU	29,450	65,830	4,720	0,519	29,580	65,750	4,670	0,521	30,630	67,110	2,260	0,490	30,810	66,900	2,290	0,495
11	DKI JAKARTA	24,930	71,790	3,280	0,393	25,030	71,720	3,250	0,394	24,890	71,690	3,420	0,395	24,550	71,680	3,760	0,395
12	JAWA BARAT	28,820	66,490	4,690	0,504	28,780	66,600	4,620	0,502	28,070	67,050	4,870	0,491	27,450	67,470	5,080	0,482
13	JAWAB TENGAH	29,840	67,350	2,810	0,485	29,760	67,460	2,780	0,482	25,420	67,050	7,530	0,491	24,960	67,200	7,830	0,488
14	DI YOGYAKARTA	26,150	66,540	7,310	0,503	26,240	66,590	7,170	0,502	21,640	69,140	9,220	0,446	21,480	69,330	9,190	0,442
15	JAWA TIMUR	21,630	69,150	9,220	0,446	21,680	69,470	8,850	0,439	23,770	68,940	7,290	0,451	23,410	68,980	7,610	0,450
16	BANTEN	24,440	68,620	6,950	0,457	24,660	68,440	6,900	0,461	29,160	67,850	2,990	0,474	28,860	68,080	3,060	0,469
17	BALI	25,470	67,910	6,620	0,473	25,590	67,900	6,510	0,473	24,800	68,600	6,600	0,458	24,150	68,870	6,980	0,452
18	NTB	31,660	63,740	4,610	0,569	31,350	63,960	4,690	0,563	31,030	64,090	4,890	0,560	30,550	64,560	4,900	0,549
19	NTT	37,340	57,940	4,710	0,726	37,350	57,780	4,870	0,731	36,580	58,510	4,910	0,709	36,020	59,020	4,970	0,695
20	KALIMANTAN BARAT	31,470	64,710	3,820	0,545	31,280	64,990	3,730	0,539	30,570	65,440	3,990	0,528	30,020	65,840	4,140	0,519
21	KALIMANTAN TENGAH	30,760	66,390	2,850	0,506	30,930	66,180	2,890	0,511	29,620	67,330	3,050	0,485	29,350	67,550	3,100	0,480
22	KALIMANTAN SELATAN	29,640	66,820	3,540	0,497	29,830	66,520	3,650	0,503	29,250	66,980	3,770	0,493	28,860	67,330	3,810	0,485
23	KALIMANTAN TIMUR	30,160	67,270	2,570	0,487	30,120	67,260	2,620	0,487	31,275	65,945	2,780	0,516	30,190	66,795	3,015	0,497
24	SULAWESI UTARA	27,060	67,420	5,520	0,483	27,170	67,240	5,590	0,487	26,540	67,700	5,770	0,477	26,170	67,780	6,040	0,475
25	SULAWESI TENGAH	30,360	65,750	3,890	0,521	30,540	65,670	3,790	0,523	30,220	65,460	4,320	0,528	28,580	65,960	4,460	0,501
26	SULAWESI SELATAN	31,090	64,560	4,350	0,549	31,320	64,410	4,270	0,553	29,900	64,460	5,640	0,551	29,110	64,970	5,930	0,539
27	SULAWESI TENGGARA	30,550	63,900	5,550	0,565	30,180	64,320	5,500	0,555	34,210	61,790	4,000	0,618	33,870	62,090	4,050	0,611
28	GORONTALO	33,450	62,580	3,960	0,598	34,280	61,620	4,100	0,623	29,430	66,530	4,040	0,503	29,210	66,410	4,380	0,506
29	SULAWESI BARAT	35,450	60,880	3,670	0,643	35,340	60,990	3,670	0,640	33,840	62,080	4,080	0,611	33,050	62,910	4,040	0,590
30	MALUKU	35,270	60,670	4,070	0,648	34,970	61,030	4,000	0,639	34,310	61,580	4,120	0,624	33,640	62,190	4,170	0,608
31	MALUKU UTARA	34,830	62,230	2,930	0,607	35,210	61,880	2,910	0,616	34,420	62,430	3,150	0,602	33,780	63,000	3,210	0,587
32	PAPUA BARAT	34,200	64,530	1,270	0,550	34,130	64,610	1,260	0,548	32,570	65,460	1,970	0,528	31,860	65,910	2,220	0,517
33	PAPUA	33,580	64,500	1,910	0,550	33,440	64,610	1,950	0,548	32,110	66,460	1,430	0,505	32,300	66,410	1,290	0,506



LAMPIRAN_4 : VARIABEL PENGELAURAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Pengeluaran APBD untuk Pendidikan dan Kesehatan tahun 2007

No	Provinsi	Total Belanja (Rp juta)	Pendidikan (Rp juta)	Kesehatan (Rp juta)	Share_Kesehatan (%)	Share_Pendidikan (%)
1	ACEH	10967033	2004832	782887	7.139	18.281
2	SUMATERA UTARA	15818169	3976362	1162647	7.350	25.138
3	SUMATERA BARAT	7357956	2319170	766886	10.423	31.519
4	RIAU	20245653	3477559	911702	4.503	17.177
5	JAMBI	5655576	1099097	360880	6.381	19.434
6	SUMATERA SELATAN	11489509	2114276	805457	7.010	18.402
7	BENGKULU	3554484	710374	357912	10.069	19.985
8	LAMPUNG	7260811	1907860	592283	8.157	26.276
9	KEP. BABEL	3099565	450454	244006	7.872	14.533
10	KEPULAUAN RIAU	6220532	958759	453192	7.285	15.413
11	DKI JAKARTA	18433926	1103891	2061738	11.184	5.988
12	JAWA BARAT	27584564	7598914	2193660	7.952	27.548
13	JAWAB TENGAH	23815259	8076695	2607400	10.948	33.914
14	DI YOGYAKARTA	3494913	1305198	255836	7.320	37.346
15	JAWA TIMUR	28589527	7283207	2058135	7.199	25.475
16	BANTEN	6530943	1508811	447129	6.846	23.102
17	BALI	6039380	1687934	485128	8.033	27.949
18	NTB	4449015	1227486	483657	10.871	27.590
19	NTT	5178953	1516434	454401	8.774	29.281
20	KALIMANTAN BARAT	6243331	1310006	540936	8.664	20.982
21	KALIMANTAN TENGAH	5896230	934193	414312	7.027	15.844
22	KALIMANTAN SELATAN	6697983	1516289	644431	9.621	22.638
23	KALIMANTAN TIMUR	21511619	3260802	1225680	5.698	15.158
24	SULAWESI UTARA	4184595	1022449	289140	6.910	24.434
25	SULAWESI TENGAH	4680629	654779	453453	9.688	13.989
26	SULAWESI SELATAN	11409598	2614813	911579	7.990	22.918
27	SULAWESI TENGGARA	4011544	964407	365387	9.108	24.041
28	GORONTALO	1852240	273283	177080	9.560	14.754
29	SULAWESI BARAT	1661450	330335	152209	9.161	19.882
30	MALUKU	3361684	454167	223356	6.644	13.510
31	MALUKU UTARA	2568606	432019	197343	7.683	16.819
32	PAPUA BARAT	4826111	666604	399355	8.275	13.812
33	PAPUA	14609994	1509835	1215616	8.320	10.334
INDONESIA		309301382	66271294	24694813	7.984	21.426

Pengeluaran APBD untuk Pendidikan dan Kesehatan tahun 2008

No	Provinsi	Total Belanja (Rp juta)	Pendidikan (Rp juta)	Kesehatan (Rp juta)	Share_Kesehatan (%)	Share_Pendidikan (%)
1	ACEH	19376232	1501567	4022818	7.750	20.762
2	SUMATERA UTARA	18625028	1779263	5157774	9.553	27.693
3	SUMATERA BARAT	10428403	975575	3137762	9.355	30.089
4	RIAU	19054866	1110872	3565004	5.830	18.709
5	JAMBI	6399583	534218	1565850	8.348	24.468
6	SUMATERA SELATAN	13877600	1082751	2978303	7.802	21.461
7	BENGKULU	4818098	496024	1055631	10.295	21.910
8	LAMPUNG	8520969	634350	2402230	7.445	28.192
9	KEP. BABEL	3811397	371476	714346	9.746	18.742
10	KEPULAUAN RIAU	5155325	359919	1094818	6.981	21.237
11	DKI JAKARTA	20523322	1363013	2568886	6.641	12.517
12	JAWA BARAT	33272212	2714686	9959322	8.159	29.933
13	JAWAB TENGAH	32906969	3316638	11116382	10.079	33.781
14	DI YOGYAKARTA	5411998	423090	1606042	7.818	29.676
15	JAWA TIMUR	36555808	3607283	10762975	9.868	29.443
16	BANTEN	8089760	704333	2089527	8.706	25.829
17	BALI	7232735	624038	2008062	8.628	27.764
18	NTB	5940232	539598	1650295	9.084	27.782
19	NTT	8357061	841684	2061849	10.072	24.672
20	KALIMANTAN BARAT	8418694	818354	1974177	9.721	23.450
21	KALIMANTAN TENGAH	8516355	632252	1550234	7.424	18.203
22	KALIMANTAN SELATAN	8388243	956333	2039108	11.401	24.309
23	KALIMANTAN TIMUR	27884588	1474138	3966547	5.287	14.225
24	SULAWESI UTARA	5339678	427082	1456325	7.998	27.274
25	SULAWESI TENGAH	5767139	547450	1285525	9.493	22.291
26	SULAWESI SELATAN	14052784	1306362	3317973	9.296	23.611
27	SULAWESI TENGGARA	5596018	525578	1184519	9.392	21.167
28	GORONTALO	2603188	209678	626943	8.055	24.084
29	SULAWESI BARAT	2413214	180336	482292	7.473	19.985
30	MALUKU	4804523	388702	778791	8.090	16.210
31	MALUKU UTARA	3817576	313756	519881	8.219	13.618
32	PAPUA BARAT	6150079	532166	856685	8.653	13.930
33	PAPUA	18067580	1413753	2117639	7.825	11.721
INDONESIA		390177259	32706320	91674519	8.382	23.496

Pengeluaran APBD untuk Pendidikan dan Kesehatan tahun 2009

No	Provinsi	Total Belanja (Rp juta)	Pendidikan (Rp juta)	Kesehatan (Rp juta)	Share_Kesehatan (%)	Share_Pendidikan (%)
1	ACEH	20896217	1685431	4773819	8.066	22.845
2	SUMATERA UTARA	20481276	1886194	6305393	9.209	30.786
3	SUMATERA BARAT	11646475	1091150	3674908	9.369	31.554
4	RIAU	20411525	1178428	4701058	5.773	23.031
5	JAMBI	7730646	649812	1995724	8.406	25.816
6	SUMATERA SELATAN	14183643	1475051	3868736	10.400	27.276
7	BENGKULU	4771872	524586	1281487	10.993	26.855
8	LAMPUNG	9085102	672498	3254726	7.402	35.825
9	KEP. BABEL	4462641	489287	914829	10.964	20.500
10	KEPULAUAN RIAU	6972381	528412	1223683	7.579	17.550
11	DKI JAKARTA	22139467	1458805	2824724	6.589	12.759
12	JAWA BARAT	38249568	3323325	12475696	8.689	32.617
13	JAWAB TENGAH	33738319	3723800	12930253	11.037	38.325
14	DI YOGYAKARTA	5398978	466468	1889589	8.640	34.999
15	JAWA TIMUR	40219412	4316388	12547652	10.732	31.198
16	BANTEN	9053824	900503	2730794	9.946	30.162
17	BALI	8038706	739946	2251764	9.205	28.012
18	NTB	6568411	600595	1946842	9.144	29.639
19	NTT	9076993	910639	2578586	10.032	28.408
20	KALIMANTAN BARAT	8959753	856913	2336535	9.564	26.078
21	KALIMANTAN TENGAH	9544887	766043	2164179	8.026	22.674
22	KALIMANTAN SELATAN	9576217	1028109	2540137	10.736	26.525
23	KALIMANTAN TIMUR	29015477	1964545	4503349	6.771	15.521
24	SULAWESI UTARA	6583662	512235	1902276	7.780	28.894
25	SULAWESI TENGAH	6342866	579704	1636181	9.139	25.796
26	SULAWESI SELATAN	15330488	1507544	4151318	9.834	27.079
27	SULAWESI TENGGARA	6913736	542529	1596240	7.847	23.088
28	GORONTALO	2774800	251063	762013	9.048	27.462
29	SULAWESI BARAT	2669310	197455	599229	7.397	22.449
30	MALUKU	5151490	390350	1004297	7.577	19.495
31	MALUKU UTARA	4630323	376342	725168	8.128	15.661
32	PAPUA BARAT	8553536	600908	1082697	7.025	12.658
33	PAPUA	19966417	1601644	2424449	8.022	12.143
INDONESIA		429138417	37796704	111598331	8.808	26.005

Pengeluaran APBD untuk Pendidikan dan Kesehatan tahun 2010

No	Provinsi	Total Belanja (Rp juta)	Pendidikan (Rp juta)	Kesehatan (Rp juta)	Share_Kesehatan (%)	Share_Pendidikan (%)
1	ACEH	17793972	1789684	4222097	10.058	23.728
2	SUMATERA UTARA	21118458	1929146	6223058	9.135	29.467
3	SUMATERA BARAT	12458031	1131876	3711722	9.086	29.794
4	RIAU	18185564	1132954	4458425	6.230	24.516
5	JAMBI	7616994	679107	1933024	8.916	25.378
6	SUMATERA SELATAN	14763158	1504422	4125326	10.190	27.943
7	BENGKULU	4708335	517234	1106348	10.986	23.498
8	LAMPUNG	34274207	2841614	9722319	8.291	28.366
9	KEP. BABEL	4391664	493074	909075	11.228	20.700
10	KEPULAUAN RIAU	6865662	577192	1288926	8.407	18.774
11	DKI JAKARTA	21552896	2046842	6926570	9.497	32.138
12	JAWA BARAT	42467967	3761991	13490802	8.858	31.767
13	JAWAB TENGAH	35060539	4067932	12985815	11.603	37.038
14	DI YOGYAKARTA	5558505	535919	1985374	9.641	35.718
15	JAWA TIMUR	43303419	5027811	12899710	11.611	29.789
16	BANTEN	9382283	889156	2696559	9.477	28.741
17	BALI	8429797	746193	2397202	8.852	28.437
18	NTB	7147305	606506	2140616	8.486	29.950
19	NTT	9392062	941011	2532099	10.019	26.960
20	KALIMANTAN BARAT	9481366	886992	2460485	9.355	25.951
21	KALIMANTAN TENGAH	9732930	740092	2208473	7.604	22.691
22	KALIMANTAN SELATAN	10671840	1044167	2748538	9.784	25.755
23	KALIMANTAN TIMUR	28469378	1870926	4243192	6.572	14.904
24	SULAWESI UTARA	6837187	519094	1988574	7.592	29.085
25	SULAWESI TENGAH	6062683	563781	1579134	9.299	26.047
26	SULAWESI SELATAN	15307905	1568601	4386042	10.247	28.652
27	SULAWESI TENGGARA	6874000	516700	1689697	7.517	24.581
28	GORONTALO	2862223	272146	777667	9.508	27.170
29	SULAWESI BARAT	2547224	215373	529942	8.455	20.805
30	MALUKU	5635445	403805	1137947	7.165	20.193
31	MALUKU UTARA	4295744	327077	613828	7.614	14.289
32	PAPUA BARAT	8339830	610095	1081028	7.315	12.962
33	PAPUA	21265217	1769795	2781009	8.322	13.078
INDONESIA		462853791	42528309	123980623	9.188	26.786

Pengeluaran APBD untuk Pendidikan dan Kesehatan tahun 2011

No	Provinsi	Total Belanja (Rp juta)	Pendidikan (Rp juta)	Kesehatan (Rp juta)	Share_Kesehatan (%)	Share_Pendidikan (%)
1	ACEH	20094333	2063806	5285208	10.271	26.302
2	SUMATERA UTARA	25494121	2229584	8876357	8.745	34.817
3	SUMATERA BARAT	13142089	1222987	4843648	9.306	36.856
4	RIAU	18768224	1201483	4846787	6.402	25.824
5	JAMBI	8238252	756265	2551445	9.180	30.971
6	SUMATERA SELATAN	17267367	1514878	5033574	8.773	29.151
7	BENGKULU	5538686	553508	1674293	9.993	30.229
8	LAMPUNG	12470587	1040930	4714173	8.347	37.802
9	KEP. BABEL	4211333	558926	1016485	13.272	24.137
10	KEPULAUAN RIAU	8034501	772873	1626641	9.619	20.246
11	DKI JAKARTA	26423600	2455766	7877004	9.294	29.810
12	JAWA BARAT	47781857	4420557	17802150	9.252	37.257
13	JAWAB TENGAH	41156412	4615658	18138467	11.215	44.072
14	DI YOGYAKARTA	6074303	600006	2405098	9.878	39.595
15	JAWA TIMUR	52795550	6282888	18953607	11.900	35.900
16	BANTEN	13291924	1179475	4187370	8.874	31.503
17	BALI	11179544	947065	3249456	8.471	29.066
18	NTB	8643009	755535	3030596	8.742	35.064
19	NTT	11382363	1117643	3652104	9.819	32.086
20	KALIMANTAN BARAT	11018410	1048691	3529341	9.518	32.031
21	KALIMANTAN TENGAH	10103457	879228	2650675	8.702	26.235
22	KALIMANTAN SELATAN	15106387	1333193	3561172	8.825	23.574
23	KALIMANTAN TIMUR	30329338	2308216	5118390	7.611	16.876
24	SULAWESI UTARA	7809555	613227	2275559	7.852	29.138
25	SULAWESI TENGAH	7249693	750679	2240922	10.355	30.911
26	SULAWESI SELATAN	17948954	1869116	5892415	10.414	32.829
27	SULAWESI TENGGARA	7459436	789153	2017185	10.579	27.042
28	GORONTALO	3400350	346012	1074936	10.176	31.613
29	SULAWESI BARAT	3198350	258593	862183	8.085	26.957
30	MALUKU	6472193	538399	1692821	8.319	26.155
31	MALUKU UTARA	4912246	376181	842239	7.658	17.146
32	PAPUA BARAT	9845126	696503	1394928	7.075	14.169
33	PAPUA	23924627	2072709	3508268	8.663	14.664
INDONESIA		510766177	48169735	156425495	9.431	30.626

Pengeluaran APBD untuk Pendidikan dan Kesehatan tahun 2012

No	Provinsi	Total Belanja (Rp juta)	Pendidikan (Rp juta)	Kesehatan (Rp juta)	Share_Kesehatan (%)	Share_Pendidikan (%)
1	ACEH	22561148	2283665	5585769	10.122	24.758
2	SUMATERA UTARA	31936216	2696428	9756639	8.443	30.550
3	SUMATERA BARAT	15726211	1462396	5409002	9.299	34.395
4	RIAU	25762924	1733082	5596968	6.727	21.725
5	JAMBI	10391167	912561	2958280	8.782	28.469
6	SUMATERA SELATAN	20615077	1734848	5574848	8.415	27.043
7	BENGKULU	6791182	726536	1868863	10.698	27.519
8	LAMPUNG	15682456	1287091	5396182	8.207	34.409
9	KEP. BABEL	5450334	540780	1176652	9.922	21.589
10	KEPULAUAN RIAU	9748602	826037	1841422	8.473	18.889
11	DKI JAKARTA	31558707	2881150	9562237	9.129	30.300
12	JAWA BARAT	59681538	5461548	19128490	9.151	32.051
13	JAWAB TENGAH	51361742	5490798	20508586	10.690	39.930
14	DI YOGYAKARTA	7606253	767101	2967463	10.085	39.013
15	JAWA TIMUR	61798325	7450432	21441862	12.056	34.697
16	BANTEN	15766041	1573260	4588928	9.979	29.106
17	BALI	12262754	1443173	3316939	11.769	27.049
18	NTB	13058044	954608	3197255	7.310	24.485
19	NTT	13282910	1265575	4200612	9.528	31.624
20	KALIMANTAN BARAT	13264410	1182459	3725633	8.915	28.087
21	KALIMANTAN TENGAH	11603480	951532	2927556	8.200	25.230
22	KALIMANTAN SELATAN	12938036	1497449	3478031	11.574	26.882
23	KALIMANTAN TIMUR	37237604	2955736	5891436	7.938	15.821
24	SULAWESI UTARA	8955905	715430	2547096	7.988	28.440
25	SULAWESI TENGAH	8996740	863531	2744158	9.598	30.502
26	SULAWESI SELATAN	21636911	2204265	6809390	10.188	31.471
27	SULAWESI TENGGARA	9112209	758069	2452401	8.319	26.913
28	GORONTALO	3891066	368441	1237395	9.469	31.801
29	SULAWESI BARAT	3472554	267080	980742	7.691	28.243
30	MALUKU	7037311	531406	1745116	7.551	24.798
31	MALUKU UTARA	5744892	425687	982094	7.410	17.095
32	PAPUA BARAT	11436985	819815	1419742	7.168	12.414
33	PAPUA	27770973	2241381	3507654	8.071	12.631
INDONESIA		614140704	57273349	174525443	9.326	28.418

Pengeluaran APBD untuk Pendidikan dan Kesehatan tahun 2013

No	Provinsi	Total Belanja (Rp juta)	Pendidikan (Rp juta)	Kesehatan (Rp juta)	Share_Kesehatan (%)	Share_Pendidikan (%)
1	ACEH	27462447	2824813	6256798	10.2861	22.7831
2	SUMATERA UTARA	39023743	3569221	11304231	9.1463	28.9676
3	SUMATERA BARAT	17536900	1709537	6030995	9.7482	34.3903
4	RIAU	31883919	2095000	6759126	6.5707	21.1992
5	JAMBI	12780773	1117402	3457088	8.7428	27.0491
6	SUMATERA SELATAN	25534713	1868096	6664979	7.3159	26.1016
7	BENGKULU	7797728	804544	2116071	10.3177	27.1370
8	LAMPUNG	21879804	1487542	5877375	6.7987	26.8621
9	KEP. BABEL	45576329	4634051	12815351	10.1677	28.1184
10	KEPULAUAN RIAU	11081586	964450	2232068	8.7032	20.1421
11	DKI JAKARTA	38301503	4219098	11048691	11.0155	28.8466
12	JAWA BARAT	70510390	6600767	22131134	9.3614	31.3871
13	JAWAB TENGAH	60836584	6689245	22747372	10.9954	37.3909
14	DI YOGYAKARTA	8850292	959222	3225383	10.8383	36.4438
15	JAWA TIMUR	71873023	8800498	23599581	12.2445	32.8351
16	BANTEN	20010911	2185434	5464843	10.9212	27.3093
17	BALI	15336398	1946270	3930918	12.6905	25.6313
18	NTB	10829276	1028285	3087287	9.4954	28.5087
19	NTT	15290194	1509248	4654437	9.8707	30.4407
20	KALIMANTAN BARAT	15711149	1453156	4193539	9.2492	26.6915
21	KALIMANTAN TENGAH	13814929	1179255	3298408	8.5361	23.8757
22	KALIMANTAN SELATAN	16751310	1949063	4384729	11.6353	26.1754
23	KALIMANTAN TIMUR	48320036	3731313	7549627	7.7221	15.6242
24	SULAWESI UTARA	10243956	868580	2866639	8.4789	27.9837
25	SULAWESI TENGAH	10456756	1112464	3055254	10.6387	29.2180
26	SULAWESI SELATAN	25580704	2532621	7580982	9.9005	29.6355
27	SULAWESI TENGGARA	10586576	919345	3001048	8.6841	28.3477
28	GORONTALO	4570506	440987	1368705	9.6485	29.9465
29	SULAWESI BARAT	4326906	332619	1064319	7.6872	24.5977
30	MALUKU	8144754	686693	2139927	8.4311	26.2737
31	MALUKU UTARA	6965408	563722	1087700	8.0932	15.6157
32	PAPUA BARAT	12661442	904891	1562404	7.1468	12.3399
33	PAPUA	32112689	2653003	3984723	8.2615	12.4086
INDONESIA		772643635	74340433	210541735	9.6216	27.2495

Pengeluaran APBD untuk Pendidikan dan Kesehatan tahun 2014

No	Provinsi	Total Belanja (Rp juta)	Pendidikan (Rp juta)	Kesehatan (Rp juta)	Share_Kesehatan (%)	Share_Pendidikan (%)
1	ACEH	34059953	3612412	8069889	10.606	23.693
2	SUMATERA UTARA	39911576	3914038	11941888	9.807	29.921
3	SUMATERA BARAT	20060281	2114564	6861874	10.541	34.206
4	RIAU	35510815	2471953	7767275	6.961	21.873
5	JAMBI	14427177	1354881	3770281	9.391	26.133
6	SUMATERA SELATAN	29253455	2267187	7239612	7.750	24.748
7	BENGKULU	8693585	894770	2415079	10.292	27.780
8	LAMPUNG	19981120	1703146	6428817	8.524	32.174
9	KEP. BABEL	7042171	806610	1548456	11.454	21.988
10	KEPULAUAN RIAU	12406671	1124277	2235615	9.062	18.019
11	DKI JAKARTA	37799664	5477833	10037423	14.492	26.554
12	JAWA BARAT	81021731	8066211	23886694	9.956	29.482
13	JAWAB TENGAH	66010569	8118642	23584411	12.299	35.728
14	DI YOGYAKARTA	9121733	909779	2854387	9.974	31.292
15	JAWA TIMUR	75622283	9575024	23608599	12.662	31.219
16	BANTEN	21403736	2461351	5426230	11.500	25.352
17	BALI	7973078	871509	2272382	10.931	28.501
18	NTB	8766903	1005670	2396202	11.471	27.332
19	NTT	12641954	1261961	3481786	9.982	27.542
20	KALIMANTAN BARAT	16452555	1584507	4134274	9.631	25.128
21	KALIMANTAN TENGAH	14932033	1348967	3680077	9.034	24.646
22	KALIMANTAN SELATAN	20277536	2557864	4670276	12.614	23.032
23	KALIMANTAN TIMUR	46235891	3400623	7240097	7.355	15.659
24	SULAWESI UTARA	11155330	1007514	2906259	9.032	26.053
25	SULAWESI TENGAH	11727681	1202377	3373718	10.252	28.767
26	SULAWESI SELATAN	26807043	2831497	7965072	10.563	29.713
27	SULAWESI TENGGARA	8606552	780267	2807248	9.066	32.618
28	GORONTALO	5247388	594817	1495119	11.335	28.493
29	SULAWESI BARAT	4937035	408373	1128355	8.272	22.855
30	MALUKU	5733889	502223	1357127	8.759	23.669
31	MALUKU UTARA	5359036	418873	757702	7.816	14.139
32	PAPUA BARAT	14395505	1016648	1756341	7.062	12.201
33	PAPUA	37112847	2777026	4274835	7.483	11.518
INDONESIA		770688776	78443394	203373401	10.178	26.389

Pengeluaran APBD untuk Pendidikan dan Kesehatan tahun 2015

No	Provinsi	Total Belanja (Rp juta)	Pendidikan (Rp juta)	Kesehatan (Rp juta)	Share_Kesehatan (%)	Share_Pendidikan (%)
1	ACEH	17472914	2666372	5650123	15.260	32.336
2	SUMATERA UTARA	40496351	4063240	12414278	10.034	30.655
3	SUMATERA BARAT	16144530	1833462	6915768	11.357	42.837
4	RIAU	16026881	1293878	4919961	8.073	30.698
5	JAMBI	15758102	1476090	4318834	9.367	27.407
6	SUMATERA SELATAN	29635749	2855538	7540745	9.635	25.445
7	BENGKULU	8131709	947794	2274690	11.656	27.973
8	LAMPUNG	17671225	1538696	5304525	8.707	30.018
9	KEP. BABEL	4952480	653125	1477163	13.188	29.827
10	KEPULAUAN RIAU	10540498	1027496	1799498	9.748	17.072
11	DKI JAKARTA	43031323	5145134	9134991	11.957	21.229
12	JAWA BARAT	88284673	9604887	25520239	10.879	28.907
13	JAWAB TENGAH	70096002	8905606	23158368	12.705	33.038
14	DI YOGYAKARTA	8634643	942260	2618607	10.913	30.327
15	JAWA TIMUR	93900907	12343343	26946185	13.145	28.696
16	BANTEN	23226459	2109006	5268150	9.080	22.682
17	BALI	23915179	2787957	5186861	11.658	21.689
18	NTB	14718637	1748471	4725448	11.879	32.105
19	NTT	18695460	2130975	5013195	11.398	26.815
20	KALIMANTAN BARAT	10075464	1024865	3347380	10.172	33.223
21	KALIMANTAN TENGAH	9916326	981606	2809826	9.899	28.335
22	KALIMANTAN SELATAN	19466929	2457998	4552148	12.627	23.384
23	KALIMANTAN TIMUR	34355976	2844104	5044008	8.278	14.682
24	SULAWESI UTARA	12431567	1174166	3342505	9.445	26.887
25	SULAWESI TENGAH	11263780	1255804	2972312	11.149	26.388
26	SULAWESI SELATAN	20214445	2658619	7554588	13.152	37.372
27	SULAWESI TENGGARA	8831238	891175	2017568	10.091	22.846
28	GORONTALO	5380218	729183	1495375	13.553	27.794
29	SULAWESI BARAT	1477041	195190	504110	13.215	34.130
30	MALUKU	9305450	805652	2407330	8.658	25.870
31	MALUKU UTARA	7890708	683648	1259793	8.664	15.966
32	PAPUA BARAT	17062199	1216722	1805428	7.131	10.581
33	PAPUA	39110307	3205829	4394568	8.197	11.236
INDONESIA		768115370	84197888	203694571	10.962	26.519

Pengeluaran APBD untuk Pendidikan dan Kesehatan tahun 2016

No	Provinsi	Total Belanja (Rp juta)	Pendidikan (Rp juta)	Kesehatan (Rp juta)	Share_Kesehatan (%)	Share_Pendidikan (%)
1	ACEH	35679741	4497973	6427708	12.607	18.015
2	SUMATERA UTARA	26488703	2985743	7787995	11.272	29.401
3	SUMATERA BARAT	19925937	2546151	5788425	12.778	29.050
4	RIAU	18399732	1778025	4127537	9.663	22.433
5	JAMBI	15183333	1741276	3872402	11.468	25.504
6	SUMATERA SELATAN	26094769	2733261	6200043	10.474	23.760
7	BENGKULU	8235692	1087148	1784282	13.200	21.665
8	LAMPUNG	22648044	2180126	5422518	9.626	23.943
9	KEP. BABEL	6958516	829819	1210602	11.925	17.397
10	KEPULAUAN RIAU	8682598	778024	1259167	8.961	14.502
11	DKI JAKARTA	47128810	6840556	9965903	14.515	21.146
12	JAWA BARAT	59617009	8872888	20104425	14.883	33.723
13	JAWAB TENGAH	61454742	9021673	19799458	14.680	32.218
14	DI YOGYAKARTA	13289086	3114068	3072920	23.433	23.124
15	JAWA TIMUR	86813438	12538921	19825314	14.444	22.837
16	BANTEN	20147484	2065443	3652375	10.252	18.128
17	BALI	12288392	1713454	4119441	13.944	33.523
18	NTB	11375205	1517666	3374174	13.342	29.663
19	NTT	13205152	1590930	2402015	12.048	18.190
20	KALIMANTAN BARAT	19634838	2220291	4338703	11.308	22.097
21	KALIMANTAN TENGAH	14521140	1655541	3649038	11.401	25.129
22	KALIMANTAN SELATAN	18833926	2759583	3643424	14.652	19.345
23	KALIMANTAN TIMUR	18312919	2085919	4159848	11.390	22.715
24	SULAWESI UTARA	13677872	1409014	3445737	10.301	25.192
25	SULAWESI TENGAH	13249279	1925911	2799350	14.536	21.128
26	SULAWESI SELATAN	26950093	4282661	6783751	15.891	25.172
27	SULAWESI TENGGARA	10491395	1150702	1800523	10.968	17.162
28	GORONTALO	6301820	997156	1358191	15.823	21.552
29	SULAWESI BARAT	6810015	888924	1273051	13.053	18.694
30	MALUKU	9213463	869256	1835998	9.435	19.927
31	MALUKU UTARA	5472908	677019	1026190	12.370	18.750
32	PAPUA BARAT	18825446	1940465	2716122	10.308	14.428
33	PAPUA	24910195	2450907	2795618	9.839	11.223
INDONESIA		720821693	93746492	171822248	13.006	23.837



LAMPIRAN_5 : HASIL OLAHAN MODEL HUMAN DEVELOPMENT

Commond Effect Model (CEM)

Dependent Variable: HDI

Method: Panel Least Squares

Date: 01/01/09 Time: 02:55

Sample: 2007 2016

Periods included: 10

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	85.32348	2.004014	42.57629	0.0000
AVAIL	0.013278	0.013438	0.988035	0.3239
ACCESS	-0.008125	0.013369	-0.607793	0.5438
STABIL	-0.020487	0.012247	-1.672798	0.0953
DR	-25.33867	2.349653	-10.78400	0.0000
S_HEALTH	-0.030250	0.096186	-0.314496	0.7533
S_EDUC	0.076953	0.027263	2.822633	0.0051
D_HDI	-4.149237	0.416607	-9.959585	0.0000
D_2008	-0.559168	0.545579	-1.024907	0.3062
R-squared	0.440155	Mean dependent var	70.82606	
Adjusted R-squared	0.424410	S.D. dependent var	3.785971	
S.E. of regression	2.872327	Akaike info criterion	4.977957	
Sum squared resid	2640.084	Schwarz criterion	5.093081	
Log likelihood	-811.3628	Hannan-Quinn criter.	5.023878	
F-statistic	27.95414	Durbin-Watson stat	0.208500	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: HDI
Method: Panel Least Squares
Date: 01/01/09 Time: 02:56
Sample: 2007 2016
Periods included: 10
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	65.71496	2.244761	29.27482	0.0000
AVAIL	0.049643	0.011145	4.454368	0.0000
ACCESS	0.009500	0.006899	1.376960	0.1696
STABIL	0.002124	0.005912	0.359170	0.7197
DR	0.579943	3.552367	0.163255	0.8704
S_HEALTH	0.395551	0.056754	6.969510	0.0000
S_EDUC	-0.007488	0.021172	-0.353695	0.7238
D_HDI	-4.502418	0.223066	-20.18426	0.0000
D_2008	-0.958673	0.260799	-3.675906	0.0003

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.892755	Mean dependent var	70.82606
Adjusted R-squared	0.877488	S.D. dependent var	3.785971
S.E. of regression	1.325155	Akaike info criterion	3.519349
Sum squared resid	505.7380	Schwarz criterion	4.002870
Log likelihood	-538.6925	Hannan-Quinn criter.	3.712218
F-statistic	58.47442	Durbin-Watson stat	0.945014
Prob(F-statistic)	0.000000		

Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: HDI
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 01/01/09 Time: 02:56
Sample: 2007 2016
Periods included: 10
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 330
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	69.36215	2.076526	33.40297	0.0000
AVAIL	0.048356	0.010789	4.481960	0.0000
ACCESS	0.008994	0.006870	1.309076	0.1914
STABIL	0.000374	0.005896	0.063413	0.9495
DR	-5.540511	3.135797	-1.766859	0.0782
S_HEALTH	0.372372	0.056175	6.628819	0.0000
S_EDUC	-0.004006	0.020550	-0.194923	0.8456
D_HDI	-4.610401	0.218515	-21.09883	0.0000
D_2008	-0.877174	0.259399	-3.381561	0.0008

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		2.449704	0.7736
Idiosyncratic random		1.325155	0.2264

Weighted Statistics			
R-squared	0.626454	Mean dependent var	11.94216
Adjusted R-squared	0.615948	S.D. dependent var	2.199941
S.E. of regression	1.363346	Sum squared resid	594.7878
F-statistic	59.62835	Durbin-Watson stat	0.758464
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.268838	Mean dependent var	70.82606
Sum squared resid	3447.972	Durbin-Watson stat	0.130838

Pengujian Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: MODEL_7_DFS
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	37.982348	(32,288)	0.0000
Cross-section Chi-square	545.340632	32	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: HDI
Method: Panel Least Squares
Date: 01/01/09 Time: 02:57
Sample: 2007 2016
Periods included: 10
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	85.32348	2.004014	42.57629	0.0000
AVAIL	0.013278	0.013438	0.988035	0.3239
ACCESS	-0.008125	0.013369	-0.607793	0.5438
STABIL	-0.020487	0.012247	-1.672798	0.0953
UTIL	-0.001827	0.010780	-0.169492	0.8655
DR	-25.33867	2.349653	-10.78400	0.0000
S_HEALTH	-0.030250	0.096186	-0.314496	0.7533
S_EDUC	0.076953	0.027263	2.822633	0.0051
D_HDI	-4.149237	0.416607	-9.959585	0.0000
D_2008	-0.559168	0.545579	-1.024907	0.3062
R-squared	0.440155	Mean dependent var		70.82606
Adjusted R-squared	0.424410	S.D. dependent var		3.785971
S.E. of regression	2.872327	Akaike info criterion		4.977957
Sum squared resid	2640.084	Schwarz criterion		5.093081
Log likelihood	-811.3628	Hannan-Quinn criter.		5.023878
F-statistic	27.95414	Durbin-Watson stat		0.208500
Prob(F-statistic)	0.000000			

Pengujian Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: MODEL_7_DFS

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	9	1.0000

* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
AVAIL	0.049643	0.048356	0.000008	0.6451
ACCESS	0.009500	0.008994	0.000000	0.4205
STABIL	0.002124	0.000374	0.000000	0.0001
UTIL	-0.002941	-0.002541	0.000000	0.3354
DR	0.579943	-5.540511	2.786088	0.0002
S_HEALTH	0.395551	0.372372	0.000065	0.0042
S_EDUC	-0.007488	-0.004006	0.000026	0.4940
D_HDI	-4.502418	-4.610401	0.002010	0.0160
D_2008	-0.958673	-0.877174	0.000728	0.0025

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: HDI

Method: Panel Least Squares

Sample: 2007 2016

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	65.71496	2.244761	29.27482	0.0000
AVAIL	0.049643	0.011145	4.454368	0.0000
ACCESS	0.009500	0.006899	1.376960	0.1696
STABIL	0.002124	0.005912	0.359170	0.7197
UTIL	-0.002941	0.005395	-0.545086	0.5861
DR	0.579943	3.552367	0.163255	0.8704
S_HEALTH	0.395551	0.056754	6.969510	0.0000
S_EDUC	-0.007488	0.021172	-0.353695	0.7238
D_HDI	-4.502418	0.223066	-20.18426	0.0000
D_2008	-0.958673	0.260799	-3.675906	0.0003

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.892755	Mean dependent var	70.82606
Adjusted R-squared	0.877488	S.D. dependent var	3.785971
S.E. of regression	1.325155	Akaike info criterion	3.519349
Sum squared resid	505.7380	Schwarz criterion	4.002870
Log likelihood	-538.6925	Hannan-Quinn criter.	3.712218
F-statistic	58.47442	Durbin-Watson stat	0.945014
Prob(F-statistic)	0.000000		

Pengujian LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	689.4424 (0.0000)	0.434902 (0.5096)	689.8773 (0.0000)
Honda	26.25723 (0.0000)	0.659471 (0.2548)	19.03299 (0.0000)
King-Wu	26.25723 (0.0000)	0.659471 (0.2548)	12.88468 (0.0000)
Standardized Honda	28.12465 (0.0000)	1.661650 (0.0483)	17.40178 (0.0000)
Standardized King-Wu	28.12465 (0.0000)	1.661650 (0.0483)	11.53983 (0.0000)
Gourieriou, et al.*	--	--	689.8773 (< 0.01)
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
	1%	7.289	
	5%	4.321	
	10%	2.952	



CURRICULUM VITAE

Data Personal

Nama : Jakaria
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 4 Oktober 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Limus Pratama Regency Blok E 20/22 , Cileungsi,
Bogor
HP : 087825975507
Email : jaka_riaseme@yahoo.com

Pendidikan

Sarjana (S1) : Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada,
Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, tahun
1993
Parcasarjana (S2) : Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia,
Program Studi Ilmu Ekonomi, tahun 2000
Program Doktor (S3) : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Padjadajaran Program Studi : Doktor Ekonomi
Terapan tahun 2018

Riwayat Pekerjaan

Pengajaran

1. 1994-2000. Dosen Mata Kuliah Ekonomi Makro dan Pembangunan, STIE Perbanas,
2. 1994-sekarang, Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Trisakti untuk mata kuliah Matematika I, II, Ekonometrika I, II, Statistik I, II, III
3. 1998-sekarang, Instruktur pada pusat pelatihan BCA untuk Program Pendidikan Akuntansi (PPA) untuk mata kuliah Ekonomi Makro, Ekonomi Mikro dan Statistik
4. 1998- 2005, Dosen Matematika Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara
5. 2004-2012 Dosen Metodologi Penelitian, Program Magister Akuntansi Universitas Trisakti

6. 2006 – 2007, Dosen Teori Ekonomi Mikro dan Metode Kuantitatif, Program Magister Ekonomi, Universitas Trisakti
7. 2006 – 2013 Dosen Metode Analisis, f, Kuantitatif Program Master Ekonomi Syariah, Universitas Trisakti
8. 2007 – 2013, Instruktur untuk Calon Auditor Ahli Bidang Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
9. 2014 – Sekarang, Dosen Magister Manajemen Universitas Trisakti mata kuliah Metode Kuantitatif

Penelitian

1. Analisis Peringkat Sosial Ekonomi Propinsi di Indonesia Dengan Pendekatan Taksonomi, 1998
2. Kinerja Ekspor Komoditas SITC 842 dan 843 Indonesia Dengan Pendekatan Constant Market Share, 1999
3. Faktor-faktor yang menentukan kegagalan dan keberhasilan mahasiswa Fakultas Ekonomi Trisakti Lulus Tepat Waktu Dengan Prestasi Baik Dengan Pendekatan Diskriminan Analisis, tahun 2000
4. Identifikasi Kinerja Ekspor SITC 4 Indonesia dengan Pendekatan RCA, TSR dan KP, tahun 2001
5. Dampak dari Sektor Perdagangan Terhadap Pembentukan Output, Nilai Tambah, Tenaga Kerja dan Kebutuhan Impor Dengan Pendekatan Analisis Input-Output, Tahun 2002
6. Identifikasi Sektor Potensi di Propinsi Sulawesi Utara dengan Pendekatan Input Output, Shift-share, Location Quotient dan Tipologi Klassen, Tahun 2003
7. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Dengan Pendekatan Structural Equation Model (SEM), tahun 2004
8. Permintaan Terhadap Bahan Makanan Sumber Karbohidrat Dan Prospek Keaneekaragaman Pangan, Pemenang Lomba Penelitian Bogasari Nurgaha Award VII, tahun 2004
9. Pola Permintaan Terhadap Bahan Makanan Sumber Karbohidrat di DKI Jakarta, tahun 2005
10. Daya Tarik Investasi Sektoral di Sulawesi Utara Dengan Pendekatan Comparative Performance Index (CPI), tahun 2007

Tenaga Ahli Penelitian

1. Tahun 1992-1994, Asisten Peneliitan Pusat Pengembangan Ekonomi (PPE-FE) UGM
2. Staff Ahli Peneliti pada *Industri Riview Industri Rumah Sakit*, Bank Rakyat Indonesia, Tahun 2002
3. Staff Ahli Peneliti pada *Industri Riview Department Store*, Bank Rakyat Indonesia, Tahun 2002
4. Staff Ahli Peneliti pada Survey Kepuasan Pelayanan Peserta Jamsostek Dasar Wilayah III DKI Jakarta, Kerjasama penelitian PT JAMSOSTEK dengan Universitas Trisakti Jakarta, Tahun 2003
5. Staff Ahli Peneliti pada Penelitian Standarisasi Sarana Prasarana SMK Di Indonesia, Kerjasama Penelitian DIKNAS dengan PPA Consultant. 2008
6. Riviewer Buku Ajar SD, SMP untuk Buku Sekolah Elektronik, DIKNAS, BSNP, 2009
7. Staf Ahli Penelitian Social Mapping Halmahera Utara, Kerjasama Penelitian CECT USAKTI dengan Feni Haltim, 2013
8. Staf Ahli Penelitian SDM Produktif Halmahera Utara, Kerjasama Penelitian CECT USAKTI demgam PT Feni Haltim, 2013
9. Staf Ahli Penelitian Reformasi Birokrasi Manajemen Perubahan Badan Peratnahan Nasional (BPN) wilayah Pekan Baru, Pangkal Pinang, Palu, Kendari, Ambon dan Ternaten, Kerjasama PPA Consultan dengan BPN Nasional, 2013-2014
10. Staf Ahli Pemberdayaan Masyarakat Pertamina EP fiel Rantau, Pangkalan Susu, Cirebon, Tanjung Kalmantan, Kerjasama CECT dengan PT Pertamina EP, 2014-2014
11. Staf ahli Kesiapan Indonesia dari Sektor Konstruksi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Proyek Departemen Perhubungan, 2016

Tenaga Instruktur

1. Instsruktur Pada Pelatihan SPSS Lanjutan untuk Dosen di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, tahun 1997
2. Instsruktur Pada Pelatihan SPSS Lanjutan untuk Dosen di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, tahun 1997
3. Instruktur Pada Pelatihan Eview's Untuk Dosen Di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. 1998
4. Instruktur Pada Pelatihan Multivariate Analisis di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, tahun 1999
5. Instruktur Pada Pelatihan Input-Output Analisis di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, tahun 2000

6. Instruktur Pada Pelatihan Metodologi Penelitian di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, tahun 2001
7. Instruktur Pada Pelatihan Structural Equation Model (SEM) di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas, tahun 2002
8. Instruktur workshop Pengolahan Data Sekunder Dengan Menggunakan Eviews, Program Studi Magister Manajemen, tahun 2017

Buku yang dihasilkan

1. Matematika Ekonomi Untuk Ekonomi Dan Bisnis diterbitkan oleh Andrea Publisher, Jakarta, 2007
2. Statistik Deskriptif diterbitkan oleh Andrea Publisher, Jakarta 2008